

Evi Dwi Yanti, Alvian Novi Arvianto.
Randa Reynaldi, dkk



Islam Kepemimpinan & Keindonesiaan

Mencari Identitas Kepemimpinan Islam
di Nusantara

Islam, Kepemimpinan & Keindonesiaan

Evi Dwi Yanti, Alvian Novi Arvianto,
Randa Reynaldi, dkk



© 2015

Islam, Kepemimpinan & Keindonesiaan

Evi Dwi Yanri, Alvian Novi Arvianto,
Randa Reynaldi, dkk

Editor:

Amirul Hasan & Fadhli Fakhri Fauzan

Layout dan Desain Sampul

Romadhan Hanafi

Cetakan I

September 2015

Diterbitkan oleh:

Dompot Dhuafa - Forum Negarawan Muda

JL. Raya Parung Bogor KM 42, Ds. Jampang Kec. Kemang
Kab. Bogor, Jawa Barat 16310

Telp (0251) 8610817, 861818, 8612044

Faks: (0251) 8615016

Email: fnm.indonesia@gmail.com

Website: www.negarawanmuda.org

ISBN 978-602-7807-57-0

Islam (dan) Nusantara

Ahmad Juwaini

Presiden Direktur Dompot Dhuafa Filantropi

Ketika diminta memberikan kata pengantar buku *“Islam, Kepemimpinan, dan Keindonesiaan,”* yang ada di tangan Anda ini, saya teringat dengan polemik “Islam Nusantara”. Menjelang Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) awal Agustus tahun lalu, ramai diperbincangkan Islam Nusantara.

Tema ini memancing pro dan kontra. Ada yang menganggap ini merupakan upaya kalangan liberal dalam “merusak” ajaran Islam. Ada pula yang menganggap, Islam akan di-nusantara-kan. Bayang-bayang Kemal Ataturk yang melakukan de-Arab-isasi Turki pada awal abad ke-20 pun menyeruak.

Namun tak sedikit yang membela, bahwa tema Islam Nusantara hanyalah ijtihad sosial-politik. Hal ini merupakan model, bukan ajaran atau paham. Pembelaan yang dilakukan Ketua PWNU Jawa Barat, Dr. H Eman Suryaman, misalnya, ia berargumen, Islam Nusantara adalah model dari sekian banyak model ke-Islam-an yang ada di berbagai suku bangsa dunia. “Betul bahwa Islam sebagai ajaran itu tunggal, tapi sebagai model beragam. Sunnatullah sosiologis-demografi itulah yang beragam,” ujarnya.

Diskursus “Islam” dengan berbagai label dan variannya, di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini, memang rak dapat dibindarkan. Dahulu, ungkapan “Islam Somoloyo”-nya Presiden RI pertama, Bung Karno juga memancing perdebatan yang cukup panjang. Belum lagi adagium yang dipopulerkan Cak Nur “*Islam Yes, Partai Islam No*”. Kajian, riser, dan buku tentang “Islam dan Indonesia (Nusantara)” banyak sekali ditulis oleh para sarjana. Semua itu tentu saja merupakan khazanah yang patut kita apresiasi, karena memperkaya intelektual kita.

Islam memang memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia, bahkan sebelum negeri ini terbangun menjadi negara-bangsa. Proses islamisasi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia berlangsung selama ratusan tahun. Islam menjadi salah satu determinan yang sangat kuat dalam sejarah bangsa ini, mulai dari ekonomi dan perdagangan, gerakan sosial dan pendidikan, hingga praktik politik kenegaraan.

Uniknya, meski Islam menjadi “kekuatan” yang besar dalam sejarah pembentukan negeri ini, Indonesia tidak lantas menjadi negara Islam. Hebatnya lagi, meski bukan negara Islam, “negara” dan “Islam” juga tidak dalam posisi yang *vis-a-vis*. Dalam tipologi yang digambarkan Baktiar Effendi (2005), relasi Islam dan negara di Indonesia berada pada jalan tengah. Keduanya merupakan persoalan yang berbeda, namun kaitan yang bersifat substansial selalu ada.

Kita percaya, Islam adalah agama yang “*solibun likulli zaman wa makan*”, agama yang *compatible* dengan segala ruang dan waktu. Islam adalah “*rahbuatan lil alamin*” yang selalu membawa maslahat di manapun ia berada. Islam beriknir derivasinya, seperti syariah, dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana yang pernah dituliskan Ibnu Qayyim, “*Dasar dari asas syari’ah adalah kemaslahatan manusia di dunia*

dan akhirat. Seluruh syariah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah”.

Kembali kepada Islam (dan) Nusantara, rasanya perlu saya mengutip salah satu pesan Nabi ketika *khutbah wada’* “Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama dari orang non-Arab, melainkan dengan takwa”. Itu artinya Islam menembus sekat-sekat geografis dan demografis. Meski turun di Arab dan Al Quran juga berbahasa Arab, Allah tak menjamin orang Arab lebih utama. Namun, penting pula dicatat di sini, kita juga tak perlu terlalu alergi dengan Arab, dan menganggap bahwa “Islam Arab” sarat dengan kekakuan, kekerasan, intoleran, dan stereotip negatif lainnya.

Kita juga tidak boleh menafikan kesukuan dan kebangsaan yang kita miliki karena itu adalah *sunnatullah* (Al Hujurat:13), dan kita bisa beragama dan berbangsa sekaligus, tanpa harus saling menegasikan. Buya Hamka, misalnya, secara tegas mengatakan, semangat Islam dan semangat kebangsaan bisa seiring sejalan. *“Maka dengan memakai paham Islam, dengan sendirinya kebangsaan dan kesatuan Indonesia terjamin. Tetapi dengan mengemukakan kebangsaan saja, tanpa Islam, orang harus kembali mengeruk, mengorek tambu lama, dan itulah pangkal bala dan bencana.”*

Jadi, sudah bukan saatnya kita ‘membatas-batasi’ diri kita. Jika kita Islami maka kita tidak nasionalis, sebaliknya, jika kita nasionalis maka kita tidak Islami. Prinsip dasar Islam berlaku untuk semua, namun cabang dan rantingnya masih dapat menyesuaikan dengan keadaan.

Bangsa ini masih menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita butuh bergandeng tangan, agar masalah-masalah bangsa dari mulai

korupsi, kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, buruknya kualitas dan akses kesehatan, hingga tingginya kesenjangan dapat terselesaikan.

Buku yang ada di tangan Anda adalah kumpulan gagasan terkait Islam, kepemimpinan, dan ke-Indonesia-an. Selain tulisan pembuka di setiap bab dari tokoh intelektual terkemuka seperti Yudi Latif, Adian Husaini, Zaim Uehrowi, dan Muhammad Jazir, banyak pemikiran segar yang tertuang dari adik-adik peserra *School for National Leader* yang dihelat teman-teman Beastudi Indonesia.

Semoga tulisan yang ada di buku ini membuka cakrawala dan menjadi khazanah intelektual. Sebagai sebuah ide dan gagasan, tentu saja banyak pemikiran yang tidak seragam, selama itu produktif, tentu saja patut kita hargai dan kita apresiasi.

Selamat membaca!

Ciputat, Agustus 2015

Dibolak-balik, Indonesia Tetap Islam

Sri Nurhidayah

Saat baru lulus tahun 1995, di tempat pertama saya bekerja dilakukan sebuah kajian tentang umat Islam di Indonesia. Kesimpulan akhir diskusi ini, Indonesia adalah Islam...

Dua puluh tahun setelah diskusi ini, di era sosial media, hampir setiap hari berseliweran berbagai cerita yang meyakinkan kita, bahwa negara ini dipenuhi oleh "Islam". Bahwa para Bapak Bangsa kita adalah seorang muslim yang taat, sekaligus nasionalis yang hebat.

Satu hal yang hari ini miskin dimiliki anak-anak muda kita adalah literasi mengenai kehidupan Bapak Bangsa kita. Tradisi cerita lisan tidak didapatkan sementara serbuan komik dan buku-buku populer mengepung mereka.

Mengharapkan mereka menulis menjadi sulit, karena menulis membutuhkan pengetahuan. Menulis berarti memberikan pikiran terbaik, dan pikiran terbaik tidak mungkin didapatkan tanpa membaca.

Disinilah sesungguhnya kita melihat betapa Islamnya negeri ini. Tidak ada seorang pun pendiri bangsa ini yang malas membaca & tidak menuliskan buah pikirannya. Diskusi dalam setiap

pertemuan, polemik adalah kegiatan harian. Liharlah Hatta yang menjadikan peti-peti hcrisi buku sebagai harta warisannya. Bacalah cerita garangnya tulisan Agtis Sahm. Islam pun sccata jelas meminta kita untuk Iqra!! Bacalah.

Hari ini juga Indonesia menjadi sattu-satunya negara yang menjadikan tauhid sebagai dasar utamanya. Dasar negara Pancasila sila pertamanya adalah Keruhanan Yang Maha Esa.

Hari ini kita tidak perlu sibuk membuat klaim sejarah keberhasilan umat islam di negeri ini. Yang perlu kita lakukan adalah berbuat, mengembahkan semangat kc-Indonesia-an yang pernah ditunjukkan dengan sangat baik oleh para syahid dan syahidah pendiri bangsa ini. Jangan seperti orang kalah, kita sibuk mencari-cari pembcnaran keterbelakangan umat saat ini.

Seperti pesan Rasulullah SAW bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah Timur... Mudah-mudahan Timur itu adalah kita, Umat Islam di Indonesia.

Bogor, September 2015

Daftar Isi

Islam (dan) Nusantara	
<i>Pengantar Presiden Direktur Dompot Dhuafa Filantropi.....</i>	<i>iii</i>
Dibolak-balik Indonesia Tetap Islam	vii
Daftar Isi.....	ix
<i>Prawacana</i>	
Melahirkan Pemimpin Nasionalis-Religius	2
Dwi Tunggal Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an	5
Menyiapkan Kepemimpinan Bangsa.....	11
Bagian I: Inspirasi Negara Madinah	25
Demokrasi Berkebudayaan dan Budaya Berdemokrasi <i>(Yudi Latif)</i>	26
Indonesia, Islam, dan Pusat Peradaban Dunia.....	73
Kepemimpinan Profetik untuk Indonesia	78
Islam Moderat, Kekuatan Indonesia Membangun Dunia	83
Pemimpin yang Layak Dipilih	88
Jabatan Bukanlah Tujuan.....	93
Wakil Rakyat 'Idaman'	97
Krisis Rohingya dan Masa Depan Komunitas ASEAN.	102
Distorsi & Deislamisasi Sejarah Indonesia.....	107

Kepemimpinan Islam yang Inklusif.....	112
Sarana Kaderisasi Pemimpin Muda.....	118
Pemimpin Seluruh Alam.....	122
Islam dan Peradaban Dunia.....	125
Indonesia dan Perkembangan Dunia Internasional.....	130
Islam Sebagai Intri Dari Pemerintahan.....	136
Bagian II: Pemimpin Transformatif.....	141
Transformasi Lee Kuan Yew (<i>Zaim Uchrowi</i>).....	142
Menanti Gelombang Keempat Indonesia.....	148
Pemimpin Muda Daerah dan Kebangkitan Indonesia..	154
Memahami Cara Pemimpin Berpikir.....	160
Indonesia Menuju Pusat Peradaban Dunia.....	165
Negarawan Muda dan Pemimpin Negarawan.....	169
Tipe Aktivis Manakah Kira?.....	174
Menipisnya Jati Diri Aktivis.....	177
Organisasi Kenegaraan.....	181
Bagian III: Islam (dan) Indonesia.....	187
Islam Dalam Sejarah dan Penyatuan Nusantara (<i>Adian Husaini</i>).....	188
Indonesia, Etalase Negara Madani.....	208
Mengembangkan Keindonesiaan.....	214
Gelombang Ketiga Peradaban Indonesia.....	218
Membangun Identitas Keindonesiaan Melalui TV.....	223
Membangun Satu Kekuatan.....	227
Menguatkan Kembali Akar Perjuangan.....	231
Penguatan Wilayah Terdepan Indonesia.....	236
Kenapa Hartis Indonesia?.....	241

Belanda Kulit Hitam Vs Pribumi di Era Reformasi	245
Membangun Visi Kemerdekaan	249

Refleksi :

Menggali Cahaya Islam untuk Membangun Politik Berkeadaban dan Berkeadilan <i>(Muhammad Jazir ASP)</i>	256
---	-----

Profil Penulis	271
----------------------	-----

Prawacana

Melahirkan Pemimpin Nasionalis Religius

Rina Fatimah

Agama Islam sudah lama menjadi agama mayoritas di Indonesia sebelum merdeka. Meski masuk dalam kelompok paling banyak, orang Islam tidak menjadi penguasa wilayah untuk menjajah kaum minoritas. Kekuatan mayoritas Islam dimanfaatkan untuk melawan dan mengusir kolonial Belanda dan Jepang yang heretahun-tahun menjajah bangsa Indonesia. Demikian ungkapan Prof. KH. Ahmad Satoto Ismail, ketua IKADI Indonesia di laman herita *republikaonline*.

Kehadiran bangsa Belanda memang memberikan warna tersendiri bagi perjuangan bangsa ini menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*), kongsi dagang bentukan pemerintah Belanda, tahun 1602 oleh Parlemen Belanda diberi hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah kekkusaannya. Tujuan utama VOC tak lain adalah mempertahankan monopoli perdagangan retmpati-retupah di Nusantara. Aktivitas monopoli inilah yang menjadikan VOC menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekkusaannya, dan pada akhirnya menyulurkan api perang di tanah Nusantara. Salah satunya Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun, 1825 – 1830.

Setelah kebangkrutan VOC di abad ke 18, selang beberapa tahun kemudian di tahun 1901 pemerintah Belanda mengubah haluan politiknya yakni dengan menerapkan politik etis. Penerapan politik etis memberikan kesempatan terbuka bagi masyarakat pribumi untuk menikmati pendidikan. Belanda banyak membangun sekolah beserta fasilitasnya.

Sayangnya, jumlah sekolah yang dibangun tidak sepadan dengan populasi penduduk Indonesia pada masa itu, dan akhirnya sekolah-sekolah yang didirikan Belanda hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan. Dari situlah lahir pendidikan agama di pesantren maupun surau, pendidikan alternatif yang lebih merakyat dan egaliter. Kehadiran politik etis ini juga menjadi pemantik lahirnya gerakan nasionalis religius.

Salah satu gerakan nasionalis religius adalah Serikat Dagang Islam H. Samanhudi, yang didirikan pada tahun 1905 dan berorientasi sosial ekonomi. Organisasi ini kemudian dilebur menjadi Serikat Islam yang orientasinya diperluas dengan politik, ekonomi, sosial dan agama. Keberadaan H.O.S Tjokroaminoto di Serikat Islam berhasil menggabungkan retorika politik melawan penjajah Belanda dengan ideologi Islam, sehingga mengenyahkan penjajah dari bumi Nusantara.

Tjokroaminoto dalam bukunya *Islam dan Sosialisme*, *"Menghisap keringatnya orang-orang yang bekerja, memakan pekerjaannya lain orang, tidak memberikan bahagian keuntungan yang semestinya (dengan sebarusnya) kebahiannya lain orang yang turut bekerja mengeluarkan keuntungan itu,- semua perbuatan yang serupa ini (oleh Karl Marx disebut memakan keuntungan, "meerwaarde" (nilai lebih) adalah dilarang dengan sekeras-kerasnya oleh agama Islam"*.

Melalui tulisan tersebut sudah sangat jelas Islam menentang kapitalisme yang dilakukan oleh Belanda. Jika kita telaah lebih

dalam terhadap tulisan tersebut, sangat jelas semangat perjuangan Tjokroaminoto adalah ingin meletakkan Islam sebagai unsur fundamemal untuk membebaskan rakyat dari kesewenang-wenangan kolonial Belanda.

Melalui “Sekolah Kepemimpinan Bangsa” diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin seperti Tjokro di negeri ini. Kepemimpinan yang tidak hanya didasarkan kecintaannya pada negeri ini namun menjadikan nilai-nilai religius yang diyakininya menjadi landasan dalam bertindak dan berpikir. Semoga...

Dwi Tunggal Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an

Purwa Udiutomo

Negeri itu bernama Indonesia. Negeri yang kaya akan sumber daya dan kaya akan budaya. Negeri kepulauan nan indah bertajuk zamrud khatulistiwa. Negara besar dengan jumlah penduduk peringkat empat terbanyak di dunia yang tersebar di penjuru Nusantara. Mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Pun mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia bukanlah Negara Islam. Sebagaimana beranekanya suku dan budaya, ragam agama juga ada di Indonesia. Ironisnya, pernyataan bahwa Indonesia bukan Negara Islam kerap disalahartikan sebagai dikotomi antara Indonesia dan Islam. Seolah-olah identitas keislaman akan kontraproduktif dengan identitas keindonesiaan. Islam dan nasionalisme, akhirnya menjadi dua kata yang dikesankan ibarat minyak dan air, tak akan mampu bersatu.

Dalam KBBI, nasionalisme didefinisikan sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme juga didefinisikan sebagai semangat kebangsaan, yaitu kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan

identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Rasa cinta terhadap tanah air sejatinya adalah fitrah manusia sebagaimana kecintaan terhadap keluarga. Dan Islam datang sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, karenanya mustahil bertentangan dengan nilai cinta tanah air.

Nasionalisme hadir untuk mengikis semangat kesetiaan dan memperkuat ikatan masyarakat. Islam telah melakukannya sebelum istilah nasionalisme ada. Di Madinah, beragam suku mulai dari Quraisy, Aus, Khazraj, hingga suku-suku beragama Yahudi dan Nasrani menandatangani Piagam Madinah yang salah satu klausulnya adalah bersatu mempertahankan Madinah dari serangan luar. Itu adalah nasionalisme. Mempererat tali persaudaraan dan mempersatukan dengan tetap menjaga eksistensi dari keragaman suku dan bangsa, itulah Islam.

Nasionalisme menurut Soekarno akan menghentik rasa percaya diri dan merupakan esensi mutlak jika kita mempertahankan diri dalam perjuangan melawan kondisi-kondisi yang menyakitkan. Ya, sebagaimana Islam, nasionalisme sejatinya hadir untuk membebaskan. Revolusi perlawanan rakyat atas hegemoni kaum aristokrat dan anti dominasi gereja di Eropa abad ke-18 adalah nasionalisme yang tidak jauh berbeda dengan bagaimana para pahlawan pejuang kemerdekaan sejak zaman kerajaan dahulu berperang untuk mengusir penjajah. Perlawanan lokal dan sporadis yang gagal mengusir penjajah kemudian bertransformasi menjadi gerakan nasional yang terorganisir. Itulah nasionalisme.

Namun Islam memang berbeda dengan nasionalisme, terutama dalam aspek ruang lingkup dan orientasi. Nasionalisme masih tersekat oleh batas geografis sementara Islam *borderless*. Kesetiaan tertinggi seorang nasionalis adalah pada bangsa dan negara, sementara kesetiaan tertinggi seorang muslim adalah

kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam Islam, kesetiaan terhadap pemimpin ataupun wilayah geografis tertentu haruslah dalam kerangka ketaatan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya. Itulah semangat nasionalisme untuk mengusir penjajah versi Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin dan banyak pejuang Islam lainnya di Nusantara. H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Serikat Islam menyatakan bahwa Islam adalah "*faktor pengikat dan simbol nasional*".

Perbedaan antara Islam dan nasionalisme bukan untuk dipertentangkan, melainkan diposisikan dengan tepat untuk membangun kepemimpinan nasional yang kuat. Semangat spiritualitas dan religiusitas Islam yang bersifat universal seharusnya diposisikan sebagai fondasi dengan semangat kebangsaan (nasionalisme) sebagai (salah satu) tiangnya. Tiang nasionalisme tanpa fondasi religiusitas akan mendorong pada primordialisme, chauvinisme, bahkan fasisme. Kecintaan terhadap tanah air yang berlebihan dan tidak didasari spiritualitas yang kuat akan berujung kepongahan, merendahkan bangsa lain, bahkan dalam titik ekstrim justru akan memicu terjadinya imperialisme dan penjajahan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan nasionalisme itu sendiri.

Dalam skala yang lebih kecil, 'nasionalisme buta' akan mematikan logika dan berpikir kritis. Padahal kemerdekaan sebagai buah dari semangat kebangsaan menghendaki kekuatan untuk berdiri sendiri. Berdikari dalam berpikir dan bertindak. Karenanya, tiang nasionalisme yang berdiri di atas landasan religiusitas ini harus berdekatan dengan tiang kemandirian menuju Indonesia berdaya. Tidak cukup hanya merdeka dan bersatu, tetapi juga harus berdaulat, adil dan makmur. Kepemimpinan bangsa yang kuat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Semangat kebangsaan dan kemandirian tanpa fondasi keislaman akan mendorong pada kebebasan tanpa batas, pun harus mengorbankan orang banyak. Lihatlah bagaimana ekspansi negara-negara Eropa di masa penjajahan, yang alih-alih berdaya malah memperdaya. Berdikari adalah berdiri di atas kaki sendiri bukan berdiri di atas kesulitan orang lain. Karenanya, tiang nasionalisme dan kemandirian harus pula disertai dengan tiang kepedulian. Berlandaskan perikematuusiaan. Karena memang tidak cukup hanya dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selain makhluk pribadi, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam skala yang lebih besar, suatu bangsa juga selalu butuh untuk membangun hubungan dengan orang lain. Sadar dan peduli bahwa keberadaannya merupakan satu entitas dari komunitas yang lebih luas. Pun demikian dalam konteks kepemimpinan, selalu erat kaitannya dengan aspek pelayanan dan motivasi kepedulian. Shalat yang berdimensi pribadi harus disertai dengan zakat yang berdimensi sosial. Kemandirian sejati adalah mampu memandirikan orang lain, berdaya adalah mampu memberdayakan orang lain.

Bagaimanapun, iman yang ahstrak harus disertai amal shalih yang konkret. Semangat kebangsaan juga bukan semara jargon, apalagi kemandirian dan kepedulian yang jelas-jelas harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Karenanya, fondasi keislaman beserta tiang-tiang kebangsaan, kemandirian dan kepedulian ini harus mewnjud menjadi sesuatu yang lebih tampak dan terukur. Hal tersebut adalah kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Suatu urusan yang dikerjakan oleh orang yang tidak berkompeten hanya akan berujung kepada kehancuran.

Karenanya pemimpin haruslah memiliki kompetensi yang mumpuni. Tidak harus sempurna, tetapi kompetensinya sesuai dengan kebutuhan, level dan lingkup amanah serta kekhasan dari kepemimpinan yang diemban.

Kepemimpinan ideal yang didambakan oleh seorang muslim harus berlandaskan fondasi keislaman, Islam yang pertengahan, tidak terlalu kaku tetapi tidak pula terlalu cair. Islam yang menginspirasi dan mencerahkan, tidak taklid buta namun tidak pula mendewakan akal. Islam yang seimbang, bijak dalam merespon kondisi kekinian dan menghargai berbagai perbedaan. Islam yang bukan hanya baik dalam aspek keimanan dan ibadah, namun kehadirannya mampu menubar kebermanfaatn yang luas. Islam yang dapat menjadi rahmat bagi semesta alam.

Untuk menghadapi tantangan kepemimpinan Islam, fondasi ini perlu diperkokoh dengan semangat kebangsaan yang mempersatukan elemen bangsa guna mencapai cita bersama. Kedaulatan dan independensi bangsa juga perlu diperkuat dengan semangat kemandirian untuk menghapus segala ketergantungan. Kontribusi kemanusiaan yang dilandasi semangat kepedulian juga akan memperkokoh bangunan kepemimpinan. Fondasi dan tiang-tiang kepemimpinan ini kemudian harus dilengkapi dengan rangka atap berupa kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan menunjang terlaksananya fungsi kepemimpinan secara utuh demi kejayaan negeri tercinta.

Negeri itu bernama Indonesia. Negeri yang kuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai perbedaan yang ada akan kian memperindah khazanah bangsa. Negeri yang satu, terikat dalam cita wawasan Nusantara. Bangsa yang utuh dan tak terpisah-pisahkan. Bangsa besar yang mampu berdiri sendiri. Negeri yang ramah, gemar menolong dan penuh tenggang

rasa. Negeri di mana Islam yang juga bermakna damai penuh keselamatan, akan menjadi penguat negeri itu. Bukan hanya secara kuantitas, tetapi melakukan banyak perbaikan kualitas. Selamanya menjadi penguat, pun ketika berbagai ujian menerpa dan duka melanda. Senantiasa menjadi solusi untuk menjawab kompleksitas permasalahan bangsa. Terus menjadi cahaya yang mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita mulia...

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

(Pembukaan UUD RI 1945)

Menyiapkan Kepemimpinan Bangsa

Budiyanto

Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang memuat dua hal pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata “pimpin” mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, juga menunjukkan ataupun memengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya.¹

Dalam hal ini George R. Terry (2006 : 495), menjelaskan, “Kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela.” Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, dalam kepemimpinan ada keterkaitan antara pemimpin dengan berbagai kegiatan yang dihasilkan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan mengarahkannya untuk

1. Joko Rizkie Widokarti, “Kepemimpinan Transformatif Menuju Masyarakat Madani”, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, *Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani*, hal. 41

mencapai rujukan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan seorang pemimpin, maka ia harus mempunyai kemampuan untuk mengatur lingkungan kepemimpinannya.²

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses memengaruhi dan mengarahkan anggota dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman dan Gilbert (1995), kepemimpinan adalah *the process of directing and influencing the task related activities of group members*. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin (2000) membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses, dan sebagai atribut.

Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.

Kepemimpinan juga meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut

2. Irmawaty, "Potret Pemimpin Masa Depan Melalui Peciptaan dan Pembangunan Karakter Kepemimpinan 360 Derajat", dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, *Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani*, hal. 27

untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan sangat tergantung kepada kewibawaan. Selain itu juga menciptakan motivasi dalam diri setiap orang yang diperintah, mitra kerja, maupun atasan dari pimpinan itu sendiri.³

Ajaran pemimpin besar India, Mahatma Gandhi, mengenai kepemimpinan adalah dengan memahami *satyagraha* (kepatuhan pada kebenaran), *swadesi* (cinta tanah air) dan *ahimsa* (pantang menggunakan kekerasan). *Satyagraha* dimaknai tidak hanya pantang melanggar janji dan perkataan yang pernah diucapkan (*satyawacana*) melainkan kepatuhan menjalankan secara utuh prinsip moral pemimpin. *Swadesi* bukanlah pemaksaan yang hanya mengasumsikan diri sebagai bagian yang sempit dari wilayah kekuasaan lingkup kerjanya, melainkan dampak secara luas yang dapat diberikan dari aktifitas yang dilakukan, demikian pula dengan prinsip *ahimsa*.⁴

Kepemimpinan sebagai proses membentuk pemimpin dengan karakter dan watak jujur terhadap diri sendiri (*integrity*), bertanggung jawab yang tulus (*compassion*), pengetahuan (*cognizance*), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (*commitment*), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (*confidence*) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (*communication*). Kepemimpinan juga merupakan proses membentuk seorang pengikut (*follower*) yang di dalam kepatuhannya tetap memiliki pemikiran kritis, inovatif, dan jiwa independen. Dalam konteks kepemimpinan di Indonesia

3 M. Nur Alamsyah, "Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional", *Jurnal Academica FISIP Untad*, Vol. 1 Tahun 2009, hal 24

4 M. Nur Alamsyah, "Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi", hal 27

di dalamnya kemudian terimplemenrasikan idenritas nasional bangsa yaitu nilai Pancasila.⁵

Selanjutnya, Satros dan Butchatsky (1996) menyatakan kepemimpinan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Sedangkan menurut Anderson (1988), "*leadership means using power to influence the thoughts and actions of others in such a way that achieve high performance*".

Kepemimpinan dalam Islam

Islam mengenal kepemimpinan sebagai tanggung jawab yang diemban oleh setiap orang. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap orang merupakan pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kepemimpinannya, "*Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iatibi*" (HIR Bukhari, Hadist 3733). Dengan cara lain siapapun, setiap orang pasti akan memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, mengurtusi atau memimpin sesuatu kaum sehingga ia harus bertanggung jawab atas apa yang diembannya, tidak hanya di dunia melainkan juga di hari kiamat.

Secara harfiah istilah *ra'i* bermakna sebagai penggembala. Penggunaan istilah ini dalam menyebut pemimpin bagi setiap individu umatnya disebabkan pada latar belakang Rasulullah sebagai seorang penggembala. Jika diperhatikan secara mendalam, pekerjaan sebagai penggembala menorehkan banyak pelajaran bagi Rasulullah dalam membangun fondasi kepemimpinannya

5 M. Nur Alamsyah, "Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi", hal 25

6 Joko Rizkie Widokarti, "Kepemimpinan Transformasi", hal 11

7 Latang M. Amirin, "Kepemimpinan yang Amanah", *Jurnal Dinamika Pendidikan* No. 1, Th. XIV, Mei 2007, hal 8

di kemudian hari. Pekerjaan tersebut, menurut Harahap (2004) mengajarkan untuk memelihara dan bertanggung jawab terhadap domba yang digembalakan agar tertib dalam kumpulan. Pekerjaan itu pun menuntut cinta kasih, semisal mencari domba yang terpisah dari kumpulan atau pun merawat domba yang sakit. Dengan tanggung jawab dan rasa cinta kasih itu, sang penggembala menggiring hewan yang digembalkan menuju titik yang dituju termasuk menggiringnya saat pulang kandang.⁸

Kepemimpinan dalam Islam juga bermakna sebagai amanah, suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga seseorang yang diberikan amanah itu harus menjalankannya sebaik mungkin. Berdasarkan hadits "*an tu'addul amanati ila abliba*" yang berarti menunaikan amanah kepada yang berhak. Dalam kepemimpinan Islam mengandung makna menyantuni orang-orang yang memberikan amanah (kepercayaan kepemimpinan), dalam konteks Islam adalah rakyat, dengan sebaik-baiknya, antara lain mendengarkan masukannya dan melaksanakan usaha untuk memenuhi keperluannya.⁹

Konsep amanah tersebut menjadi inti dari kepemimpinan Islam, seperti yang dikatakan Beekun (2006), bahwa "*Leadership in Islam is a trust (amanah). It represents a psychological contract between a leader and his follower that he will try his best to guide them, to protect them and to threat them justly. Hence, the focus of leadership in Islam is on doing good*" bahwa "Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu kepercayaan (amanah). Ia mewakili perjanjian psikologis antara pemimpin dan yang dipimpin bahwa pemimpin akan berupaya sebaiknya untuk membimbing

8 A.F. Djunaedi, "Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam", *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XIII Thn. 2005, hal 55

9 Tatang M. Amirin, "Kepemimpinan yang Amanah", hal.10

melindungi dan memperlakukan mereka secara adil. Oleh karena itu fokus kepemimpinan dalam Islam adalah mengerjakan segala sesuatu secara baik”.¹⁰

Dalam literatur-literatur Islam, kata pemimpin atau memimpin ditenmkan dalam Al Qur'an dan Hadits, di amaranya adalah : 1) Imam (QS Al Baqarah : 24, QS Al Isra : 71, QS Al Furqan: 74), 2) Khalifah (QS Al Baqarah : 30, QS Al An'am : 165, QS Sad : 26), 3) Wali atau Auliya (QS Ali Imran : 28, QS An Nisa : 89, QS Al Maidah : 51, 57, QS An Naml : 155), 4) Ulil Amri (QS An Nisa: 59, 82), dan 5) Ra'in (Hadist riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Ibnu Umar). Mencermati ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist di atas, pemimpin pada dasarnya adalah pengembal amanah Allah dan rakyat untuk memakmurkan bumi dan menycajhahterakan rakyatnya. Menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan sekedar jabatan untuk menduduki status sosial.

Dalam sejarah politik Islam, para cendekiawan Muslim telah berusaha untuk merumuskan kriteria-kriteria ideal yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin. Ibnu Siua dalam kitabnya *As-Syifa* mengatakan, “Kemudian wajib bagi seorang pemimpin untuk mewajibkan patuh kepada orang yang akan menggantikannya. Suksesi ini tidak boleh terjadi melainkan dari sisinya atau berdasarkan ijma para senior atas seseorang yang secara publik dan deklaratif diakui sebagai orang yang mandiri dalam politik, kuat secara intelektual dan bermoral mulia seperti berani, terhormat, ahli mengelola pemerintahan dan memiliki kepakaran dalam hukum syariat, sehingga tidak ada orang yang dikenal lebih ahli darinya”.¹¹

Fungsi pemimpin dalam Islam bukan hanya sekedar menjaga masyarakat, Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam*

10. Tatang M. Amirin, “Kepemimpinan yang Amanah”, hal.10

11. Ajat Sudrajat, *Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam*, Prodi Ilmu Sejarah FISI UNY, hal.3

as-Sulthaniyah mengatakan fungsi pemimpin adalah menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah. Seorang pemimpin, bagaimanapun kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis. Hal ini dikarenakan pemimpin menjadi penentu kemana arah dan gerak lembaga yang dipimpinnya.¹² Kemudian Al Mawardi menyebutkan syarat orang yang layak menyandang pemimpin, yaitu : 1) Adil dengan seluruh persyaratannya, 2) Berilmu pengetahuan sehingga mampu berjihad dalam kasus yang dihadapi dan ketetapan hukum, 3) Kesempurnaan penginderaan seperti mendengar, melihat dan berbicara, 4) Kelengkapan anggota tubuh dari berbagai cacat fisik yang bisa menghalangi tanggung jawab kepemimpinan, 5) Memiliki kemampuan menggagas yang dapat melahirkan strategi kepentingan rakyat dan pengat ukuran kemashalatan. 6) Berani dan tangguh sehingga mampu mempertahankan negara, 7) Nasab pemimpin berasal dari keturunan Quraisy dan memenuhi kesepakatan konsesus.¹³

Kriteria seorang pemimpin negara Islam kemudian dijelaskan oleh Al Baqillani yang mengatakan bahwa syarat kepala negara haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Hal ini diperlukan karena dengan pengetahuan yang luas pemimpin dapat melihat apakah keputusan yang diambil oleh hakim negara sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Syarat seorang kepala negara lainnya adalah harus memiliki sifat adil dalam segala urusan, berani dalam peperangan dan bijaksana dalam mengorganisir militer yang bertugas melindungi rakyat dari gangguan musuh. Di samping syarat di atas, Al Baqillani mengatakan bahwa syarat kepala negara harus berasal dari suku Quraisy.¹⁴

12 A.F. Djunaedi, "Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam", hal. 60-61

13 Ajat Sudrajat, *Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam*, hal. 3

14 Arsyad Sobby Kesuma, "Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam", *Jurnal Islamica* Vol. 4, No. 1, September 2009, hal 124

Sementara itu Ibnu Khaldun dalam kitabnya *al-Muqaddimah* menyebutkan adanya empat syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu : ilmu, keadilan, kemampuan dan kesempurnaan indera dan anggota tubuh dari hal-hal yang bisa mempengaruhi cara berpendapat dan bertindak. Adapun syarat kelima, yakni keturunan Quraisy masih diperselisihkan. Syarat berilmu pengetahuan juga jelas dimiliki, karena pemimpin mampu menjalankan hukum-hukum Allah apabila dia mengetahuinya. Berilmu pengetahuan yang dimaksudkan tidak akan memadai kecuali jika pemimpin adalah seorang *mujtabid*.¹⁵

Pendapat lainnya dari Abdul Malik Al Juwaini yang dikenal sebagai Imam Haramain dalam kitabnya *al-Irsyad* menyebutkan mengenai syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu : 1) Mauku berjihad sehingga pemimpin tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain, 2) Memiliki kemampuan untuk mengurus dan memelihara kemaslahatan umat, 3) Mengatur militer untuk keamanan dan pertahanan, 4) Memiliki wawasan yang luas dalam memikirkan urusan kaum Muslimin, 5) Tegak dalam menjalankan hukum, 6) Memiliki sifat lemah lembut, dan 7) Seorang laki-laki yang merdeka. Satu hal yang menarik dari pemikiran Al Juwaini adalah ia tidak menetapkan syarat seorang pemimpin negara dari keturunan Quraisy, hal tersebut menurutnya merupakan suatu masalah yang diperselisihkan sehingga belum pasti dan tidak mutlak sebagai persyaratan.¹⁶

Abu Hamid Al Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* menyebutkan syarat-

15 Ajar Sudrajat, Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi, hal. 3

16 Arsyad Sobhy Kesuma, "Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam", hal.125

syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara, diantaranya : 1) Dewasa dan aqil baligh, 2) Memiliki akal pikiran yang sehat, 3) Seseorang yang merdeka dan bukan seorang budak, 4) Seorang laki-laki, 5) Berasal dari keturunan Quraisy, 6) Memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, 7) Memiliki perangkat kekuasaan yang memadai antara lain seperti angkatan bersenjata, 8) Memiliki daya pikir dan daya rancang yang kuat dan kesediaan untuk bermusyawarah, 9) Memiliki ilmu pengetahuan, dan 10) Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri dari hal-hal yang terlarang (*wara*).¹⁷

Terakhir, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang layak menjadi pemimpin adalah harus memiliki kualifikasi kekuatan dan integritas. Hal ini didasarkan atas petunjuk Al Qur'an surat Al Qasas ayat 26, yang menyebutkan bahwa orang yang terbaik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (*amanah*). Dalam hal persyaratan menjadi seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan pemimpin harus berasal dari keturunan Quraisy. Menurutnya hal ini adalah permasalahan yang masih diperselisihkan oleh kalangan ulama, maka syarat itu tidak mungkin ditetapkan. Bahkan menurutnya, pendapat bahwa kepemimpinan Islam harus berasal dari keturunan suku Quraisy adalah pendapat yang bertentangan dengan konsep persamaan yang digagas oleh Al Qur'an sendiri dalam surat Al Hujurat ayat 13. Jadi meskipun pendapat itu berdasarkan dari hadist akan tetapi bertentangan dengan nash Al Qur'an sendiri.

Kepemimpinan dalam Konteks Indonesia

Setiap bangsa yang memiliki sejarah, budaya dan lingkungan yang khas, serta memiliki metode khusus dalam mewujudkan kepemimpinan bangsanya. Kondisi tersebut melahirkan gaya

17 Ajat Sudrajat, *Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam*, hal.7

kepemimpinan nasional yang secara umum dijelaskan oleh Gabriel A. Almond yaitu : 1) Gaya kepemimpinan berorientasi ideologi (*ideology oriented style*), 2) Gaya kepemimpinan berorientasi pragmatik (*pragmatic oriented style*), 3) Gaya kepemimpinan berorientasi pada nilai-nilai absolut tradisional (*absolute value and traditional oriented style*).¹⁸ Jika membandingkan gaya di atas, maka gaya kepemimpinan nasional Indonesia perlu dilaborasi sendiri untuk dapat menjadi gaya kepemimpinan yang khas, dengan pijakannya pada Inisari budaya tradisional. Identitas budaya bangsa Indonesia yang dimaksud adalah ideologi yang menjadi filter di tengah arus liberalisme dan kapitalisme, yaitu ideologi Pancasila. Posisi Pancasila tersebut berfungsi sebagai ideologi negara, falsafah hidup bernegara dan sebagai pandangan hidup bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan nasional, regional dan global.¹⁹

Denys Lombard (1996) menawarkan pendekatan dalam memahami sejarah peradaban masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan model penekanan sosio-geologis, Lombard melihat masyarakat Indonesia itu dibentuk oleh lapisan-lapisan peradaban dari yang terdalam (masa lalu) hingga lapisan terluar (masa kini) dengan sifatnya yang dinamis. Dengan demikian dapat dipahami mengapa peradaban Indonesia kontemporer terlihat perpaduan antara unsur-unsur peradaban Nusantara purba, Hindu-Buddha, Islam, dan Barat. Secara karakter individu perpaduan ini dapat dilihat pada diri Presiden Soekarno dan Soeharto yang penampilan bergaya Barat, beragama Islam, nama berbau Hindu, dan memiliki sikap toleran terhadap warisan budaya purba Nusantara (Suwirta, 2003).²⁰

18. M. Nur Alamsyah, "Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional", hal. 26

19. M. Nur Alamsyah, "Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional", hal. 26

20. Andi Suwirta dan Iyep Candra Hermawan, "Masalah Karakter Bangsa dan Figur

Dalam konteks kepemimpinan di Indonesia dikenal semboyan Tut Wuri Handayani yang berasal dari Ki Hadjar Dewantara yang berbunyi “*Ing ngarsa sung tuladha, big madya mangun karsa, tut wuri handayani*”, yang secara harafiah memiliki arti “Di depan menunjukkan keteladanan, di tengah bersama membangun kemauan dan di belakang memberdayakan.” Nilai kepemimpinan Tut Wuri Handayani ini juga senada dengan konsep kepemimpinan *Bocah Angon* (bocah penggembala). Wawan Susetya (2007 : 90) mengatakan bahwa, “*Bocah angon*, seorang penggembala, mencerminkan filosofi kepemimpinan yang dialami oleh para Nabi dan Rasul dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW yang sebagian besar pernah menjadi penggembala domba atau kambing. Hal ini dimaksudkan sebagai bekal latihan mereka kelak ‘menggembala’ umat manusia menuju ke jalan yang benar”.²¹

Berkaitan dengan pola kepemimpinan yang tercermin dalam sosok Dwitunggal Kepemimpinan Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, Herbert Feith dalam bukunya *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (1962), menyebutkan bahwa Muhammad Hatta selaku wakil presiden merupakan pemimpin dengan tipe pengelola, sementara Presiden Soekarno merupakan pemimpin tipe pemersatu. Dua karakter kepemimpinan ini jarang menyatu pada diri satu orang. Para pemimpin dengan tipe pemersatu umumnya mampu mengumpulkan dukungan rakyat serta berhasil memengaruhi mereka, tetapi ketika harus mengelola pemerintahan, seringkali dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya para pemimpin dengan tipe pengelola umumnya cakap dalam mengelola pemerintahan tetapi kurang mendapat

Kepemimpinan di Indonesia : Perspektif Sejarah”, *Jurnal Atikan* 2(1) Tha. 2012, hal. 138

21 Priadi Surya, *Penanaman Nilai Kepemimpinan Profetik Pendidik Melalui Mata Kuliah Manajemen Pendidikan*, Universitas Negeri Yogyakarta, hal 5

dukungan rakyat. Dikarenakan kurang menguasai retorika atau tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa. Tipe pemimpin pengelola biasanya sering tidak dipahami orang kebanyakan. Warak kepemimpinan ideal salah satunya adalah jika kedua karakter kepemimpinan ini bersatu dalam satu tokoh atau mereka saling bekerja sama seperti Bung Karno dan Bung Hatta.²²

Keteladanan kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta juga tampak dalam sikap kehidupan keseharian mereka. Ketika ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung, terkait dengan kehidupan baru dan kebebasannya dari penjara, Bung Karno menjawab, “Seorang pemimpin tidak akan berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama.” (Soekarno, 1961). Di tengah tekanan depresi ekonomi dan represi rezim *rust en orde* pada tahun 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata, “Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu”. Lantas ia menegaskan, “Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu *conditio sine qua non*, syarat yang terutama untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moral yang kuat, ia tidak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan.” (Hatta, 1998).²³

Bung Hatta juga menegaskan mengenai kewajiban seorang pemimpin akan rakyatnya, “Menduga perasaan rakyat dan

22 Utami Dewi, *Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia : Transaksional atau Transformatif*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNY, hal 4-5

23 Yudi Latif, “Kepemimpinan Moral dan Harapan”, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, *Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani*, hal 16-17

memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban *leaderschap*! Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya. Pemimpin mengemukakan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat, itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang.”

Kisah keteladanan pemimpin lainnya berkaitan dengan istilah *leiden is lijden* yang berarti memimpin adalah menderita. Ungkapan ini diucapkan oleh aktivis kemerdekaan, Kasman Singodimedjo pada tahun 1925 ketika ia masih menjadi pelajar STOVIA di Batavia. Demi mendapatkan pendidikan politik dari Haji Agus Salim, pemuda Kasman dan teman-temannya sering mendatangi Rumah Haji Agus Salim, mereka datang naik sepeda. Suatu hari karena hujan lebat dan jalan tanah yang dilalui becek dan liat, sehingga roda sepeda tidak bisa dikayuh. Pemuda Kasman terpaksa memanggul sepedanya di bahu sampai ke rumah Haji Agus Salim. Karena melihat Pemuda Kasman memanggul sepeda, Haji Agus Salim dengan bergurau mengatakan bahwa saat itu peranan manusia dan sepeda sudah terbalik. Saat itulah pemuda Kasman menanggapi dalam bahasa Belanda, “*Een leidersweg is een lijden sweg. Leiden is lijden,*” jalan pemimpin bukanlah jalan yang mudah, memimpin adalah menderita.²⁴

Menyiapkan Kepemimpinan Bangsa

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini adalah kumpulan gagasan para alumni pelatihan Sekolah Kepemimpinan Bangsa.

24 Zulfikri Suleman, “Kepemimpinan Nasional dalam Sejarah Perjalanan Bangsa : Dari Pemimpin Pergerakan, Pemimpin Pejuang, Pemimpin Perebutan, ke Pemimpin yang Baik”, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, *Transformasi Kepemimpinan Nasional! Menuju Masyarakat Madani*, hal 93-94

Para aktivis sosial kemasyarakatan dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Mereka tergabung dalam Forum Negarawan Muda (www.negarawanmuda.org). Sebuah wadah berkumpul, sinergi dan pengembangan diri para pegiat “Merawat Indonesia”a melalui berbagai aktivitas kontribusi di masyarakat.

Mereka bersama-sama menempa diri. Membangun dan menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi dan mengoptimalkan jaringan. Membaca, menulis, berdiskusi dan melakukan berbagai aktivitas di tengah masyarakat. Bersinergi dengan berbagai elemen bangsa lainnya.

Apa yang tertulis dalam buku ini merupakan refleksi dan catatan kecil selama pelatihan. Memotret dan menganalisa persoalan kepemimpinan, keislaman, kemandirian, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ikhtiar kecil dalam mendokumentasikan gagasan, dan menyebarkan ke publik. Dengan harapan menjadi wakaf yang dapat memberi manfaat dalam waktu yang tidak terbatas.

Bagian I

*Inspirasi
Negara Madinah*

Demokrasi Berkebudayaan Dan Budaya Berdemokrasi

Yudi Latif



Demokrasi dengan suara terbanyak tidak mengandung cita-cita kebudayaan. Dalam demokrasi seperti itu, suara mayoritas yang menentukan apa yang benar, bukan ketentuan kebaikan dan keadilan. (Sutatmo Suryokusumo)

Kebudayaan Indonesia terancam oleh individualisme, egoisme dan materialisme Barat. Tanpa menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan, niscayalah kita hanya akan mendapat pergerakan borjuis, yang hanya akan memberi kenikmatan borjuis, yakni

orang-orang kaum atasan dan pertengahan, sedangkan rakyat akan terus hidup sengsara. (Ki Hadjar Dewantoro)

Bagi orang Indonesia, kebahagiaan sosial merupakan pencapaian harmoni antara individu dan kelompok, antara kelompok dan kosmos. Seluruh kehidupan kita tersusun dari perjuangan terus-menerus menuju tujuan akhir ini hingga kita dapat benar-benar mencapai keseimbangan sosial yang sempurna. (Soepomo)

Demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan dari rakyat itu. (Soekarno)

Jadinya, kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang impor. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang. (Mohammad Hatta)

Perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas patahan-patahan lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan. Politik sebagai teknik mengalami kemajuan, tetapi politik sebagai etik dan estetik mengalami kemunduran. Perkembangan demokrasi sebagai prosedur mengalami perubahan cepat dan massif, tapi demokrasi sebagai substansi seakan jalan ditempat.

Politik sebagai dimensi manusia secara keseluruhan memerlukan tautan harmonis antara individu dan masyarakat (mikro-kosmos dan makro-kosmos). Untuk pertautan itu, jembatan penghubungnya adalah etika dan estetika. Etika dan estetika membantu manusia untuk menentukan pilihan yang tepat dalam perkembangan abadi menuju kebaikan, kebenaran, keadilan, dan keindahan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, politik yang baik dengan sendirinya harus merupakan politik yang berkebudayaan.

Setelah 15 tahun gerakan reformasi digulirkan, pelbagai langkah untuk mendemokratisasikan institusi dan prosedur-prosedur politik Indonesia telah dilakukan dengan sejumlah transformasi yang nyata: pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif bebas dan berkala (meski di sana sini masih ada masalah menyangkut asas *fairness*), kebebasan berkumpul dan berekspresi, keluasaan akses informasi, desentralisasi dan otonominasi, pemilihan presiden dan pilkada secara lebih kompetitif.

Bersamaan dengan itu, kita juga bisa mencatat adanya perubahan mendasar herdimensikan struktural dan kultural. Pertama, stabilitas demokrasi dimungkinkan oleh terpenuhinya prasyarat konsensus elit (*elite settlement*). Konsensus elit ini melibatkan pengambil keputusan tingkat tinggi, pemimpin organisasi, politisi, petinggi pemerintah, kaum intelektual, pebisnis, dan pembentuk opini. Keyakinan mereka pada demokrasi membuat demokrasi berjalan.

Elite settlement merupakan faktor krusial yang memberi andil besar pada kegagalan eksperimen demokrasi Indonesia di masa lalu. Namun, gelombang demokratisasi pada era reformasi ini menunjukkan perkembangan positif dalam kemauan yang lebih luas di kalangan elit politik untuk mencapai konsensus. Dengan resistensi yang minimal, para elite setuju melakukan

amandemen atas konstitusi. Dengan persetujuan serupa, kita masih perlu melakukan usaha lanjutan agar hasil amandemen itu lebih mendekati kesempurnaan, bukan makin menjauh dari kesempurnaan. Seturut dengan itu, ada kesepakatan dari para pemegang senjata dengan para elite negeri untuk tidak menghalangi atau membatasi proses demokratisasi. Walaupun masih memiliki modal politik dan posisi tawar yang tinggi, militer—sebagai salah satu aktor terpenting dalam jagat perpolitikan Indonesia—rela meninggalkan gelanggang politik praktis, tunduk pada otoritas sipil.

Bersamaan dengan itu, ruang partisipasi dalam kekuasaan diperluas secara horisontal dan vertikal lewat proses distribusi dan desentralisasi kekuasaan politik sebagai upaya menjaga kesatuan negara. Idealnya, proses ini mengantarkan Indonesia pada partisipasi politik masif dan terbesar dalam sejarah Indonesia maupun dunia. Konsensus oleh bangsa ini mengenai bentuk distribusi kekuasaan merupakan terobosan demokratisasi melalui pendobrakan institusi-institusi prareformasi. Meskipun harus segera diberi catatan, bahwa kisruh yang terjadi dalam Pilkada di beberapa tempat menyiratkan masih lemahnya daya-daya konsensus elit demokratik, selain segi-segi yang menyangkut kesenjangan sosial, serta kelemahan pranata hukum dan institusi demokrasi.

Perkembangan ini diikuti pula oleh pencapaian kesepakatan diantara para elite individu maupun kolektif untuk loyal pada institusi dan praktik demokrasi. Apapun latar belakang ideologis dan kepentingan mereka, ada semacam kesepakatan bahwa institusi dan praktik demokrasi membantu tercapainya kemaslahatan umum. Tanpa adanya komitmen dan kepercayaan pada demokrasi dari elite politik, demokrasi hanya akan tinggal wacana.

Kesetiaan pada praktik dan institusi demokrasi dengan mengabaikan latar belakang ideologis dan identitas ini mengantarkan proses moderasi pemikiran dan ideologi antarkutub yang ekstrem. Elite politik yang berseberangan pun pada akhirnya dipaksa oleh keniscayaan sejarah dan keiktian demokratis untuk melakukan pendekatan dan negosiasi yang kemudian memoderasi ekstrimisasi ideologis, yang dapat mereduksi potensi konflik.

Selain itu, Orde Reformasi juga berhasil menghadirkan sejumlah institusi baru yang relatif berhasil menjadi rumpuan kepercayaan publik pada institusi-institusi negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski misi besar reformasi untuk memberantas korupsi masih jauh dari tuntas, kehadiran institusi ini masih mendapat dukungan publik.

Dengan segala perkembangan awal yang menjanjikan itu, bisa dipahami jika banyak kalangan yang menilai bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia sudah berada di jalan yang benar, bahkan ada yang menyebutnya telah menjadi *the only game in town*, dengan memosisikan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.¹

Meskipun terdapat sejumlah capaian positif, kita harus tetap waspada bahwa semua perkembangan ini hanyalah tahap awal dari proses panjang menuju konsolidasi demokrasi dan kemajuan bangsa. Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi-segi substantif. Karena di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambungkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi

1 Ini antara lain pernah disampaikan Presiden Federal Jerman, Christian Wulff saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Terapan Perpustakaan UI Depok, Kamis 1 Desember 2011. Simak: <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/02/173369489/Indonesia-Negara-Demokrasi-Terbesar-Ketiga-Dunia>

politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokrasi menjanjikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokratisasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi: yakni, pemberdayaan rakyat (*popular empowerment*) dan pertanggungjawaban sistemik (*systemic responsiveness*).

Dalam kerangka pencapaian demokrasi yang lebih substantif, berbagai capaian prosedural itu bisa dipertanyakan, setidaknya dengan menggunakan perspektif Thomas Carothers, wakil presiden *Carnegie Endowment for International Peace*, Washington, Amerika Serikat. Carothers menggambarkan bahwa sejumlah negara yang awalnya tampak menuju konsolidasi demokrasi kini justru berbalik arah menuju cengkraman otoritarianisme baru atau setidaknya memasuki politik zona abu-abu (*gray zone*). Menurut Carothers, di satu sisi, negara-negara tersebut memiliki ciri kehidupan politik yang demokratis, seperti adanya ruang politik, meski terbatas, untuk partai-partai politik oposisi dan masyarakat sipil yang otonom, serta Pemilu yang teratur dan konstitusi yang demokratis. Bersamaan dengan itu, mereka juga mengalami defisit demokrasi yang parah dengan karakternya antara lain adanya representasi politik yang buruk, rendahnya partisipasi politik di luar memilih dalam Pemilu, banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara, Pemilu dengan ketidakpastian legitimasi, semakin rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat dan institusi negara, dan rendahnya kinerja lembaga-lembaga negara.²

Pertanyaan pun muncul, apakah Indonesia juga masuk dalam kategori politik zona abu-abu seperti yang digambarkan Carothers? Pertanyaan tersebut penting diajukan karena setelah

2 Thomas Carothers, "The End of the Transition Paradigm" dalam *Journal of Democracy* 13, 2002, hal. 1.

belas-tahun reformasi bergulir, perkembangan demokrasi sebagai prosedur mengalami perubahan cepat dan massif, tapi demokrasi sebagai substansi seakan jalan ditempat.

Usaha mewujudkan substansi demokrasi, pada kenyataannya terkendala oleh hambatan-bambatan kultural, institusional dan struktural. Pada tingkat kultural, selama era reformasi, politik sebagai teknik mengalami kemajuan; tetapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Perangkat keras--prosedur demokrasiya terlihat relatif lebih demokratis; namun perangkat lunak--hudaya demokrasiya masih tetap nepotis-feodalistis; pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritokrasi (pemerintahan orang-orang berprestasi), malahan sebaliknya cenderung diikuti mediokrasi (pemerintahan orang sedang-sedang saja).

Pada tingkat insritusional, desain institusi demokrasi terlalu menekankan pada kekuatan alokatif (sumber dana), ketimbang kekuatan otoritatif (kapasitas manusia); politik padat modal membuar biaya kekuasaan tinggi, mengakibatkan *high cost economy*; merebakkan korupsi; demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang; demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita republikanisme dan *civic nationalism* justru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme). Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan (*disengagement*), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat.

Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi liberal tanpa menyesuakannya secara seksama dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, justru dapat melemahkan demokrasi. Dalam pembangunan demokrasi terdapat postulat, seperti diingatkan oleh Seymour Martin Lipset, bahwa semakin setara dan sejahtera sebuah bangsa, semakin besar peluangnya untuk menopang demokrasi. Sebaliknya,

ketidaksetaraan sosial yang ekstrem dapat mempertahankan oligarkhi atau tirani. Sementara demokrasi menghendaki derajat kesetaraan dan kesejahteraan, pilihan desain demokrasi kita justru seringkali memperlebar ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Berbeda dengan masyarakat Amerika Serikat yang pada awal pertumbuhan demokrasinya ditandai oleh derajat kesetaraan dalam ekonomi, pendidikan, dan dalam kemampuan mempertahankan diri (pemilikan senjata), prasyarat kesetaraan seperti itu belum hadir di negeri ini. Sebagai masyarakat pasca-kolonial yang terus terperangkap dalam dualisme ekonomi, ketimpangan sosial mewarnai negeri ini. Segelintir orang yang menguasai sektor modern menguasai perekonomian, membiarkan sebagian besar rakyat di sektor tradisional terus termarginalkan. Hal ini berimbas pada kesenjangan di bidang pendidikan—sekitar 70% warga masih berlatar pendidikan dasar. Bertahannya hierarki tradisional feodalisme juga melanggengkan ketidaksetaraan dalam otoritas legal dan kontrol warga atas pemerintah. Dalam multidimensi ketidaksetaraan seperti itu, watak pemerintahan yang akan muncul, Indonesia belum bisa menjalankan demokrasi sejati. Sejauh yang berkembang hanyalah oligarki dalam mantel demokrasi.

Sementara demokrasi kita bercorak oligarkis, kebebasan sebagai paket demokratisasi tidak selalu mengarah pada kesetaraan. melainkan bisa juga memperlebar ketidaksetaraan. Liberalisasi politik yang memacu liberalisasi pemilikan dan perusahaan, dalam lebarnya ketimpangan sosial bisa memperkuat dominasi pemodal besar atas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan. Dalam memperkuat dominasinya, para pemodal bisa menginvasi prosedur demokrasi. Oligarki yang muncul dari situasi seperti itu bukanlah oligarki yang punya empati terhadap penderitaan rakyat, melainkan yang melayani kepentingan pemodal dan dirinya sendiri.

Singkat kata, 15 tahun Orde Reformasi, demokrasi Indonesia masih menyimpan banyak persoalan, yang jika tidak diatasi secara segera bias menimbulkan keraguan umum mengenai kehaikan demokrasi. Meski rakyat bias saja punya andil dalam menciptakan problem demokrasi ini, masalah utamanya tidaklah pada "sisi-permintaan" (*demand-side*) seperti sering didalihkan para politisi: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme pemilih, serta kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya terletak pada kelemahan "sisi-penawaran" (*supply side*), dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat.

Ketidakpercayaan rakyat pada politik timbul manakala partai dan para pemimpin politik tak mampu menjawab masalah-masalah kolektif. Masalah-masalah kolektif ini justru timbul ketika institusi-institusi yang semula didesain untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif terdistorsikan oleh kepentingan memperjuangkan motif-motif perseorangan. Bahkan partai politik yang dasar mengadanya diorientasikan sebagai *interface*, untuk menyatukan aspirasi-aspirasi individual menjadi aspirasi kolektif dalam mempengaruhi kebijakan negara, sebagian besar justru dikuasai oleh orang per orang (pemodal besar atau dinasti).

Akibatnya tidak ada sandaran untuk memperjuangkan kepentingan kolektif. Perundang-undangan yang mestinya merupakan "kontrak sosial" dengan warga negara, terdistorsikan oleh kepentingan sempit-sesaat elit politik. Prosedur demokrasi mengalami penjelimitan dan petuhorosan sebagai rintangan masuk bagi para pesaing seraya membuka peluang transaksional yang mengunruangkan kepentingan oligarki politik.

Perubahan politik harus dimulai dari usaha menulihkan rasa saling percaya dan kepercayaan bahwa rasionalitas kepentingan individual tak akan dibayar oleh irasionalitas kepentingan kolektif. Kepercayaan bahwa warga negara akan mendapatkan politik

sesuai dengan perilakunya harus diubah dengan kepercayaan bahwa politik terpercaya akan mendapatkan partisipasi politik yang sepadan dengannya. Sekali aktor politik menunjukkan sinyal bisa dipercaya, maka partisipasi dan kepercayaan rakyat pada politik akan menguat.

Pemulihan rasa saling percaya dan kerjasama itu diarahkan untuk mendorong lahirnya semangat restorasi dan transformasi politik demokratik ke arah yang lebih baik. Visi restoratif politik demokratik menekankan pentingnya menjangkarkan pembangunan politik dan demokrasi pada basis nilai bangsa, terutama nilai-nilai Pancasila. Desain institusi politik dan demokrasi harus dapat menguras “the cost of *power*” yang dapat mendorong korupsi politik. Politik dikembalikan kepada *khittah*-nya sebagai seni untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.

Solusi atas kelemahan demokrasi tidak ditempuh dengan jalan menguranginya, melainkan justru dengan jalan menambahnya agar lebih demokratis. Karena itu, perlu ada pendalaman dan perluasan demokrasi. Pendalaman demokrasi diarahkan untuk menyempurnakan institusi-institusi demokrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan kepatutan etis, lebih responsif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat; mengurangi sifat narsisme politik yang hanya melayani segelintir elit politik. Sementara perluasan demokrasi diarahkan agar institusi demokrasi dan kebijakan politik punya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang dapat melumpuhkan demokrasi.

Secara singkat dapat dikatakan, ada dua tantangan besar dalam usaha untuk melakukan pendalaman dan perluasan demokrasi. Pertama, tantangan untuk mengembangkan demokrasi yang berkebudayaan. Kedua, tantangan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang kondusif bagi pengembangan demokrasi.

Demokrasi Berkebudayaan: Belajar dari Pengalaman

Gagasan "demokrasi permusyawaratan" berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila merupakan usaha sadar dari para pendiri bangsa untuk membuai apa yang disebut Putnam "*making democracy work*", atau apa yang disebut Saward "mengakar" (*to take root*), dalam konteks keindonesiaan. Suatu model demokrasi dengan cita-cita kebudayaan berdasarkan daya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia sendiri, sesuai dengan sifar-siat "tanah-air", kondisi sosial, dan perjalanan sejarah bangsa.

Ibarat individu, pada hakekatnya setiap bangsa memiliki karakternya tersendiri. Pengertian "bangsa" (*nation*) yang terkenal dari Otto Bauer, menyatakan bahwa, "Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman." Dalam kaitan ini, Soekarno menandakan, "Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya" (Soekarno, 1958).

Seturut dengan itu, demokrasi Indonesia juga harus dijalankan sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Dalam ungkapan Soekarno: "Demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan dari rakyat itu" (Soekarno, 1958).

Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekadar alat-teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian dan

cita-cita nasional. Dalam pandangan Soekarno, jika demokrasi sekadar alat teknis, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan nasional-sosialisme (fasisme), maupun diktatur proletariat; yakni, sekadar alat untuk mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan, entah masyarakat kapitalistis, sosialistis, maupun yang lain. Bahkan, dengan mengutip pandangan seorang ahli sosiologi Karl Steuerman, Soekarno menyatakan bahwa “demokrasi, apalagi yang dikenal oleh kita dengan *parlementaire democratie* itu adalah ideologi dari suatu periode saja”. *Parlementaire democratie* adalah ideologi politik dari kapitalisme yang sedang naik (*Kapitalismus in Aufstieg*); adapun fasisme adalah ideologi politik dari kapitalisme yang sedang menurun (*Kapitalismus in Niedergang*)—sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan kapitalisme.

Selanjutnya dia tegaskan:

“Tetapi di dalam cara pemikiran kita, atau lebih tegas lagi di dalam cara keyakinan dan kepercayaan kita, kedaulatan rakyat bukan sekadar alat saja. Kita berpikir dan berasa bukan sekadar hanya secara teknis, tetapi juga secara kejiwaan, secara psikologis nasional, secara kekeluargaan. Di dalam alam pikiran dan perasaan yang demikian itu maka demokrasi dus, bagi kita bukan sekadar satu alat teknis saja, tetapi satu geloof, satu kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat sebagai yang kita cita-citakan. Bahkan dalam segala perbuatan-perbuatan kita yang mengenal hidup bersama, dalam istilah Jawa hidup bebrayan kita selalu hendak berdiri di atas dasar kekeluargaan, dasar musyawarah, demokrasi, yang kita namakan kedaulatan rakyat.”

Karena demokrasi alam pemikiran Indonesia bukan sekadar alat teknis, melainkan juga mengandung jiwa pemikiran dan perasaan, maka perwujudan demokrasi itu hendaknya diletakkan di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan di atas cita-cita nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya Soekarno menyatakan:

“Oleh karena itulah bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu ‘identik’ artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain.”

Corak kepribadian Indonesia itu hingga taraf tertentu merupakan pantulan dari kebudayaan Indonesia. Menurut ekosistemnya, Hildred Geertz (1967) membagi corak kebudayaan Nusantara ke dalam tiga kategori: kebudayaan petani beririgasi, kebudayaan pantai, dan kebudayaan masyarakat paladang dan pemburu.

Kebudayaan pertanian beririgasi berkembang di wilayah yang disebut Clifford Geertz (1963) sebagai “Indonesia dalam”, yang meliputi Jawa dan Bali. Kebudayaan ini ditandai oleh tingginya intensitas pengolahan tanah secara teratur dengan menggunakan sistem pengairan dan sistem tanam padi di sawah yang bersifat padat karya di daerah yang paling padat penduduknya. Kebudayaan pertanian ini secara kuat dipengaruhi oleh Hinduisme dan juga mendapatkan stimulus dari peradaban China, kenujiaan mengembangkan kebudayaan “adiluhung” di sekitar keraton yang sangat berorientasi pada status. Kebudayaan ini mengalami pergeseran terutama sejak masuknya pengaruh Islam dan Barat-Kristen.

Kebudayaan pantai ditandai oleh kegiatan perdagangan yang secara kuat dipengaruhi oleh Islam. Kebudayaan tersebut tersebar di sepanjang pantai, terutama di wilayah “Indonesia luar”, seperti pantai Sumatra dan Kalimantan yang didukung oleh

orang-orang Melayu dan pantai Sulawesi Selatan yang didukung oleh orang-orang Bugis-Makassar. Kebudayaan ini berorientasi pada perdagangan yang bersifat kosmopolitan, mengutamakan pengajaran dan hukum Islam, dan mengembangkan tarian, musik dan kesusasteraan sebagai unsur pemersatunya. Kebudayaan ini mengalami pergeseran setelah kekuatan-kekuatan Eropa menguasai daerah-daerah pesisir.

Kebudayaan masyarakat peladang dan pemburu berkembang di atas system pencaharian perladangan, yang ditandai oleh jarangya penduduk dan baru beranjak dari kebiasaan hidup berburu ke pertanian. Kategori kebudayaan ini meliputi kebudayaan orang Toraja di Sulawesi Selatan, orang Dayak di pedalaman Kalimantan, orang Halmahera, suku-suku bangsa di pedalaman Pulau Seram, suku-suku bangsa di kepulauan Sunda Kecil, orang Gayo di Aceh, orang Rejang di Bengkulu, dan orang Pasemah di Sumatra Selatan.³

Ketika rancang bangun negara Indonesia merdeka diperbincangkan antara dekade 1920-an hingga 1940-an, partisipan utama dalam wacana publik dapat dikarakterkan mewakili perspektif budaya "Indonesia dalam" dan "Indonesia luar". Kedua arus kebudayaan ini memiliki titik temu dalam menekankan pentingnya semangat kekeluargaan. Baik nelayan dalam mengayuh perahu, maupun petani dalam mengolah tanah, sama-sama membutuhkan semangat tolong-menolong' gotong-royong. Dalam lingkungan kebudayaan seperti itu, seseorang hanya dapat memperoleh makna eksistensialnya dalam kemampuannya berbakti pada kebersamaan.

3 Untuk uraian lebih rinci, lihat Prof. Dr. S. Budhisantoso dalam Kata Pengantar untuk buku Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1997.

Setiap manusia dipandang sebagai perwujudan khusus atau “diferensiasi” alam, yang harus menyatukan diri dengan aturan alam yang agung itu, dan hak-haknya muncul dari fungsi dan tugas sosial masing-masing. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, perkembangan manusia, budaya dan bangsa harus berlaku menurut asas “tri-kon” (konrinu, konvergen, konsentris): “kontinu” dengan alamnya sendiri, “konvergen” dengan alam di luarnya, untuk menuju ke arah persatuan “konsentris” yang universal, yaitu bersatu dengan alam besar, namun tetap memiliki “kepribadian” sendiri (Reeve, 20013: 17).

Meski terdapat titik temu, kedua arus kebudayaan memperlihatkan perbedaan perspektif dalam mengaktualisasikan semangat kekeluargaan itu. Sifat pedalaman yang konsentris lebih memberikan tekanan pada pentingnya merawat persatuan-kesatuan (*unity*). Sedangkan sifat pesisir yang dispersal lebih memberikan tekanan pada pentingnya merawat perbedaan-keragaman (*diversity*). Secara garis besar, Soekarno mewakili perspektif yang pertama, sedangkan Mohammad Hatta mewakili perspektif yang kedua.

Dalam menekankan unitas, Bung Karno lebih memilih bentuk negara kesatuan, mengedepankan kewajiban warga di atas hak, menghendaki penyederhanaan partai bahkan mengidealisasikan adanya satu partai pelopor (*PNI Staatspartij*), dan perlunya pembentukan kolektivisme golongan fungsional (*corporate state*) sebagai aktualisasi semangat kekeluargaan dalam mengatasi partikularitas partai politik, serta mengutamakan kepemimpinan yang kuat.

Dalam menekankan diversitas, Bung Hatta lebih memilih bentuk negara federal, lebih memperhatikan hak warga, mendukung pembentukan multi-partai, memilih demokrasi parlementer, dan pentingnya mengembangkan individualitas

(bukan individualisme) untuk mengimbangi kemungkinan kolektivisme terbjak oleh kekangan tradisi, serta tidak mengutamakan kepemimpinan yang kuat.

Pergulatan antara kedua pendekatan itu memperoleh sintesisnya dalam nilai dasar Pancasila, yakni semangat gotong-royong. Adapun substansi dari semangat gotong royong itu tiada lain adalah apa yang disebut oleh Profesor Nicolaus Driyarkara sebagai “ada-bersama-dengan cinta” (*liebendes Mit-sein*); bahwa cinta kasih sebagai pemersatu sila-sila.⁴ Dengan semangat gotong-royong itu, Konstitusi Proklamasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) disusun dalam sistematik negara kekeluargaan.

Dalam semangat gotong-royong dan sistematik negara kekeluargaan, bentuk negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercaya bisa menjamin persatuan yang kuat bagi negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan (*unitary*). Meski demikian, mereka sepakat bahwa untuk mengelola negara sebesar, seluas dan semajemuk Indonesia tidak bisa tersentraliasi dengan mengandalkan inisiatif segelintir elit di Jakarta. Negara Indonesia sepatutnya dikelola dengan mengadopsi unsur pendekatan federal dengan melibatkan peran serta daerah lewat desentralisasi dan dekonsentrasi. Termasuk perlunya pembentukan pemerintahan daerah berdasar atas permusyawaratan dengan menghormati “hak-hak asal-usul” dari daerah yang bersifat istimewa, seperti daerah kerajaan (*Kooti*) dan daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa.

Kewajiban warga tetap dikedepankan, seraya menjunjung tinggi hak-hak dasarnya, agar negara kekeluargaan tidak menjelma

4 Untuk lebih memahami penjelasan Profesor Driyarkara tentang konsepsi Pancasila sebagai “ada-bersama-dengan cinta” ini, lihat tulisannya, “Pemikiran Pancasila Sebelum 1965”, dalam Karya Lengkap Driyarkara (2006).

menjadi negara kekuasaan. Soepomo sebagai representasi arus "pedaiaman" yang bertindak sebagai Ketua Tim Kecil Perumus Rancangan UUD bersedia menempuh pilihan kompromistis, dengan menamhahkan pasal "yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan kin-lain yang diatur oleh undang-undang."

Dengan pasal tersebut, warga bebas mendirikan partai politik, namun tetap diletakkan dalam kerangka negara kekeluargaan. Untuk itu, desain lembaga perwakilan disusun dengan mencari keseimbangan antara kebhinnekaan dan kesatuan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melambangkan keragaman ideologis warga yang diisi oleh perwakilan aneka partai politik yang (atas usul Hatta) dipilih langsung oleh rakyat. Posisi DPR tidak dipandang sebagai "parlemen" (yang menjadi *locus of sovereignty* seperti di Inggris); DPR hanyalah lembaga legislatif biasa yang ditempatkan sebagai majelis rendah (*lower house*).

Pengggangam kedaulatan Rakyat (*locus of sovereignty*) ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lambang kesatuan semangat kekeluargaan bangsa Indonesia. MPR dipandang sebagai lembaga tertinggi negara (*upper house*) yang diisi bukan saja oleh perwakilan DPR, namun juga kekuatan-kekuatan strategis rakyat lainnya, yakni utusan daerah dan utusan golongan (kelompok strategis di ruang publik seperti kolektivitas perekonomian, kaum marginal, cendekiawan, dan kelompok bela negara). Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat tertinggi, MPR berrugas untuk menetapkan dua kebijakan dasar: UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Tentang prosedur pembentukan utusan daerah dan golongan, Soekiman dan Mohammad Yamin mengusulkan pemilihan secara langsung, Hatta keheratan dengan usul tersebut. Soepomo

mengusulkan lewat pemilihan secara tidak langsung, seperti lewat konvensi (permusyawaratan) golongan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang menyerahkan soal pengangkatan utusan golongan itu kepada Presiden.

Dalam menjalankan pemerintahan Negara. Indonesia tidak menganut pemerintahan parlementer. Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan ada di tangan Presiden. Meski demikian, dalam negara kekeluargaan, Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan tidaklah mengembangkan politik sendiri, melainkan sekadar mandataris MPR yang melaksanakan GBHN yang dirumuskan secara musyawarah-kekeluargaan oleh perwakilan segala unsur kekuatan rakyat.

Keseluruhan desain institusi demokrasi itu deletakkan dalam kerangka semangat sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat); dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).

Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dari aneka bentuk penindasan, khususnya penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme, yang bersahutan dengan semangat egalitarianisme. Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan

mengakui adanya “kesederajaran/persamaan dalam perbedaan”. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini bahwa syarat yang mutlak untuk kuarnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.⁵ Karena itu, dengan “asas kerakyatan” itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri “hikmat-kebijaksanaan”. Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Selanjutnya dikatakan, “Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya” (Hatta, 1957: 34-35). Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghasilkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh “mayorokrasi” dan “minorokrasi”.

5 Lihat “Uraian Sila Demi Sila Hasil Rumusan Panitia Lima”, khususnya untuk bagian Uraian Sila Keempat. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, seperti dimuat kembali dalam Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1977.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Tentang bagaimana cara bekerjanya demokrasi permusyawaratan, Hatta menganjurkan perlunya berjejak pada tradisi permusyawaratan desa. Meskidemikian, dia mengingatkan bahwa tidak semuanya yang tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai begitu saja pada tingkat negara. "Mufakat yang dipraktekkan di desa-desa ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanya, setelah masalahnya diperbincangkan dengan panjang lebar."

Adapun pada tingkat negara, menurutnya "terdapat berbagai partai dan pertentangan politik", sehingga keputusan dengan mufakat secara bulat memang sulit dicapai dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, sebagai pilihan terakhir, harus dimungkinkan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Berkaitan dengan itu, Hatta menegaskan bahwa "mufakat yang dipaksakan sebagaimana lazim terjadi di negeri-negeri totaliter tidaklah sesuai dengan paham demokrasi Indonesia, sebab mufakat baru jadi sebagai hasil daripada permusyawaratan. Dengan tidak ada musyawarat, di mana tiap-tiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya, tidak ada mufakat" (Hatta, 1956; 1988: 14).

Dalam konteks inilah, Hatta mengingatkan bahwa masyarakat kolektif yang demokratis perlu merawat mentalitas kolektif yang cenderung pada kemaslahatan umum, sebagai prasyarat rohaniah yang memudahkan tercapainya mufakat.

Selengkapnya dia katakan:

"Tetapi di dalam masyarakat kolektif yang demokratis, seperti Indonesia, mentalitet orang-seorang berlainan dari di dalam masyarakat individualis. Dalam segala tindakannya dan menyatakan pendapatnya, ia terutama dikemudikan oleh kepentingan umum. Dalam keselamatan kesemuanya terletak kepentingannya sendiri. Sebab itu, pada dasarnya, mencapai kata sepakat lebih mudah."

Mentalitas kolektif ini, menurutnya, tidak perlu membuat seseorang menjadi objek kolektivitas yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Yang diperlukan adalah bahwa kemerdekaan individu itu harus beroperasi dalam batas garis kontur kemaslahatan umum. Selengkapnya dia katakan:

"Sungguh pun orang-seorang dalam pikirannya dan dalam tindakan-nya ke luar terikat kepada cita-cita kepentingan umum, ia bukan obyek semata-mata daripada kolektivitet, seperti yang berlaku dalam negara totaliter. Ia tetap subyek yang mempunyai kemauan, merdeka bergerak untuk mengadakan perhubungan yang spesial, untuk mengadakan diferensiasi. Dalam perikatan masyarakat ia tetap mempunyai cita-cita, mempunyai pikiran untuk mencapai kemaslahatannya atau keselamatan umum (Hatta, 1956; 1988: 15)."

Alhasil, dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi, dan konsensus secara hermutu dengan meusyaratkan mentalitas

kolektif dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan manapun akan merasa ikut memiliki, loyal, dan bertanggung jawab atas segala keputusan politik. Atas dasar itu, pemungutan suara (*voting*) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itu pun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati.

Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan (kekeluargaan). Kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari perbedaan aneka gugus kebangsaan diperkuat melalui pemuliaan nilai-nilai keadilan. Menurut penjelasan Mohammad Hatta, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berhubung erat pula dengan sila Keadilan Sosial, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat" (Hatta, 1957: 35).

Lebih lanjut, dalam *Demokrasi Kita* (1960), Hatta mengatakan, "Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada". Senada dengan itu, Soekarno menegaskan bahwa demokrasi yang harus dikibarkan di negara ini adalah demokrasi politik dan ekonomi:

"Bagaimana dan demokrasi yang harus dituliskan di atas bendera kita,--yang harus kita adakan di seberang jabatan-emas? Demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenar-benarnya pemerintahan Rakyat. Bukan demokrasi 'à la Eropa dan Amerika yang hanya suatu 'potret dari pantatnya' demokrasi-politik sahaja, bukanlah demokrasi yang memberi kekuasaan 100% pada Rakyat di dalam urusan politik sahaja, tetapi suatu demokrasi politik dan ekonomi yang memberi 100% kecakrawartian pada Rakyat-jelata di dalam urusan politik dan urusan ekonomi. Demokrasi politik dan

ekonomi inilah satu-satunya demokrasi yang boleh dituliskan di atas bendera partai,--ditulis dengan aksara-aksara-api sebagai di atas saya katakan, agar supaya menyala-nyala tertampak dari ladang dan sawah dan bingkil dan paberik di mana Marhaen berkelub-kesah mandi keringat mencari sesuatu nasi (Soekarno, 1965: 320)."

Demikianlah rancang hangun Konsritusi Proklamasi dalam menjaga harmoni anrara kesatuan dan kebhinekaan. Dalam kejernihan bening budi bangsa Indonesia disadari bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai dan diisi dengan menyertakan etos kedua sayap kebudayaan itu. Secara metaforis, kesadaran ini tercermin pada detik-detik menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ketika matahari mulai meninggi, dan kerununan massa yang tak sabar mendesak Bung Karno untuk segera mengucapkan proklamasi, yang didesak tetap tak mau bangkit dari peraduan tanpa kehadiran sebuah nama. "Aku masih menderita demam, tetapi aku tidak kehilangan akal. Menghadapi desakan-desakan kepadaku, yang mengherankan, aku masih dapat berpikir dengan jernih. 'Hatta belum datang,' kataku, 'Aku tidak mau membacakan proklamasi tanpa Hatta'." (Soekarno, 1965).

Namun di dalam perkembangan lebih lanjut, pelaksanaan system pemerintahan negara sering kali melenceng dari *maxim* keseimbangan itu. Menyusul Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta (3 November 1945), politik Indonesia lebih herat pada sayap kebhinekaan. Di luar ekspektasi Hatta sendiri, jumlah partai politik meledak, disusul oleh penerapan sistem pemerintahan parlementer yang menyimpang dari Konstitusi Proklamasi--meski dapat dipahami untuk kepentingan diplomasi yang memaksa Soekarno untuk melengkungkan (meski tak mematahkan) pendiriannya. Konsekuensinya, Bung Karno (lambang unitas) "ditinggalkan" sekadar sebagai Presiden simbolik. Diversitas menjadi orientasi politik, bahkan

di saat negara memerlukan persatuan dalam menghadapi agresi Belanda, partai-partai sibuk dengan kepentingannya masing-masing, mengabaikan komitmen pada blue-print pembangunan kesejahteraan bersama. Pemerintahan silih berganti, dengan tidak ada kabinet yang bisa bertahan lebih dari dua tahun. Pemilu 1955 yang diharapkan menjadi tonggak bagi perwujudan pemerintahan yang stabil tidak memenuhi harapan.

Tahun 1956, Bung Karno yang mulai kehilangan kesabaran menyerukan pembubaran partai politik. Terbentur pada kesulitan pembubaran partai politik, ia pun mundur beberapa tindak dengan mengeluarkan serangkaian konsepsi yang mengarah pada penyederhanaan partai politik, memasukan anasir golongan fungsional ke dalam DPR, serta pembentukan kabinet gotongroyong/kabinet karya, yang kesemuanya itu mengarah pada sistem pemerintahan yang lebih berat pada sayap kesatuan. Pada tahap ini, giliran Bung Hatta (lambang diversitas) yang "ditinggalkan" menyusul pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden pada 1956.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecenderungan watak pemerintahan bablasan Orde Lama itu diteruskan oleh Orde Baru secara lebih eksekutif. Meskipun rezim ini mengklaim menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dalam pelaksanaannya banyak yang menyimpang dari desain keseimbangan yang dikehendaki Konstitusi Proklamasi.

Di bawah rezim yang menekankan unitas seperti itu harus diakui politik lebih memperhatikan pembangunan, stabilitas politik terjamin, pertumbuhan ekonomi menggembirakan. Di sisi lain, pemaksaan penyederhanaan partai, kecenderungan sentralisasi kekuasaan, pengekangan hak-hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta penyeragaman budaya yang mengarah pada dekulturnisasi golongan etnis minoritas, banyak mengorbankan dimensi kebhinekaan Indonesia.

Dengan meninggalkan Bung Karno, Orde Reformasi juga tak sepenuhnya memuliakan Bung Hatta, ketika tekanan pada diversitas tidak dibarengi oleh kekuatan individualitas yang diidealisasikan Bung Hatta. Ledakan diversitas tanpa otonomi-kritisisme individu hanya membuat politik dirayakan oleh kerumunan, yang mudah “dijinakkan” oleh sogokan uang atau dibelokan ke arah anarkisme dan terorisme komunal.

Setelah 68 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia tak kunjung belajar dari sejarah yang membuatnya tak kunjung sadar bahwa dua proklamatornya, Soekarno dan Mohammad Hatta, bukan sekadar dua nama yang kebetulan tampil pada momen yang tepat. Keduanya tampil berkat rahmat Tuhan sebagai manifestasi ‘tindakan sejarah’ (*historical action*) dan ‘penemuan sejarah’ (*historical selfinvention*) dari kegigihan pergulatan dua arus besar kebudayaan Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dengan memadukan diri dalam sejoli monodualisme kekuatan sejarah Indonesia: “bhinneka tunggal ika” (*unity indiversity*).

Mengembangkan Budaya Berdemokrasi

Dengan menjangkarkan demokrasi pada kebudayaan dan kepribadian nasional tidaklah berarti bahwa pemuliaan terhadap nilai dan asas lama itu harus dilakukan dengan “mata tertutup”. Sedari awal, para pendiri Republik menyadari sepenuhnya adanya warisan tradisi lokal yang menindas. Untuk itu, diperlukan “mata terbuka” untuk melakukan peminjaman budaya secara selektif dengan keyakinan bahwa tradisi lama bisa diolah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kemanusiaan dengan mengambil faedah dari unsur-unsur budaya luar yang konstruktif. Dalam ungkapan Ki Hadjar Dewantoro dikatakan:

“Dalam pada itu hendaknya lah kebudayaan lama disaring seperlunya; apa yang bertentangan dengan zaman baru dan/

atau tak bermanfaat lagi harus dihapuskan, dibentakan atau dibekukan, sedangkan yang masih berguna diperbaiki. Jangan lupa memasukkan bahan baru, baik dari dunia luar maupun dari hidup baru sendiri, asalkan dapat mengembangkan dan memperkaya.” (Dewantoro, 1941; Reeve, 2013: 14).

Dalam lapangan politik, salah satu warisan tradisi lama yang menindas itu bernama feodalisme. Dalam kaitan ini, dasar ontologis menjadi Indonesia, selain merupakan perjuangan untuk membebaskan diri dari kolonialisme dari luar, juga merupakan perlawanan abadi terhadap feodalisme dari dalam. Elemen-elemen kultural untuk melakukan perlawanan terhadap feodalisme itu diramu dari unsur-unsur tradisi nusyawah demokrasi desa, tradisi egalitarianisme Islam, dan tradisi “sosial-demokrasi” yang diadopsi dari Barat.

Tradisi kekuasaan pra-Indonesia memang kerajaan feodal, yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu telah berkembang dalam budaya nusantara, dan dipraktikkan seridaknya dalam unit politik kecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, banjar di Bali, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Tan Malaka, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di bumi Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya, pada abad 14 sampai 16 kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal di masa itu bahwa “Rakyat ber-raja pada Penghulu. Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut”. Dengan demikian, menurutnya, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan dan patut-lah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak bila bertentangan dengan pikiran akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Tan Malaka, 2005:15-16).

Menurut analisis Hatta, demokrasi asli Nusantara itu dapat terus bertahan di bawah feodalisme karena, di banyak tempat

di Nusantara, tanah sebagai factor produksi yang terpenting bukanlah kepunyaan raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama atas tanah desa ini, maka hasrat tiap-tiap orang untuk memanfaatkan tanah ini harus mendapatkan persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong-royong dalam memanfaatkan tanah bersama yang merembet pada urusan-urusan lainnya, termasuk mengenai hal-hal pribadi seperti mendirikan rumah. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum, yang diputuskan secara mufakat (kata sepakat). Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau: "*Bulek aci dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*" (Bulat air karena pembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat). Tradisi musyawarah-mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu.

Karena alasan pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, demokrasi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tak dapat dilenyapkan; bahkan tumbuh hidup sebagai adat istiadat. Hal ini, menurutnya, menanamkan keyakinan di lingkungan pergerakan kebangsaan "bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan, liat hidupnya", seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau, "*indak lakang dek panas, indak lapuak dek ujan*"; tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1960: 121-123).

Hatta menambahkan dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli di Nusantara. "Yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana." Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat

apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi yang damai. Tidak sering rakyat yang sabar berbuat seperti itu. Namun, apabila hal itu dilakukan, pertanda menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan tilang peraturan yang dikeluarkannya. Adapun hak menyingkir, dapat dianggap sebagai hak orang-seorang untuk menentukan nasib sendiri (Hatta, 1960: 123).

Tradisi demokrasi desa itu diperkuat oleh nilai-nilai demokratis dari Islam. Tentang kontribusi Islam, Bung Karno menyebutkan bahwa tradisi Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis (Soekarno, 1965: 265).

Nilai-nilai demokratis Islam itu bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengaktian pada Ketuhanan Yang Maha Esa (*Tauhid, Monotheisme*). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, setiap bentuk pengaturun hidup sosial manusia yang meahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa *Tauhid*. Kelanjutan logis dari prinsip *Tauhid* adalah paham persamaan (keseederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat serta pemaksaan kehendak/pandangan antarsesama manusia. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Madjid, 1992: 4).

Kehadiran Islam di Nusantara membawa perubahan penting dalam pandangan dunia (*world view*) dan etos masyarakat, terutama, pada mulanya, bagi masyarakat wilayah pesisir. Menurut Dennis Lombard, Islam meratakan jalan bagi modernitas dengan memunculkan masyarakat perkotaan dengan konsepsi 'kesetaraan'

dalam hubungan antarmanusia, konsepsi 'pribadi' (*nafs, personne*) yang mengarah pada pertanggungjawaban individu, serta konsepsi waktu (sejarah) yang 'linear', menggantikan konsepsi sejarah yang melingkar (Lombard, 1996: II, 149-242). Dalam pandangan Lombard, pengaruh modernisasi dan nilai-nilai humanism Barat pada dasarnya melanjutkan jalan yang sebelumnya telah diratakan oleh pengaruh Islam.

Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter (Wertheim 1956: 205). Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, dalam Dunia Melayu berkembang peribahasa, "Melayu pantang membantah." Lewat pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi, "Raja adil, raja disembah' raja zalim, raja disanggah." Nilai-nilai egalitarianisme Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhap sistem "kasta" baru yang dipaksakan oleh kekuatan colonial (Wertheim, 1956: 205).

Tradisi demokrasi desa yang diperkuat oleh nilai-nilai demokratis Islam itu memberi lahan bagi penyemaian nilai-nilai sosial-demokrasi dari Barat. Bung Hatta, seperti juga Bung Karno, menolak mentah-mentah untuk mengekor model demokrasi-liberal yang menekankan suara mayoritas, tetapi dapat menerima nilai-nilai demokrasi-sosial yang mengedepankan semangat konsensus dan keadilan sosial.

Nilai-nilai demokrasi-sosial dari Barat itu dipinjam melalui perjumpaan yang intens dengan tradisi demokrasi di Eropa yang dialami oleh mereka yang menempuh pendidikan di Eropa, penyelidikan atas praktik sosio-demokrasi di negara-negara Skandinavia, instalasi institusi demokrasi di Tanah Air seperti Volkstraad, dan yang lebih penting melalui kesadaran

emansipatoris akibat kererpaparan anak-anak negeri dengan sistem pendidikan Eropa dan kemunculan ruang publik modern di Nusantara.

Bibit-bibit kelahiran ruang publik modern di Hindia dimungkinkan oleh dampak ikutan dari penerapan ekonomi Liberal pada paruh akhir abad ke-19, yang bertanggungjawab dalam mendorong pendirian pers-pers vernakular (herbahasa lokal) serta dalam penyebaran klub-klub sosial bergaya Eropa. Lewat proses pendidikan dan *mimicry* dan dengan cara membaca pers *vernakular* yang didirikan oleh orang Eropa dan kemudian juga oleh orang keturunan Cina, serta dengan membentuk perhimpunan-perhimpunan, inteligensia pribumi pada akhirnya bias menciptakan ruang publiknya sendiri.

Wacana dominan pada fase kecambah ruang publik modern ini berkisar pada isu "kemadjoean". *Kemadjoean* dalam arti ini mengekspresikan suatu kehendak umum mencapai status sosial yang ideal, baik sebagai individu maupun komunitas imajiner, yang meliputi banyak hal: kemajuan pendidikan, modernisasi (yang secara luas diasosiasikan dengan Westernisasi), kehormatan, dan keberhasilan dalam hidup.

Sampai akhir abad ke-19, peran para guru dalam mempromosikan wacana *kemadjoean* sangatlah menonjol. Seridaknya karena dua alasan. Pertama, profesi guru hingga masa ini menghimpun porsi terbesar dari orang-orang pribumi berpendidikan terbaik, dan sebagai para pendidik, mereka merupakan pihak yang paling merasa terpanggil untuk mengemban misi suci untuk mencerahkan saudarasaudara sebangsanya. Kedua, fakta bahwa profesi guru kurang dihargai jika dibandingkan dengan posisi-posisi administratif mungkin telah menstimulasi mereka untuk menjadi artikulator dari konsep 'kemadjoean' dalam rangka menjadikannya sebagai tolok ukur

baru dalam menentukan privilese sosial. Peran yang menonjol dari para guru ini menunjukkan bahwa 'intelektual organik' dari bibit inteligensia pada akhir abad ke-19 ini terutama berasal dari lingkaran-lingkaran para guru.⁶

Dengan trajektori *kemadjoean* yang telah dirintis kaum guru, sedini awal dekade pertama abad ke-20, terjadilah fase formatif ruang publik modern. Sejauh mengenai perkembangan pers *vernakular*, dekade pertama abad ke-20 merupakan momentum paling penting dalam sejarah keterlibatan kaum pribumi dalam bidang tersebut.⁷ Para jurnalis pribumi yang paling terkemuka pada masa itu berasal daripara pelajar atau mantan pelajar sekolah *Dokter-Djawa/STOVIA*. Di antara mereka, yang paling terkenal

- 6 Tuntutan utama dalam proyek emansipasi kaum guru ini berkisar pada upaya perjuangan kata/bahasa. Yakni perluasan akses terhadap perpustakaan serta peningkatan pengajaran bahasa Belanda di sekolah-sekolah pendidikan guru pribumi dan pengajaran bahasa Belanda bagi semua anak pribumi (Adam 1995: 89). Kaum guru melancarkan tuntutan dan kritik mereka terutama lewat majalah-majalah pendidikan, seperti Soeloeh Pengadjar di Probolinggo (yang pertama kali terbit pada tahun 1887) dan Taman Pengadjar di Semarang (terbit sekitar tahun 1899-1919). Majalah-majalah itu memainkan peran yang signifikan dalam mengartikulasikan aspirasi-aspirasi guru pribumi, bagi penghapusan diskriminasi dalam pendidikan. Seiring dengan itu, persis menjelang akhir abad ke-19, perkumpulan guru paling berpengaruh terbentuk, yang diberi nama klub 'Mufakat Guru'. Cabang-cabang dari klub ini bermunculan di berbagai kabupaten dan kawedanan di Jawa. Tujuan dari 'Mufakat Guru' pada pokoknya ialah 'untuk membuka jalan bagi para guru untuk bersatu dan berdiskusi mengenai permasalahan dan isu kemadjoean.
- 7 Sementara pada abad ke-19, telah ada beberapa redaktur dan jurnalis pribumi yang bekerja untuk pers milik orang Belanda/Indo dan orang keturunan Cina, peran kaum pribumi dalam dekade awal abad ke-20 jauh lebih substansial. Di samping jumlah redaktur dan jurnalis pribumi yang meningkat, para anggota dari inteligensia pribumi itu sekarang telah mendirikan pers yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh kalangan pribumi sendiri.

ialah Abdul Rivai (lahir tahun 1871) dan Tirta Adhi Surjo (1880-1918). Melanjutkan tradisi perjuangan kaum guru, para jurnalis-inteligensi ini juga memancangkam tongkat kebangkitan lewat bahasa dan konstruksi tanda.

Menulis pada edisi perdana (1902) majalah pengobar 'kemajuan', *Bintang Hindia*, Abdul Rivai memperkenalkan istilah 'bangsawan pikiran'. Dikatakan, "Tak ada gunanya lagi membicarakan 'bangsawan usul', sebab kehadirannya merupakan rakdir. Jika nenek-moyang kita keimman bangsawan, maka kita pun disebut bangsawan, meskipun pengetahuan dan capaian kita bagaikan katak dalam tempurung. Saat ini, pengetahuan dan pencapaianlah yang menentukan kehormatan seseorang. Situasi inilah yang melahirkan 'bangsawan pikiran'."

Tulisan seorang lulusan sekolah Dokter-Jawa ini, mewakili kegetiran anak-anak terdidik dari kalangan priyayi rendahan dan non-bangsawan. Karena administrasi pribumi, sebagai lambang kehormatan, dipertunjukkan bagi anak-anak priyayi tinggi, anak-anak dari kalangan ini cenderung memilih sekolah menak yang disebut *hoofdenschool* (awal abad 20 menjadi OSVIA). Sementara itu, perluasan birokrasi dan kapitalisme memerlukan tenaga-tenaga pertukangan. Sekolah Dokter-Jawa (awal abad 20 menjadi STOVIA) dan sekolah guru (*Kweekschool*) semula dirancang untuk memenuhi keperluan itu.

Diskriminasi tidak sendirinya lenyap dengan menyandang ijazah. Baik dalam standar gaji maupun status sosial, lulusan STOVIA lebih rendah kerimbang lulusan OSVIA. Situasi inilah yang mendorong kaum terdidik dari keturunan priyayi rendahan dan non-bangsawan berjuang memancangkan 'pikiran' sebagai randa baru kebormatan sosial. Dalam usaha itu, anak-anak STOVIA bermotivasi tinggi umuk memperjuangkan getakan-gerakan kebangkitan.

Salah satu yang terpenting adalah pendirian perkumpulan Budi Utomo (BU) pada 1908. Dengan melancarkan kritik terhadap kegagalan kepemimpinan priyayi tua dalam melindungi kepentingan rakyat, pada awalnya BU bermaksud memperjuangkan kepemimpinan kaum muda. Meskipun terbukti, pengaruh priyayi mapan masih terlalu kuat, membuat BU segera dibajak oleh kalangan priyayi konservatif. Betapapun, BU menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan gerakan kebangkitan berbasis 'bangsawan pikiran'. Sejak itu, 'pikiran' menjadi peta-jalan bagi ideal-ideal generasi selanjutnya. Memasuki dekade kedua abad ke-20, dengan dibukanya sekolah ala Eropa bagi penduduk bumiputera, seperti HIS (sekolah dasar), MULO (sekolah menengah pertama), dan AMS (sekolah menengah atas), orang-orang terdidik dari keturunan priyayi-rendahan dan non-bangsawan makin besar jumlahnya. Berpijak pada peta-jalan yang telah dipancangkan generasi sebelumnya, angkatan baru kaum terdidik bergerak lebih maju dengan mencampakkan kata bangsawan yang mendahului kata pikiran. Seseorang menulis di *Sinar Djawa* (4 Maret 1914): "Dengan pergeseran waktu, telah muncul jenis bangsawan baru, yakni 'bangsawan pikiran'. Namun jika bangsawan pikiran ini hanyalah kelanjutan dari bangsawan usul, maka perubahan dan pergerakan tak akan pernah lahir."

Maka tanda baru segera dicipta, tanda yang sepenuhnya bebas dari imaji kebangsawanan, dan bekhidmat sepenuhnya pada pikiran. Tanda itu bernama 'kaum terpelajar' atau 'pemuda-pelajar', atau seringkali diungkapkan dalam bahwa Belanda. 'jong'. Dalam tanda dan peta-jalan seperti inilah generasi Sukarno, Hatta, Sjahrir dan Natsir dibesarkan.

Semua tokoh-tokoh ini lahir pada dekade pertama abad ke-20, dan semuanya tak bisa dikatakan sebagai anak-anak priyayi tinggi. Sukarno hanyalah anak priyayi rendahan yang mujur bisa masuk ELS karena pertolongan seorang guru Belanda; Hatta

adalah anak ulama-pedagang, yang beruntung bisa diterima di ELS karena kekayaan keluarganya; Sjahrir berlatar sedikit lebih baik, ayahnya seorang jaksa pribumi sehingga diterima di ELS; Keluarga Natsir lebih rendah lagi, ayahnya hanyalah seorang juru tulis kontelir, yang membuatnya hanya diterima di HIS. Alhasil, mereka bisa memastiki pendidikan sistem Eropa, berkat kegigihan generasi sebelumnya dalam menciprakan tanda; tanda yang membuat Belanda terpaksa mengendurkan persyaratau keruruan.

Tampak jelas, perjuangan merobohkan kolonialisme dan feodalisme dimulai dari kerja wacana. Tanpa kata, perjuangan kehilangan arah. Seperti itu jugalah generasi Sukarno. Praksis wacana lewat kelompok studi, kerja jurnalistik, dan kesasteraan menjadi tahap awal dari perjuangan mereka. Sejak 1924, Hatta terlibat aktif di Perhimpunan Indonesia berikut jurnalnya *Indonesia Merdeka*, seraya tak lupa menulis puisi-puisi patriotik.⁸ Pada 1926, Sukarno mendirikan Algemeene Studieclub berikut jurnalnya, *Indonesia Moeda*. Saat yang sama ia juga aktif sebagai editor malajah SI, *Bandera Islam* (1924-1927), bahkan selama pembuangan rak luput menulis naskah drama. Seperti Hatta, Sjahrir aktif di Perhimpunan Indonesia, dan kelak berperan penting dalam jurnal *Daulat Rakyat*. Ia pun dikenal sebagai pemain sandiwara dengan ertidisinya yang luas di bidang kesusasteraan. Natsir mengikuri beberapa kelompok diskusi dan terlibat intens di Persatuan Islam. Sejak 1929 ia mulai menekuni kerja jurnalistik sebagai ko-editor dari jurnal *Pembela Islam*.

Menulis adalah mencipta, dan mencipta selalu mensyaratkan membaca. Semakin banyak mencipta, semakin banyak membaca; semakin kaya bacaan, semakin kaya hasil penciptaan. Yang pertama mereka ciptakan adalah nama. Tanda pengenalan diri,

8 Dua yang terkenal, *Beranta Indera* dan *Hindania*

yang memberi kesadaran eksistensial. Jika tak suka dengan rumah kolonial, hal pertama yang harus dirobohkan adalah tanda-tanda yang diciptakannya. Jika Belanda menandai tanah-air ini sebagai Hindia-Belanda, yang diperjuangkan generasi Sukarno adalah memberi nama baru kepada tumpah darahnya. Semula ditemukan sebuah istilah dalam bahasa Belanda 'Indonesische', yang merujuk pada suatu geo-kultur di kawasan Austronesia yang berciri kepulauan dan bercorak kultur India. Maka pada 1922, perkumpulan pelajar Indonesia di Negeri Belanda, *Indische Vereeniging*, berubah menjadi *Indonesische Vereeniging*. Pada 1924, Sutomo mendirikan kelompok studi pertama pemudapelajar bumiputera dengan nama 'Indonesische Studieclub'. Dari sinilah kemerdekaan Indonesia menemukan jangkarnya.

Demikianlah, perjuangan menjadi Indonesia adalah perjuangan melawan kolonialisme dan feodalisme yang dimulai dengan memancarkan "pikiran" dan "keberaksaraan" sebagai kehormatan sosial. Dengan logika yang sama, manakala "pikiran" dan "keberaksaraan" tidak lagi dihormati, maka feodalisme menguat kembali.

Lima belas tahun setelah reformasi digulirkan, perkembangan demokrasi Indonesia ibarat mengenakan baju secara terbalik. Demokrasi yang mestinya dijiwai oleh meritokrasi justru menghidupkan feodalisme baru dalam bentuk nepotisme. Terdapat tanda-tanda bahwa 'pikiran' dan keberaksaraan tak lagi menjadi ukuran kehormatan. Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipra, karena kepintaran kembali dihinakan oleh 'kebangsawanan baru' berbasis uang dan keturunan. Penaklukan daya pikir dan daya literasi oleh pragmatisme dan banalisme membuat *mindset* kebangsaan kehilangan daya refleksivitasnya? Tanpa kemampuan refleksi diri, suatu bangsa kehilangan wahana pembelajaran untuk menakar, memperbaiki dan memperbaharui dirinya sendiri.

Tanpa kapasiras pembelajaran, bangsa Indonesia (secara keseluruhan) bergerak seperti *zombie*. Perrumbuhan penampilan fisiknya tak diikuti perkembangan rohaninya. Tampilan luar dari kemajuan peradaban modern segera kita tiru, tanpa penguasaan sistem pentalarannya. Sebagai pengekot yang baik dari perkembangan *fashion* dunia, kita sering merasa dan bergaya seperti bangsa maju. Padahal, secara substantif, tak ubahnya hak Peterpan yang mengalami fiksasi ke fase “kanak-kanak” (*jabiliyah*). Bahkan bisa lebih buruk lagi. Dalam kasus strategi kebudayaan, kita cenderung mempertahankan yang buruk dan membuang yang baik.

Pendaktian Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia makin nyaring terdengar di panggung pencitraan, tetapi nilai-nilai kontra-demokrasi menelikung lewat pintu belakang prosedur demokrasi, menikam demokrasi dari balik selimut. Perkembangan demokrasi bukan saja diikuti oleh penyemarakan modus korupsi dan kolusi, tetapi juga membawa arus balik nepotisme dalam bentuk penguatan dinasti politik.

Nepotisme, perlakuan istimewa tanpa rasionalitas terhadap suatu keluarga, menistakan jatidiri bangsa dan nilai-nilai demokrasi: karakter keindonesian dibentik oleh semangat anti-feodalisme dan anti-kolonialisisme. Nepotisme juga melanggar kesamaan hak warga negara yang menuntut prinsip-prinsip *fair play* dan meritokrasi dalam politik. Bahwa posisi seseorang tidak ditentukan oleh prinsip-prinsip hereditas melainkan oleh pengetahuan, pengalaman, kreativitas dan prestasinya.

Tak terbantahkan, bahwa seseorang yang terlahir dari dinasti politik mendapatkan keuntungan modal sosial dan kultural, berupa proses familiarisasi lebih dini dengan “bahasa” dan pergaulan politik. Mereka juga diuntungkan oleh pengenalan publik yang lebih baik karena asosianya dengan keluarga-keluarga

terkenal. Modal-modal inilah yang memudahkan mereka terjun ke dalam dunia politik.

Meski demikian, sejauh dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, fakta keberuntungan tersebut sama sekali tidak boleh menafikan prinsip-prinsip *fair play* dan meritokrasi. Siapapun, dari keluarga mana pun, harus sama-sama mengikuti proses pengkaderan dan menapaki jenjang posisi politik menurut ukuran prestasi.

Gelombang pasang nepotisme di Indonesia saat ini, baik tingkat pemerintahan pusat maupun daerah ditimbulkan oleh perpaduan dari unsur-unsur degeneratif dari bangsa ini. Selain mencerminkan peluluan daya pikir, nepotisme juga mencerminkan lemahnya internalisasi budaya demokrasi serta meluasnya kesenjangan sosial dalam masyarakat.⁹

Alhasil, gelombang pasang nepotisme harus dibaca dalam bentuk *symptomatic reading*. Secara kultural, nepotisme merupakan gambaran bahwa perubahan pada perangkat keras (prosedur) demokrasi, belum diikuti oleh perubahan pada perangkat lunak (budaya) demokrasi. Secara struktural, nepotisme merupakan pertanda bahwa demokrasi yang kita kembangkan hanyalah sebatas *fashion* pencitraan, ketimbang membawa perubahan fundamental secara substantif.

9 Adam Bellow, dalam *In Praise of Nepotisme* (2003), menengahi bahwa gejala nepotisme menurun ketika terjadi perluasan kelas menengah yang menciptakan kesengangan sosial, sebagai ikutan dari kebijakan reformasi kesejahteraan. Sebaliknya, nepotisme cenderung menguat ketika kelas menengah menipis yang meluaskan kesenjangan sosial, sebagai ikutan dari kebijakan rejim neoliberalisme. Temuan Bellow tersebut mendapatkan penguahan dari Paul Krugman dalam *The Conscience of A Liberal* (2007). Bahwa kesenjangan sosial yang lebar, menyusul dominasi pemerintahan konservatif yang mengusung neoliberalisme, merupakan katalis bagi gelombang pasang politik partisan dan politik pengkultusan.

Neporisme merupakan penampakan secara telanjang dari kegagalan kita mengembangkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Semuanya itu mengisyaratkan bahwa pencapaian demokrasi substantif memerlukan lebih dari sekadar perubahan prosedur-kelembagaan politik, melainkan perlu perubahan struktural herdimensi kebudayaan. Perhatian terhadap variabel budaya terutama karakter, sebagai bagian yang menentukan bagi perkembangan ekonomi dan politik suatu masyarakat/bangsa pernah mengalami musim seminya pada tahun 1940-an dan 1950-an. Para pengkaji budaya pada periode ini, dengan sederer nama besar seperti Margareth Mead, Ruth Benedict, David McClelland, Gabriel Almond, Sidney Verba, Lucian Pye dan Seymour Martin Lipset, memunculkan prasyarat nilai dan etos yang diperlukan untuk mengejar kemajuan bagi negara-negara yang terpuruk pasca Perang Dunia kedua. Namun, seiring dengan gemuruh laju developmentalisme yang menekankan pembangunan material, pengkajian tentang budaya mengalami musim kemarau pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Kegagalan pembangunan di sejumlah negara, setelah melewati pelbagai perubahan ekonomi dan politik, menghidupkan kembali minar dalam studi budaya sejak tahun 1980-an. Pada 1985, Lawrence Harrison dari Harvard Center for International Affairs menerbitkan buku, *Underdevelopment Is a State of Mind: The Latin American Case*, yang menunjukkan bahwa di kebanyakan negara Amerika Latin, budaya merupakan hambatan utama untuk berkembang.

Pentingnya variabel budaya dalam perkembangan ekonomi tampak dalam kasus negara-negara muhibudaya. Sekalipun semua kelompok etnis dihadapkan pada hambatan sosial-politik dan krisis ekonomi yang sama, namun sebagian kelompok lebih berhasil dibanding kelompok lainnya. Ambillah contoh keberhasilan minoritas etnis Tionghoa di Asia Tenggara, minoritas

Jepang di Brazil, Basque di Spanyol, serta Yahudi ke mana pun mereka bermigrasi.

Pentingnya variabel budaya dalam perkembangan politik ditunjukkan antara lain oleh riset yang dilakukan oleh Robert Putnam (1993) dan Ronald Inglehart (2000). Menurut Putnam, budaya adalah akar dari perbedaan-perbedaan yang besar antara Italia utara yang bercorak demokratis dan Italia Selatan yang bercorak otoritarian. Kesimpulan kedua ilmuwan tersebut mewarisi pemikiran rintisan dari Alexis de Tocqueville (1835; 1998), yang menyimpulkan bahwa apa yang membuat sistem politik Amerika berhasil adalah kecocokan budayanya dengan demokrasi.

Arus balik kesadaran akan pentingnya nilai budaya sebagai titian kemajuan ini bisa dijadikan koreksi terhadap kecenderungan untuk menjadikan politik dan ekonomi sebagai panglima. Secara latak, tanggungjawab untuk perubahan biasanya dialamatkan pada faktor-faktor semacam modernisasi, investasi, industrialisasi, partai politik, pemilihan umum, dan aspek-aspek prosedural kelembagaan politik lainnya.

Hal ini mengabaikan kenyataan bahwa reformasi sosial tidak akan pernah muncul hanya mengandalkan reformasi politik dan ekonomi, melainkan perlu berjejak pada reformasi sosial-budaya. Dalam sejarah kemajuan Eropa Barat dan Amerika Serikat. Jurgen Habermas (1990) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perubahan sosial-budaya (formasi kerangka institusional dan bentuk integrasi sosial baru) dengan laju perkembangan teknologi dan produksi, dimana perkembangan yang terakhir justru terjadi kemudian setelah adanya reformasi "sosial budaya"; bahwa revolusi industri di Eropa (abad 17-19) didahului oleh revolusi kebudayaan, *Renaissance* (abad 14-16). Di luar pengalaman Barat, kemajuan pesat yang dicapai

oleh perekonomian China saat ini pun didahului oleh revolusi kehttdayaan, apapun penilaian orang terhadap pelaksanaan dan implikasinya.

Reformasi sosial merupakan fungsi dari perubahan proses belajar social secara kolektif, yang membawa transformasi tata nilai, ide dan jalan hidup (*ways of life*). Dalam hal ini, minat pengetahuan (*knowledge interest*) serta aktivitas produksi ide (*ideas-producing activities*) sangat esensial dalam mengkonstruksikan identitas kolektif baru yang memungkinkan gerakan sosial mampu memelihara vitalitasnya.

Dalam ketiadaan platform politik yang jelas, gerakan kebudayaan menjadi alternatif menjaga kewarasan publik. Adalah melalui sastra, nyanyian dan seni yang lain—yang dibudayakan dalam masyarakat—yang bisa membuat gerakan dan cita-cita sosial bisa bertahan dalam memori kolektif. Tentang hal ini, pada dekade 1960-an, Herbert Marcuse menekankan dimensi estetik dari gerakan sosial pada masa itu, dengan menegaskan bahwa dalam seni, musik dan sastra lah gerakan-gerakan sosial mengingat dan menyimpan tradisi kritik dan perlawanan (Marcuse, 1969). Hal ini diperkuat oleh Richard Flacks dalam analisisnya tentang “tradisi kiri” Amerika, yang mengindikasikan bahwa gerakan sosial seringkali lebih penting sebagai actor budaya ketimbang politik (Flacks, 1988).

Tentang peuingnya gerakan kebudayaan sebagai cara menghadirkan kewarasan demokrasi, ada baiknya kita simak pernyataan Antonio Skármeta, Sastrawan Chile, “Jika modernitas bukan sekadar budaya efisiensi, dan jika demokrasi bukan hanya pesta pemilihan dan penjelimitan prosedur politik, akan selalu ada intelektual-sastrawan di seberang struktur politik—herhadapan dengan mereka yang memburu kekuasaan—di luar institusionalisasi akademik dan negara.

Akan selalu ada intelektual-sastrawan yang melontarkan pertanyaan jenaka, menafsirkan kembali kontroversi dengan memunculkannya lagi, untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang mungkin diabaikan agenda publik, atau digelapkan oleh media masih absah dipertanyakan” (Skármeta 1996: 48-49).

Penutup

Demokrasi yang sehat harus mengandung cita-cita kebudayaan; bahwa demokrasi bukan sekadar alat teknis belaka, tetapi juga suatu ekspresi pikiran, perasaan, dan kepercayaan sesuai dengan kepribadian dan cita-cita kekeluargaan-keadilan kebangsaan Indonesia; dengan cara mempertahankan nilai-nilai lama yang baik seraya mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik.

Cita-cita kedaulatan rakyat (demokrasi) memiliki jangkang yang kuat dalam sejarah politik Indonesia. Stimulusnya bersumber dari tradisi musyawarah desa; semangat kesederajatan, persaudaraan dan permusyawaratan Islam; dan gagasan emansipasi dan sosial-demokrasi Barat. Semangatnya dikobarkan oleh kehendak untuk membebaskan diri dari represi politik dan ekonomi kolonialisme-kapitalisme serta tekanan tradisi feodalisme.

Dengan mempertimbangkan tradisi gotong-royong masyarakat Indonesia, watak multikultural kebangsaan Indonesia, dan pengalaman keterjajahan sebagai perpanjangan dari kapitalisme dan individualisme, para pendiri bangsa menggagas demokrasi yang sejalan dengan alam pikiran dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Yakni suatu demokrasi permusyawaratan yang menyediakan wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial di bawah bimbingan hikmah-kebijaksanaan.

Di bawah semangat kekeluargaan, negara yang berkedaulatan rakyat itu mengadung cita-cita kerakyatan dan permusyawaratan. Dalam visi negara ini, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka 'musyawarah-mufakat'. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh diktator mayoritas (mayorokrasi) atau tirani minoritas eht politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warganegara tanpa pandang bulu.

Di bawah orientasi etis hikmah-kebijaksanaan, demokrasi direalisasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; serta nilai-nilai persatuan (kekeluargaan) dan keadilan. Demokrasi yang berdasarkan aras Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan para penyelenggara negara untuk memelihara budipekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Demokrasi yang berdasarkan nilai persatuan dan keadilan, dituntut untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Orientasi etis "hikmah-kebijaksanaan" juga mensyaratkan adanya wawasan pengetahuan yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah mereka yang mewakili rakyat bias merasakan, menyelami dan mengetahui apa yang dipikirkan rakyat untuk kemudian diambil keputusan yang hijaksana yang membawa republik ini pada keadaan yang lebih baik. Orientasi etis "hikmah-kebijaksanaan" juga mensyaratkan kearifan unruk dapat

menerima perbedaan secara positif dengan memuliakan apa yang disebut sebagai "kebajikan peradaban" (*the virtue of civility*); yakni rasa pertautan dan kemitraan di antara ragam perbedaan dan kesediaan untuk berbagi substansi bersama, melampaui kepentingan kelompok, untuk kemudian melunakkan dan menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat, tanpa pandang bulu, harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya; bukan dengan kepentingan kelompoknya.

Dengan bimbingan hikmah-kebijaksanaan, perilaku politik yang etis akan berkembang. Di lembaga perwakilan, wakil-wakil rakyat berdebat, bersikukuh dengan kebenaran pendapatnya namun dengan menjunjung etika politik dan semangat kekeluargaan. Rakyat pun akan melihat apa yang dilakukan wakil-wakilnya itu memang merepresentasikan kedaulatan rakyat, bukan memperlak rakyat untuk mencapai tujuannya. Dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warganegara yang bijaksana, dengan kekuatan daya pikir yang dapat memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya.

Singkat kata, demokrasi berkebudayaan dan budaya berdemokrasi harus terus diperkuat agar demokrasi bisa diperdalam dan diperluas demi penyehatan institusi demokrasi dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Rujukan

- Adam, A.B. *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)*. Ithaca: Cornell University (SEAP), 1995.
- De Tocqueville, A. *Democracy in America*. Hertfordshire: Wordsworth Classic of World Literature. New York: Vintage Books, 1998.
- Driyarkara, N., "Pemikiran Pancasila Sebelum 1965", dalam A. Sudiarja, et.al. (ed.) *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, Jakarta: Kompas, Gramedia, Kanisius, 2006.
- Flacks, R., *Making History*, New York: Columbia University Press, 1988.
- Furedi, F., *Where Have All the Intellectuals Gone?* London: Continuum, 2006.
- Geertz, C. *Old Societies*, New States. New York: The Free Press, 1963.
- Geertz, H. "Indonesian Cultures and Communities". Dalam Ruth T. McVey (Ed.), *Indonesia*, rev. ed., Survey of World Cultures, No. 12. New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University; by arrangement with HRAF Press. 1967.
- Habermas, J., *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Hatta, M., *Demokrasi Kita*. Jakarta: *Pandji Masyarakat*, 1960.
- Hatta, M. *Kebangsaan dan Kerakyatan: Karya Lengkap Bung Hatta*, Emil Salim (Ketua Dewan Editor), Vol. 1, Jakarta: LP3ES, 1998.

- Horrison, L., *Underdevelopment Is a State of Mind: The Latin American Case*, Maryland: Madison Books, 1885.
- Latif, Y., *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lombard, D. *Nusa Jawa: Silang Budaya. Vol. 1 & 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Malaka, T. *Merdeka 100%*. Tangerang: Marjin Kiri, 2005.
- Madjid, N. *Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Skármeta, A., "The Book Show", dalam W.H. Gass & L. Cuoco (ed.), *The Writer in Politics*, Illinois: Southern Illinois University, 1996.
- Soekarno. *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, jilid 1, jilid 2, jilid 3 & 4*, Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1958.
- Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi, Vol. 1*. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1965.
- Reeve, D., *Golkar, Sejarah yang Hilang*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition*. The Hague: Van Hoeve, 1956.

Indonesia, Islam, dan Pusat Peradaban Dunia

Muhammad Rizal



Sejarah bergulir begitu panjang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Ada banyak proses yang terjadi. Sejarah masa lampau telah mengajarkan para pendiri bangsa dalam mengonsep tatanan negara yang paripurna.

Internalisasi nilai-nilai kehidupan dan perpaduan kebudayaan adalah kunci utama peradaban ini dimulai. Merangkul perbedaan menjadi suatu cinta yang menyatukan. Hidup dalam persatuan, penuh empati dan kepercayaan. Itulah Indonesia yang terwujud melalui anugerah yang teramat indah.

Sejarah mencatat bahwa para pendiri bangsa ini sebagian besar lahir dari kalangan para cendekiawan muslim. Namun seiring berjalannya waktu, pemutarbalikan fakta sering dilakukan. Politik

adu domba yang dilakukan kolonial Belanda pada masanya telah mampu menghancurkan kejayaan Islam di Indonesia. Fitnah dan upaya-upaya pengkerdilan peranan Islam selalu dilakukan ketika agama ini telah membawa bibit perdamaian di tanah nusantara.

Hamka pernah menulis di bukunya, *"marilah kita jadikan saja segala kejadian itu, menjadi kekayaan sejarah kita, dan jangan dicoba memutar balikkan keadaan, agar kokohkan kesatuan bangsa Indonesia di bawah lambaian merah putih. Memang di zaman jahiliyah kita bermusuhan, kita berdendam, kita tidak bersatu. Islam kemudian adalah sebagai penanam pertama jiwa persatuan. Dan kompeni belanda kembali memakai alat perpecahannya, untuk menguatkan kekuasaan."*

Tulisan itu menjelaskan tentang keprihatinan Buya Hamka melihat pandangan sinis para anak bangsa terhadap Islam. Budaya bangsa sudah dipersepsikan sebagai budaya Hindu-Buddha. Hukum adat dan warisan kolonial dianggap pemersatu, dan agama Islam dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Propaganda yang sangat licik ini telah menipu rakyat Indonesia dan bahkan masih terasa dampaknya sampai sekarang.

Seorang ilmuwan Islam Prof. S.M Naquib al-Attas, juga menyatakan hal yang sama dengan pandangan Buya Hamka tentang upaya-upaya pengkerdilan peranan Islam oleh sejarawan Barat dalam sejarah peradaban Nusantara.

"Banyak sarjana yang telah mengatakan bahwa Islam itu tidak meresap ke dalam struktur masyarakat melayu-indonesia, hanya sedikit jejaknya di atas jasad melayu, laksana pelintur di atas kayu, yang andaikan dikorek sedikit akan terkupas menonjolkan kehinduannya, kebuddhaannya, dan animismenya. Namun menurut saya, paham demikian itu tidak benar dan hanya berdasarkan wawasan sempit yang kurang dalam lagi hanya merupakan angan-angan belaka" (S.M Naquib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, hal 41)

Dalam berbagai penelitiannya, al-Attas telah mengungkapkan bahwa kedatangan Islam di wilayah kepulauan Indonesia ini adalah hal yang teramat penting dalam sejarah peradaban bangsa. Transformasi bahasa Melayu-Indonesia menjadi bahasa pengantar kepulauan, dan merupakan bahasa muslim terbesar ke-2 yang digunakan lebih dari 100 juta jiwa.

Islam pada akhirnya mampu menggerakkan ke arah kesadaran nasional. Yang menghilangkan budaya kasta, perbudakan, dan kebiasaan sekulerisme yang telah memecah belah pemikiran anak bangsa. Dan pada akhirnya mempersatukan Indonesia di bawah peradaban yang mencintai kedamaian.

Berbagai pandangan yang datang seolah terus menafikan keberadaan Islam. Upaya pemisahan agama dengan kenegaraan terus dilakukan. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam mulai dipengaruhi dengan paham sekulerisme, paham di mana urusan negara berbeda dengan urusan agama. Padahal sejatinya negeri ini tidak akan berdiri jika tidak dibangun dengan nilai-nilai keislaman.

Dalam sistem pendidikan juga terjadi hal yang demikian. Pengajaran tentang Pancasila tidak pernah dikaitkan dengan nilai keislaman. Perspektif sekuler yang secara nyata diajarkan untuk memengaruhi sejarah yang sebenarnya. Islam membawa banyak perubahan untuk tatanan kehidupan bangsa. Paham kasta yang dianut dalam sistem kerajaan diubah menjadi paham persamaan derajat. Bahwa di mata Allah semua manusia itu sama. Suara mayoritas bukan lagi menjadi acuan, namun demokrasi sosial Islam yang mengedepankan semangat keadilan adalah *role model* yang harus dilakukan.

Paham kebangsawanan yang berbasis uang dan keturunan (nepotisme), menghinakan kepintaran dan intelegensi seseorang. Daya fikir yang mulai ditaklukkan, maka refleksi diri melalui nilai-

nilai keislaman harus selalu dilakukan sebagai media pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan.

Dalam sebuah diskusi bersama Yudi Latif yang merupakan Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, beliau mengatakan bahwa "Indonesia suatu saat akan menjadi pusat peradaban dunia. dengan berbagai latar belakang dan fakta sejarah yang ada membuktikan bahwa Indonesia sejak awal sudah dikonsepsikan sebagai pusat peradaban Islam berikutnya.

Dimulai dari dasar negara "Pancasila", yang di dalam kelima silanya disusun berdasarkan butir-butir perjanjian Hudaibiyah ketika pembentukan Negara Islam Madinah di zaman Rasulullah. Situasi dan kondisi yang persis sama dengan Indonesia saat itu, di mana Madinah dihuni oleh berbagai suku dan golongan, berbagai perbedaan adat dan keyakinan. Namun begitulah keagungan Rasul yang mampu menyatukan semua perbedaan tersebut dengan sebuah perjanjian damai secara bersama. Tidak ada pihak yang dizalimi ataupun dirugikan."

Hal inilah yang kemudian dimunculkan di Indonesia, para tokoh negarawan pendiri bangsa belajar dari sejarah masa lampau. Islam yang diyakini mampu mendamaikan semua perbedaan kemudian ditransformasikan menjadi dasar negara. Sejarah pun membuktikan bahwa tidak ada perdebatan yang berarti ketika proses pembentukan dasar negara berlangsung.

Hal yang harus kita perhatikan bersama sekarang adalah bahwa nilai-nilai yang sudah dikonsepsikan menjadi dasar negara Indonesia, hari ini sudah mulai memudar. Bukan karena konsepnya yang salah, namun kepribadian generasi hari ini yang sudah mulai lemah. Arah peradaban dunia yang kian membutuhkan mata, sementara di belakang sana ada segolongan orang yang bertepuk tangan melihat generasi muda Indonesia yang semakin hari semakin tak berpendirian.

Turki dan Malaysia, dua negara Islam yang saat ini sedang menapaki puncak kejayaannya. Menguasai kemapanan ekonomi dan mampu berdiri di atas dua kakinya sendiri. Politik dijadikan sarana untuk berkomunikasi. Perbedaan menjadikan mereka teguh dalam bersikap. Kemandirian yang dibangun bukan atas dasar kepentingan pribadi. Namun untuk kepentingan bersama demi mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera.

Dua negara ini telah membuktikan bahwa agama Islam bukanlah agama yang membuat negeri mereka terpecah belah, malahan sebaliknya. Menjunjung tinggi sebuah perdamaian, saling melengkapi demi tercapainya tujuan bersama.

Polemik Turki yang begitu panjang, akhirnya dapat diselesaikan dengan kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Turki mampu tampil sebagai negara yang memiliki kekuatan perkembangan ekonomi yang mengagumkan, Erdogan berhasil meningkatkan ekonominya sampai 3 kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Dengan ini Erdogan dapat membuktikan bahwa partai Islam dapat hidup berdampingan dengan konstitusi sekuler negara Turki, dan membuat sejarah baru yang mampu menyaingi capaian rezim sekuler sebelumnya (Kemal Al Atatürk).

Begitupun dengan Malaysia yang meletakkan nilai-nilai keislaman sebagai falsafah pembangunannya, penguat sistem pendidikan dan infrastruktur, membangun keahlian dan pendidikan sepanjang hayat, meningkatkan moral, budaya, dan etika. Dan hal ini merupakan salah satu poin dari 4 agenda transformasi yang dilakukan Malaysia yang akhirnya mengantarkannya menjadi negara industri baru. Sejarah akan selalu mengajarkan kita.

Kepemimpinan Profetik untuk Indonesia

Evi Dwi Yanti



Setiap umat muslim adalah pemimpin. Oleh karena itu, setiap pemimpin mempunyai tugas sebagai pembebas dan pembangun peradaban. Sebagai pembebas peradaban, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa, "Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya di hari kiamat kelak."

Hadis tersebut menjadi salah satu landasan mengapa akhirnya kita harus yakin bahwa akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dan berkarakter jika dibina untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Kita tidak akan bisa berubah kalau kita belum menyadari bahwa kita adalah pemimpin. Air mata, keringat, dan pengorbanan kita adalah bukti bahwa kita adalah pemimpin.

Tugas seorang pemimpin adalah melakukan pembebasan dari segala penindasan. Kesadaran diri akan membuat kita berkorban sebagai seorang pemimpin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa, "Allah telah mengirim kami untuk mengeluarkan siapa yang Dia kehendaki dan penghambaan kepada hamba."

Sebagai pembangun peradaban, umat Islam seharusnya bisa menjadi pemimpin dan mengamalkan kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik dapat dipelajari dari kisah kepemimpinan Nabi-Nabi dalam Al-Quran.

Bung Karno pernah berkata, "Jangan sampai kita hanya mendapat abu sejarahnya saja tetapi api sejarahnya kepemimpinan nabi-nabi lah yang harus kita dapat dan kita terapkan dalam proses membangun Indonesia yang lebih baik dan bermartabat ini."

Menurut konsep Kuntowijoyo (yang menaburkan kandungan dari surat Ali Imran: 110), kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang membawa misi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Kepemimpinan profetik yang pertama adalah *Ta'muruna bil ma'ruf* (misi humanisasi), yaitu misi yang memanusiakan manusia, mengangkat harkat hidup manusia, dan menjadikan manusia bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. Kepemimpinan profetik yang kedua adalah *Tanhauna 'anil munkar* (misi liberasi), yaitu misi membebaskan manusia dari belenggu keterpurukan dan ketertindasan.

Kepemimpinan profetik yang ketiga adalah *Tu'minna billah* (misi transendensi), yaitu manifestasi dari misi humanisasi dan liberasi yang diartikan sebagai kesadaran ilahiyah yang mampu menggerakkan hati dan bersiap ikhlas terhadap segala yang telah dilakukan.

Kriteria pertama, seorang pemimpin profetik adalah meyakini akan peran dan fungsinya sebagai khalifah di muka

bumi Allah. Sang pemimpin harus disertai visi dan misi ke-Ilahi-an (Ketuhanan) yang kuat dalam menjalankan amanahnya untttk melayani dan membenahi masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang “*Baldatun Thayyiban wa Rabbun Ghafur.*”

Tanpa visi dan misi ke-Ilahi-an yang kuat, keberhasilan seorang pemimpin adalah keberhasilan yang semti yang tidak akan menghasilkan pengaruh apaptin kepada generasi penerusnya.

Kriteria kedua, seorang pemimpin profetik harus mempunyai ilmu. Ilmu tersebut merupakan ilmu pengetahuan yang bisa menjadikan dirinya mampu memutuskan kebijakan yang tepat dan sejalan dengan akal sehat dan syariat Islam.

Pemimpin yang memiliki kekuatan ilmu akan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan cerdas dan bijaksana yang melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Sedangkan seorang yang lemah akalnya pasti tidak akan mamptu menyelesaikan urusan rakyatnya.

Kriteria ketiga, seorang pemimpin profetik harus memiliki kekuatan ketika ia memegang amanah kepemimpinan. Kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang yang lemah.

Rasulullah pernah menolak permintaan Abu Dzar al Ghilari yang menginginkan sebuah kekuasaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abu Dzar berkata, “Aku berkata kepada Rasulullah SAW, “*Ya Rasulullah, tidaklah engkau mengangkatku sebagai penguasa? Rasulullah menjawab “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah. Padahal kekuasaan adalah amanah yang kelak hari akhir hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan diserahkan kepada orang yang mampu memikulnya.*”

Keempat, seorang pemimpin profetik harus menjadi orang yang amanah. Orang yang amanah adalah orang yang memiliki

kredibilitas dan integritas tinggi sehingga dipercaya oleh masyarakatnya. Seorang pemimpin yang amanah tidak akan goyah oleh godaan harta, tahta, dan nafsu seksual dalam menjalankan amanah kepemimpinannya. Pemimpin yang amanah tetap akan amanah dalam segala kondisi hingga mampu berjaya di dunia dan akhirat.

Kelima, seorang pemimpin profetik memiliki daya regenerasi, yaitu seorang yang mampu mewariskan sifat-sifat kepemimpinannya kepada anak cucunya. Hal tersebut terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, *“Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhananya dengan beberapa kalimat lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman: sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata: dan juga dari anak cucuku? Allah berfirman: benar, tetapi janji Ku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim.”*

Kepemimpinan profetik dibentuk melalui proses sebagai berikut berikut:

- Proses pembacaan (penguasaan informasi berupa konsep, teori, dan paradigma dasar)
- Proses penyucian (purifikasi). Proses pembersihan yang diisyaratkan dalam menetralisasi pemikiran, perasaan, dan moral dari muatan-muatan negatif.
- Proses pengajaran (penguasaan epistemologi dan metodologi ilmu pengetahuan *sciences* dan kebijaksanaan “wisdom”).
- Proses penguasaan informasi dan masalah-masalah baru dan dinamis.

Hanya hamba Allah yang memiliki kesadaran akan peran dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, berilmu, kuat, amanah, dan tidak zalim lah yang akan memegang janji Allah. Ia memiliki kontrak kepemimpinan dengan Allah beserta makhluknya.

Dengan memahami konsep kepemimpinan profetik tersebut, para pemuda Islam diharapkan bisa mempersiapkan dirinya sedari dini untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia, dunia, dan Islam.

Sayyid Quthb pernah berkata dengan penuh keyakinan bahwa "Islam adalah masa depan" atau "masa depan di tangan Islam." Sejarah mengajarkan bahwa cita-cita yang agung haruslah dibawa oleh manusia yang agung. Sebuah misi besar haruslah diemban oleh manusia yang besar. Sebuah beban amanat yang berat haruslah dipikul oleh manusia yang kuat, dan sekuat pedang yang tajam hanya akan berguna jika herada dalam genggamannya seorang pahlawan pemberani. Sebuah peradaban hanya dapat dibangun di atas altar sejarah oleh manusia-manusia peradaban.

Semoga dengan kepemimpinan profetik tersebut bisa membawa Indonesia, dunia, dan Islam menjadi lebih baik dan bermartabat. Tanpa perlu berdebat siapa orangnya dan saling menentrik, maka mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menjadi manusia agung tersebut.

Islam Moderat, Kekuatan Indonesia Membangun Dunia

Muhammad Suzianto



Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar menjadi harapan dunia (terutama umat muslim) untuk bisa berkontribusi dalam menata kehidupan global yang saat ini semakin kacau. Kata “dunia yang damai” menjadi sebuah mimpi yang semakin hari semakin susah diwujudkan.

Perang berkobar di mana-mana, termasuk di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Suriah, Afganistan, Iraq, dan yang terbaru adalah konflik di Yaman. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia?

Sebagai salah satu negara besar, sudah menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam menghadapi segala problematika yang dihadapi dunia, terutama dunia Islam.

Pasca perang dingin, Samuel Huntington memprediksi akan terjadi benturan peradaban (*clash of civilization*) antara dunia timur dan barat. Apa yang disampaikan Huntington kini terbukti, timur yang merujuk pada dunia Islam saat ini menjadi sorotan dunia, banyak negara berpenduduk muslim herada dalam kecamuk konflik atau bahkan perang.

Selain dari konflik yang terjadi di negara berpenduduk Islam, adanya kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam (terorisme) dan fenomena islamphobia semakin menguatkan tesis Huntington. Menyikapi fenomena ini, segala yang terjadi dan memiliki kaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia Islam, Indonesia seharusnya herada dalam barisan depan dalam menuntaskan permasalahan tersebut.

Harus disadari, terkait kecenderungan konflik yang terjadi dalam dunia Islam posisi Indonesia sangat menarik, Indonesia relatif lebih srabil, padahal heterogenitas di Indonesia sangatlah tinggi termasuk dalam hal keyakinan beragama. Menurut hemat penulis, pencapaian ini tidak lepas dari kondisi mayoritas muslim di Indonesia yang bersikap dan berperilaku moderat yang berupaya menetapkan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Islam moderat inilah yang harusnya menjadi kekayaan dan kekuatan Indonesia untuk disalurkan kepada umat muslim di dunia, terutama dalam upaya mewujudkan perdamaian global. Islam moderat sebagaimana pemikiran salah satu guru bangsa dan juga presiden keempat kita, KH. Abdurahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, menjelaskan bahwa ajaran Islam hendaknya dipahami secara kontekstual tidak terbatas hanya dipahami secara tekstual saja.

Pemahaman ini sangat penting bagi upaya mewujudkan sikap saling memahami dan saling menghormati antartumat

berkeyakinan serta menciptakan perdamaian di tengah-tengah mereka. Dalam banyak kasus konflik keagamaan seringkali diawali dari penafsiran ajaran agama yang terlalu kaku yang hanya merujuk pada teks-teks keagamaan saja, sehingga dengan mudahnya akan menyalahkan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda.

Yang patut menjadi perhatian adalah konflik yang terkait dengan dunia Islam sesungguhnya sangat membutuhkan peran dan kontribusi muslim moderat Indonesia, keberadaan pihak moderat dapat menjadi “penghubung” antara dua belah pihak yang berbeda pandangan dan berkecenderungan untuk dilanjutkan dalam bentuk konflik, baik antar sesama muslim maupun antara muslim dan non-muslim (barat).

Peran penghubung tidak terbatas dilakukan langsung oleh negara (*state actor*). Dalam ilmu hubungan internasional kontemporer aktor selain negara (*non state actor*) seperti individu, kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta yang lainnya dapat berperan sebagai aktor penting dalam ranah global.

Selain berperan menjadi penghubung, dalam menghadapi kekacauan global yang terkait dengan dunia Islam, dengan bermodalkan kondisi sosial kemasyarakatan dalam negeri yang relatif lebih stabil, Indonesia dapat berperan memulihkan citra Islam di mata dunia, terutama melalui diplomasi publik.

Diplomasi publik merupakan diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap masyarakat internasional guna mencapai kepentingannya. Sebagai upaya preventif-persuasif, atau dapat berperan penting sebagai penengah/mediator untuk menemukan solusi dari setiap konflik yang melibatkan kaum muslim melalui jalur diplomasi keagamaan (*faith-based diplomacy*) sebagai bentuk upaya solutif.

Terkait diplomasi keagamaan, Douglas Johnston (seorang pakar diplomasi keagamaan) mendefinisikannya sebagai penggabungan dari kepentingan keagamaan dalam praktik politik internasional. Agama menjadi bagian dari solusi kebuntuan konflik identitas dalam lingkup geopolitik masa kini.

Merujuk pada definisi yang disampaikan Johnston, setiap konflik antarmuslim sejatinya diakibatkan kebuntuan konflik identitas yang umumnya disebabkan rendahnya rasa toleransi antar sesama muslim. Mereka (kelompok muslim yang bertikai) belum bisa memaknai perbedaan sebagai suatu rahmat yang diberikan tuhan (*ikhhtilafu umati rahmah*).

Kita tidak perlu pesimis dengan kemungkinan Indonesia memainkan peran ini. Diplomasi keagamaan sudah dilakukan oleh muslim Indonesia, salah satunya yang sudah dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menyikapi konflik di Afganistan.

PBNU berperan aktif dalam menengahi konflik yang terjadi di Afganistan, konflik antar etnik berkepanjangan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sikap moderat PBNU bisa diterima pihak yang bertikai dan mampu memberi dampak yang cukup berarti, salah satunya adalah ketika berhasil membebaskan 27 Warga Negara Korea selatan yang disandera Taliban.

Selain itu, mereka juga mampu mempertemukan pihak-pihak yang bertikai guna mencari solusi konflik, bahkan bisa meyakinkan Taliban untuk mau duduk bersama di meja perundingan yang sebelumnya menolak segala bentuk perundingan. Serta tumbuhnya harapan baru bagi masa depan muslim Afganistan dengan berdirinya Nahdlatul Ulama Afganistan (NUA) yang terdiri dari ulama-ulama berbagai kelompok yang ada di Afganistan yang mulai menyadari pentingnya persatuan dan persaudaraan.

Diplomasi keagamaan yang dilakukan PBNU (dan juga kelompok muslim lainnya) merupakan bukti bahwa muslim Indonesia bisa diterima dan bahkan dipercaya umat muslim di belahan dunia lain. Ini merupakan sebuah kemajuan yang harus didukung agar Islam moderat yang ada di Indonesia menjadi solusi bagi permasalahan global saat ini yang terkait dengan Islam, baik Islam sebagai sebuah ajaran maupun sebagai sebuah identitas.

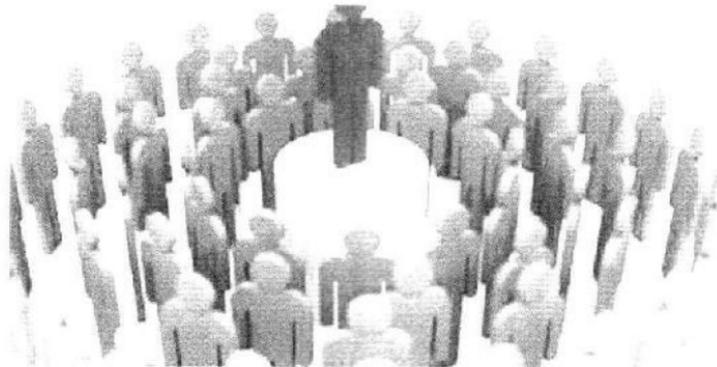
Dalam beberapa kasus *faith-based diplomacy* yang dilakukan muslim Indonesia telah membuahkan hasil yang menggembirakan, yang diakui masyarakat dunia termasuk dari pihak non muslim sekalipun. Peluang ini (*faith-based diplomacy*) harus dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya mewujudkan dunia Islam yang damai dan mampu berkembang bersama demi kesejahteraan muslim dan kejayaan Islam.

Diplomasi keagamaan yang dilakukan muslim Indonesia dapat menjadi sumbangan besar dalam membangun peradaban Islam. Tidaklah mungkin umat Islam dapat membangun peradaban bila sesama muslim terus bertikai dan meminggirkan rasa persatuan dan persaudaraan.

Bangsa Indonesia harus kembali berperan aktif dalam upaya membangun dunia. Bila dulu di awal berdirinya negara Indonesia semangat yang ditularkan adalah semangat anti kolonialisme dan imperialism, maka saat ini semangat yang harus ditularkan (terutama kepada saudara muslim yang sedang bertikai) adalah semangat kebersamaan dan persatuan dan hidup berdampingan secara damai. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan?

Pemimpin yang Layak Dipilih

Abdullah Al-Hazmy



Memilih seorang pemimpin adalah sesuatu yang sering sekali kita hadapi, baik memilih dengan cara musyawarah maupun secara pemungutan suara. Acap kali pemilihan pemimpin menyebabkan friksi antar pendukung golongan yang banyak berbicara tentang baik buruk sang calon, calon yang didukung maupun calon dari pihak lawan.

Tak ada masalah dengan adanya tendensi, karena setiap orang punya pilihan, asalkan tendensi itu beralasan kuat. Pembahasan tentang memilih pemimpin telah banyak diulas di dalam kitab kita yang agung, al-Quran. Dalam kitab agung itu telah tertulis petunjuk dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam upaya menjawab “Siapakah pemimpin yang layak kita pilih?”

Dari banyak ayat al-Quran yang berbicara tentang kepemimpinan, sedikitnya dua sifat pokok yang harus disandang oleh seorang yang memikul suatu jabatan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Kedua hal itu hendaknya diperhatikan dalam menentukan pilihan pemimpin, baik organisasi yang notabene bergerak di bidang keislaman maupun yang bukan, serta pemerintahan.

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya,” demikian ucapan putri Nabi Syu'aib yang dibenarkan dan diabadikan dalam al-Quran surat al-Qashash ayat 26.

Konsideran pengangkatan Yusuf sebagai Kepala Badan Logistik Kerajaan Mesir yang disampaikan oleh rajanya dan diabadikan pula oleh al-Quran adalah: *“Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami.”* (Q.S Yusuf: 54). Tak ada masalah dengan pengangkatan Yusuf di usianya yang masih belia, dia mendapatkan kepercayaan besar dari raja Mesir bukan karena ia tampan namun karena ia punya kompetensi dan kredibilitas yang luar biasa meski usianya masih muda.

Ketika Abu Bakar ra. menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai ketua panitia pengumpulan mushaf, alasannya pun tidak jauh berbeda: *“Engkau seorang pemuda (kuat lagi bersemangat) dan telah dipercaya oleh Rasul menulis wahyu.”* Bahkan Allah SWT memilih Jibril sebagai pembawa wahyunya, antara lain, karena malaikat ini memiliki sifat kuat lagi terpercaya. *“Sesungguhnya al-Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.”* (Q.S At-Takwir:19-21).

Salah satu ari amanat menurut Rasulullah adalah kemampuan atau keahlian dalam jabatan yang akan dipangku: "Amanat terabaikan dan kehancuran akan tiba, bila jabatan diserahkan pada yang tidak mampu," demikian lebih kurang sabda Nabi. Sahabat Abu Dzarr, pernah dinasihati oleh Nabi SAW: *"Wahai Abu Dzarr, aku melihat engkau lemah. Aku suka untukmu apa aku suka untuk diriku. Karena itu, jangan memimpin (walau) dua orang dan jangan pula menjadi wali bagi harta anak yatim."* Karena dikawatirkan kelemahan itu akan mengurangi kepemimpinannya, sehingga suatu wadah organisasi maupun pemerintahan butuh pemimpin yang kuat.

Kuat di sini bisa kita tafsirkan dalam beberapa hal. Bisa kuat secara fisik, kuat secara fisik tidak hanya diartikan dengan pemimpin yang memiliki badan besar, berotor, dan pandai bertarung. Bukankah Jenderal Soedirman masih bisa memimpin perang meski herada di atas tandu yang berdiri di atas pikulan para pastukannya. Bukankah Abdurrahman Wahid masih bisa memimpin Indonesia meski memiliki gangguan penglihatan. Kuat fisik di sini berarti seseorang masih mampu secara fisik untuk memimpin orang-orangnya meski dalam keterbatasan, tidak ada standar bakunya memang.

Kuat juga bisa ditafsirkan dengan kekuatan pemikiran atau kepandaian. Pemimpin yang memiliki kekuatan pikir tentu saja akan lebih bisa membawa banyak perbaikan dengan sistem maupun kebijakan yang strategis. Meski tidak mutlak, namun hampir semua pemimpin pasti dituntut memiliki tingkat pemikiran maupun intelektual yang tinggi.

Kuat juga bisa diartikan kuat secara ekonomi, bukan berarti memiliki banyak uang untuk menyuap, namun menjadi pemimpin acap kali menuntut diri kira untuk berkorban harta benda demi kemaslah.uan bersama.

Syarat yang kedua adalah bisa dipercaya. Bicara masalah kepercayaan maka kita akan berbicara masalah amanat. “Apabila amanat diabaikan, maka nantikanlah kiamat (kehancuran). Mengabaikannya adalah menyerahkan tanggung jawab kepada seseorang yang tidak wajar memikulnya,” demikian salah satu jabanar kata amanat.

Dengan kata lain kepercayaan di sini merujuk pada kejujuran seorang pemimpin serta merujuk pada kredibilitas pribadi seorang pemimpin. Yang artinya, seorang pemimpin tidak bisa dipilih secara sembarangan, namun harus benar-benar selektif. Karena kesalahan memilih pemimpin bisa sangat berakibat fatal sekali. Tidak mudah terhimpun dalam diri seseorang kedua sifat tersebut secara sempurna, tetapi walaupun harus memilih, maka pilihlah yang paling sedikit kekurangannya, dan lakukan pilihan setelah upaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik.

Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang dua orang yang dicalonkan untuk memimpin satu pasukan—yang pertama kuat tapi bergelimang dalam dosa, dan yang kedua baik keberagamaannya namun lemah—beliau menjawab: “Orang pertama, dosanya dipikulnya sendiri sedangkan kekuatannya mendukung kepentingan umat, dan orang kedua keberagamaannya untuk dirinya, sedangkan kelemahannya menjadi petaka bagi yang dipimpin.”

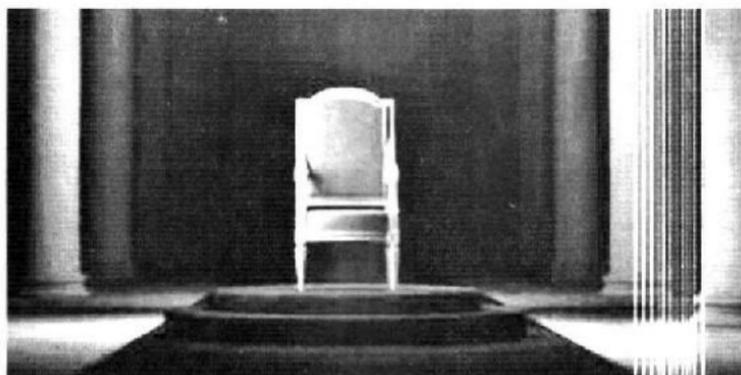
Inilah pertimbangan dalam menetapkan pilihan. Menurut saya pribadi tak ada masalah misalkan ada seorang pemimpin dari kaum non-muslim asalkan yang bersangkutan memang memiliki kompetensi dan kekuatan untuk memimpin, mengapa tidak. Karena bicara soal pemimpin maka kita tidak hanya bicara masalah latar belakang pemimpinnya saja, namun kita juga harus bisa memosisikan pemimpin itu di tengah-tengah masyarakat yang ia pimpin.

Setiap dari kita punya kriteria dan punya pertimbangan dalam memilih pemimpin. Namun, terkadang lanatik terhadap pemimpin bukanlah sesuatu hal yang baik, bukankah itu akan membuat kita buta terhadap pemimpin-pemimpin lain yang boleh jadi lebih baik daripada pilihan kita.

Anda boleh menetapkan pertimbangan Anda, tapi ingatlah selalu sabda Rasul: "Siapa yang mengangkat seseorang untuk satu jabatan yang berkaitan dengan urusan masyarakat sedangkan ia mengetahui ada yang lebih tepat, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum Muslim."

Jabatan Bukanlah Tujuan

Deris Yudistira



Politik, entah sejak kapan pertama kali saya mulai mengenal kata itu dan entah bagaimana kata itu kurang bersahabat di benak saya. Mendengar kata politik seperti mendengar sesuatu kata yang bermakna kotor. Sedari kecil kita memang tidak mempelajari politik, tetapi lingkunganlah yang memberi sedikit wawasan mengenainya, akan tetapi sepertinya lebih banyak asupan negatif yang kita cerna mengenai politik, daripada asupan positifnya.

Dahulu saya tak begitu tahu mengenai maksud dan fungsi politik yang sebenarnya, yang saya tahu politik itu hanyalah suatu hal yang kotor, licik di mana orang-orang saling memperebutkan

niat ingin belajar dan memenuhi tanggung jawab. Tiada niatan lain selain itu.

Saya tidak pernah memihak siapapun dan tidak ditunggangi golongan manapun yang memiliki kepentingan terhadapnya. Walaupun riuh bisikan masuk kedua telinga ini, namun semuanya begitu samar dan tak ada yang bisa saya percaya. Saya hanya bisa percaya jika logika dan nurani saya berkata 'Ya' itu adalah kebenaran yang harus di perjuangkan.

Tak terlalu banyak berkata, lebih banyak terdiam untuk mengamati situasi. Kata demi kata yang mereka ucapkan dan juga gerak-gerik mereka. Saya memang orang yang polos tidak terlalu banyak mengerti mengenai dunia politik. Namun saya bisa merasakan bagaimana setiap orang yang hadir di dalam ruangan datang dengan berbagai kepentingannya masing-masing, dan strategi yang telah mereka susun sebelumnya. Miris sekali mendengar mereka berbicara sembari membentak dengan kata-kata yang kurang pantas, yang sengaja mereka lontarkan demi mempertahankan argumennya dan menjatuhkan mental lawan politiknya.

Ternyata tak cukup sampai di sana, ketika salah satu kubu merasa bahwa mereka tidak dapat mempertahankan argumennya, suaranya, kepentingannya, sidang pun semakin memanas. Tiba-tiba datang segerombolan orang yang bukan peserta sidang datang dan mengacaukan ruang sidang. Bukan main ketika ruang sidang seolah disulap bak arena tempur, kursi melayang, piring, *microphone* semua peralatan hancur dan sampai ada yang terluka.

Apakah ini pantas dinamakan musyawarah, ketika seharusnya kita duduk bersama saling memberikan pendapat untuk mencari solusi demi menegakkan kebenaran, keadilan, dan keputusan yang terbaik. Apakah jabatan menjadi segalanya dalam hidup, sampai segala cara kita halalkan walaupun harus menumpahkan

darah saudara kita sendiri. Di manakah nurani kita, di manakah logika seorang mahasiswa, di manakah birokrat-birokrat yang arif dan bijaksana.

Saya tidak setuju ketika ada seseorang yang berbicara bahwa dalam politik itu, jika kita tidak membunuh maka kita akan terbunuh. Jikalau upaya saling menjatuhkan itu sudah mendarah daging di dalam politik hingga menjadi sebuah budaya, maka saya kira kita jangan menjadi bebek yang ikut-ikutan melakukan budaya kotor tersebut. Politik ditujukan untuk menciptakan hidup yang baik, maka bertusahalah sebaik mungkin walaupun manusia memang tidak ada yang sempurna. Kita boleh membawa kepentingan di dalam politik, tetapi hanya kepentingan untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan umat. Jikalau politik harus menggunakan strategi, gunakanlah strategi yang sehat. Bukan menghalalkan segala cara. Jikalau nanti kita dijatuhkan pun tak ada yang sia-sia ketika kita membela sebuah kebenaran.

Setiap manusia memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi pemimpin sejati tidak pernah memaksakan kehendak menjadi seorang pemimpin. Pemimpin sejati bukan orang yang gila akan jabatan, pemimpin sejati tidak pernah mengharap ia mendapat sanjungan atas amanah yang ia emban. Ingatlah kita ketika Umat bin Khatah mendapatkan amanah untuk memimpin, beliau menangis karena ia tabu begitu beratnya amanah dan tanggung jawab yang harus ia pikul.

Alangkah lucunya ketika hari ini kita malah saling menjatuhkan untuk mendapatkan posisi seorang pemimpin. Jikalau politik sudah begitu kotor, bukan berarti kita hanya menjadi penonton. Jika orang-orang baik enggan untuk masuk ke dalam dunia politik, maka politik akan tetap disesaki oleh orang-orang kotor. Jadilah seorang pemimpin, namun jangan jadikan jabatan sebagai sebuah tujuan. Jadikan ia sebagai sarana untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Wakil Rakyat 'Idaman'

Hasanuddin Ismail



Indonesia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Suara rakyat sangat berperan besar bagi jalannya roda pemerintahan. Namun, tidak mungkin seluruh rakyat dapat datang berbondong-bondong ke suatu tempat hanya untuk memberikan aspirasinya. Oleh karena itu, sangat diperlukan lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita.

DPR mempunyai 3 fungsi, yaitu: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (membahas dan memberikan/tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)),

dan pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN). Anggota DPR (wakil rakyat) terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Menjadi wakil rakyat telah menjadi impian banyak orang. Segala cara akan dilakukan untuk menduduki kursi tersebut, bahkan cara-cara yang kurang etis pun sering dilakukan. Jabatan wakil rakyat merupakan jabatan kehormatan sekaligus amanah rakyat.

Wakil rakyat memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan rakyat biasa, seperti gaji yang menggiatkan, tunjangan jabatan, rumah dinas, kendaraan dinas, uang sidang, studi banding ke luar negeri (melancong/berperulangan) dan aneka keuntungan lainnya.

Saat ini, wakil rakyat sangat memprihatinkan dan mengecewakan karena berbagai kasus hukum yang menimpa beberapa oknum. Mulai dari kasus korupsi, mafia anggaran, mafia proyek, dan sebagainya. Melihat realita tersebut, penulis hendak menuangkan gagasan mengenai kepemimpinan Islam dan ke-Indonesiaan yang berkaitan dengan kriteria wakil rakyat yang ideal di masa yang akan datang.

Penulis mengangkat gagasan ini karena penulis bercita-cita menjadi wakil rakyat (DPRD Kabupaten Wajo, DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dan DPR Republik Indonesia). Menurut hemat penulis, ada 12 kriteria wakil rakyat yang ideal di masa yang akan datang untuk menjadi pertimbangan. Wakil rakyat yang ideal di masa datang tersebut adalah wakil rakyat yang memiliki kepribadian sebagai berikut:

1. Berintegritas, yaitu sikap yang menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Seorang wakil

rakyat harus memiliki perilaku yang dapat dipercaya oleh rakyat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wakil rakyat harus memberikan bukti nyata terhadap janji-janji kampanyenya bukan sekedar janji atau wacana belaka. "*Beri bukti bukan janji, bukti nyata bukan wacana*".

2. Demokratis, yaitu sikap atau pemikiran yang menilai hak dan kewajibannya sama dengan orang lain. Seorang wakil rakyat harus melindungi kebebasan rakyatnya dan menjamin kebebasan tersebut. Wakil rakyat harus patuh dan taat terhadap segala peraturan. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar tetapi dipatuhi. Wakil rakyat harus merakyat. Kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. "*Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat*".
3. Amanah, yaitu dapat dipercaya. Seorang wakil rakyat harus merealisasikan seluruh janji-janji kampanyenya, menyuarakan dan memperjuangkan seluruh aspirasi rakyat dan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. "*Suara rakyat, suara Tuhan*".
4. Manusiawi, yaitu sikap berperikemanusiaan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Seorang wakil rakyat harus menghargai dan menghormati rakyatnya, memperjuangkan hak-hak setiap rakyat, melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*".
5. Arif, yaitu sikap bijaksana. Bijaksana berarti memiliki jiwa yang cerdas dan pandai. Seorang wakil rakyat harus bijak dalam mengambil keputusan. Wakil rakyat harus menempatkan dirinya dan kekuasaannya di bawah kepentingan umum dan dalam bekerjasama harus selalu terikat oleh tanggung jawab

kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya harus dapat menghargai pendapat orang lain, khususnya dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat. "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.*"

6. Nasionalis, yaitu sikap mencintai tanah air. Seorang wakil rakyat harus memperjuangkan kepentingan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara. Wakil rakyat harus menanamkan semangat kebangsaan, khususnya kepada generasi muda agar negara kita lebih baik di masa yang akan datang. "*Bhinneka Tunggal Ika.*"
7. Religius, yaitu sikap atau perilaku patuh melaksanakan ajaran agama yang dianut dan toleransi. Seorang wakil rakyat harus patuh dan taat terhadap perintah agamanya, senantiasa berbuat kebaikan, menjamin rakyatnya untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing agar tercipta kertkunan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "*Ketubanan Yang Maha Esa.*"
8. Adil, yaitu sikap tidak memihak kecuali kepada yang benar, memutuskan sesuatu dengan sepatutnya dan tidak bertindak sewenang-wewaug. Seorang wakil rakyat berkewajiban untuk membina dan mengembangkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Wakil rakyat harus memperjuangkan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Di samping keadilan hukum, keadilan dalam segala aspek kehidupan juga harus ditegakkan. "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*"
9. Kreatif, yaitu memiliki daya cipta. Seorang wakil rakyat harus memiliki jiwa artistik, imajinatif, inovatif dan inventif agar dapat memberikan yang terbaik untuk rakyat. Wakil rakyat harus mampu memberikan sebuah terobosan baru untuk

kepentingan bangsa dan negara. “*We have to do the best (Kita harus melakukan yang terbaik).*”

10. *Yad'uuna wa Yamuruuna*, yaitu sikap mengajak dan memerintahkan melakukan kebaikan. Seorang wakil rakyat harus senantiasa mengajak dan memberikan keteladanan yang baik kepada rakyat, memerintah kepada yang *maruf* dan mencegah yang mungkar. “*Amar maruf nahi munkar.*”
11. Beramal shaleh, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Seorang wakil rakyat harus melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat seperti mengeluarkan zakat, bersedekah, memberi bantuan untuk korban bencana alam, fakir miskin, penyandang cacat, orang jompo, anak yatim piatu, dan sebagainya. Wakil rakyat harus peduli dengan rakyat. “*Shadaqatun jariyah.*”
12. Bertanggung Jawab, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seorang wakil rakyat harus memberikan yang terbaik kepada rakyat dan mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. “*Berani berbuat, berani bertanggung jawab.*”

Semua kriteria wakil rakyat yang ideal tersebut merupakan wakil rakyat ‘IDAMAN RAKYAT’ yang tepat untuk menjadi pilihan rakyat. Semoga dapat menjadi pertimbangan pilihan rakyat dan dapat diteladani wakil rakyat. Rakyat sedang menunggu kinerja yang sungguh-sungguh dari wakil rakyat dalam berbagai segi kehidupan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Krisis Rohingya dan Masa Depan Komunitas ASEAN

Mukhamad Suzianto



Beberapa bulan terakhir kawasan Asia Tenggara diramaikan dengan permasalahan pengungsi Rohingya yang terus berupaya mendapatkan suaka dari negara lain. Mereka terusir dari kampung halamannya dan hidup terkatung-katung di tengah lautan. Krisis Rohingya sebenarnya ironi bagi sebuah kawasan yang telah mendeklarasikan diri mewujudkan satu komunitas, Komunitas ASEAN. Krisis yang melibatkan etnis Rohingya (muslim) dan etnis lokal Myanmar yang beragama Buddha ini bisa menjadi batu sandungan ASEAN dalam menyukseskan *ASEAN Community 2015*.

ASEAN yang didirikan di tengah ketegangan perang dingin pada tahun 1960-an mencoba meniru Uni Eropa yang

mengupayakan sebuah penyatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan para elit. Penyatuan ini belum sampai pada tahap kesepakatan antar masyarakat yang ada di kawasan ini.

Upaya meng-*copy paste* bentuk organisasi kawasan dari Eropa ini tanpa diikuti dengan dukungan masyarakat menjadikan proses integrasi sulit untuk menemukan wujudnya. Terutama menciptakan persamaan identitas yang melekat. Mayoritas masyarakat ASEAN masih menganggap kebangsaan mereka lebih penting dibanding menjadikan satu identitas dalam mengenalkan diri terhadap dunia luar. Berbeda dengan masyarakat eropa yang bangga mengidentifikasi diri sebagai orang Eropa tidak melihat dari mana asal negaranya, baik Inggris, Jerman, Prancis ataupun lainnya mereka tetap bangga ketika menjadi orang eropa.

Fenomena seperti ini belum terjadi di lingkungan Asia Tenggara. Satu contoh kecil yang tidak bisa kita bantah, apakah kita (orang Indonesia) sudah mau mengungkapkan dan memperkenalkan terhadap dunia luar "*I am South-East Asian*" tentunya tidak. Kita masih bangga ketika berbicara *I am Indonesian*, begitupun dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya.

Lalu, apa relevansi antara krisis Rohingya dengan integrasi kawasan? Bukankah secara legal-formal sudah menjadi kesepakatan negara anggota ASEAN melalui deklarasi Bali pada tahun 2005? Bila kita melihat tujuan integrasi sebagaimana tertuang dalam *Blue Print ASEAN Community*, tentunya kita akan sangat mendukung upaya mewujudkan komunitas ASEAN ini. Tetapi bila kita mau jujur, apakah integrasi kawasan bisa diwujudkan bila masyarakatnya masih dibelenggu konflik horizontal layaknya masyarakat primitif. Sebagai contoh konflik etnik Rohingya, dan beberapa konflik lain yang memiliki motif sejenis, seperti konflik syiah di sampang (Indonesia), konflik di Thailand selatan, dan

konflik di Filipina selatan. Teruu bisa menimbulkan keraguan kita bahwa integrasi benar-benar berjalan sebagaimana gambaran yang muncul dalam benak elit yang ada di kawasan ini.

Kembali membahas masalah Rohingya, krisis ini memang tergolong “nnik” karena berlangsung cukup lama dan belum menemukan jalan keluar. Padahal krisis ini terjadi di rengah kawasan yang mayoritas negaranya mengaku mencintai perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan salah seorang warganya mendapat kehormatan gelar nobel perdamaian sebagai pejuang hak asasi manusia (HAM) yaitu Aung San Suu Kyi yang juga saat ini menjadi tokoh politik berpengaruh di Myanmar, namun Suu Kyi bungkam akan hal ini. Ironi bukan?

Bila demikian, kita boleh mempertanyakan keseriusan semua pihak dalam menuntaskan krisis ini. Terutama ASEAN sebagai organisasi kawasan dalam melaksanakan tanggung jawabnya menciptakan perdamaian di kawasan. Kemudian Indonesia sebagai negara yang seharusnya memiliki peran vital dalam kasus ini. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara penggagas berdirinya ASEAN yang merupakan negara terbesar di kawasan (dan juga negara dengan penduduk mayoritas muslim).

Karena sikap pemerintah Myanmar yang “keras kepala” dalam menyelesaikan krisis ini kemungkinan bisa luluh hanya bila ada tekanan dari luar yang menuntut pemerintah Myanmar segera mengakhiri derita ernis Rohingya atau dengan bahasa yang lebih halus sangat diperlukan intervensi kemauusiaan terhadap Myanmar.

Namun masalahnya, bila krisis Rohingya dipertanyakan kepada ASEAN maupun pemerintah Indonesia, jawaban yang selalu muncul adalah (bisa juga diartikan alasan) terkendala prinsip

non-intervensi yang disepakati anggota ASEAN. Sehingga negara-negara ASEAN tidak diperbolehkan ikut campur dalam setiap permasalahan yang ada di negara lain. Non-intervensi inilah yang menjadikan Myanmar tetap kukuh dalam sikap dan kebijakannya dalam menghadapi masalah domestik (krisis Rohingnya). Dalam kasus Rohingnya, Prinsip non-intervensi ini jelas berseberangan dengan suara masyarakat internasional (termasuk masyarakat Indonesia) yang menghendaki adanya campur tangan negara lain sebagai bentuk intervensi kemanusiaan agar nasib etnis Rohingnya semakin jelas dan hak-hak mereka bisa dilindungi.

Namun, hingga saat ini sikap tegas dari negara-negara ASEAN termasuk Indonesia belum terlihat atau belum mampu memaksa Myanmar segera mengakhiri masalah ini. Dalam hubungan antar bangsa, keadaan ini memiliki dua kemungkinan bila melihat alasan mendasar yang menjadi landasan bagi semua negara ASEAN dalam menyikapi krisis Rohingnya.

Pertama adalah sikap para pemerintah Negara ASEAN yang terkesan “tidak tegas” merupakan bentuk penghormatan akar prinsip non-intervensi sebagai upaya menjaga keutuhan ASEAN dan dalam kemungkinan ini negara-negara ASEAN meyakini bahwa Myanmar akan mampu menuntaskan masalahnya sendiri.

Kedua adalah negara-negara ASEAN memang tidak sungguh-sungguh dalam menuntaskan krisis Rohingnya. Ini berarti negara-negara ASEAN menganggap prinsip non-intervensi juga sebagai prinsip resiprositas. Artinya Negara ASEAN tidak mau mengambil kebijakan yang akan menjadi *blunder* di masa mendatang.

Bila demikian, anggapan bahwa ASEAN didirikan hanya merupakan kesepakatan antar elit benar adanya. Yang lebih parah lagi prinsip non-intervensi sejatinya merupakan alat yang digunakan pemerintah di negara-negara ASEAN untuk

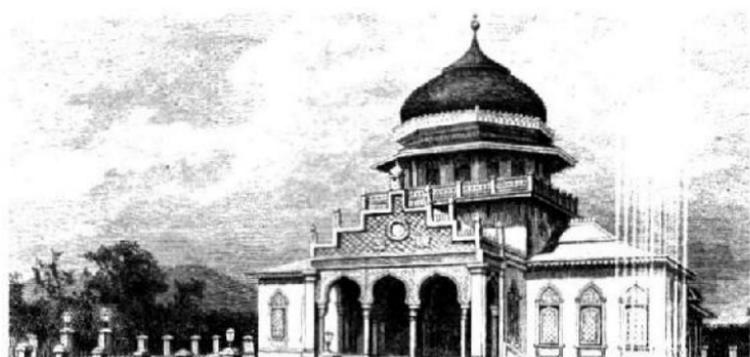
memertahankan eksistensi dan kekuasaannya, kira tidak tahu motif sesungguhnya dari setiap sikap negara ASEAN dalam krisis ini. Tetapi penyelesaian tetap harus menjadi prioritas demi kepentingan bersama. Terutama menyukseskan semua agenda ASEAN.

Komunitas ASEAN sudah di depan mata, permasalahan Rohingya sepatutnya tidak dianggap remeh. Karena konflik yang juga “dibumbui” isu sentimen keagamaan tidak menutup kemungkinan dapat menyebar luas dan mampu mengancam stabilitas kawasan. Bila krisis tidak ditangani secara serins dan mendorong disabiliras kawasan, mungkinkah integrasi bisa diwujudkan, karena kita semua tahu bahwa agama Buddha dan agama Islam memiliki jumlah penganut yang tidak sedikit di kawasan Asia Tenggara.

Harapannya tentu semua pihak secepatnya mengedepankan keperntingan bersama, dalam hal ini menemukan jalan keluar untuk krisis Rohingya, agar komunitas ASEAN tidak sekadar agenda politik para elit di kawasan.

Distorsi & Deislamisasi Sejarah Indonesia

Randa Reynaldi



Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno dalam salah satu pidatonya, berpesan pada seluruh rakyat Indonesia agar *"Jangan sekali-sekali melupakan sejarah,"* yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *"Jas Merah"*. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno tersebut sangat benar adanya, mengingat begitu pentingnya sejarah untuk dipelajari oleh setiap individu.

Sejarah merupakan kejadian masa lampau yang tak boleh kita lupakan, karena tanpa adanya sejarah kita tidak akan ada pada zaman seperti sekarang ini. Ada perkataan bijak yang mengatakan *"history repeats itself"* sejarah itu akan berulang kembali.

Hal yang pernah terjadi di masa lalu, suatu saat akan terjadi kembali di masa yang akan datang. Hal inilah yang membuat kita

sebagai bangsa Indonesia harus mengerahui sejarah akan bangsa ini. Bagaimana sejarah bangsa ini berdiri, bagaimana perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, hingga bagaimana cita-cira para *the founding fathers* dalam membangun negara ini. Karena bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya sendiri.

Namun sayang seribu sayang, saat ini sejarah bangsa kita telah mengalami distorsi (pemutar halikkan suatu fakta) dan deislamisasi sejarah yang begitu hebat. Dr. Adian Husaini, salah satu pembicara dalam acara *School for Nation Leader*, dalam artikelnya "*Islam Dalam Sejarah dan Penyatuan Nusantara*" mengatakan bahwa telah terjadi pemutar halikkan sejarah yang sengaja disebarkan oleh kaum orientalis yang menyatakan bahwa Majapahit runtuh karena diserang oleh Islam. Upaya tersebut dilakukan untuk menjauhkan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan Islam sebagai basis semangat kebangsaan.

Akibatnya, dalam penulisan sejarah nasional Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah, nama Sunan Ampel dan Sunan Giri tenggelam oleh nama Gajah Mada. Nama Raden Patah dan Patih Unus yang mencoba mengusir penjajah Portugis dari Malaka, tenggelam oleh nama Raja Airlangga.

Upaya sistematis untuk memecah helah bangsa Indonesia yang mayoritasnya Muslim dilakukan dengan herbagai cara oleh penjajah Belanda. Salah satunya dengan menjauhkan Islam dari semangat kebangsaan Indonesia. Sekolah-olah Indonesia adalah kelanjutan dari Kerajaan Majapahit.

Senada dengan Dr. Adian Husaini, penulis buku *Api Sejarah*, Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan bahwa ada proses deislamisasi sejarah di dalam penulisan sejarah yang ada di Indonesia. Dengan deislamisasi penulisan sejarah tersebut, hilanglah peran ulama dan santri yang berperan penting dalam panggung perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Misalnya, secara umum kita tahu bahwa kesadaran pergerakan nasional dipelopori oleh Organisasi Budi Utomo. Namun fakta yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Pelopor pertama kesadaran pergerakan nasional adalah dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi yang kemudian menjadi cikal bakal organisasi Syarikat Islam bersama HOS. Tjokroaminoto.

Di samping itu, Budi Utomo bukanlah partai rakyat yang menantang penjajah Belanda, tetapi golongan kaum priyayi yang menjadi anak emas dan bekerja sama dengan Belanda. Anggota Budi Utomo tidak ada yang masuk penjara, dibuang ke Digul atau ditembak mati oleh Belanda. Tetapi tokoh Syarikat Islam berdesak-desak masuk penjara yang sempit, ditembak mati atau dibuang ke Digul (Irian Barat). Budi Utomo sesungguhnya tidak menyetujui Indonesia merdeka. Justru Budi Utomo ingin mendirikan Kerajaan Jawa yang berlandaskan Agama Jawa (kejawen) yang sekuler dan anti Islam.

Tapi fakta yang terjadi di pelajaran sejarah yang disampaikan di sekolah-sekolah Indonesia, justru cerita tentang organisasi Budi Utomo lah yang menjadi tonggak sejarah pergerakan nasional, bukannya Syarikat Islam. Dan porsi cerita Budi Utomo terlihat begitu besar dibandingkan cerita Syarikat Islam.

Distorsi dan deislamisasi penulisan sejarah Indonesia memang strategi dari pemerintah kolonial Belanda, seperti dengan membesar-besarkan Hindu Budha dan mendistorsikan Islam termasuk tentang awal masuknya agama Islam ke Indonesia ini. Hal ini dilakukan, karena hampir dapat dikatakan bahwa Hindu dan Buddha tidak melancarkan perlawanan terhadap Belanda.

Distorsi dan deislamisasi sejarah seperti yang terjadi di atas hanyalah sebagian contoh kecil dari banyak kasus-kasus lainnya. Namun jika kita lihat, dampak dari distorsi dan deislamisasi sejarah tersebut masih berlangsung sampai saat ini.

Hal ini bisa dilihat dari huku-huku pelajaran sejarah yang terdapat di sekolah-sekolah di Indonesia, yang sebagian masih banyak terpengaruh oleh karangan-karangan para orientalis tersebut. Apalagi kalau guru-guru yang mengajarkannya juga banyak terpengaruh oleh apa yang ditulis para orientalis tersebut, maka dapat dipastikan para generasi muda di Indonesia dari sejak dini sudah diajari pelajaran-pelajaran sejarah yang di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar tentang Islam.

Iniilah yang menjadi tugas besar kita hari ini untuk menghentikan distorsi dan deislamisasi sejarah yang terjadi. Sejarah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan sebuah bangsa, karena peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau dari sebuah bangsa itu akan menjadi sebuah pedoman atau pegangan hidup dari bangsa tersebut di masa sekarang dan di masa depan.

Demikianlah mengapa pelajaran sejarah menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Bahkan setiap bangsa berusaha menggali sumber-sumber sejarah dengan tujuan untuk mengetahui kehidupan bangsanya di masa lampau.

Namun jika pelajaran sejarah yang dinikmati hari ini oleh para generasi masa depan adalah sejarah-sejarah yang masih simpang siur dari kebenaran sesungguhnya, maka dapat dipastikan bangsa ini sulit untuk berkembang. Generasi masa depan harus memiliki visi misi yang sama dengan para *the founding fathers* dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Oleh karenanya, distorsi dan deislamisasi sejarah harus segera dihentikan dan diluruskan fakta yang sebenarnya.

Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno pernah mengatakan bahwa kaum (generasi masa depan) akan menghadapi perjuangan melawan penjajah yang lebih sulit daripada zamanku. Penjajah pada zamanku sangat terlihat jelas di depan mata, yaitu mereka

(para penjajah Belanda dan Jepang). Namun pada zaman kalian nanti, penjajah itu sulit untuk dilihat karena mereka justru berasal dari kalangan kalian sendiri.

Semoga para pemimpin pengambil kebijakan negeri ini juga sadar akan distorsi dan deislamisasi sejarah yang tengah menjamur di negeri ini. Segera lakukan revolusi, khususnya pada pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Jangan sampai generasi masa depan justru kembali tercebur ke dalam jurang distorsi dan deislamisasi sejarah.

Kepemimpinan Islam yang Inklusif

Redza Dwi Putra



Jika tuan dan puan dahulu, ketika umur masih belia pernah bermimpi menjadi seorang pemimpin. Maka, tak usahlah khawatir soal itu. Karena pada hakikatnya setiap manusia yang terlahir adalah pemimpin. *Kullukum ra'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'yyatihi* (Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap dari kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya). Begitu disampaikan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar.

Allah pun berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini.' Mereka (para malaikat) berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di

bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau.' Tuhan Berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." (QS. al-Baqarah: 30)

Dari dalil di atas telah jelas bahwa tugas manusia di bumi adalah sebagai khalifah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi. Siapapun pasti percaya konsepsi dasar ini, bahwa kita pada hakikatnya adalah khalifah, yang dalam bahasa keseharian kita lebih mengenalnya sebagai 'pemimpin'.

Lantas untuk mensyukuri anugrah Tuhan yang menjadikan kita sesosok pemimpin yang telah dilahirkan di bumi ini adalah dengan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap amanah yang telah diembankan kepada kita. Kalaulah Aamir Kahn dalam film garapannya, *Taree Zaman Par* (2007) memiliki kalimat *every child is special*. Maka, dalam konsep Islam hal itu senada dengan *everyone is special*. Setiap manusia adalah istimewa.

Mengapa manusia dan mengapa istimewa? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian muncul dalam benak kita, mempertanyakan hal sederhana tentang siapakah manusia dan alasannya yang begitu istimewa.

Siapa manusia? Dalam al-Quran dijelaskan, manusia adalah makhluk Allah yang diberi posisi melebihi posisi malaikat. Tugas malaikat hanya satu: melaksanakan perintah Allah tanpa adanya pembangkangan. Dalam sebuah ayat, posisi malaikat dengan sangat jelas digambarkan sebagai berikut: "Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan manusia (anak keturunan Adam), dan kami angkut mereka (diberi kendaraan) di darat dan di laut, dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Begitu pula dengan alam. Allah telah memberikan suatu perintah alami (*natural command*) kepada alam tanpa adanya proses pembangkangan. Tidak ada hak bagi alam untuk membangkang, ia harus separuh-patuhnya menjalankan perintah dari Yang Maha Kuasa.

Lain halnya dengan manusia. Manusia secara moral mempunyai pilihan kebebasan untuk patuh atau membangkang. Karenanya apa yang diperintahkan kepada alam merupakan perintah moral (*moral command*) bagi manusia. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara kepatuhan dan pembangkangan, ini telah menjadi ciri utama yang menggerakkan roda peradaban manusia sejak ribuan tahun yang silam.

Bilamana Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih, maka bukan berarti kebebasan itu hanya untuk diri sendiri, juga harus dibatasi oleh prinsip kepentingan umum, kepentingan keadilan dalam bingkai kemanusiaan. Karena dari sisi pandangan hidup manapun, manusia tidaklah maha tahu. Manusia adalah makhluk yang terbatas, sedangkan Allah adalah Dzat Yang Maha Nirhatas.

Manusia Eksklusif

Dalam hubungannya dengan masyarakat, manusia terkadang abai, bahkan ingkar terhadap fitrah asal manusia. Manusia terkadang diburakan dari ajaran-ajaran moral dan agama. Juga lalai terhadap tujuan dan hakikat hidup. Manusia dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi dan kekuasaan. Manusia sebagai khalifah tercoret keistimewaannya.

Begitu banyak manusia yang begitu mendewakan status sosialnya, tuengultuskan status jabatannya dan juga kekayaannya. Mereka telah mencedetai posisi mulia sebagai khalifah. Akibatnya,

harga diri manusia menjadi rendah dan hina di hadapan Allah (*Asfala safilin*).

Begitu angkuhnya manusia diberi lencana sebagai pemimpin, tapi kepemimpinannya tidak berefek kepada kesejahteraan dan kemakmuran bagi yang dipimpinnya. Manusia mungkin terlalu merasa eksklusif dengan statusnya sehingga merasa paling benar. Akibatnya, dalam kepemimpinannya ada kecenderungan untuk menutup semua mata dan telinga. Tak mau mendengar dan menerima masukan-masukan dari orang lain.

Dalam konteks ini, kepemimpinan Islam justru hadir dari ketersediaan menerima perbedaan. Islam bukanlah ajaran yang memaksakan kehendak. Islam justru lahir sebagai *rahmatan lil alamiin*. Rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang.

Barangkali kita bisa belajar dari perjuangan Rasulullah menyebarkan ajaran Islam secara damai, tanpa kekerasan. Atau barangkali kita bisa pula belajar dari proses penyiaran Islam di Indonesia yang dilakukan dengan cara yang damai pula. Tak seperti yang terjadi saat ini. Radikalisme atas nama agama semakin marak terjadi.

Dan masihkah tuan dan puan ingat dengan kasus-kasus semacam doktrin NII kepada para pemuda, juga ISIS yang menggemparkan dunia? Siapa pula yang tak ingat kasus-kasus tersebut. Bagaimana tidak, fenomena radikalisme agama yang terjadi tentu sangat menyita perhatian banyak pihak.

Atas nama agama sekelompok orang memilih untuk bersikap radikal, berjuang melalui cara-cara kekerasan. Mereka mungkin lupa bahwa dalam bumi yang tunggal ini kita hidup berdampingan. Multietnik, multiras, juga multiagama. Mereka

ini adalah kelompok-kelompok yang fanatis: ianya melampaui batas.

Fanatisme yang berlebihan melahirkan *truth claim* (klaim kebenaran) yang bersifat eksklusif. Selanjutnya, eksklusivisme akan memandang pengikut agama lain sebagai musuh, sehingga melahirkan arogansi sosial, terutama ketika ia menjadi mayoritas.

Kesombongan sosial yang berupa sikap tertutup dan tidak mau berdialog dengan pihak lain serta kesombongan emosional berupa sikap yang fanatik berlebih pada pandangan sendiri inilah yang akan terus menyulut api-api kekerasan dan jalan radikal.

Lautas siapa gerangan yang akan bertanggungjawab terhadap ini? Jawabnya adalah kira, manusia yang dianugerahi oleh Allah menjadi seorang *khalifah fil ardh*. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah “di mana kita, sebagai seorang khalifah, saat ketidakadilan merebak di mana-mana, saat kondisi kemanusiaan yang compang-camping masih belum putus dirundung malang?”

Apakah kita terlalu sibuk dengan ‘memonopoli’ surga demi kepentingan pribadi? Ataukah karena kita terlalu sibuk menyampaikan pesan langit dengan semangat yang berkoar-koar tapi kita hanya diam pada ketidakadilan? sedangkan di belahan bumi lain begitu banyak orang yang membutuhkan sikap kita sebagai seorang khalifah.

Lihatlah, tidak sedikit bukan, di zaman ini para pemimpin yang seharusnya menyampaikan kebenaran dan menumpas segala kemungkaran begitu eksis sekali tampil di depan publik. Menyampaikan janji-janji manisnya, tapi menafikan ucapannya. Dalam kata mungkin dimuliakan tapi dalam laku hanya dikhianati. Dan lagi-lagi status pemimpin dijadikan tujuan pragmatis bahkan ladang kapitalis.

Seridaknya kita perlu mengambil teladan dari kepemimpinan Umar bin Khatah yang dalam dalam kisahnya diceritakan begitu

bertanggung jawab perihal mengetahui sekaligus menyelesaikan penderitaan kelaparan rakyatnya. Atau setidaknya kita perlu meredakan arogansi kepemimpinan kita dengan bersikap sederhana tapi bukti kepemimpinan tetaplah nyata dan bermakna.

Sungguh sekali pun kita merasa menjadi manusia eksklusif, tetapi di hadapan Allah kita adalah makhluk yang lemah tak berdaya. Semoga kita bisa mengemban amanah sebaik-baiknya menjadi seorang *khalifah fil ardh* dengan menebar kebaikan secara inklusif dan komprehensif kepada yang lain. Semoga.

Sarana Kaderisasi Pemimpinan Muda

Riky Taufik Afif



Manusia diciptakan tidak secara kebetulan. Allah SWT memiliki tujuan tertentu dibalik alasan kenapa manusia diciptakan. Dalam al-Quran Allah SWT. berfirman: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"* Tuhan berfirman: *"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Al-Baqoroh : 30)"*

Manusia memiliki peran besar sebagai pemimpin di muka bumi. Hal ini telah lama disampaikan sejak dakwah Rasulullah

saw dimulai bahwa manusia diberikan oleh Allah sebuah amanah besar untuk mengurus bumi ini. Mengurus dalam artian manusia menjalani fitrahnya sebagai makhluk Allah SWT yang dianugerahi akal untuk berfikir dan mengambil makna dari ciptaan Allah SWT yang lain.

Permata Akal...

"Segala sesuatu memiliki permata

Permata dalam diri manusia adalah akalnya

Dan akal yang bernilai permata adalah akal

Yang mau menerima hidayah Allah.."

Harits Al-Mubasibi

Seorang muslim tentunya memiliki tugas untuk mempelajari agamanya dengan baik. Sebagaimana perintah Allah SWT dan ketetapanNya bahwa mempelajari agama hukumnya adalah *farđu 'ain* (harus bagi setiap muslim) berbeda dengan ilmu dunia yang bersifat *farđu kifayah* (wajib bagi sebagian muslim saja). Seorang muslim tidak dituntut untuk menjadi ulama tetapi seorang muslim wajib menuntut ilmu agama. Karenanya dalam ajaran Islam setiap muslim wajib untuk menegakan *amar ma'ruf nahyi munkar* atau istilah populer saat ini adalah dakwah islamiyah, yaitu mengajak manusia atau orang-orang di sekeliling kita kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran tanpa mengabaikan untuk terus menerus memperbaiki diri.

Dalam misi dakwah setiap dai (orang yang berdakwah) dari masa ke masa selalu ada tantangan dan hambatan yang pasti menghadang. Hambatan dan tantangan tersebut adalah pasti datangnya dari Allah SWT sebagai bentuk ujian dari kesungguhan tekad hambanya untuk menjalankan misinya berdakwah di tengah-tengah umat. Dalam dakwah seorang muslim sesungguhnya ada misi kaderisasi dari Allah SWT untuk menggembleng jiwa kepemimpinan (kekhalfahan) seorang hamba.

Bagian kaderisasi kepemimpinan dari misi dakwah Islam sangatlah terasa karena tujuan dakwah Islam sendiri adalah mengajak bukan mengejek, mengajar bukan menghajar, membina bukan menghina, mencintai bukan mencaci, menasehati bukan menusuk hati. Hal-hal inilah yang akan membuat seorang dai menjadi pemimpin di tengah-tengah umat.

Kepemimpinan memang sudah seperti tugas pasti bagi manusia yang hidup di bumi ini, bahkan dalam peran sekecil apapun. Seorang laki-laki kelak akan memiliki peran setidaknya sebagai pemimpin keluarganya, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Seorang perempuan akan menjadi ibu dan pemimpin bagi anak-anaknya. Bahkan jika seandainya seseorang itu tidak berkeluarga maka dia pun adalah pemimpin bagi dirinya sendiri.

Tugas kepemimpinan dan tugas dakwah dari Allah SWT tidak dapat dipisahkan, dan akan saling menguatkan dan menghasilkan. Dakwah yang produktif akan menghasilkan insan-insan baik dan unggul yang laham akan fitrahnya sebagai manusia. Seorang dai yang aktif bergerak akan mempetoleh nilai-nilai kepemimpinan dalam misi dakwah tersebut. Tidak aneh memang, seorang dai di tengah-tengah masyarakat menjadi figur sentral tempat merujuk masalah fatwa dan penyelesaian perkara masalah yang menyangkut agama.

Seorang dai dianggap mampu memimpin proses-proses keagamaan masyarakat sekitarnya. Bahkan pengaruhnya bisa sampai menghantarkan seorang dai kepada kepercayaan masyarakat untuk memberinya amanah kekuasaan politik. Temu politik dan kekuasaan bukan tujuan dakwah Islam, karena tujuan dakwah Islam sendiri adalah mengajak manusia kepada jalan Allah SWT dan menjauhi berbagai bentuk maksiat pada Allah SWT. Tujuan tersebut bisa dirempuh dengan berbagai cara bukan hanya lewat kekuasaan dan politik.

Peran pemuda hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa ini. Pemuda muslim tentunya harus segera menyambut seruan ini. Misi dakwah dan kaderisasi kepemimpinan bisa dijalankan bersamaan dan berakhir untuk aksi nyata bagi Indonesia yang lebih baik.

Indonesia di masa depan hanya akan menjadi lebih baik manakala pemudanya hari ini baik juga. Karena masa depan bangsa adalah pemuda bangsa itu sendiri. Bukan rahasia bahwa pemuda adalah masa depan bangsa.

Pemimpin Seluruh Alam

Siti Awaliyatul Fajriyah



"Pemimpin adalah pemimpi. Tanpa mimpi manusia adalah mati".

Hal yang melekat erat pada diri seorang pemimpin adalah mimpi. Mimpi atau visi hidup seseorang akan menjadi alasan untuk bergerak bagi pemimpin sebagai lokomotif penggerak perubahan. Tidak pernah ada yang salah mengenai kadar mimpi.

Yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin istimewa adalah sikap setelah sebuah mimpi terwujud. Ada yang hanya meninggalkan mimpinya di masa lalu dan membiarkan orang lain mengambil mimpinya, ada yang berhenti bergerak setelah mimpinya tercapai, ada pula orang yang membiarkan mimpinya berjalan tanpa rencana, yang terakhir adalah pemimpin

yang berhasil mencapai mimpinya dengan perencanaan yang matang dan senantiasa memimpikan hal-hal baru.

"Dialah menjadikanmu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka." (Q.S. Fathir: 1)

Allah menjadikan setiap muslim adalah pemimpin di muka bumi. Artinya, ketika seorang muslim tidak menjadi pemimpin, bahkan untuk dirinya sendiri, ia sudah menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Yang menjadikan manusia sebagai pemimpin adalah mimpinya.

Tanpa mimpi, pemimpin tidak akan bergerak. Meskipun bergerak, itu hanyalah gerakan semu. Hanya jalan di tempat tanpa membawa perubahan apapun terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap kelompoknya.

Sebagai seorang pemimpin muslim, hendaknya mimpi-mimpi kita mengacu pada nilai-nilai Islam. Pengakuan mengenai syariat Islam yang kita gunakan untuk menjalankan sebuah sistem bukanlah hal yang penting. Yang jauh lebih mendasar daripada pengakuan adalah nilai-nilai yang diterapkan. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, sudah pasti nilai-nilai Islam akan relevan dengan konteks manapun.

Mengapa pengakuan dan pendeklarasian bahwa seorang pemimpin menegakkan syariat Islam dalam kepemimpinannya bukanlah hal yang penting? Pemimpin harus mampu bersikap moderat karena ia adalah seorang yang harus berdiri untuk semua golongan, termasuk orang-orang di luar Islam. Apalagi semakin hari dunia ini semakin heterogen. Untuk menjadi pemimpin,

yang penting adalah nilai-nilai yang dibawa, terlepas dari ia adalah pemimpin Islam atau bukan. Ketika yang dijual seorang pemimpin bukanlah nilai-nilai kehidupan yang universal, orang-orang yang dipimpinnya tidak akan *respect* terhadap sistem yang ia buat.

Bagi muslim, meskipun kemoderuan pemimpin sangat penting, kita hanya boleh mengurus pemimpin muslim pula. Kita tidak boleh menjadikan orang-orang yang mengingkari Islam sebagai pemimpin di tengah-tengah kita.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al maidah: 51)

Itulah sebabnya mengapa setiap diri muslim adalah pemimpin dan harus memiliki kapasitاس memimpin yang hebat karena tongkat kepemimpinan di tengah muslim haruslah dipegang oleh muslim pula. Ketika muslim tidak memiliki kapasitاس yang cukup, relakah kita dipimpin oleh orang yang berkapasitاس namun mengingkari Islam?

Islam dan Peradaban Dunia

Taufik Permana



Dewasa ini mayoritas umat Islam sangat pesimis bahwa Islam akan menggapai kemenangan, baik itu kesejahteraan ataupun di semua aspek kehidupan. Saat ini yang harus dilakukan adalah bagaimana membangkitkan dan menguatkan keyakinan terhadap agama yang dianut dan meningkatkan kemampuan berpikir dari setiap umat Islam.

Kebanyakan orang Islam terlahir dari orang tua yang memang sudah Islam. Hubungannya dengan Islam semata-mata berupa hubungan keturunan semata. Sehingga jarang melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam memperoleh pemahaman yang sebenarnya tentang Islam.

Ajaran Islam pada hakekatnya adalah ajaran bag kepemimpinan dan kesejahteraan dunia. Karena inilah sebenarnya tujuan dari datangnya agama Islam. Salah satu cirinya yang paling terpenting ialah ia mengajarkan kepada para pengikutnya, bagaimana memperoleh kepercayaan diri tanpa dinodai

kesombongan dan mementingkan diri sendiri. Kepadanya Islam menghembuskan semangat agama dan keyakinan. Membebaskan diri dari segala penipuan diri, dan memisahkan ia dari segala ketergantungan pada yang lain. Islam menanamkan keimanan yang sempurna terhadap Allah dengan keimanan yang tidak akan pernah bimbang, ragu, dan menjadi lemah.

Keimanan ini menugaskan umat Islam memikul tanggung jawab kemanusiaan semampu mungkin dan mendorongnya menjadi wakil bagi semua bangsa manusia. Hal itu adalah kewajiban setiap umat Islam untuk memberi petunjuk ke jalau yang lurus bagi mereka yang tersesat di jalan hidupnya. Dengan kemampuan ilmu dan petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia, manusia berkewajiban membawa umat Islam dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Seperti halnya yang Allah firmankan dalam al-Quran: *“Engkau adalah sebaik-baik umat di antara manusia yang telah dijadikan. Engkau menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kesalahan dan engkau percaya kepada Allah.”*

Ini adalah ungkapan semangat dan firman Allah langsung yang menyatakan bahwa kita adalah sebaik-baik umat (manusia/mahluk) yang telah dijadikan dan diciptakan oleh Allah SWT. Dan tugas kita adalah menyuruh manusia berbuat kebajikan dan melarang berbuat kesalahan. Jadi mengajak setiap manusia untuk menjalankan seluruhnya agama Islam itu adalah hagian terpenting dari keimanan seseorang. Sehingga telah kita yakini bahwa jika kita menjalankan segala perintanya dan menjauhi segala larangannya maka kita akan mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat yang menjadi kehidupan kekal dan sebenarnya.

Sekarang akan kita bahas kembali bagaimana kondisi alam semesta ini sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang memberikan penerangan bagi seluruh manusia di bumi ini.

Arabia

Bangsa Arab sebelum datangnya Islam memiliki kebaikan-kebaikan alamiah tertentu yang membuat mereka menonjol di mata dunia. Mereka memiliki kepandaian berbicara dan keterampilan menggunkan bahasa yang sangat baik. Mereka menganggap kebebasan dan kehormatan berada di atas segalanya. Mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang hebat. Mereka pun sangatlah rajin, berani, tegas, jujur, setia, dan dapat dipercaya.

Namun pengasingan diri selama berabad-abad di jazirah itu, serta dorongan yang tidak masuk akal yaitu terletak pada agama nenek moyang mereka, mengakibatkan merosotnya moral mereka. Sejarah pun mencatat bahwa abad ke-6 Masehi, kita melihat mereka terjerumus ke dalam kebejatan moral, perbuatan tidak senonoh dan kemusyrikan, dan mereka telah memperturutkan hawa nafsu dalam segala sifat kehidupan lainnya.

Nasib Kaum Wanita

Di Jazirah Arab sebelum Islam datang, nasib kaum wanita sungguh tidak beruntung. Mereka tidak mempunyai hak waris. Wanita yang menjanda dan yang diceraiakan tidak diperbolehkan untuk menikah kembali. Kemudian, anak tertua dapat mengambil mantan istri dari bekas ayahnya untuk dijadikan istri.

Selanjutnya kebiadaban terhadap kaum wanita juga adalah ketika anak perempuan lahir akan dikubur hidup-hidup. Kebanggaan dan kemiskinan menjadi penyebab kejahatan pembunuhan terhadap kaum wanita. Dan adakalanya seorang gadis remaja yang selamat dari pembunuhan di masa lahirnya, dengan tipu daya dibawa ke tempat sunyi dan dibunuh. Dan inilah sebagian kecil nasib wanita sebelum datangnya Nabi

Muhammad SAW dengan membawa Islam, di mana al-Quran sebagai pedomannya.

Kesuraman dan Kegelapan Dunia

Pada abad ke-6 Masehi tidak ada satu pun bangsa di dunia yang bisa berwatak sehat. Tidak ada pula masyarakat yang diilhami cita-cita keadaban tinggi, juga tidak terdapat negara yang berlandaskan asas-asas keadilan, persamaan dan kejujuran. Tidak ada juga agama yang memberikan ajaran murni yang dibawa oleh para Nabi.

Dunia yang Allah titipkan kepada manusia menjadi rusak, pengetahuan yang sesungguhnya dan tindakan yang benar demikian jarang. Itulah sekilas singkat kondisi zaman kegelapan sebelum Nabi Muhammad datang membawa ajaran kebenaran, namun sebenarnya kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi dunia pada zaman sekarang ini.

Ketika manusia berada dalam kondisi yang sangat gelap dan suram, dan kemanusiaan sudah jauh dari kata keadilan dan kesejahteraan yang sebenarnya. Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW untuk menyadarkan dan mengantarkan setiap manusia dari kegelapan kepada cahaya. Nabi memecahkan belenggu kebodohan dan kejahiliaan, dan mengajak manusia kepada hakikatnya sebagai manusia dari pengabdian yang dapat membebaskan mereka dari setiap bentuk perbudakan.

Kedatugannya memberikan nafas baru, cahaya baru, semangat baru, kebudayaan baru, dan masa depan baru bagi umat manusia di dunia, Ia membawa zaman baru dalam sejarah manusia dengan menandai permulaan misi manusia yang sebenarnya hidup di dunia. Bahwa manusia dilahirkan ke dunia dengan misi yang jelas bahwa kita datang dengan membawa suatu

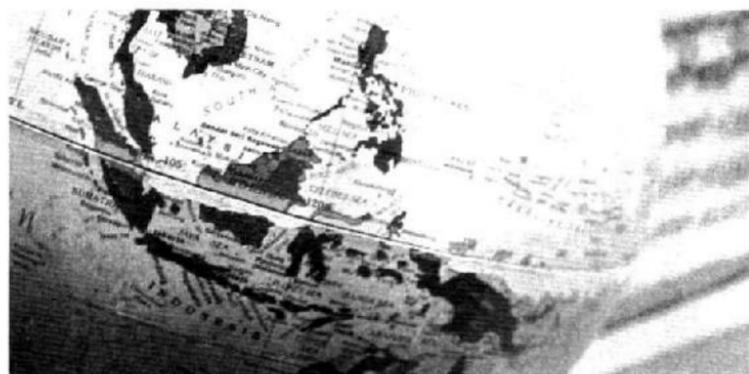
amanah besar dari Allah yaitu sebagai khalifah yang mengatur bagaimana alam ini diatur.

Untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan dan kesedihan, Nabi Muhammad SAW dengan keberanian moral dan semangat berkorban. Nabi selalu menanamkan bahwa kehidupan ini sangatlah murah sehingga apabila seseorang melakukan pengorbanan akan mencapai martabat yang sebenarnya datangkan berdasarkan penyampaian dari Allah SWT.

Seluruh dunia memandang Islam sebagai penyelamatnya. Penyelamat dari kesengsaraan dan ketidakadilan manusia-manusia yang zalim, sehingga dunia mengharapkan bimbingan dan kepemimpinannya kepada Islam. Semua itu kita akan tetap kembalikan kedudukan sebagai sumber petunjuk untuk menggapai kesejahteraan yang hakiki kepada Allah SWT melalui firmanNya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu al-Quran dan Hadis. Sehingga yakinlah kesejahteraan yang sebenarnya diimpikan akan menjadi kenyataan di dunia ini.

Indonesia dan Perkembangan Dunia Internasional

Vemby



Indonesia selama ini dikenal dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, bahkan mengalahkan populasi penduduk Islam di negara Arab Saudi. Saat ini populasi umat Islam di dunia berjumlah sekitar 23,4 persen dari total penduduk dunia dan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan populasi umat Islam ini diikuti oleh negara-negara Islam lainnya seperti India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Turki, dan Maroko. Populasi umat Islam yang terus bergerak naik ini sangat memungkinkan untuk bangkitnya kembali peradaban Islam pada tahun 2045.

Di tengah kemelut berkepanjangan dan islamophobia yang ramai dibicarakan pihak barat, Indonesia sebagai negara muslim

tidak lepas dari dampak isu tersebut. Di bawah pengaruh besar Amerika Serikat, Indonesia dipaksa bergabung untuk ikut dalam memerangi terorisme yang sebagian besar merupakan rekayasa politik negara adidaya tersebut.

Globalisasi juga memaksa sejumlah negara-negara muslim lainnya untuk menyesuaikan aturan-aturan negara mereka dan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh Barat. Sementara itu propaganda Barat untuk terus menghilangkan peradaban muslim secara besar-besaran terus dilakukan.

Untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di tahun 2045, negara-negara muslim di dunia terus meningkatkan pertahanan dan daya saing mereka di dunia Internasional. Sumber daya manusia terus ditingkatkan agar lahir bibit-bibit pemimpin pembawa peradaban Islam pada tahun 2045.

Oleh karena itu, penulis akan membagi pembahasan menjadi dua bagian. Pertama, perkembangan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dunia. Kedua, perkembangan dunia Internasional dalam membangkitkan peradaban Islam tahun 2045.

Sejarah lahirnya negara Indonesia tak lepas dari masuknya agama Islam ke Nusantara. Hal ini dimulai sejak ditemukannya kuburan Fatimah Binti Maimun di Jawa Timur, berdirinya kerajaan Pasai serta masuknya Wali Songo di pulau Jawa sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13.

Berdirinya kerajaan Pasai dan berkembangnya Wali Songo di pulau Jawa tidak lepas dari misi dakwah kerajaan Islam Turki yang saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad I yang ingin memperluas wilayah Islam ke seluruh dunia.

Kekuatan Islam dalam mempersatukan wilayah Nusantara terlihat ketika perjuangan melawan penjajahan hingga

kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di pulau Jawa dipimpin oleh kesultanan Islam seperti Kesultanan Demak dan Mataram yang mengobarkan semangat perjuangan melawan penjajahan di bumi Nusantara.

Sementara di wilayah Sumatera, kaum Paderi merupakan kelompok yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan merebut kemerdekaan. Keinginan dan semangat untuk membentuk sebuah negara yang utuh diecetuskan pertama kali oleh Serikat Islam dalam NTICO (*Natioonal Indische Congress*) pada 17-24 Juni 1916 di Surabaya. Kongres ini membahas tentang pandangan Islam mengenai demokrasi dan sosialisme. Kongres ini terus berlanjut hingga tahun 1921 yang nantinya akan melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Propaganda Barat untuk menghentikan peningkatan populasi muslim di Indonesia terus dilakukan. Saat ini kondisi kepemimpinan di Indonesia semakin menurun seiring dengan kekacauan politik dalam negeri dan tuntutan dunia Internasional yang semakin meningkat. Banyaknya rekayasa politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin membesar.

Hal ini juga berdampak pada peningkatan kristenisasi dan himbauan dari masyarakat Hindu untuk kembali ke masa Majapahit agar Indonesia kembali menjadi negara adidaya. Gempuran perang pemikiran yang berasal dari dalam dan luar mengakibatkan depopulasi muslim Indonesia setiap tahunnya.

Indonesia saat ini tengah mencari sosok pemimpin yang akan mengembalikan kejayaannya. Ideologi Pancasila yang dipegang teguh oleh negara ini merupakan produk dari para pemimpin Islam di masa kemerdekaan. Peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk mengubah Indonesia menjadi pusat peradaban Islam pada tahun 2045.

Tahun 2045 merupakan *golden year* untuk Indonesia sendiri karena pada tahun tersebut menjadi puncak di mana usia produktif penduduk Indonesia meningkat secara drastis. Banyaknya kelompok-kelompok pemuda beragama Islam saat ini memberikan angin segar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban.

Persatuan seluruh umat Islam Indonesia terus diperkuat dengan banyaknya pengembangan bakat dan kemampuan di bidang kepemimpinan oleh berbagai pihak. Beberapa organisasi besar Islam seperti NU, KAMMI, bahkan HTI telah mewajibkan setiap kadernya untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan agar bisa menjadi pemimpin negara yang berkarakter dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Meskipun seringkali mendapat serangan dari dunia Barat, namun dengan tekad yang kuat Indonesia akan tetap maju dengan para pemimpin yang memiliki landasan agama dan ilmu yang kuat.

Perkembangan Dunia Internasional dalam Kebangkitan Peradaban Islam 2045

Selain perkembangan Islam yang terus diperbaiki di Indonesia, dunia internasional, khususnya negara-negara mayoritas Islam juga terus berupaya membangkitkan kembali kejayaan Islam di muka bumi ini. Dalam beberapa penelitian, negara-negara seperti India dan Pakistan bahkan diprediksi akan mengalahkan populasi Islam Indonesia pada tahun 2030 nanti. Masalah tersebut tentu saja menarik perhatian banyak kalangan mengingat saat ini Indonesia masih menyanggah gelar negara mayoritas muslim terbesar di dunia.

Kebangkitan peradaban Islam tidak hanya dilihat dari segi populasi, tapi juga perkembangan suatu negara. Pada saat ini Malaysia dan Turki terus membuktikan eksistensinya di dunia Internasional menjadi sebuah negara yang maju di tengah gempuran globalisasi dan doktrin-doktrin Barat.

Selain Malaysia dan Turki, masih banyak negara-negara muslim lainnya yang terus bergerak menjadi sebuah negara maju dan menjadikan Islam sebagai peradaban yang ditunggu oleh dunia Internasional saat ini. Malaysia merupakan negara Islam herbentuk kerajaan yang saat ini mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kemauan keras pemerintah Malaysia untuk terus mengembangkan kekayaan dalam negeri dan memperkuat daya saingnya dengan dunia Internasional.

Pemakaian ideologi Islam dalam hukum-hukum negara tidak menghalangi Malaysia untuk terus mengeksplorasi kemampuan ekonomi mereka dalam dunia Internasional. Program-program yang dicanangkan pemerintah Malaysia saat ini telah membawa Malaysia diakui sebagai negara industri baru di kawasan Asia.

Kebangkitan Turki juga tidak terlepas dari kesadaran pemerintah akan pentingnya Islam dalam sendi-sendi pemerintahan. Sejak berkemihannya sekularisme di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk pada 1923, Turki terus mengalami kemerosotan dalam berbagai bidang dan pemakaian militer secara ketat dalam kehidupan bernegara.

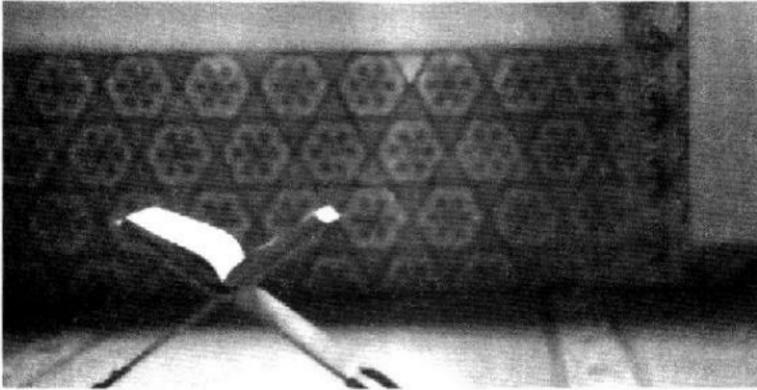
Kemunculan Recep Erdogan sebagai presiden Turki saat ini telah banyak membawa kemajuan terutama kebangkitan partai Islam di negara ini. Kebangkitan partai Islam saat ini membuktikan bahwa Islam mampu berdampingan dengan ideologi sekuler yang ada selama ini. Bahkan dengan kemenangan partai Islam di Turki menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

mengagumkan serta menghilangkan rasa skeptis para pemimpin dunia terhadap perkembangan Turki sebelumnya.

Dunia Islam saat ini mendapatkan cobaan dan tantangan yang berat dari dunia Internasional. Pemimpin yang memiliki landasan agama yang kuat dan memiliki strategi yang jitu merupakan hal yang dibutuhkan Islam untuk menggapai peradabannya. Oleh karena itulah, pemuda harus terus meningkatkan kualitasnya untuk membangkitkan Islam kembali sebagai kekuatan dunia. Persatuan dan kebersamaan di antara seluruh negara-negara muslim di dunia dalam melawan doktrin-doktrin Barat yang terus bertebaran akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kebangkitan Islam. Dengan demikian, kebangkitan peradaban Islam bukan lagi hal yang mustahil untuk dicapai pada tahun keemasannya.

Islam Sebagai Inti Dari Pemerintahan

Yulinda Dwi Komala



"Religion is a central defining characteristics of civilizations"

– Samuel P. Huntington –

Islam merupakan agama terakhir di dunia yang dipercaya sebagai agama yang paling sempurna. Islam mengajarkan segalanya, dari mulai pengetahuan yang belum dapat diterima oleh logika manusia sampai panduan kegiatan sehari-hari. Islam dahulu memimpin dunia dengan kehebatannya, dan Indonesia pun sempat jaya ketika tokoh-tokoh Islam masuk ke dalam Indonesia untuk menyebarkan Islam.

Pada zaman dahulu, Indonesia mengalami masa paling jaya ketika agama Hindu dan Buddha sedang menyebarkan agamanya

di Indonesia. Sebut saja kerajaan Majapahit, yang dikenal dengan masa Majapahitisme. Pada saat tersebut, Indonesia mengalami masa paling jaya karena berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah Indonesia.

Namun sejarah yang diajarkan di sekolah mengatakan bahwa persatuan Indonesia tersebut kembali terpecah ketika Islam masuk ke Indonesia. Ada beberapa tokoh Islam, sebut saja Buya Hamka, yang menentang pernyataan tersebut. Beliau meyakini bahwa, perpecahan yang terjadi ketika masa Islam tersebut dipengaruhi oleh cerita yang tidak benar dan mempengaruhi cerita sejarah Indonesia.

Pendeta Dr. Eka Darmaputra dalam bukunya mengaku, dibandingkan dengan kebudayaan asli dan Hindu, Islam jauh lebih berhasil menanamkan pengaruhnya pada seluruh lapisan masyarakat. Ia berhasil mencapai rakyat biasa dan menjadi agama dari mayoritas penduduk Indonesia. "Namun demikian, ia tidak menciptakan suatu peradaban baru. Sebaliknya, dalam arti tertentu, ia harus menyesuaikan diri dengan peradaban yang telah ada", tulis Eka Darmaputera (dalam buku *Pancasila: Identitas dan Modernitas*, di dalam jurnal karya Dr. Adian Husaini).

Perjuangan Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-11. Pada saat itu komunitas Islam masuk ke Pulau Jawa. Situs yang menjadi bukti sejarah tersebut yaitu adanya makam seorang pahlawan wanita bernama Fatimah binti Maimun. Dalam nisannya tertulis bahwa beliau wafat pada tahun 475 H/1082 M di Desa Leran, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya pada abad ke-12, mulai berdiri kerajaan Islam pertama kali bernama kerajaan Islam Pasai di Aceh. Tokoh yang terkait dengan kerajaan ini yaitu Sultan Malik Al-Shaleh sebagai raja pertama yang wafat pada tahun 1123 M. Selain itu berdiri pula kerajaan Singosari di Jawa, dengan Raja Kertanegara sebagai raja pertamanya pada masa periode 1254-1293 M.

Misi dakwah Islam yang dilakukan dinulai pada tahun 1404 M (ahad ke-14) dengan misi dakwah utusan Sultan Muhammad I yang berasal dari Turki. Di atas tanah Jawa, semhila tokoh Islam yang dikenal dengan sebutan Walisongo angkatan pertama. Setelah tokoh Walisongo I tersebut sudah pada wafat, maka perjuangannya digantikan oleh tim yang meneruskan dengan misi dakwah II oleh Walisongo angkatan kedua di Jawa.

Selanjutnya misi dakwah III oleh Walisongo angkatan ketiga dilakukan pada tahun 1435 sekaligus sidang Walisongo di Ampel Dento (Surabaya) untuk menetapkan Walisongo angkatan keempat. Dan pada tahun 1466, sidang Walisongo ke-4 menetapkan Walisongo angkatan kelima.

Sampai saat ini, Indonesia menjadi terkenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Hal itu dipercaya bahwa pengaruh Islam sudah menjalar sampai ke penduduk dalam di seluruh daerah Indonesia. Seorang ilmuwan bernama Prof. Naquib al-Attas sejak berpuluh tahun lalu sudah memperhatikan peran Islam di Indonesia. Dalam hukunya, beliau menegaskan bahwa jati diri bangsa Melayu-Indonesia sejatinya adalah Muslim. Identitas dan jati diri Melayu-Islam itu seharusnya dimanfaatkan oleh bangsa Melayu-Indonesia untuk membangun negeri mereka secara sungguh-sungguh sehingga mampu tampil sebagai salah satu peradaban yang kuat di muka bumi.

Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila tidak merujuk kepada nilai-nilai keislaman. Banyak kaum Muslim yang dipaksa tidak merasa memiliki Pancasila karena Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dalam perspektif sekuler dan peradaban lain untuk menggantikan Islam.

Istilah "Tuhan Yang Maha Esa" dalam sila pertama yang sudah jelas merujuk kepada Allah SWT dikaburkan maknanya menjadi "Tuhan apapun." Padahal sebenarnya nilai-nilai yang

ada dalam Pancasila hanyalah sebagian nilai yang ada pada agama Islam. Hal ini bisa dianalogikan seperti Islam memiliki 100 sila, dan Pancasila hanyalah 5 sila diantaranya. Jadi, dengan begitu apabila kita merujuk kepada Pancasila, secara tidak langsung kita pun merujuk kepada nilai-nilai Islam. Namun apabila kita ingin merujuk kepada nilai-nilai Islam, tidak harus menggunakan Pancasila, karena nilainya yang terhitung banyak.

Negara-negara Islam di dunia terkenal dengan letak geografisnya yang strategis. Salah satu negara yang berlandaskan Islam adalah Turki, namun sempat mengalami sekularisasi Islam. Tahun 1923 Republik Turki berdiri dengan dipimpin oleh Kemal Attaturk, dengan menghapus sistem kekhalifahan Islam.

Dalam masa pemerintahannya, Attaturk membangun satu sistem pendidikan sekuler, menggunakan sistem kalender internasional/Barat, serta menggunakan huruf latin dan menghapuskan Islam sebagai agama negara pada tahun 1923. Dampak yang ditimbulkan terhadap Turki yaitu terputusnya hubungan dengan dunia Islam di Arab dan penghapusan sejarah Turki Usmani. Lalu, Islam yang terorganisasi menjadi dicurigai, sehingga kegiatan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pada tahun 1923-1950, terjadi kebijakan penguatan sekularisasi. Di antaranya diterapkan sistem satu partai di mana Partai Republik dijadikan sebagai partai penguasa. Para Jenderal dipensiunkan dan ditetapkan sebagai pejabat partai. Selain itu, militer aktif dijauhkan dari aktifitas politik dan dijadikan sebagai instrumen negara penjaga ideologi sekulerisme. Presiden negara pun berkonsultasi dengan pimpinan militer dalam hal penyusunan undang-undang di mana militer memiliki hak veto. Dan pada saat itu pun Barat dijadikan sebagai acuan budaya oleh Turki modern.

Pada tahun 1950-1960, dikenal sebagai era multipartai. Kebijakan pemerintah saat itu untuk bergabung dengan NATO

relah menimbulkan perpecahan di kalangan militer terutama pejabat senior dan rendah. Para pejabat militer bergabung dengan Partai Demokrat, yang selanjutnya pemerintahan Demokrat gagal menjalin hubungan dengan militer rendah sehingga militer aktif mulai mengarahkan dukungannya kepada Partai Republik yang merupakan partai Attaturk. Dan pada akhir masanya, pejabat militer mulai memasuki dunia bisnis dan ekonomi.

Pada tahun 1960-1990, mulailah muncul kembali partai Islam. Kelompok Islam yang sebelumnya fokus pada kegiatan ekonomi dan dakwah mulai mendukung Refah Partisi (Partai Refah) Mekuatnya Islam dalam politik juga dipicu oleh menguatnya gerakan separatis Knrdi yang berafiliasi dengan sosialis. Dengan tokoh-tokoh perubahan pada masa itu diantaranya adalah Said Nursi, Necmetin Erbakan, Recep Tayyip Erdogan, dan Fetullah Gulen.

Dari kejadian tersebut dapat ditarik garis besar ceritanya, partai Islam beraliran Islam moderat ini telah membuktikan bahwa partai islam dapat hidup berdampingan dengan konstitusi sekuler negara Turki, bahkan dengan gemilang mempersembahkan pembangunan ekonomi yang mengagumkan, capaian yang tidak pernah sekalipun dicapai oleh rezim sekuler sebelumnya.

Bagian II

Pemimpin Transformatif

Transformasi Lee Kuan Yew

Dr. Zaim Uchrowi, MDM
(Guru Karakter & Transformasi)



"Jika kalian merasa sulit berpikir kalau tidak mengunyahnya, coba saja ganti dengan pisang."

–Lee Kuan Yew–

Itu kutipan tentang permen karet. Siapa lagi yang mengatakannya kalau bukan 'Bapak Singapura' yang wafat 23 Maret 2015 lalu. Ia mengatakannya pada radio BBC tahun 2000 silam. Saat itu wartawan BBC menanyakan pandangannya mengapa Singapura begitu keras menindak orang yang membuang kunyahan permen karet seenaknya.

Permen karet. Itu salah satu hal yang paling dikenal dunia tentang Singapura. Bukan karena enaknyanya rasa permen karet mereka. Namun karena besarnya denda yang dijatuhkan terkait

permen karet. Tidak ada negara di dunia yang khusus mengurus permen karet selain Singapura. Itukah yang menjadikan Singapura tumbuh menjadi salah satu negara termakmur di dunia?

Tentu saja bukan permen karet yang membuat Singapura makmur. Namun urusan permen karet berkontribusi dalam kemakmuran negeri pulau itu. Hingga pertengahan periode 1960-an, Singapura 'bukan apa-apa'. Bekas wilayah Kesultanan Riau Pulau Penyengat ini saat itu hanyalah pulau berawa-rawa dengan perkampungan kumuh di sana sini. Sangat jauh untuk dapat menjadi model peradaban dunia.

Lee Kuan Yew bertekad untuk mengubahnya. Ia punya bekal untuk mentransformasi Singapura. Dari sebuah kampung pulau di khatulistiwa menjadi sebuah *hub*—'pelabuhan penghubung'—perekonomian global. Ia seorang pengacara lulusan Cambridge di zamannya. Pengenalannya tentang Eropa membuatnya tahu bagaimana wajah semestinya dari sebuah peradaban. Ia tahu pula bagaimana membangun peradaban itu.

Pada tahun 1965, Singapura merdeka dari Malaysia. Gagasan transformasi diusung tinggi buat Singapura. Apalagi yang dapat menyelamatkan—bahkan memajukan—Singapura kalau bukan transformasi. Lee melihat peluang itu. Singapura tak punya sumber daya apa-apa. Namun kawasan sekitarnya, kepulauan Nusantara iri, adalah kawasan yang sangat kaya di dunia. Singapura bisa menjadi pusat pengendali ekonomi kawasan ini.

Kunci transformasi itu adalah *mindset*. Pola pikir. Yakni transformasi pola pikir warga kampung pulau menjadi pola pikir warga *hub* ekonomi dunia. Transformasi pola pikir itu dilakukan dengan mentransformasi struktur. Baik struktur fisik maupun struktur sosial. Struktur fisik dilakukan dengan membongkar kampung-kampung yang ada, menggantikannya dengan perumahan bertingkat.

Housing Development Board (HDB) menjadi titik awal transformasi oleh Lee Kuan Yew. Bekas perkampungan dibijaukan menjadi kota. Penduduk ditampung di perumahan-perumahan perkotaan. Dengan perubahan fisik seperti itu, perubahan sosial pun dilakukan. Yakni mengubah "masyarakat tradisional" menjadi "masyarakat industri".

Ketertiban menjadi pondasi dasarnya. Hal itu menyangkut kedisiplinan dan sekaligus kebersihan. Membuang sampah sembarangan didenda. Begitu pula meludah di tempat umum, dan juga membuang sisa permen karet seperti tersebut di atas. Seloroh "*Singapore is a fine city*" menuang mengemuka. *Fine* yang berarti denda, dapat pula berarti bagus. Dalam konteks Singapura, denda itu terbukti membuatnya menjadi kota yang bagus.

Ketika masyarakatnya tumbuh menjadi masyarakat industri, mudah bagi Lee Kuan Yew menjadikan Singapura *hub* ekonomi global. Investor asing diundang dan disambut baik. Infrastruktur dibangun habis-habisan. Ia ciptakan fasilitas terbaik untuk investasi maupun untuk layanan sebagai *hub* dunia. Dalam infrastruktur, pelabuhan Singapura salah satu yang terbaik di dunia. Begitu pula pelayanannya. Itulah yang membuat banyak negara bergantung pada Singapura, termasuk Indonesia.

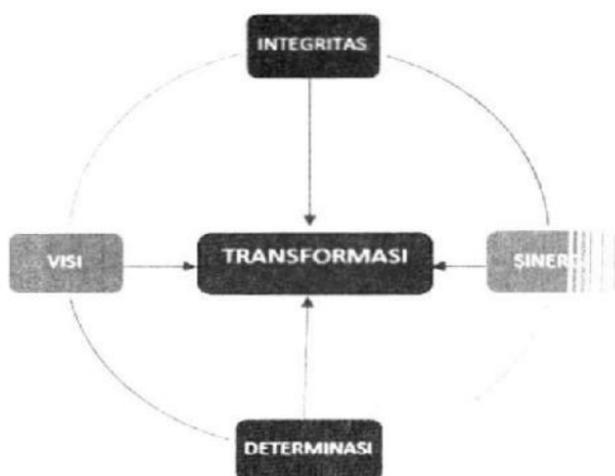
Hasilnya, Singapura tumbuh menjadi negara yang sangat makmur. Tingkat pendapatan perkapita Singapura mencapai lebih dari 15 kali lipat pendapatan perkapita Indonesia. Peringkat kesejahteraan masyarakatnya adalah 9 sementara Indonesia di peringkat 107 dunia. Pencapaian dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi pun melesat. Begitu pula dalam berbagai bidang jasa yang ditekuninya.

Meskipun begitu, Singapura belum puas dengan pencapaiannya. Bagi mereka rak cukup dengan hanya menjadi pusat keuangan dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik Barat. Negara

itu juga menjelma menjadi pusat kegiatan budaya terpenting di kawasan ini. Karya-karya maestro asal Indonesia seperti La Galigo dan Matah Ati menjadi besar setelah dipentaskan di Singapura. Drama *Broadway* New York pun rutin tampil di Singapura. Itu semua merupakan bagian dari hasil transformasi yang diinisiasi Lee Kuan Yew.

James MacGregor Burns (1978) memulai kajian transformasi dengan mengenalkan istilah “kepemimpinan transformasional”. Dalam pandangannya, kepemimpinan tersebut merupakan suatu proses di mana pemimpin dan pengikut saling membantu meningkatkan diri menuju “jenjang moral dan motivasi yang lebih tinggi.”

Sejak itu kajian kepemimpinan transformasi terus berlanjut. Termasuk yang dilakukan ‘bapak ensiklopedi kepemimpinan’ Bernard M. Bass (1985). Menurut Bass, seorang pemimpin transformasi adalah seorang pemimpin yang memiliki kualitas. Dengan kualitasnya, para pengikut menjadi “percaya, kagum,



loyal, dan hormat” bahkan “siap bekerja lebih keras dari semesrinya.”

Lee Kuan Yew memiliki kualiras seperti yang disebutkan oleh Bass. Ia tidak tiba-tiba mentransformasi Singapura. Ia membangun modal kepemimpinan yang kuat lebih dulu yang membuatnya mampu mentransformasi masyarakat kampung rawa-rawa itu. Modalnya bukan sekadar modal kekuasaan politik, melainkan hal lain yang lebih kuat yang membuat sebagian besar masyarakatnya percaya, kagum, loyal, dan hormat, serta siap bekerja lebih keras dari semesrinya.

Modal berharga sekaligus pondasi utama transformasi Singapura oleh Lee Kuan Yew adalah integritas. Aspek ini menyangkut ketulusannya bahwa transformasi didorongnya memang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh bangsa Singapura. Bukan untuk kelompoknya. Apalagi demi keluarga dan dirinya sendiri.

Semua tahu bahwa Lee Kuan Yew seorang jujur dan dapat dipercaya. itu modal utamanya. Apalagi ia juga seorang yang sangat kompeten. Kepemimpinannya bukan basil dari ‘menyihir publik’, melobi, atau ‘merebut kursi’. Kepemimpinannya merupakan buah dari kapasitas atau kompetensinya. Ketulusan, kejujuran, plus kompetensi itulah yang mengantarkannya ke level tinggi dalam integritas. Level yang secara umum masih sulit diraih dalam kepemimpinan pemerintah maupun korporasi milik negara di Indonesia.

Bukan hanya integritas yang menopang transformasi Singapura. Visi yang jelas juga menjadi kunci transformasi yang dilakukan Lee Kuan Yew. Merasa terjepit oleh negara-negara yang dominan beretnis Melayu, Singapura mengambil strategi Israel yang kuat di tengah kawasan Arab yang keras. Visi Singapura bahkan terbukti lebih efektif dibanding Israel, terbukti dari pencapaiannya sekarang.

Transformasi itu juga ditopang dengan determinasi yang luar biasa. Singapura memiliki prinsip *Kiasu*—bekerja esera keras karena tak ingin gagal—. Prinsip *Kiasu* itu dijalankan oleh seluruh elemen Singapura, mulai dari negara hingga masyarakat bawah. Belakangan timbul kritik terhadap prinsip itu karena dipandang membuat bangsa Singapura “kurang manusiawi”. Tetapi *Kiasu* itu telah menjadi kunci determinasi kuat bagi transformasi Singapura.

Penopang lain transformasi Singapura adalah sinergi. Berbeda dengan para pemimpin Israel yang memilih konflik, Lee Kuan Yew memilih bersinergi dengan negara-negara tetangganya. Untuk itu pada tahun 1973 Lee Kuan Yew rela menabur bunga di pusara Usman dan Harun—pahlawan Indonesia yang digantung Singapura dalam Konflik Malaya pada 1960-an—. Hasilnya: Indonesia dalam banyak hal termasuk energi menjadi sangat tergantung pada Singapura.

Lee Kuan Yew menunjukkan bagaimana sebuah transformasi besar dapat berjalan secara benar-benar efektif. Integritas, visi, determinasi, hingga daya sinergi Lee Kuan Yew telah mengantarkan Singapura menjadi seperti sekarang. Soal permen karet hanyalah pernak-pernik yang ikut mewarnai transformasi besar itu.

Menanti Gelombang Keempat Indonesia

Alvian Novi Arvianto



Perubahan dinamika pergerakan Indonesia saat ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin kuat. Tingkat kemajemukan bukan hanya terdiri dari ras, suku bangsa, dan agama. Tetapi, telah lahir sebuah kemajemukan modern yang disebabkan oleh arus globalisasi. Perubahan dalam sosial masyarakat saat ini memang begitu massif dan sporadis. Pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga terjadi sebagai imbas dari globalisasi tersebut.

Ini menunjukkan bahwa setiap perkembangan teknologi akan memicu pergeseran nilai yang ada dalam masyarakat. Globalisasi merupakan siklus peradaban dunia yang mempengaruhi pemikiran secara global atas isu dan pola kehidupan yang sedang

berkembang dalam lingkungan masyarakat dunia. Pengaruh ini membawa pemuda Indonesia secara tidak langsung mau tidak mau harus terlibat dalam sistem globalisasi apabila tidak ingin tertinggal dalam persaingan global.

Saat ini generasi muda Indonesia sedang dihadapkan pada perkembangan peradaban di era globalisasi yang nantinya akan menjadi sebuah peradaban baru dalam kehidupan manusia. Peradaban ini akan menjadi simbol peradaban yang baik, bahkan diharapkan menjadi salah satu peradaban terbaik di dunia.

Peradaban Indonesia saat ini telah melewati beberapa gelombang perkembangan kehidupan yang telah memberikan warna dalam sejarah berdirinya bangsa ini. Menurut Anis Matta dalam bukunya "Gelombang Ketiga Indonesia", Indonesia hingga saat ini telah melewati 3 fase gelombang perubahan.

Gelombang pertama yaitu masa penjajahan. Pada tahap ini generasi muda berhasil melahirkan bangsa Indonesia. Kemudian lahir generasi fase gelombang kedua Indonesia yang terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Gelombang kedua ini merupakan masa pencarian sistem ekonomi politik yang sesuai dengan budaya sosial rakyat Indonesia. Di tahap gelombang kedua ini tercipta keseimbangan demokrasi dan pembangunan, kebebasan dan kesejahteraan, serta otonomi daerah dan integritas nasional. Pada gelombang kedua ini juga mulai menggugat kesadaran baru akan relasi agama dan negara, demokrasi dan pembangunan, serta hubungan pusat dan daerah.

Sedangkan fase gelombang ketiga yang sedang terjadi saat ini mempunyai ciri-ciri diantaranya penguatan *civic society*, seperti partai politik, media, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM). Pada gelombang ketiga ini, kekuasaan lembaga negara rak ada lagi yang dominan. Dalam masa ini, pemimpin tidak lagi mengandalkan otoritas, melainkan kemampuan persuasi. Gelombang perubahan tersebut berangsur-angsur berkembang sesuai dengan zamannya. Tidak bisa diptingkiri bahwa pergeseran tersebut telah memberikan warna pada kehidupan sosial yang ada di masyarakat secara menyeluruh.

Masyarakat mulai merasakan pengaruh pergeseran model kepemimpinan dalam keberlangsungan dan eksistensi dari sebuah bangsa. Kondisi sosial yang berubah-ubali pun mempengaruhi model kepemimpinan yang lahir pada masanya. Ideologi atau pandangan terhadap sebuah perkembangan zaman juga dipengaruhi oleh kondisi pendidikan dan intelektualitas dari masing-masing generasi tersebut.

Menuju Peradaban Baru

Saat ini generasi muda Indonesia memasuki dunia di mana sebuah pergerakan dapat terhubung secara luas dan cepat. Konektivitas menjadi sebuah ciri khas yang membedakan generasi Indonesia saat ini dengan generasi-generasi sebelumnya. Inilah pengaruh globalisasi yang semakin menjamur di mana-mana. Generasi muda saat ini semakin mudah terkoneksi satu sama lain. Perkemhangan teknologi sangat berpengaruh besar dalam pergerakan generasi muda.

Tingkat konektivitas yang tinggi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Generasi gelombang ketiga dimanjakan dengan teknologi yang bisa dijangkau dengan mudah dan cepat sehingga seolah-olah tidak ada sekat dalam komunikasi.

Pergerakan saat ini tidak hanya dari satu lingkaran dalam

makna literal tetapi sudah memasuki sebuah pergerakan di mana setiap generasi muda mampu berinteraksi secara global. Namun perkembangan gelombang pergerakan di Indonesia akan terus bergerak ke fase berikutnya. Secara konseptual, generasi gelombang ketiga ini akan mempersiapkan generasi gelombang keempat yang akan lahir dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.

Generasi selanjutnya secara klasikal juga akan ditentukan oleh kualitas dan sistem pendidikan yang ada pada generasi fase gelombang sebelumnya. Inilah yang menjadi landasan kenapa kualitas generasi sebelumnya dan sistem pendidikan yang diterapkan sangat mempengaruhi kualitas generasi selanjutnya.

Generasi gelombang keempat Indonesia akan dididik berdasarkan kriteria-kriteria pendidikan yang saat ini sedang berkembang dengan mengangkat nilai-nilai ketuhanan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Generasi gelombang keempat tidak hanya memiliki konektivitas yang baik dalam teknologi tetapi mereka juga akan dipersiapkan melalui sebuah sistem pendidikan yang menuntun generasi tersebut supaya memiliki karakter dan kemampuan dalam bersaing secara global.

Gelombang keempat Indonesia ini dipersiapkan melalui konsep pendidikan yang mengintegrasikan 4 kompetensi inti yang seharusnya mereka miliki setelah konektivitas pada gelombang ketiga terpenuhi. Generasi ini akan mampu mengendalikan efek domino dari perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat sehingga mampu menjadi pemimpin yang berkarakter kuat dan cerdas.

Keempat kompetensi inti yang dikembangkan ini nantinya menjadi cikal bakal kemampuan yang akan dimiliki oleh generasi muda fase gelombang keempat Indonesia. Konsepsi kompetensi ini dapat dikembangkan dalam berbagai literasi yang menjadi hasil dari kontemplasi dan elaborasi dari generasi gelombang ketiga.

Konsepsi ketuhanan akan memberikan dasar pemahaman kepada generasi gelombang keempat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Konsepsi dari kemampuan sikap akan membentuk mental generasi muda dalam proses menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Konsepsi pengeraluan akan mendorong generasi gelombang keempat dalam memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin talunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

Ketiga konsepsi tersebut akan dilengkapi dengan konsepsi keterampilan yang akan membantu generasi gelombang keempat dalam mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.

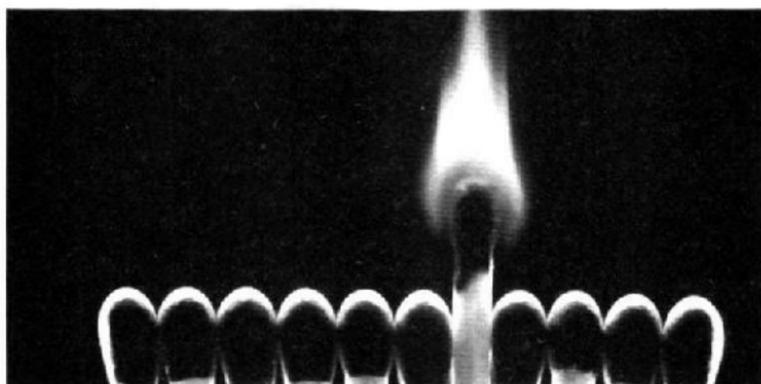
Gelombang keempat Indonesia nantinya diharapkan mampu mempelajari fase-fase gelombang sebelumnya sehingga mampu mengetahui dan memahami perubahan dan perkembangan generasi muda Indonesia. Konektivitas dan perkembangan teknologi akan berperan dominan dalam persiapan generasi fase

gelombang keempat Indonesia. Sehingga peran pendidikan sangat berpengaruh besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan memimpin bangsa ini.

Sistem pendidikan yang mencakup keempat aspek atau konsepsi tersebut akan melahirkan generasi Indonesia yang unggul karena selain terbiasa dengan teknologi yang baik, mereka juga akan ditempa dalam aspek karakter dan keterampilan sehingga mampu menjadi generasi muda Indonesia yang memiliki jiwa kepemimpinan integratif.

Pemimpin Muda Daerah dan Kebangkitan Indonesia

Dicky Adra Pratama



Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan luar biasa. Kekayaan sumber daya alam seperti pertambangan, hasil laut, agrarian, hingga sumber daya manusia Indonesia yang berjumlah hingga 250 juta. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Hardiyanto mengatakan, jika dilihat dari Neraca Aset Negara yang tercatat di laporan keuangan Pemerintah Pusat sampai pada akhir 2014 lalu, nilai kekayaan Indonesia bisa mencapai Rp.1,949,15 triliun.

Data tersebut yang tercatat di Pemerintah Pusat, belum dengan hasil pencatatan dari konsolidasi Pemerintah Daerah. Dari laporan keuangan tersebut saja kita bisa menyimpulkan

bahwa Indonesia sangat kaya. Bahkan, Kekayaan Indonesia tidak terhingga karena tidak semua kekayaan Indonesia bisa dihitung, seperti udara.

Kekayaan tersebut tidak hanya berhenti pada data statistik saja. Bonus demografi pada tahun 2020-2030 mendatang juga kekayaan yang dimiliki Indonesia. Penduduk dengan umur produktif lebih banyak dari penduduk yang umurnya tidak produktif, yakni sebanyak 70% atau sekitar 180 juta penduduk Indonesia. Bila merujuk pada data World Bank dari The 2011 International Comparison Program (ICP) pada 2014 lalu, yang menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami kemajuan dengan PDB sebesar 2,3%, menduduki peringkat 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Artinya, dengan segala potensi yang ada, bila dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan terutama para pemimpinnya, Indonesia akan menuju kebangkitan yang dicita-citakan.

Sesuai dengan laporan McKinsey Global Institute (MGI) yang dipublikasikan pada bulan September 2012 dengan tajuk "*The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*" yang memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia berpotensi besar untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang saat ini sebesar 6% apabila iklim ekonomi Indonesia stabil maka diperkirakan PDB Indonesia akan mencapai USD 6,7 triliun.

Pemimpin Muda Daerah dan Indonesia Bersih

Setelah 16 tahun Otonomi Daerah dilaksanakan, yang berarti daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, tidak menjadikan korupsi di Indonesia berkurang. Korupsi

yang sebelumnya banyak terjadi di pemerintah pusat juga ikut mengotoganisasi diri hingga ke daerah. Kemendagri dari rahun 2004 hingga Februari 2015 mencatat ada 291 kepala daerah tingkat provinsi maupun kota/kabupaten terlibat dalam kasus korupsi. Tercatat juga 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi.

Kepemimpinan merupakan unsur penting dalam pencegahan korupsi. Keberhasilan daerah selalu ditentukan kualitas kepemimpinan yang bersih dari korupsi. Daerah memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan perekonomiannya jika setiap potensi tersebut tidak dikorupsi.

Banyak kepemimpinan muda di daerah yang menorehkan prestasi perubahan dalam pencegahan korupsi seperti Gamawan Fauzi yang menjabat sebagai Bupati Kota Solok pada usia 38 tahun. Beliau uelakttkan pemotongan honorarium tambahan aparat pemerintahan yang pertanggungjawabannya kurang jelas dan juga melakukan perhitungan honor tersebut secara transparan sehingga berhasil mengalokasikan dana sebesar 14 milyar ke sektor produktif.

Ada juga Bupati Kebumen, Rusrriningsih yang dengan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) lelang terbukanya. Proses lelang yang terbuka ini menekankan pada upaya pencerapan Inpres No.5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Mekanisme PBJ yang terbuka maksudnya adalah dengan melakukan pelelangan di tempat terbuka; Alun-Alun Kebumen dengan tujuan menegakkan transparansi dan menghilangkan prasangka masyarakat terkait KKN dalam proses PBJ.

Juga beberapa kepemimpinan muda lainnya yang menjadi motor penggerak pencegahan korupsi di Daerah seperti Pft. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) yang tahun 2015 ini ditetapkan sebagai Pemimpin Daerah Terbaik versi Tempo,

Walikota Bandung Ridwan Kamil yang menerima 3 penghargaan dari KPK dan masih ada tokoh kepemimpinan muda lainnya.

Urgensi Kepemimpinan Pemuda

Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa kepemimpinan pemuda di daerah telah berhasil membawa Indonesia jauh dari celah *extraordinary crime* (KKN). Namun *kontras* dengan prestasi kepemimpinan muda tersebut, permasalahan utama yang sedang Indonesia hadapi saat ini adalah krisis kepemimpinan. Masyarakat kecewa dengan wajah kepemimpinan yang selama ini ada. Banyak harapan masyarakat yang tidak terpenuhi, permasalahan yang tidak terselesaikan, dan utamanya adalah korupsi yang semakin menjadi-jadi. Alhasil, terjadilah krisis kepercayaan dari masyarakat.

Masyarakat mulai menaruh kepercayaan kembali setelah munculnya beberapa wajah pemimpin daerah yang menorehkan prestasinya dalam upaya pencegahan korupsi. Kepemimpinan kaum muda dipercaya dapat membawa perubahan terhadap permasalahan korupsi saat ini. Kaum muda dirasa masih idealis, konsisten, dan bersih dari korupsi. Karakteristik kepemimpinan kaum muda cukup kuat, pola pengambilan keputusan yang demokratis sehingga dapat terhindar dari upaya KKN.

Sesuai teori generasi Strauss dan Howe, bahwa setiap generasi memiliki karakteristik masing-masing yang dibentuk dalam sejarah, yang mengubah arah perkembangan masyarakatnya. Kaum muda beruntung karena dibentuk dalam iklim yang lebih baik, lebih demokratis dan tidak korup. Maka bukan suatu hal yang mustahil untuk Indonesia jauh dari korupsi. Semua itu bergantung pada kepemimpinannya.

Bangkit atau Mundur

Kemajuan Indonesia sudah ada di depan mata. Namun, apabila kita masih tidak bisa menghadapi dua persoalan utama yakni kepemimpinan dan korupsi, bisa dipastikan Indonesia malah semakin jauh dari kebangkitan. Kepemimpinan dan korupsi saling berkaitan satu sama lain.

Kita mendambakan posisi di mana triliunan anggaran APBN-APBD benar-benar diorientasikan untuk mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan. Dalam Studi yang dilakukan Paolo Mauro (1995: 681-711) membuktikan bahwa korupsi membawa dampak negatif bagi rasio total investasi terhadap PDB. Artinya, korupsi memang menjadi pengaruh yang buruk terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Dari studi seorang peneliti, Mauro, menunjukkan jika Indonesia bisa menangani masalah korupsi sehingga Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sama dengan Singapura, maka total Investinya akan melonjak hingga 9,98%. (Nusamara, 2001)

Menurut data terbaru yang dirilis Transparency International mengenai Indeks Persepsi Korupsi tahun 2014, Singapore menduduki peringkat 7 dengan IPK 84 sementara itu Indonesia naik menjadi peringkat 34 dari 107 Negara dengan angka Indeks Persepsi Korupsi 32.

Kita juga perlu wajah kepemimpinan nasional maupun daerah yang kuat untuk mengelola Indonesia yang kompleks ini terutama dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan juga melaksanakan amanat konstitusi untuk menjaga kekayaan Indonesia. Amanat konstitusi, Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang dengan jelas mengatakan bahwa "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran*

rakyat.” Karena jelas kesuksesan Indonesia dalam mengelola permasalahannya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang ada. Kalau pemimpinnya tidak mengerti masalah Indonesia, korup, enggan mematuhi konstitusi, maka berarti Indonesia sedang berbalik arah menuju kemunduran.

Jelas kita perlu mengisi kekosongan kepemimpinan muda yang bersih di daerah lainnya untuk menjadikan fondasi utama dalam menyokong kebangkitan Indonesia. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut, seluruh elemen masyarakat Indonesia terutama Pemerintah Pusat dan Daerah harus memberikan usaha terbaiknya dalam melahirkan dan memberi kesempatan kepada generasi muda yang berkompeten untuk memimpin daerah-daerah di Indonesia.

Kita membutuhkan kepemimpinan *creative minority* yang konsisten memerangi korupsi dan selalu menebarkan optimisme Indonesia akan jauh dari korupsi dan bangkit menjadi negara besar. Semua itu menandakan bahwa sudah saatnya kaum muda yang memimpin Indonesia. Suara untuk membawa perubahan lewat kaum muda sudah terdengar. Apakah kita merasa terpanggil? Apakah salah satu dari kaum muda yang akan mengisi kekosongan tersebut adalah kita?

Memahami Cara Pemimpin Berpikir

Edi Saputra



Membicarakan tema kepemimpinan sama halnya dengan berbicara tentang peradaban. Peradaban tercipta saat ini karena goresan pena perjuangan dan pengorbanan para pemimpin. Pemimpin dan sejarah selalu saling memberi dan menginspirasi. Jika bukan karena kondisi sejarah yang begitu buruk, tidak akan muncul seorang pemimpin. Dan jika tidak muncul seorang pemimpin, sejarah hanya tinggal sejarah.

Langkah pertama dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan adalah memahami hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan, seperti halnya cinta, dapat dijelaskan dengan banyak cara. Salah satu cara penjelasan yang mencakup sebagian arti kepemimpinan adalah tindakan dan kemampuan

yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif.

Dengan memahami makna kepemimpinan, maka pemimpin dapat diartikan sebagai orang yang bertindak dan memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga orang lain bertindak positif menuju tujuan bersama.

Banyak contoh kejadian mengajarkan bahwa tujuan kepemimpinan adalah menciptakan perubahan, karena kebanyakan perbaikan akan memerlukan perubahan dari *status quo*. Agar mencapai perubahan yang signifikan diperlukan tim atau orang lain yang bekerja sama sehingga tantangan kepemimpinan adalah bagaimana membuat orang lain *take action*.

Satu minggu mengikuti pelatihan School for Nation Leader (SNL) mengajarkan bahwa era kepemimpinan masa depan adalah era *networking*. Seorang pemimpin yang hebat tidak maksimal dalam kepemimpinannya tanpa jaringan pertemanan yang luas. Pelatihan yang menghimpun 50 mahasiswa seluruh Indonesia dari 40 Perguruan Tinggi diharapkan menjadi salah satu media berjaring antara mahasiswa di mana mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan.

Bagaimana Pemimpin Berpikir?

Dubrin dalam buku *The Complete Ideal's Guide for Leadership* menjelaskan bahwa memahami bagaimana pemimpin merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan kepemimpinan bagi diri sendiri atau ketika kita sedang mengobservasi pemimpin yang kita idolakan.

Sebagian besar tugas pemimpin adalah membuat keputusan, baik keputusan penting atau tidak penting. Keputusan apapun yang dibuat oleh pemimpin akan mempunyai dampak pada

segala aspek di organisasi yang dipimpin baik langsung maupun tidak langsung.

Kemampuan berpikir yang mampu melihat gambaran umum merupakan salah satu aspek kemampuan kepemimpinan yang harus dimiliki. Seorang pemimpin diharapkan mampu melihat implikasi luas dari tindakan mereka dan dari tindakan anggota timnya. Berikut tiga kategori pemikiran umum seorang pemimpin:

1. Pemikiran strategis

Pemikiran strategis adalah kemampuan untuk berpikir dari segi bagaimana tindakan pemimpin bisa membantu organisasi beradaptasi dengan dunia luar. Pemikiran ini dapat diartikan sebagai pemikiran yang melihat hasil akhir atau tujuan akhir dari suatu keputusan.

2. Pemikiran Sistem

Pemikiran sistem merupakan pemikiran yang berusaha memahami bagaimana perubahan pada bagian suatu sistem akan menimbulkan perubahan di bagian yang lain dari sistem itu. Pemikir sistem juga memperkirakan bagaimana perubahan hari ini akan mempengaruhi perubahan di masa depan

3. Pemikiran besar

Pemikiran besar merupakan pemikiran yang berusaha melihat gambaran besar dari sesuatu. Pemikiran besar membuat organisasi optimis akan masa depan organisasi.

Salah satu tokoh luar biasa Indonesia yang telah menerapkan ketiga pemikiran tersebut adalah H.O.S Cokroaminoro. Beliau terkenal sebagai guru bangsa karena menjadi guru bagi para pemimpin bangsa sekaligus sebagai merupakan seorang pemimpin salah satu organisasi yaitu Sarekat Islam.

Cokroaminoto berpikir strategis dengan mendirikan organisasi Sarekat Islam yang akhirnya menjadi partai politik. Ia melihat hasil akhir bahwa umat Islam di Indonesia memerlukan organisasi yang bisa menampung semua aspirasi masyarakat dengan prinsip egaliter.

Pemikiran sistematisnya tampak dalam pesannya bahwa organisasi adalah rumah, koperasi adalah dapur, dan media adalah alat perjuangan. Ketiga hal tersebut merupakan suatu kesatuan sistem pergerakan yang harus saling bersinergi. Beberapa organisasi yang berdiri sebelum dan setelah SI berdiri menjadi tidak idealis karena tidak mempunyai kemandirian keuangan sebagai "dapur" organisasi. Cokro melihat ini sebagai tantangan sehingga melebarkan sayap SI menjadi cabang-cabang penggerak perdangan.

Visi besar Cokro terkait hijrah membuktikan bahwa dia memiliki pemikiran besar akan masa depan pribumi. Ketika berdiskusi dengan Agus Salim, Cokro menyampaikan bahwa hijrah tidak terjadi kecuali setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sebaik-baik siasat. Menurutnya hijrah akan tercapai jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

Selain visi hijrah, Cokro juga memandang pentingnya memaknai kata *iqra'* atau bacalah. Membaca tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Pemimpin yang hebat merupakan pemimpin yang mampu membaca tanda zaman. Cokro dapat membaca tanda zaman bahwa tidak lama lagi pribumi akan menjadi bangsa yang merdeka.

Menjadi Pemimpin *Why?*

Banyak pemimpin yang gagal, namun banyak juga pemimpin yang berhasil. Pemimpin besar yang lahir pada zamannya

seringkali tidak menyadari atau tidak merencanakan bahwa dia akan menjadi pemimpin besar. Sebut saja Dr. Martin Luther King, ketika berpidato di lapangan Washington, kurang lebih 250.000 ribu orang dengan suka rela datang berkumpul datang umuk mendarkan pidatonya. Dr. King mampu menjadi magnet berkumpulnya ribuan orang bukan karena dia keliling Amerika dan menawarkan solusi yang dibutuhkan Amerika. Orang berkumpul karena orang percaya dengan apa yang dipercayai oleh Dr. King.

Hal yang demikian juga terjadi pada Cokroaminoto, Sukarno, dan pemimpin-pemimpin dunia lain. Mereka memulai dari apa yang mereka percayai, tujuan, sebagai atau dengan kata lain "*why*" mengapa melakukannya. Pemimpin yang mampu memberikan "*why*" yang jelas. Orang-orang yang mengikutinya ikut bukan karena harus ikut tapi memang ingin ikut. Mereka mengikuri pemimpin karena mereka percaya dan yakin akan apa yang diyakini pemimpinnya.

Indonesia Menuju Pusat Peradaban Dunia

Ferry Wirawan



Kesalahan sosial merupakan cara atau pola interaksi manusia dengan manusia lainnya. Apakah itu terhadap keluarga, teman, sahabat, atasan, bawahan, dan orang yang baru dikenal ataupun orang yang memang hadir hanya sekian detik dalam kehidupan kita.

Bahasa kesalahan sosial sering juga dikenal dengan istilah *Hablum Minannas* (hubungan dengan manusia). Ini juga yang menjadikan alasan mengapa diciptakannya manusia yang begitu banyak dan berbeda antara satu sama lain—baik kekurangan maupun kelebihan—agar manusia selalu senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga dapat memahami arti dari sebuah perbedaan yang akhirnya akan saling melengkapi satu sama lain.

Lalu bagaimana kesalahan sosial masyarakat di Indonesia? Kita harus mengakui bahwa saat ini Indonesia benar-benar dalam posisi yang kurang sehat dalam hal kesalahan sosial. Di tingkat masyarakat saja bisa kita lihat dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh di jalan raya yang selalu kita amati; melawan arus lalu lintas merupakan hal yang biasa, begitu pula dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dikuatkan lagi pada penegakan hukum di tingkat dasar, suap-menyuap antara pelanggar dan penegak hukum menjadikan Indonesia terlihat lemah dalam hal kesalahan sosial.

Kesalahan sosial di tingkat pelajar bisa kita lihat melalui berita-berita di media massa tentang banyaknya pelajar—khususnya di kota-kota besar—yang melakukan rawuran. Belum lagi masalah tak wajar lainnya seperti rokok, niras, narkoba, serta pergaulan bebas.

Begitu juga dengan iklim kesalahan sosial di tingkat pemerintahan. Mulai dari *mark up* anggaran, suap menyuap, hingga permainan tender. Tak heran, indeks korupsi Indonesia herada di posisi 107, yang artinya sangat jauh dari kata 'negara bersih'.

Jika kita ingin melihat bagaimana kondisi kesalahan sosial negara ini sesungguhnya, silahkan heranggapan bahwa kita adalah seorang turis yang harti tiha di Indonesia. Selepas sampai bandara kita akan tuenemui calo-calo yang memaksa kita untuk naik taksi ataupun angkutan lainnya. Yang mengagetkan adalah mereka melakukannya dengan paksaan. Belum lagi setelah sampai di terminal kita akan lebih banyak menenuikan pemaksaan mulai dari tukang ojek, bajaj, taksi, angkot, dan lainnya. Saat herada di angkutan umum pun kita masih merasa tak aman dari ancaman copet, hipnotis, jambret dan sebagainya. Beginilah kira-kira gambaran masyarakat Indonesia, terutama di ibukota.

Memang semuanya yang tergambar di atas bukan merupakan cerminan dari seluruh tindak tanduk insan Indonesia. Namun kita tidak boleh memungkiri bahwa kesalahan sosial di negeri kita memang sedang terganggu. Baik mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua.

Maka jika Indonesia bercita-cita menjadi pusat peradaban dunia, kita harus bersiap mengubah pola kesalahan sosial kita terlebih dahulu. Kita bisa memulai dari hal yang paling dekat dengan diri kita, seperti; keluarga, sahabat ataupun teman, tentunya dengan menjadikan diri kita sebagai *role model* manusia Indonesia yang memiliki jiwa kesalahan sosial.

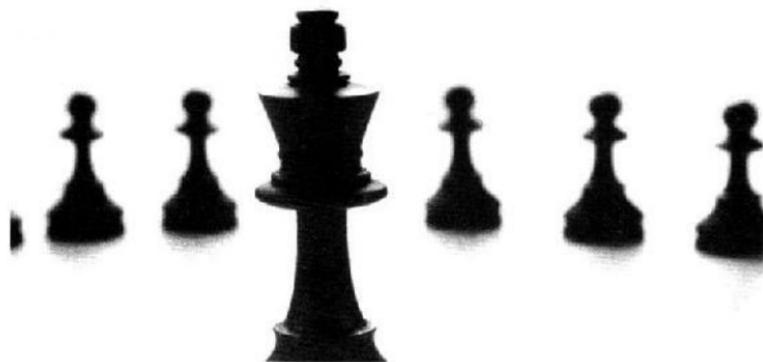
Kita bisa bayangkan jika Indonesia ke depannya memiliki penduduk yang mempunyai sifat-sifat kesalahan sosial yang tinggi. Di jalanan kita akan melihat kondisi jalan raya yang tertib. Di sekolah-sekolah kita akan melihat pelajar sedang belajar bersungguh-sungguh dan jauh dari aktivitas premanisme. Di kalangan pemerintahan kita tidak menemukan lagi berita-berita soal korupsi dan praktek kecurangan lainnya.

Bayangkan saja jika manusia Indonesia sudah memiliki karakter kesalahan sosial dalam dirinya. Maka tak heran jika seluruh pelosok Indonesia tak ada lagi jiwa yang kelaparan, rasa aman di mana-mana, disiplin dan tertib menjadi prinsip. Banyak pula orang yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Indonesia belum siap menjadi pusat peradaban dunia jika saja dalam hal kesalahan sosial masih minim. Saat ini Indonesia sangat membutuhkan karakter kesalahan sosial yang tinggi, yang harus melekat pada jiwa setiap insan Indonesia. Karena diharapkan nantinya Indonesia bukan saja menjadi pusat peradaban dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi, namun juga harus menjadi pusat peradaban dunia dalam hal kesalahan sosial. Semoga. Amin!

Negarawan Muda dan Pemimpin Negarawan

Suciana Nurul



Pemuda Indonesia memiliki banyak karakter, mulai dari yang energik, tegas, hingga kritis. Ragamnya karakter itu tercipta dari keanekaragaman yang khas dari berbagai etnis, golongan, dan agama. Semuanya menjadi budaya yang kharismatik dan melekat pada negarawan muda Indonesia.

Indonesia sepatutnya bangga terhadap bangsanya yang terkenal ramah dan santun. Tapi apakah kesantunan itu terwujud dalam korupsi, apakah keramahan itu terwujud dalam aksi bakar ban? Demo anarkis? Atau merusak fasilitas umum? Itukah budaya yang kharismatik diwarisi oleh para pejuang terdahulu? Zamannya sudah berbeda kawan!

Identitas bangsa ini mulai usang dimakan oleh zaman globalisasi yang keji. Bisa jadi globalisasi tidak berpihak pada Indonesia atau sebaliknya, sehingga identitasnya mulai kusam oleh debu-debu ketidakjujuran, individualisme, keras hati, dan keapatisan yang kental seperti susu es krim.

Sekarang tahun 2015, 30 tahun lagi Indonesia akan masuk pada usia 100 tahun kemerdekaannya. Tapi tak sedikit pun kemerdekaan moral. Nepotisme merenggut kekuasaan, korupsi membunuh ekonomi, kolusi menggadai hak kehidupan bangsa, dan teknologi serta obat-obat terlarang merusak mental generasi. Mereka jadi bodoh dan pengemis kepada pihak asing yang tumbuh subur menyegar di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosok Negarawan Muda

Di manakah negarawan muda yang lahir di tanah surga ibu pertiwi? Negarawan muda bukanlah sosok yang mudah dipanaspansi oleh masalah yang tak jelas akarnya di mana. Negarawan muda berpikir jenih dan membidik tajam pokok permasalahan. lalu musyawarah seperti yang diwarisi oleh negarawan terdahulu. Inilah budaya yang kharismatik, karakter dan keterampilan perencanaan yang membudaya di kalangan warganya.

Negarawan muda lahir di tanah subur, dan harus jadi tunas yang subur juga. Ia terlahir sebagai pemimpin negarawan yang memikirkan Indonesia 100 tahun yang akan datang, bahkan lebih dari itu. Bukan terlahir sebagai pemimpin politik yang hanya memikirkan bagaimana memenangkan kedudukan politik agar terus berkuasa secara grup dan individu. Pemimpin muda mampu merangkul semua kalangan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan Indonesia yang sudah sangat pelik, mengakar.

Negeri ini sudah sangat lama tertidur dan tak pernah membangunkan pemimpinnya dari tidur berkepangangan. Layaknya negeri ini terjajah seumur hidup. Bukan terjajah selama 3,5 abad ataupun 3,5 tahun. Tetapi terjajah selamanya dari moral, kemiskinan, kebodohan, keapatisan, ketidakjujuran, dan banyak lagi. Penjajahan dari segi ekonomi dan budaya. Teknologi apa lagi. Penjajahan ini memang tak tampak dan kurang disadari, tetapi jelas menyengsarakan dan melumpuhkan sebagian besar aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Negara membutuhkan pemuda yang menjadi negarawan muda untuk jadi pemimpin agar Indonesia lepas dari permasalahannya. Pemuda lahir dari jiwa aktivis, bekhidmat pada kepentingan masyarakat, berintegritas, jujur, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pemuda sebagai wujud pemimpin masa depan yang tak hanya menghujai dan mengkritik secara anarkis tetapi mereka beraksi nyata dan berkontribusi secara positif.

Mengkritik kebijakan pemerintah melalui aksi positif seperti musyawarah, surat terbuka, tulisan melalui media jika pemerintah mulai lalai. Negarawan muda ialah mereka yang bertekad dan nekat dalam memperjuang hak rakyat, kewajibannya sebagai pemimpin bangsa dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang memiliki kepentingan dan niat untuk menghancurkan bangsa ini.

Tugas dan Peran Pemimpin Negarawan

Pemimpin negarawan menjadi teladan yang sangat signifikan untuk jadi *role model* di berbagai aspek kehidupan. Pemimpin negarawan mempunyai kemampuan dalam memengaruhi rakyat untuk mengestimasi seluruh energi masyarakat dan mengoptimalkan kemampuan rakyat untuk saling merangkul dan bersama-sama berbuat.

Memperpendek jurang pemisah sosial yang sering menjadi sekat komunikasi. Penyatuan kelas sosial dan afiliasi, pengusaha dan buruh, kampus dan pabrik, sipil dan militer, Polri dan KPK. Semua akan membuat pembaruan yang krusial sesuai kapasitasnya sebagai pelaku dan pemberi contoh di pandangan lokal dan internasional. Bukan pencitraan dan peliputan media yang mengagung-agungkan dirinya agar tetap eksis di layar televisi.

Perubahan seperti reformasi di tubuh pemerintahan menjadi *main point* dalam pemecahan banyaknya permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia. Dalam hal ini, birokrasi yang terbuka dan independen menjadi bidikan untuk bagaimana mengelola sistem keuangan negara yang dinilai sangat tidak efisien dengan banyaknya kasus-kasus korupsi. Tanpa pengelolaan sistem keuangan yang efektif pada birokrasi, kampus sekalipun yang dikenal sebagai lembaga pencetak generasi intelektual akan membidik proyek dan berburu rupiah semata, melupakan segala inti kewajiban sebagai kontributor ilmu pengetahuan dan peradaban.

Perbaikan tubuh birokrasi akan memberikan keuntungan banyak seperti tidak bebasnya para investor untuk seenaknya menanamkan modal. Contoh, Freeport tak akan pernah puas untuk mengeruk harta karun Indonesia di Papua sampai ludes, investasinya sampai 40 tahun dengan pembagian yang tidak merata, mau makan apa anak cucu kita nanti.

Kemudian, peningkatan kapasitas industri seperti, industri kapal, industri pesawat terbang, pelabuhan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, apalagi Indonesia akan dihadapkan pada bonus demografi. Juga, meningkatkan mutu pendidikan dan pendidikan bagi orang-orang terbaik negeri ini. Mereka butuh asupan pendidikan yang berkualitas taraf internasional.

Kebijakan baik dari pemerintah ketika membuka kesempatan emas bagi orang-orang terbaik bangsa ini dengan penyediaan beasiswa LPDP dalam dan luar negeri. Mereka yang lahir dari kampus dengan kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang memadai akan diberi beasiswa ke 100 bahkan 50 universitas terbaik di dunia untuk menuntut ilmu agar menjadi generasi yang berkontribusi besar pada bangsa dan negaranya.

Saya sendiri teringat pada kebijakan presiden pertama negeri ini, Ir. Soekarno mengirim sebanyak-banyaknya pelajar untuk menuntut ilmu teknologi maritim dan pesawat terbang ke banyak negara karena kapasitas Indonesia yang tinggi di bidang maritim dan kedirgantaraan.

Merawat Indonesia

Sosok negarawan muda dan tugas serta peran pemimpin negarawan bukan melirik dia ataupun mereka, tapi kita. Kita adalah bangsa yang besar karena budaya yang kharismatik dan khas mewarnai karakter Indonesia dari gugusan pulau dan kekayaan alam, budaya, dan bahasa. Indonesia lahir di antara dua benua Asia dan Australia, diapit oleh laut China Selatan dan Samudra Pasifik, tak salah jika berbagai negara di belahan bumi ini selalu mengintainya. Negara agraris dengan rarusan cincin vulkanis yang menjadikan ia subur dan menjadi pesona dunia yang tersohor.

Mari sibukkan diri untuk merawat Indonesia. Karena kita, kita adalah kaum yang terlahir di bumi pertiwi ini, raksasa dunia yang sedang bangun dari tidur berkepanjangan.

Tipe Aktiwis Manakah Kita?

Ryan Frizky



Menjadi mahasiswa adalah masa paling menguntungkan. Bahkan ada yang berkata bahwa status sosial tertinggi dipegang seseorang ketika ia menjadi mahasiswa. Betapa tidak, karena ketika kita menjadi mahasiswa, banyak sekali hal yang bisa kita eksplorasi dibanding ketika kita menjadi siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kalau di SMA kita masih terbatas dalam melakukan berbagai kegiatan, berbeda ketika kita menjadi mahasiswa. Kita bisa menjadi siapa pun dan apapun yang kita mau. Bagi yang *passion*-nya sosial, kita bisa membuat sebuah *social movement* sendiri dan membantu lingkungan masyarakat sekitar.

Bagi yang *passion*-nya politik, kita bisa mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan sebagainya. Bagi yang *passion*-nya mendaki gunung,

kita bisa mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa MAPALA, dan banyak lagi kegiatan yang tidak akan habis kalau kita eksplorasi selama kita menjadi mahasiswa.

Semua yang aktif di organisasi manapun, selama ia menyebarkan kebermanfaatannya bisa disebut sebagai aktivis. Nah, Dalam konteks menjadi aktivis sendiri, kita harus memilih tipe aktivis seperti apa yang kita mau. Karena sejatinya dalam konteks menjadi aktivis, paling tidak ada empat tipe aktivis.

Kemana-mana & di mana-mana

Ini adalah tipe aktivis yang paling keren. Selain ia aktif di organisasi dalam dan luar kampus, mobilitasnya pun tinggi. Selain itu, tipe ini punya banyak *networking*, banyak sekali jejaring yang dikumpulkan dari hasil mobilitasnya. Aktivis tipe ini biasanya mereka yang namanya terdengar sampai banyak kampus.

Ia dikenal di mana-mana bukan hanya karena fisiknya yang ke mana-mana, melainkan karena karya-karya yang dibuatnya. Bisa jadi karena keahliannya menulis, membuat film, ataupun *skill-skill* lain yang dia miliki. Biasanya tipe aktivis ini jarang sekali ditemukan di kampus-kampus. Karena untuk menjadi aktivis tipe ini, kita harus mengeluarkan sumberdaya yang lebih kebanding menjadi ketiga tipe aktivis lainnya.

Tidak kemana-mana tapi di mana-mana

Tipe ini adalah tipe aktivis yang karyanya berada di mana-mana namun ia tidak suka kemana-mana. Biasanya tipe aktivis ini adalah aktivis yang sangat rajin dalam menghasilkan karya. Ia aktif di organisasi kampusnya namun ia tidak suka untuk keluar kampus. Mobilitasnya terletak di karya-karyanya. Aktivis tipe ini biasanya adalah ia yang dekat sekali dengan media sosial. Mungkin mobilitas fisiknya sangat rendah, namun mobilitasnya di media sosial sangatlah tinggi.

Kemana-mana tapi tidak di mana-mana

Tipe ini adalah tipe aktivis yang mobilitas fisiknya sangat tinggi. Biasanya ia sering aktif keluar kampus dan sering mengikuti banyak *event* di luar kampus. Tipe ini bukanlah tipe aktivis yang menghasilkan karya-karya yang membuat namanya terdengar di banyak kampus

Tidak kemana-mana & tidak di mana-mana

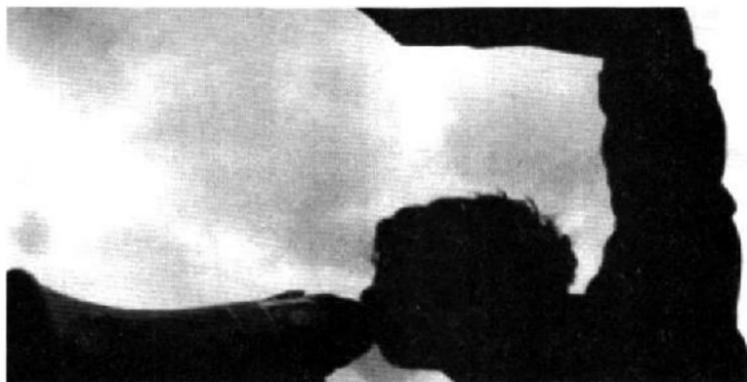
Tipe aktivis ini adalah tipe yang biasanya hanya aktif di organisasi kampusnya. Ia memilih peran sebagai aktivis karena *passion* selintas atau hanya mengisi kekosongan waktu akademiknya saja. Mobilitas mencari ilmu di luar kampus tidaklah tinggi. Tipe ini pun jarang sekali menciptakan karya-karya sehingga namanya tidak terkenal di kalangan aktivis kampusnya.

Pada dasarnya menjadi tipe aktivis manapun adalah suatu kegiatan yang mulia karena banyak memberi kebermanfaatn. Namun seringkali banyak sekali aktivis yang tidak tahu tipe aktivis apa yang harus ia pilih sehingga berbagai kebaikan yang ia lakukan hanyalah kebaikan selintas saja.

Padaahal ketika kita menjadi aktivis, kita tidak hanya dituntut untuk mencari pengalaman saja, namun juga ikut memberikan pengalaman kepada orang-orang di sekitar kita. Dan untuk memberikan pengalaman-pengalaman kebaikan itu tidak bisa didapat hanya dengan menjadi aktivis yang statis, namun menjadi aktivis yang dinamis, dan juga mempunyai mobilitas tinggi. Kesempatan memilih itu akan optimal ketika dilakukan di awal. Ya, sekarang. Bukan nanti!

Menipisnya Jati Diri Aktivistis

Siti Nur Arifah



2015. Tahun yang unik bagi para aktivis, terutama aktivis pergerakan untuk bisa menunjukkan jati dirinya. Salah satu alasan yang melandasi hal itu adalah pemerintah yang kini terlihat “sangat demokratis” dan para aktivis yang kini dibayang-bayangi oleh kelulusan yang semakin cepat.

Pemerintah yang kini terlihat “sangat demokratis” sering kali menjadi sebuah dilema tersendiri bagi para aktivis. Satu sisi pemerintah terkesan sangat “welcome” dan siap untuk selalu bekerjasama dengan mahasiswa, seolah-olah menjadi *partner* yang sangat bisa diandalkan. Dengan alasan ini pula menjadikan para aktivis serba salah untuk kemudian memakai cara apa yang akan digunakan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.

Mengingatkan teman dekat dan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita pasti berbeda caranya. Termasuk dengan mengontrol pemerintah yang dalam hal ini menjadi kewajiban aktivis untuk bisa mengingatkan pemerintah.

Ketika kita terlalu dekat dengan pemerintah, kita akan semakin tahu kekurangannya, namun akan menjadi sulit bagi para aktivis dalam penyampaian kritik. Kita tahu cara konvensional yang sering digunakan oleh para aktivis untuk mengontrol kebijakan pemerintah adalah dengan audiensi yang berakhir dengan aksi.

Aksi yang diandalkan sebenarnya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki massa untuk menyerang pemerintah. Namun, ketika aksi kini tak lagi menjadi ruh dalam diri para aktivis, apakah masih layak untuk kemudian kita gunakan kembali untuk menjadi alat kontrol pemerintah?

“Terlihat demokratis” ini menjadi sebuah bumerang tersendiri bagi para aktivis untuk merekonstruksi alat yang digunakan untuk mengontrol pemerintah. Hal baiknya adalah kita tidak perlu terlalu “repot” untuk membawa massa aksi menyampaikan aspirasi kita, karena cukup dengan perwakilan beberapa orang datang kepada pemerintah sudah bisa menyampaikan dan disambut baik oleh tuan rumah.

Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika menggunakan cara baru ini apakah aspirasi dari kalangan aktivis ini dapat menjadi pertimbangan kuat kebijakan-kebijakan pemerintah. Atau jangankan kita hanya dipermainkan oleh retorika pemerintah yang hanya ingin membungkam para aktivis secara perlahan?

Mengapa saya katakana demikian, karena yang sering kali tidak kita cermati adalah keberlanjutan setelah kita menyampaikan aspirasi. Setelah kita menyampaikan apa yang menurut kita benar, yang katanya merupakan representasi dari keresahan dan

kebutuhan masyarakat, kita menghilang begitu saja. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk menunjukkan eksistensi mahasiswa namun tanpa esensi.

Atas nama masyarakat Indonesia yang sering digunakan oleh para aktivis juga harus diperbaiki lagi. Sering kali kita mengarasnamakan masyarakat, tetapi sering kali juga kita lupa untuk turun ke masyarakat. Apa yang disampaikan kalangan aktivis kini mengalami degradasi kualitas karena tidak benar-benar mewakili masyarakat.

Pun ketika para aktivis mencoba menyampaikan aspirasinya dengan cara aksi, tidak sedikit masyarakat yang justru menyalahkan dan tidak mendukung aktivitas ini karena dinilai sering membuat macet jalanan dan mengganggu aktivitas. Lantas, kepemimpinan siapa yang sebenarnya sedang disung oleh kalangan aktivis ini.

Kita harus mencari kembali format pergerakan yang ideal untuk kondisi pemerintah saat ini. Mungkin ketika pemerintah mencoba untuk lebih terbuka, harus ada cara baru dan gebrakan baru yang digunakan. Sedikit lebih *soft* namun tetap esensial dan didengar serta dipertimbangkan oleh pemerintah. Jangan sampai kondisi terlalu nyaman dekat dengan pemerintah saat ini menjadikan kita terlena akan kewajiban dalam mengontrol pemerintah. Hal ini sangat strategis dan butuh rekonstruksi pemikiran para aktivis.

Model pemerintah yang sangat *open* ini menjadi langkah strategis bagi para aktivis untuk lebih menunjukkan jati dirinya dengan gaya baru yang lebih *fresh*. Apalagi ketika dihadapkan dengan masa belajar yang semakin pendek, yang membuat para aktivis sering mengerdilkan aktivitas organisasi.

Hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri di masa ini, di mana ketika semakin sedikit orang yang peduli dengan

kewajibannya sebagai kekuatan kontrol sosial, sedangkan semakin banyak ulah pemerintah dari kebijakan-kebijakannya yang membuat negeri ini gonjang-ganjing. Harus ada strategi baru yang digunakan para aktivis untuk tetap bisa mempertahankan kedudukannya di hadapan pemerintah. Tetap menjaga intelektualitas tentunya tetapi tidak mehilangkan sikap kritis.

Semakin menurunnya para pelaku pengingat kebijakan ini menjadi strategis bagi para aktivis. Semakin sedikit orang yang menjalankan secara otomatis akan membuat segerlintir orang memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Hanya memerlukan inovasi gerakan untuk membuat yang lebih menarik bagi mahasiswa yang lain untuk peduli dan memainkan peran masing-masing agar selalu tetap *on the track*.

Serta mencari cara baru untuk bisa memosisikan diri menjadi *partner* yang baik bagi pemerintah dengan kedudukan aktivis yang kini semakin dekat dengan pemerintah. Banyak sedikitnya para pelaku sejarah tidak terlalu berpengaruh, asalkan tetap menjaga kualitas dan kapasitas dari para pelakunya. Karena kuantitas tidak menjanjikan kualitas, maka berbahagialah kaum minoritas yang kini mengatasnamakan masyarakat yang mendedikasikan dirinya sebagai pahlawan aspirasi untuk memosisikan diri dengan baik.

Organisasi Kenegaraan

Yulinda Dwi Komala



"Good management is the art of making problems so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with them." - Paul Hawken -

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dengan segala kelebihannya. Kekayaan sumber daya alamnya, keberagaman budaya masyarakatnya, dan tokoh-tokoh sejarahnya yang telah memengaruhi dunia sudah menjadi bagian dari cerita bangsa ini. Namun apakah arti kekayaan ini apabila tidak dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.

Kebhinekaan budaya, agama, nabati, dan hewani merupakan anugerah yang tidak ternilai bagi kita, namun keadaan ini pun dapat sekaligus menjadi ancaman jika pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak mampu menjaganya. Oleh karenanya, kekayaan

bangsa Indonesia menjadi suatu modal besar yang harus dipelihara dengan sistem yang mumpuni.

Manajemen yang baik oleh seorang pemimpin yang terpercaya menjadi kunci utama dari kemerdekaan bangsa. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanya akan menjadi peristiwa tak bermakna, apabila kita belum memaknainya dengan jiwa yang merdeka. Mengingat usia bangsa yang semakin dewasa, yang diperlukan di sini adalah pemimpin yang melayani, menginspirasi, dan memberikan keteladanan bagi seluruh rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa seharusnya memiliki mimpi yang besar untuk kesejahteraan rakyatnya.

Saat ini pemimpin negara Indonesia adalah pemerintah yang menjadi kelompok eksekutif yang mengatur jalannya negara. Suara aspirasi rakyat berusaha didengarkan dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Nilai-nilai dan praktek demokrasi sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia, salah satunya adalah sistem pemilu yang demokratis. Namun, sayangnya kita masih miskin dalam hal politisi-negarawan yang mengakibatkan hilangnya *wisdom* dari demokrasi itu sendiri. Perebutan kekuasaan antar elit politik semakin menonjol, dan agenda negara untuk mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat secara merata pun menjadi semakin jauh. Seorang pemimpin sudah sewajarnya berani ambil resiko demi orang lain.

Berani masuk kotoran, tapi tidak ikut menjadi kotor. Seperti seekor lele yang menikmati hidupnya di lingkungan kotor dan bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama. Begitupun seharusnya pemimpin, berani mengambil resiko untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, banyak lahir tokoh-tokoh pemimpin bangsa yang dengan berani memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat itu,

nusuh bangsa berupa penjajah jelas di depan mara. Visi misi pemimpin saat itu pun jelas untuk memperoleh kemerdekaan bangsa dan menghilangkan perlakuan bangsa penjajah terhadap rakyat Indonesia. Sejak pra kemerdekaan masyarakat Indonesia sudah aktif dan mandiri. Kekuatan ini harus dijaga dan difasilitasi bersama oleh negara untuk menggerakkan rakyat. Di sini tugas seorang pemimpin untuk mengatur kekuatan dan kelemahan bangsa dan untuk menciptakan perkembangan negara yang harmonis dan sinergis.

Secara umum, apabila negara dipandang sebagai organisasi terbesar di Indonesia, ada empat hal yang perlu seorang pemimpin manajemen dengan baik dalam suatu organisasi. Di antaranya yaitu waktu, uang, orang, dan administrasi.

Waktu menjadi musuh setiap individu. Waktu akan terus berjalan dengan kecepatan yang sama dan tidak pernah bisa mundur. Kebermanfaatan sebuah waktu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Begitupun seorang pemimpin negara. Usia negara terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu.

Namun hal tersebut kembali lagi kepada bagaimana pemimpin negaranya dapat merencanakan untuk memanfaatkan waktu yang tersedia. Seperti kata pepatah, jika kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Pemimpin di Indonesia yaitu seorang presiden dengan masa jabatan 5 tahun, dan seorang presiden pun hanya seorang manusia yang memiliki keterbatasan waktu hidup. Namun hal ini menjadi tantangan bagi seorang pemimpin untuk dapat memberikan makna yang berarti dengan keterbatasan waktu.

Kedua adalah uang. Karena zaman sekarang, sebuah barang atau jasa dapat dinilai dengan alat tukar berupa uang. Tidak lagi seperti sistem barter di zaman purba yang dapat dinilai suatu barang atau jasa hanya dengan ditukar barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama.

Perekonomian butuh perencanaan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan tujuan agar terjadi kestabilan ekonomi dan pemerataan tingkat ekonomi rakyat. Sesuai dengan fungsi ekonomi pemerintah menurut Adam Smith dalam pandangan ekonomi publik, pemerintah memiliki fungsi ekonomi pokok, yaitu stabilisasi (*stabilization*), distribusi (*distribution*), dan alokasi (*allocation*).

Manajemen keuangan pemerintah yang buruk terlihat dari ketiga hal tersebut. Yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang lain, pendistribusian ekonomi rakyat, serta alokasi dana yang tepat terhadap barang publik.

Ketiga adalah orang atau anggota di dalam suatu negara, dalam hal ini adalah pemerintah dan rakyat. Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak dan unggul. Pelajar Indonesia banyak yang memenangkan perlombaan dengan skala internasional.

Bahkan cendekiawan Indonesia pun lebih dihargai di negara yang sudah maju. Namun sayangnya, kekayaan sumber daya manusia ini belum sepenuhnya disyukuri oleh pemerintah Indonesia dan kepentingan pribadi menjadi tujuan utama dari mayoritas pemerintah Indonesia.

Diproyeksikan pada tahun 2030, bangsa Indonesia akan menerima hadiah berupa ledakan pemuda. Di mana jumlah rakyat berusia 15-25 tahun di Indonesia akan berjumlah sangat banyak dengan semangat kepemudaannya. Namun hal ini kembali lagi kepada seorang pemimpin Indonesia untuk bagaimana memanfaatkan momentum tersebut dengan baik. Karena apabila tidak diatur dengan baik, akan menimbulkan masalah yang lebih besar yaitu berupa ledakan pengangguran akibat tidak adanya pekerjaan.

Terakhir adalah administrasi. Negara akan terus tumbuh, namun seorang pemimpin memiliki waktu hidup yang terbatas. Sehingga perlu adanya sistem administrasi untuk menjaga cerita perkembangan Indonesia. Dengan begitu, perkembangan ekonomi, sosial, politik, kesejahteraan dan kualitas penduduk, metode, strategi, serta detail kerja pemerintah pun dapat tercatat dengan baik. Hal tersebut untuk memudahkan kepengurusan pemerintah berikutnya agar dapat belajar dari kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya sekaligus menjaga sejarah bangsa agar tidak dicemari oleh kepentingan politik.

Bagian III

Islam (dan) Indonesia

Islam dalam Sejarah dan Penyatuan Nusantara

Dr. Adian Husaini¹



“Majapahitisme”

Majalah *MEDIA HINDU*, edisi Oktober 2011, menurunkan laporan utama berjudul “Kembali ke Hindu, Bila Indonesia Ingin Berjaya Kembali Seperti Majapahit.” Ditegaskan pada bahasan utama: “Kembali pada Hindu, sebagai satu-satunya langkah utama untuk mengantar Indonesia ini kembali menjadi Negara Adidaya.”

Mengutip ramalan Goldman Sach, Majalah Hindu ini menyatakan, tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara maju

1 (Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam - Universitas Ibn Khaldun Bogor)

ke-7 setelah Cina, USA, India, Brazil, Mexico dan Rusia. Prediksi ini, katanya, cocok dengan ramalan Jayabaya bahwa di tahun 2000 Saka (2078 M), Nusantara menjadi negara Adikuasa.

"Namun atas dasar pendapat tersebut di atas, mustabil suatu bangsa menjadi maju apabila mayoritas rakyatnya masih menganut agama yang faktanya mengusir budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu harus kembali ke agama yang dapat memelihara dan mengembangkan budaya bangsa, sebagai syarat mutlak untuk menjadi Negara Adidaya. Satu-satunya agama yang dapat menumbuhkembangkan budaya bangsa adalah Hindu, karena memang sejak dahulu kala bangsa ini beragama Hindu, yang kemudian menimbulkan budaya bangsa yang adiluhung ini," demikian tulis majalah yang terbit di Jakarta ini.

Di dalam pengantar redaksi, disebutkan: "Pohon bisa tumbuh besar dan kuat menghadapi badai adalah yang akarnya tertanam jauh di dalam tanah. Bukan pohon hasil cangkokan atau tempelan. Dan pohon yang tumbuh dalam habitatnya akan menghasilkan buah yang baik. Salak Nongan di Karangasem, tidak akan menghasilkan buah yang sama kualitasnya bila ditanam di Ubud. Pohon kurma yang habitatnya di gurun pasir tidak akan berbuah di daerah subur dan banyak hujan seperti Indonesia. Jika Indonesia ingin maju maka ia harus kembali ke akar budayanya."

Jadi, simpul *MEDIA HINDU*: "Kembali menjadi Hindu adalah mutlak perlu bagi bangsa Indonesia apabila ingin menjadi negara Adidaya ke depan, karena hanya Hindu satu-satunya agama yang dapat memelihara & mengembangkan jati diri bangsa sebagai modal dasar untuk menjadi negara maju."

Harapan dan imbauan *MEDIA HINDU* ini sejalan dengan "mitos nasional" yang selama ini dibangun di Indonesia—khususnya

melalui pendidikan sejarah—bahwa Indonesia memang pernah mengalami puncak kejayaan di masa Kerajaan Hindu Majapahit, terutama di era pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Berbagai buku sejarah menulis, bahwa di Nusantara ini, banya pernah ada dua kerajaan di Indonesia yang bersifat nasional, yaitu Kerajaan Sriwijaya (Budha) dan Kerajaan Majapahit (Hindu). Islam belum pernah menyatukan Nusantara. Itulah informasi yang mudah kita jumpai di berbagai buku sejarah.

Tokoh Kristen di Indonesia, TB Simatupang, pernah menulis bahwa Indonesia tidak pernah mengalami sebuah kerajaan Islam yang mencakup seluruh Indonesia, seperti di zaman Mogul di India. Menurutnya, Kerajaan Sriwijaya yang Budha dan Majapahit yang Hindu, pernah mempersatukan sebagian besar wilayah Nusantara. “Tetapi tidak pernah ada zaman Islam dalam arti kerajaan yang mencakup seluruh negeri,” tulis TB Simatupang. Begitulah, lanjutnya, dalam arti rertenru, yang menggantikan Majapahit adalah pemerintahan kolonial Belanda dan yang menggantikan yang terakhir tersebut adalah pemerintahan Republik Indonesia. (Lihat, T.B. Simatupang, *Iman Kristen dan Pancasila*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), hal. 11).

Pendeta Dr. Eka Darmaputera, dalam bukunya, mengakui, dibandingkan dengan kebudayaan asli dan Hindu, Islam jauh lebih berhasil menanamkan pengaruhnya pada seluruh lapisan masyarakat. Ia berhasil mencapai rakyat biasa dan menjadi agama dari mayoritas penduduk Indonesia. “Namun demikian, ia tidak menciptakan suatu peradaban baru. Sebaliknya, dalam arti tertentu, ia harus menyesuaikan diri dengan peradaban yang telah ada.” tulis Eka Darmaputera. (Lihat, Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia, 1997), hal. 34).

Doktrin tentang “penyatuan Nusantara” oleh Kerajaan Budha dan Hindu seperti itulah yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan kadangkala juga di berbagai pondok pesantren, melalui pengajaran Sejarah. Sebagai contoh, buku *Sejarah untuk SMA Kelas X*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), menulis bahwa saat pelantikannya sebagai Patih Amangkubhumi Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa (*Tan Amukti Palapa*) yang menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan hidup mewah sebelum Nusantara berhasil disatukan di bawah Panji Kerajaan Majapahit. Ditulis: *“Bahkan Kerajaan Majapahit dapat disebut sebagai kerajaan nasional setelah Kerajaan Sriwijaya. Selama hidupnya, Patih Gajah Mada menjalankan politik persatuan Nusantara. Cita-citanya dijalankan dengan begitu tegas, sehingga menimbulkan Peristiwa Sunda yang terjadi tahun 1351 M.”* (hal. 48).

Jadi, disimpulkan, bahwa Indonesia pernah jaya dan hebat di zaman Hindu. Kemudian, dikatakan, datanglah Islam, yakni Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah, untuk menghancurkan kejayaan Indonesia itu. Tentang keruntuhan Kerajaan Majapahit, ditulis dalam buku pelajaran sejarah tersebut: *“Suatu tradisi lisan yang terkenal di Pulau Jawa menyatakan bahwa Kerajaan Majapahit hancur akibat serangan dari pasukan-pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah (Demak).”* (hal. 49).

Tentu, penggambaran semacam itu bisa menimbulkan salah paham dan citra buruk terhadap Islam. Dalam bukunya, *Genealogi Keruntuhan Majapahit*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Nengah Bawa Atmadja mengutip buku *Islam Kejawaan* (2004) karya Hariwijaya dan buku *Ramalan Ghaib Sabdo Palon Noyo Genggong* (2006) karya S. Hardiyanto, yang menggambarkan keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan tikus, tawon, dan setan (demit).

“Pendek kata, ungkapan bahwa Majapahit runtuh karena diserang oleh tikus, tawon, dan setan memiliki makna konotatif. Dalam konteks ini Majapahit runtuh karena diserang oleh Demak. Demak adalah musuh dalam selimut yang menghancurkan Majapahit secara tersembunyi dari dalam pada saat Majapahit lengah dan herada dalam kondisi sakit keras. Serangan ini terjadi secara tiba-tiba dan beramai-ramai.” (hal. 12).

Islam datang untuk menghancurkan kejayaan Indonesia. Logikanya, kalau mau mengalami kejayaan, Islam harus disingkirkan dari simbol-simbol dan lambang kenegaraan. Kembalilah ke Majapahit! Kembalilah ke Hindu, jika ingin meraih kejayaan! Islam ditempatkan sebagai “musuh persatuan”, sehingga perlu diupayakan agar istilah dan simbol-simbol Islam dijauhkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Raden Patah digambarkan sebagai penghancur prestasi Gajah Mada yang berhasil menyatukan Nusantara!

Upaya menyingkirkan islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah disadari oleh para cendekiawan Muslim di Indonesia. Cendekiawan Muslim Haji Agus Salim, tahun 1941, menulis sebuah buku berjudul *Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia* (dicetak ulang dan diterbitkan oleh Tintamas Jakarta, 1962). Haji Agus Salim mengklarifikasi cerita tentang keruntuhan Majapahit akibat serangan Islam. Bahkan, menurut cendekiawan legendaris ini, Majapahit tidak runtuh pada 1478 M, saat ibu kota Majapahit diserang oleh Girindrawardhana. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indië* mencatat bahwa seorang pelaut Portugis, Pigafetta, memberitakan pada 1463 Çaka (1541) Majapahit masih berdiri. Jadi, anggapan bahwa tahun 1478 adalah tahun runtuhnya Majapahit akibat serangan tentara Islam adalah keliru yang bersumber dari para penjelajah bahari Portugis (hlm. 19-20).

Kontroversi "Majapahitisme"

Benarkah Majapahit pernah menyatukan Nusantara? Sejumlah sejarawan memang menggambarkan kebesaran Majapahit. Mengutip buku *Sriwijaya* (2008), karya Slamet Mulyana, Yudi Latif menulis: "Selepas Sriwijaya, giliran Kerajaan Majapahit yang menguasai sebagian besar (wilayah pantai) Nusantara, bahkan meluas ke arah Barat hingga bagian tertentu di Vietnam Selatan dan ke arah Timur sampai di bagian Barat Papua." (Lihat, Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 260).

Para cendekiawan Muslim sudah lama mengkritisi rekayasa penjonjolan Hinduisme dan pengecilan Islam ini. Buya Hamka—yang di tahun 2011 ini ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional—dalam *Tafsir al-Azhar*, sudah menulis, bahwa bangsa Indonesia selama ini dididik untuk menjauhkan nasionalisme dengan Islam dan hendaklah bangsa ini lebih mkencintai Gajah Mada ketimbang Raden Patah. "*Diajarkan secara halus apa yang dinamai Nasionalisme, dan hendaklah Nasionalisme diputuskan dengan Islam. Sebab itu bangsa Indonesia hendaklah lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah.*" (Lihat, Hamka, *Tafsir al-Azhar -- Juzu' VI*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hal. 300.)

Karena opini tentang kehebatan Majapahit tersebut sudah begitu dominan, bisa dimaklumi, bahwa sebagian kaum Hindu di Indonesia berpikir, bahwa bangsa ini harus kembali menjadi Hindu, bila ingin menjadi bangsa besar, sebagaimana dicitakan oleh Majalah *Media Hindu* (edisi Oktober 2011) tersebut.

Prof. Dr. Hamka pernah menulis sebuah artikel menarik berjudul "*Islam dan Majapahit*", yang dimuat dalam buku *Dari Perbendaharaan Lama* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). Hamka memulai artikelnya dengan ungkapan pembuka: "*Meskipun telah*

hidup di zaman baru dan penyelidik sejarah sudah lebih luas dari pada dahulu. masih banyak orang yang mencoba memutar balikkan sejarah. Satu di antara pemutarbalikkan itu ialah dakwah setengah orang yang lebih tebal rasa Hindunya daripada Islamnya, berkata bahwa keruntuban Majapahit adalah karena serangan Islam. Padahal bukanlah begitu kejadiannya. Malahan sebaliknya."

Hamka menjelaskan, bahwa Kerajaan Majapahit pada zaman kebesarannya, terutama semasa dalam kendali Patih Gajah Mada, memang adalah sebuah kerajaan Hindu yang besar di Indonesia, dan pernah mengadakan ekspansi, serangan dan tekanan atas pulau-pulau Indonesia yang lain. Dalam kitab "*Negarakertagama*" disebutkan daftar negeri taklukkan Majapahit. Berbagai Kerajaan, baik Hindu, Budha, maupun Kerajaan Islam ditaklukkan.

Kerajaan Islam Pasai dan Terenggamu pun dihancurkan oleh Majapahit. Pasai tidak pernah bangkit lagi sebagai sebuah kerajaan. Tapi, Pasai kaya dengan para ulama. Di dalam sejarah Mekayu, Tun Sri Lanang menulis, bahwa setelah Kerajaan Malaka naik dan maju, senantiasa juga ahli-ahli agama di Malaka menanyakan hukum-hukum Islam yang sulit ke Pasai. Dan jika ada orang-orang besar Pasai datang ziarah ke Malaka, mereka disambut juga oleh Sultan-sultan di Malaka dengan serba kebesaran.

Menurut Hamka, jika Pasai ditaklukkan dengan senjata, maka para ulama Pasai kemudian datang ke Tanah Jawa dengan dakwah, dengan keteguhan cita-cita dan ideologi. Para ulama datang ke Gresik sambil berniaga dan berdakwah. Terdapatlah nama-nama Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ibrahim Asmoro, arau Jimadil Kubro, ayah dari Maulana Ishak yang berputera Sunan Giri (Raden Paku) dan Sunan Ngampel (Makhdum Ibrahim).

"Dengan sabar dan mempunyai rancangan yang teratur, guru-guru Islam berdarah Arab-Persia-Aceh, itu menyebarkan

agamanya di Jawa Timur, sampai Giri menjadi pusat penyebaran Islam, bukan saja untuk tanah Jawa, bahkan sampai ke Maluku. Sampai akhirnya Sunan Bonang (Raden Rahmat) dapat mengambil Raden Patah, putra Raja Majapahit yang terakhir (Brawijaya) dikawinkan dengan cucunya, dan akhirnya dijadikan Raja Islam yang pertama di Demak,” tulis Hamka.

Tindakan para wali dalam penyebaran Islam di Jawa itu tidak dapat dicela oleh raja-raja Majapahit. Bahkan, kekuasaan dan kewibawaan mereka di tengah masyarakat semakin meluas. Ada wali yang diangkat sebagai adipati Kerajaan Majapahit. Hamka menolak keras pandangan yang menyatakan, bahwa Majapahit runtuh karena diserang Islam. Itu adalah pemutarbalikan sejarah yang sengaja disebarkan oleh orientalis seperti Snouck Hourgronje. Upaya ini dilakukan untuk menjauhkan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan Islam sebagai basis semangat kebangsaan. “Maksud ini berhasil,” papar Hamka.

Akibatnya, dalam pentas sejarah nasional Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah, nama Sunan Ampel dan Sunan Giri tenggelam oleh nama Gajah Mada. Nama Raden Patah dan Pati Unus yang mencoba mengusir penjajah Portugis dari Malaka tenggelam oleh nama Raja Airlangga. Upaya sistematis untuk memecah belah bangsa Indonesia yang mayoritasnya Muslim dilakukan dengan berbagai cara oleh penjajah Belanda. Salah satunya dengan menjauhkan Islam dari semangat kebangsaan Indonesia. Seolah-olah Indonesia adalah kelanjutan Kerajaan Majapahit.

Simaklah paparan Hamka selanjutnya berikut ini:

“Marilah kita jadikan saja segala kejadian itu, menjadi kekayaan sejarah kita, dan jangan dicoba memutar balik keadaan, agar kokohkan kesatuan bangsa Indonesia, di bawah lambaian Merah Putih!”

Kalau tuan membusungkan dada menyebut Gajah Mada, maka orang di Sriwijaya akan berkata bahwa yang mendirikan Candi Borobudur itu ialah seorang Raja Budha dari Sumatra yang pernah menduduki pulau Jawa.

Kalau tuan membanggakan Majapahit, maka orang Melayu akan membuka Sitambo lamanya pula, menyatakan bahwa Hang Tuah pernah mengamuk dalam kraton sang Prabu Majapahit dan tidak ada kstaria Jawa yang berani menangkapnya.

Memang, di zaman jahiliah kita bermusuhan, kita berdendam, kita tidak bersatu! Islam kemudiannya adalah sebagai penanam pertama jiwa persatuan. Dan Kompeni Belanda kembali memakai alat perpecahannya, untuk menguatkan kekuasaannya.

Tabukan tuan, bahwasanya tatkala Pangeran Diponegoro, Amirul Mukminin Tanah Jawa telah dapat ditipu dan perangnya dikalahkan, maka Belanda membawa Pangeran Sentot Ali Basyah ke Minangkabau buat mengalahkan Paderi? Tabukah tuan bahwa setelah Sentot merasa dirinya tertipu, sebab yang diperangnya adalah kawan sefahamnya dalam Islam, dan setelah kaum Paderi dan raja-raja Minangkabau memperbaiki ikatan serbannya sama dengan ikatan serban ulama Minangkabau, sudi menerima Sentot sebagai "Amir" Islam di Minangkabau? Leringatkah tuan, bahwa lantaran rahasia bocordan Belanda tahu, Sentot pun diasingkan ke Bengkulu dan disana beliau berkubur buat selama-lamanya?

Maka dengan memakai paham Islam, dengan sendirinya kebangsaan dan kesatuan Indonesia terjamin. Tetapi dengan mengemukakan kebangsaan saja, tanpa Islam, orang harus kembali mengeruk, mengorek tambo lama, dan itulah pangkal bala dan bencana."

Begitulah paparan dan imbauan Buya Hamka. Penyesalan dan dendam tentang pengislaman Nusantara seyogyanya tidak perlu

dipelihara. Apalagi, kemudian mengikuti kemauan dan skenario penjajah untuk mengerdilkan peran Islam dan memposisikan Islam sebagai agama yang “anti-budaya bangsa”, sebab budaya bangsa sudah dipersepsikan identik dengan ke-Hindu-an atau ke-Budha-an. Hukum adat dan warisan kolonial dianggap sebagai pemersatu, sebaliknya syariat Islam diposisikan sebagai pemecah belah bangsa.

Kini, sebagian kalangan, masih saja berpikir, bahwa Islam bukanlah jatidiri bangsa Indonesia. Islam tidak bersifat universal. Islam hanya untuk orang Islam. Yang bersifat universal adalah nilai-nilai sekular di luar agama.

Ternyata, bukan hanya kalangan Islam yang mengkritisi pengagungan Majapahit secara berlebihan. Majalah Hindu RADITYA, edisi 134 (Oktober 2008), mengangkat tema utama tentang “Kebangkitan Majapahit”. Berbeda dengan banyak orang Hindu, Majalah Hindu ini justru mengkritisi jargon-jargon dan semangat orang Hindu untuk kembali ke era Majapahit, sebab menganggap Kebesaran Majapahit adalah kebesaran agama Hindu. “Pemahaman yang menganggap kejayaan Majapahit sebagai kejayaan Hindu adalah suatu kesimpulan yang harus dikoreksi,” tulis majalah ini. Lebih jauh, Majalah ini menulis:

“Majapahitisme atau keterpesonaan terhadap Hindu di zaman majapahit tidaklah ideal. Pertama, karena pada masanya saja, masyarakat Hindu Majapahit gagal mempertahankan eksistensinya, gara-gara lebih banyak terlibat konflik internal bikinan elite Majapahit ketika itu. Siwa-Budha kala itu pun tidak bisa berperan banyak dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, *tat tuam asi* dan sejenisnya. Majapahit selain berhasil menundukkan banyak daerah bawahan, juga sibuk perang saudara. Agama di dalam masyarakat seperti ini lebih menjadi bersifat gaib, eksklusif, hanya untuk berhubungan

dengan dewa-dewa yang abstrak. Agama Siwa Budha meskipun sudah menjadi agama kerajaan tidak bisa diamalkan oleh elite di sana yang lebih dikuasai motif politik, motif perebutan kekuasaan. Agama gagal menginspirasi kehidupan sehari-hari tentang hal-hal lebih praktis menyangkut pola interaksi antarindividu...Jika Majapahit meninggalkan hal-hal pahit bagi penganut Hindu ketika itu, lantas apa enaknya mengenang hal-hal pahit?"

Dalam wawancara dengan Majalah *Raditya* tersebut, Guru besar sejarah, Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gede Parimartha menyatakan, bahwa "Mengagungkan Majapahit lebih banyak merugikan." Dilihat dari sistem kehidupan yang dibawa Majapahit, tampak membawa pengaruh pada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sistem kasta yang rumit sering menimbulkan konflik sesama masyarakat Bali.

Penjelasan Prof. S.M.Naquib al-Attas

Prof. Naquib al-Attas adalah ilmuwan yang sejak berpuluh-puluh tahun lalu sudah mengungkap adanya upaya untuk memperkecil peran Islam dalam sejarah Kepulauan Nusantara. Kata Prof. Al-Attas:

"Kecenderungan ke arah memperkecil peranan Islam dalam sejarah Kepulauan ini, sudah nyata pula, misalnya dalam tulisan-rulisan Snouck Hurgronje pada akhir abad yang lalu. Kemudian hampir semua sarjana-sarjana yang menulis selepas Hurgronje telah terpengaruh kesan pemikirannya yang meluas dan mendalam di kalangan mereka, sehingga tidak mengherankan sekiranya pengaruh itu masih berlaku sampai dewasa ini. Namun begitu, baik dalam tulisan Hurgronje maupun dalam tulisan Van Leur, tidak terdapat hujjah-ilmiah yang mempertahankan pandangan

demikian mengenai Islam dan peranan sejarahnya." (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Bandung: Mizan, 1990), hal. 36).

Al-Attas menekankan pentingnya melihat wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan peradaban Melayu, dengan menempatkan faktor Islam sebagai unsur yang dominan. Wilayah itu kini dihuni oleh lebih dari 200 juta kaum Muslim. Memang, banyak cendekiawan yang merumuskan bahwa agama merupakan unsur pokok dalam suatu peradaban (*civilization*). Agama, kata mereka, adalah faktor terpenting yang menentukan karakteristik suatu peradaban. Sebab itu, Bernard Lewis menyebut peradaban Barat dengan sebutan "*Christian Civilization*", dengan unsur utama agama Kristen. Samuel P. Huntington juga menulis: "*Religion is a central defining characteristic of civilizations.*" Menurut Christopher Dawson, "*The great religions are the foundations of which the great civilizations rest.*" Di antara empat peradaban besar yang masih eksis—Islam, Barat, India, dan Cina, menurut Huntington, terkait dengan agama Islam, Kristen, Hindu, dan Konghucu. (Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, hal. 47 ; Bernard Lewis, *Islam and the West*, (New York: Oxford University Press, 1993).

Peradaban-peradaban kuno, seperti Mesopotamia dan Mesir Kuno juga menempatkan agama sebagai unsur utama peradaban mereka. Marvin Perry mencatat: "*Religion lay at the center of Mesopotamian life. Every human activity—political, military, social, legal, literary, artistic—was generally subordinated to an overriding religious purpose. Religion was the Mesopotamians' frame of reference for understanding nature, society, and themselves; it dominated and inspired all other cultural expressions and human activities.*" (Marvin Perry, *Western Civilization A Brief History*, (New York: Houghton Mifflin Company, 1997), hal. 9).

Dalam tradisi peradaban Mesir Kuno, agama menempati peranan yang sangat penting: *“Religion was omnipresent in Egyptian life and accounted for the outstanding achievements of Egyptian civilization. Religious beliefs were the basis of Egyptian art, medicine, astronomy, literature, and government.”* (Ibid, hal. 15).

Karena itulah, al-Attas menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah peradaban Melayu di wilayah Nusantara, kedatangan Islam di wilayah kepulauan Melayu-Indonesia merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kepulauan tersebut. (*the coming of Islam seen from the perspective of modern times ... was the most momentous event in the history of the Archipelago*). Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa pengantar di kepulauan Melayu-Indonesia (*the Malay-Indonesian archipelago*) merupakan “bahasa Muslim” kedua terbesar yang digunakan oleh lebih dari 100 jura jiwa. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hal. 169-179. Angka 100 juta itu disebut al-Attas pada tahun 1969, saat ia menerbitkan bukunya *Preliminary Statement on a General Theory of Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago*. Tahun 2007, jumlah Muslim di kepulauan itu sudah lebih dari 200 juta jiwa. Penduduk Muslim Indonesia sahaja, ada sekitar 180 juta jiwa.)

Sebab itu, Melayu kemudian menjadi identik dengan Islam. Sebab, agama Islam merupakan unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan bahasa Melayu kemudian berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran nasional penduduk kawasan ini. Al-Attas mencatat masalah ini:

“Together with the historical factor, the religious and language factors began setting in motion the process towards a national consciousness. It is the logical conclusion of this process that created the evolution of the greater part of the Archipelago into the modern Indonesian nation with Malay as its national

language... The coming of Islam constituted the inauguration of a new period in the history of the Malay-Indonesian Archipelago" (Ibid, hal. 178).

Al-Attas mengkritik keras teori para sarjana Barat yang menganggap kehadiran Islam di wilayah Melayu-Indonesia ini tidak meninggalkan sesuatu yang berarti bagi peradaban di wilayah ini. Ia menulis:

"Banyak sarjana yang telah memperkatakan bahwa Islam itu tidak meresap ke dalam struktur masyarakat Melayu-Indonesia; hanya sedikit jejaknya di atas jasad Melayu, laksana pelitur di atas kayu, yang andaikan dikorek sedikit akan terkupas menonjolkan kehinduannya, kebudhaannya, dan animismenya. Namun menurut saya, paham demikian itu tidak benar dan hanya berdasarkan wawasan sempit yang kurang dalam lagi hanya merupakan angan-angan belaka." (S.M. Naquib Al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, hal. 41).

Al-Attas juga menekankan kekeliruan hasil penelitian ilmiah Barat yang meletakkan serta mengukuhkan kedaulatan kebudayaan dan peradaban Jawa sebagai titik tolak permulaan kesejarahan Kepulauan Melayu-Indonesia. "... anggapan seperti inilah hingga dewasa ini masih merajalela tanpa gugutan dalam pemikiran kesejarahan kita." (Ibid, hal. 40-41).

Paparan al-Attas tentang peran Islam dan bahasa Melayu dalam kebangkitan kesadaran nasional dipertajam lagi dengan hadirnya buku terbaru al-Attas yang berjudul *Historical Fact and Fiction (HFF)*, (Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2011). Buku ini sangat fantastis, melihat kerajaman analisis dan kekayaan referensi yang digunakannya. Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud menilai buku *HFF* ini sebagai salah satu karya besar dari al-Attas. Dengan karya ini, menurut Prof Wan Mohd Nor,

al-Attas pantas disebut sebagai salah satu ahli falsafah sejarah di dunia Islam. Tokoh lain adalah Almarhum Malek Bennabi dari Aljazair (m. 1973). "Buku terharu SMN al-Attas, *Historical Fact and Fiction (HFF)*, meneguhkan kembali kepeloporan dan kependekaran beliau dalam masalah sejarah, khususnya sejarah di alam Melayu, yang dipeganginya selama lebih 40 tahun secara penuh istiqamah," tulis Prof. Wan Mohd Nor (*Republika*, 20 Oktober 2011).

Melalui buku ini, al-Attas berhasil membalik herbagai pandangan umum tentang sejarah Islam dan Melayu yang sudah dianggap mapan, sebagaimana yang selama ini diteorikan oleh sejarawan lain. Al-Attas, misalnya, memperjelas kembali gambaran bagaimana keberhasilan para pendakwah Islam (digunakan istilah "misionaris Islam") dalam mengangkat dan mengIslamkan bahasa Melayu, sehingga berhasil menjadi bahasa persatuan di wilayah Nusantara.

Bahasa Melayu yang semula hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Sumatra, kemudian diangkat, di-Islamisasi, dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia ilmiah di wilayah Nusantara ini. Karena itulah, simpul al-Attas, bahasa Melayu dan agama Islam, merupakan dua faktor penting yang berjasa dalam upaya penciptaan semangat kebangsaan dan persatuan di wilayah Nusantara. (*The spread of the new and vibrant Malay language and literature as a vehicle of Islam and knowledge presently used by more than two hundred million people in the Malay Archipelago is one of the most important factors in the creation of nationhood, the other factor being the religion of Islam itself. Historians of the Archipelago have never considered language as an important source material for the study of history.* HFF, hal. xvi).

Jadi, menurut al-Attas, disamping agama Islam, penyeharan bahasa Melayu merupakan salah satu faktor terpenting dalam

pembentukan semangat kebangsaan. Dalam buku *HFF*, al-Attas menguraikan salah satu kesimpulan penting, yakni bahwasanya penyebaran Islam di Nusantara ini utamanya bukan dilakukan oleh pedagang, tarekat sufi, atau kaum Syiah, secara sambilan atau asal-asalan. Dengan bukti-bukti yang kuat dari karya para penulis Muslim klasik, sumber-cumber Cina dan Eropa, al-Attas sampai pada kesimpulan bahwa Islamisasi di Nusantara ini dilakukan dengan cara yang sistematis, terencana, konsisten, dan dilakukan oleh para misionaris Islam yang hebat. Islamisasi di wilayah seluas ini bukanlah pekerjaan sambilan dan asal-asalan: *"the spread of Islam by these Arab missionaries in the Malay world was not a haphazard matter, a disorganized sporadic affair... It was a gradual process, but it was planned and organized and executed in accordance with timelines and situation."* (*HFF*, hal. 32).

Seperti yang diungkapkan al-Attas, kaum orientalis Belanda telah lama berusaha mengecilkan peran Islam di wilayah ini. Snouck Hurgronje, misalnya. Melalui bukunya, *Snouck Hurgronje en Islam* (Diindonesiakan oleh Girimukti Pusaka, dengan judul *Snouck Hurgronje dan Islam*, tahun 1989). P.S.J. Van Koningsveld memaparkan sosok dan kiprah Snouck Hurgronje dalam upaya membantu penjajah Belanda untuk 'menaklukkan Islam'. Mengikuti jejak orientalis Yahudi, Ignaz Goldziher, yang menjadi murid para Syaikh al-Azhar Kairo, Snouck sampai merasa perlu untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim (1885) dan mengganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Dengan itu dia bisa diterima menjadi murid para ulama Mekkah. Menurut Van Koningsveld, pemerintah kolonial mengerti benar sepak terjang Snouck dalam 'penyamarannya' sebagai Muslim. Snouck dianggap oleh kaum Muslim di Nusantara ini sebagai 'ulama', bahkan ada yang menyebutnya sebagai "Mufti Hindia Belanda". Padahal, Snouck sendiri menulis tentang Islam: "Sesungguhnya agama ini meskipun cocok untuk membiasakan ketertiban

kepada orang-orang biadah, tetapi tidak dapat berdamai dengan peradaban modern, kecuali dengan suatu perubahan radikal, namun tidak sesuatu pun memberi kita bak umuk mengharapkannya.”

Tahun 1938, M. Natsir pernah menulis sebuah artikel berjudul: *"Suara Azan dan Lonceng Gereja"*. Artikel ini mengomentari hasil Konferensi Zending Kristen di Amsterdam pada 25-26 Oktober 1938, yang juga menyinggung pentingnya peran pendidikan Barat dalam menjauhkan kaum Muslim dari agamanya. Natsir mengutip ungkapan Prof. Snouck Hurgronje, dalam bukunya *Nederland en de Islam, "Opvoeding en onderwijs zijn in staat, de Moslims van het Islamstelsel te emancipeeren."* (Pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan orang Muslimin dari genggamannya Islam).

Snouck Hurgronje juga mendukung upaya kristenisasi terhadap pribumi. Sebuah surahnya yang tertanggal: Leiden 28 Januari 1889 – beberapa bulan sebelum Snouck sendiri datang ke Indonesia – isinya menunjukkan bahwa Snouck menyetujui pemikiran Holle, tokoh Partai Politik Kristen, bahwa Islam adalah bahaya yang sangat besar bagi pemerintah kolonial. Dia menyetujui satu usul Holle, yaitu usaha Kristenisasi daerah yang masih animis, walaupun hal ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan sokongan nyata dari pemerintah. (Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke – 19*. (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1984), hal. 241 – 242).

Hasil kajian Prof. Uli Kozok terhadap kegiatan misionaris Kristen di daerah Batak menemukan kuatnya dukungan kolonial Belanda terhadap gerakan misionaris didasari oleh pandangan bahwa keislaman dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keberlangsungan penjajahan.

“Betapa orang Batak Kristen dapat diandalkan tampak jelas sekarang. Sebagai orang Islam, orang Batak takkan mungkin menjadi rakyat yang patuh pada Belanda. [...] memang benar orang Silindung yang Kristen adalah teman setia Belanda, dan pasukan bantuan mereka berperang bersama pasukan Belanda.”. (Prof. Uli Kozok, *Utusan Damai di Kemelut Perang, Peran Zending dalam Perang Toba: Berdasarkan Laporan L.I. Nommensen dan Penginjil RMG Lain*, Sekolah Tinggi Teologia Jakarta, bekerjasama dengan Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Ecole française d’Extreme-Orient, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal. 106).

Sejarah juga menunjukkan, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Persatuan sempat ditolak oleh kaum Kristen. J.D. Wolterbeek dalam bukunya, *Babad Zending di Pulau Jawa*, mengatakan: “Bahasa Melayu yang erat hubungannya dengan Islam merupakan suatu bahaya besar untuk orang Kristen Jawa yang mencintai Tuhannya dan juga bangsanya.” Senada dengan ini, tokoh Yesuit Frans van Lith (m. 1926) menyatakan: “Melayu tidak pernah bisa menjadi bahasa dasar untuk budaya Jawa di sekolah-sekolah, tetapi hanya berfungsi sebagai parasit. Bahasa Jawa harus menjadi bahasa pertama di Tanah Jawa dan dengan sendirinya ia akan menjadi bahasa pertama di Nusantara. (Seperti dikutip oleh Karel A. Steenbrink, dalam bukunya, *Orang-Orang Katolik di Indonesia*. Lihat juga buku *Van Lith, Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, Sejarah 150 th Serikat Jesus di Indonesia* (2009).

Identitas peradaban

Melalui buku terbarunya, Prof. Naquib al-Attas kembali menegaskan bahwa jati diri bangsa Melayu-Indonesia sejatinya

adalah Muslim. Mereka adalah haugsa Muslim. Identitas dan jati diri Melayu-Islam itu seharusnya dimanfaatkan oleh bangsa Melayu-Indonesia untuk membangun negeri mereka secara sungguh-sungguh sehingga mampu tampil sebagai salah satu peradaban yang kuat di muka bumi.

Jika nilai-nilai Islam disingkirkan, dan "nilai-nilai di luar Islam" dirempatkan sebagai jati diri dan simbol-simbol kebangsaan Indonesia, maka Muslim Indonesia didorong untuk tidak memiliki perasaan memiliki terhadap negeri ini. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Itulah yang – misalnya – selama ini terjadi dalam kasus Pancasila. Banyak kaum Muslim dipaksa tidak merasa memiliki Pancasila karena Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dalam perspektif sekular dan peradaban lain untuk menggamikan Islam.

Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila (dan Pembukaan UUD 1945) jelas-jelas bernama Allah SWT, dikahurkau makna dan nama-Nya, menjadi "Tuhan apa pun". Padahal, Allah SWT adalah Tuhan kaum Muslimn. Satu-satu-Nya kitab suci di Indonesia yang sejak awal hingga kini memuat nama Tuhan bernama Allah, hanya al-Quran. Kaum Kristen di Indonesia kemudian meminjam kata Allah itu untuk menyebut Tuhan mereka dengan Allah. Tetapi, 'Allah' yang disebut kaum Kristen memiliki silat yang sangar berbeda dengan Allah-nya orang Islam. Sebab, Allah dalam al-Quran tidak pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan. Jadi, Tuhan yang resini disebut nama-Nya dalam Kosntitusi UUD 1945 adalah Allah SWT'.

Guru hesar Ilmu hukum Universitas Indonesia, Prof. Hazairin (alm.), dalam bukunya, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, cet.ke-6), menulis: "bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat nutlak) bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" berarri "Kekuasaan

Allah” atau “Kedaulatan Allah”. (hal. 31). “Negara RI, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara.” (hal. 34).

Upaya untuk memisahkan kaum Muslim dari identitas kenegaraan – selama ini – sudah gagal. Ketika Pancasila dipaksakan untuk menggusur agama – dijadikan sebagai *worldview* dan pedoman amal – maka Pancasila dipaksa untuk berbenturan dengan agama, khususnya Islam. Tahun 1951, Buya Hamka, pernah menulis satu artikel berjudul “*Urat Tunggang Pancasila*”, yang ditutup dengan satu kesimpulan:

“Suatu kenyataan, adalah bahwa agama Islam dipeluk oleh golongan terbesar dari bangsa Indonesia. Pengaruh agama Islam berurat berakar pada Kebudayaanannya dan adatiadatnya. Boleh dikatakan bahwa orang tidak mengenal corak lain di Indonesia, kecuali Islam. Pancasila sebagai Filsafat Negara Indonesia, akan hidup dengan suburnya dan dapat terjamin, sekiranya kaum Muslimin sungguh-sungguh memahami agamanya, sehingga agama menjadi pandangan dan mempengaruhi seluruh langkah hidupnya... Dan percobaan mencuri jalan air buat menjamin suburnya Pancasila di Indonesia adalah suatu Tahsisul ‘Umyan; laksana raba-rabaan orang buta, di malam gelap gulita. Yang dikandung berceceran, yang dikejar tidak dapat. Maka untuk menjamin Pancasila marilah kita bangsa Indonesia yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasul, bersama-sama menghidupkan agama Islam dalam masyarakat kita.” (Hamka, *Urat Tunggang Pancasila*, (Jakarta: Media Dakwah, 1985).

Wallahu a'lam bil-shawab.

Indonesia, Etalase Negara Madani

Adelia Oktarina



Sejumlah permasalahan yang dihadapi negara ini senantiasa dihubungkan dengan tingginya jumlah penduduk. Salah satunya adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari kata sejahtera. Tingginya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kualitas penduduk sering dijadikan alasan memburuknya kondisi kesejahteraan masyarakat. Akibatnya berbagai program dikeluarkan untuk menekan jumlah kelahiran. Program ini diharapkan mampu menahan laju pertumbuhan penduduk sehingga terwujudlah negara Indonesia yang sejahtera.

Berbeda dengan apa yang dilakukan Indonesia, pemerintah di beberapa negara maju di Eropa tengah fokus dalam peningkatan jumlah kelahiran. Ini diakibatkan semakin dominannya lanjut

usia di negara-negara tersebut dan rendahnya jumlah masyarakat produktif. Hal ini tentunya akan mempengaruhi eksistensi negara tersebut di beberapa tahun yang akan datang.

Transformasi keterpurukan negara yang telah dialami negara-negara Eropa Barat dan Utara pada tahun 1880-an menunjukkan konsistensi pemerintah dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan. Pemerintah negara Eropa Barat dan Utara saat itu mampu memperlihatkan peran negara dalam menekan angka kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas pendidikan, serta perluasan jaminan sosial di masyarakat.

Jauh sebelum masa krisis Eropa, Islam telah mengajarkan cara pengentasan masalah kesejahteraan masyarakat. Melalui negara Madinah yang sangat sejahtera Rasulullah mengajarkan sikap seorang pemimpin dalam membangun negara hingga sejahtera. Muhammad SAW. mengajarkan bagaimana seorang pemimpin seharusnya mengambil kebijakan. Yakni kebijakan yang dekat dengan kepentingan kelompok masyarakat marginal/*mustadh'afin*.

Kebijakan ini kemudian mampu meningkatkan kedudukan masyarakat marginal sehingga mempersempit ruang kesenjangan antara kaya dan miskin yang menjadi kebiasaan masyarakat *jahiliyah* di Makkah. Dengan kebijakan-kebijakan yang dekat dengan rakyat ini pula Muhammad SAW. mampu menghapuskan sistem perbudakan di masa itu.

Kesatuan hidup bermasyarakat dibangun dengan sangat indah melalui persaudaraan. Masyarakat *Muhajirin* Makkah yang sebagian besar miskin karena meninggalkan hartanya di Makkah dipersaudarakan dengan masyarakat *Anshar* Madinah. Persaudaraan ini kemudian menghilangkan perbedaan antara dua budaya masyarakat sehingga umat muslim di Madinah muncul

sebagai satu kekuatan muslim yang tak mudah terpecah belah. Optimalisasi potensi masyarakat *Muhajirin* dan *Anshar* mampu membangun Madinah menjadi negara besar yang kuat dan merdeka.

Sosok pemimpin yang mampu meneladani Rasulullah yang saat ini dibutuhkan Indonesia untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah sudah seharusnya mengamhil kebijakan yang dekat dengan kepentingan masyarakat kecil. Pengendalian sektor ekonomi dan keamanan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan yang dekat dengan kepentingan rakyat akan mampu mengembalikan wibawa pemerintah dihadapan rakyat Indonesia.

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta ktnampuan negara dalam menjaga keamanan masyarakat menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Ketika dua indicator tersebut mampu dipenuhi, dengan demikian pemerintah akan dinilai berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Setelah masa Rasulullah, sejarah islam mencatat kesejahteraan masyarakat Islam di bawah pemerintahan Umar Bin Khattab. Manuver politik yang Umar terapkan mampu membersihkan pemerintahan dari para pejabat yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Pemberantasan korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan ditindak oleh Umar bin Khattab dengan sangat tegas. Pemecatan dan penggantian langsung pejabat-pejabat yang terbukti melakukan kesalahan terbukti efektif mendukung suksesnya program pemerintahan Umar untuk kesejahteraan masyarakat.

Begitu pula pemerintah Indonesia harusnya bersikap. Kegiatan pemberantasan korupsi sudah seharusnya mendapat dukungan penuh pemerintah. Bukan hanya menjadi tugas dari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan adanya aturan hukum yang kuat serta penanaman nilai yang luhur pada para pemegang kekuasaan di negeri ini.

Selain kebijakannya yang mampu membersihkan pejabat publik dari kepentingan pribadi, Umar bin Khattab juga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab merupakan contoh nyata kebijakan ekonomi kerakyatan. Umar bin Khattab secara rinci mengendalikan arus keuangan negara. Kekayaan negara digunakannya untuk mengatasi kesulitan dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ekonomi politik Umar bin Khattab lainnya adalah melarang adanya pekerjaan lain yang dilakukan oleh para pejabat negara. Ini dilakukan Umar untuk menghindari adanya faktor kepentingan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Ketulusan dan kerelaan menjadi sikap dari para pemimpin besar negara besar Islam. Islam memperlihatkan para pemimpin yang zuhud dan dekat dengan rakyat. Orientasi pemerintahan adalah syiar Islam dan kesejahteraan masyarakat yang bersih dari faktor kepentingan golongan. Keberadaan pemimpin yang memiliki jiwa keindonesiaan dan ketuhanan menjadi langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kondisi para pejabat pemerintahan yang dominan hanya berasal dari orang-orang dengan kecerdasan intelektual tanpa adanya dukungan kecerdasan spiritual dan emosional terbukti gagal membawa Indonesia ke dalam kemerdekaan.

Belajar dari masa perjuangan kemerdekaan di mana para pejuang kemerdekaan yang sukses menggerakkan massa dan mencetak perubahan besar berasal dari golongan yang memiliki kecerdasan spiritual dan emosional yang baik.

Para pejuang tersebut berasal dari orang-orang yang memiliki kedekatan hati dengan Sang Pencipta dan rakyat. Sosok orang dengan hati yang dekat dengan Tuhan dan rakyat serta memiliki kecerdasan intelektual inilah yang mampu membawa perubahan besar menuju Indonesia merdeka.

Penanaman nilai keindonesiaan dan ketuhanan serta pendidikan karakter generasi muda menjadi prioritas utama yang harus segera dilaksanakan. Pelatihan kepemimpinan, kejujuran, kedisiplinan para pemuda menjadi program-program yang sangat dibutuhkan saat ini. Penanaman nilai-nilai kejujuran, disiplin, keregasan, keindonesiaan, dan ketuhanan juga harus dimulai pada anak-anak usia dini melalui berbagai hal. Baik melalui cerita dongeng, permainan, maupun tayangan film anak-anak dan nyanyian.

Penanaman nilai keindonesiaan dan ketuhanan ini dapat dilakukan dari hal-hal kecil di sekitar masyarakat. Seperti melalui gurauan dalam masyarakat, poster-poster, tulisan-tulisan mahasiswa, program resmi pengembangan masyarakat, dan hal-hal lain. Tanpa harus mengadakan kegiatan dengan modal dan waktu yang besar, penanaman nilai keindonesiaan dan ketuhanan dapat disebarkan melalui individu.

Pemberian teladan yang baik pada orang terdekat baik keluarga, organisasi, sahabat, dan ruang kerja mampu memberikan efek domino dalam penyebaran kebaikan. Penyebaran nilai keindonesiaan dan ketuhanan melalui keteladanan ini menjadi salah satu senjata yang sangat efektif dan berdampak besar.

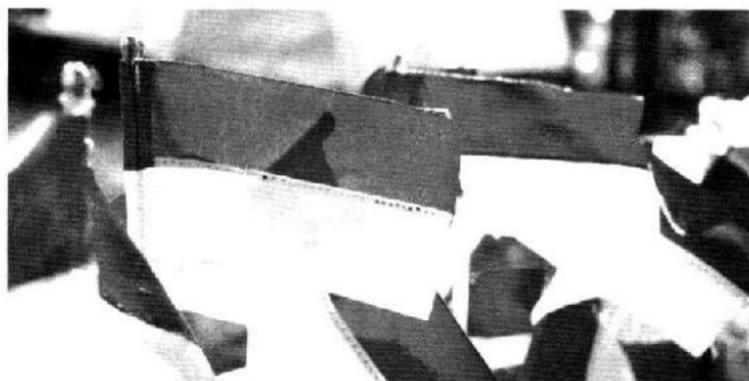
Jika seorang pemuda dengan nilai keindonesiaan dan ketuhanan yang baik mampu menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada 10 orang yang ia kenal dalam waktu 1 bulan, dan setiap orang yang telah mendapat teladan tersebut kemudian menyebarkan nilai keindonesiaan dan ketuhanan tersebut kepada

10 orang lainnya dalam waktu satu bulan juga, maka setidaknya dalam satu tahun seluruh penduduk Indonesia telah memahami nilai keindonesiaan dan ketuhanan.

Maka impian bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang sejahtera dengan pemimpin yang memiliki jiwa keindonesiaan dan ketuhanan yang baik tentunya dapat terwujud. Kebijakan yang diambil pemerintah akan menjadi kebijakan yang dekat dengan rakyat dan mampu menjaga keamanan negara sebagai syarat terbentuknya negara sejahtera sebagaimana negara Madinah di zaman Rasulullah. Impian Indonesia sebagai negara madani di era modern akan menjadi nyata di 2045.

Mengembalikan Keindonesiaan

Admi Lidya Sari



Rasa keindonesiaan yang menempel pada bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin luntur. Di mana bangsa Indonesia sendiri lebih tertarik untuk mempelajari sejarah ataupun budaya dari bangsa lain. Keindonesiaan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, toleransi, kesantunan, serta kemanusiaan. Jika poin-poin tersebut menghilang maka kemajuan dari sisi teknologi maupun ekonomi yang berhasil dicapai tidak ada artinya.

Masuknya berbagai budaya asing ke Indonesia bisa menjadi hal yang baik apabila dapat disikapi dan disaring dengan baik juga. Namun berbeda apabila budaya asing yang masuk tidak bisa disikapi dan disaring. Karena kita tahu tidak semua budaya asing

yang masuk sesuai dengan kultur bangsa Indonesia sendiri dan tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Saat ini para generasi muda di Indonesia sudah banyak yang berpendapat dan berpikir bahwa kita akan menjadi bangsa yang kuno dan kolot apabila tidak mau menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia. Generasi muda masa kini terutama di Indonesia telah digoyahkan dengan 4F dan 5S yaitu *Food, Fun, Fashion, Film, Sport, Sex, Smoke, Science, Songs*).

Contohnya, seperti yang baru kemarin ramai diperbincangkan, adanya perayaan kelulusan yang bertema *bikini party*, dengan menghalalkan minuman keras dan berpakaian minim. Banyak pro kontra yang terjadi setelah adanya masalah tersebut. Para remaja yang mendukung pesta tersebut berpendapat bahwa pesta tersebut adalah hal yang biasa, menganggap orang-orang yang menolak adanya pesta tersebut ketinggalan zaman atau kolot dan merasa bahwa urusan mereka adalah urusan mereka, dan masyarakat tidak berhak untuk menghakimi mereka.

Contoh lainnya yang sangat menyedihkan adalah anak-anak usia dini sudah mengenal pacaran yang sangat tidak sesuai dengan usia mereka. Semakin ke sini saya semakin banyak melihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Anak-anak sekolah dasar zaman sekarang sudah mengenal istilah cinta-cintaan dan berperilaku yang tidak pantas dilakukan oleh anak kecil. Dari mana mereka mengenal cinta-cintaan dan pacaran? Tentunya dari film-film dan sinetron cinta-cintaan yang mendominasi di televisi dan tentunya lingkungan sekitar mereka yang sudah terbiasa dengan masalah-masalah tersebut.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena lemahnya rasa keindonesiaan yang dimiliki. Saat ini, banyak anak muda yang sudah teracuni dengan perilaku atau budaya asing yang tidak patut untuk dilakukan sebagai anak muda Indonesia.

Lunturnya keindonesiaan ini juga berarti lunturnya nilai-nilai Islam di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia terlahir dari pemikiran-pemikiran Islam. Islam sangat berpengaruh dan berurat berakar pada kebudayaan dan adat-istiadat Indonesia. Islam memberikan corak tersendiri untuk Indonesia.

Selama ini Indonesia selalu dijauhkan dari nilai keislaman, padahal Indonesia sendiri terlahir dari Islam. Banyak cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia dan Islam bangkit, dengan cara menyingkirkan nilai-nilai keislaman dari kehidupan bangsa Indonesia. Mereka mencoba menempatkan nilai-nilai di luar Islam sebagai jati diri dan simbol-simbol kebangsaan Indonesia. Secara langsung maupun tidak langsung masyarakat muslim Indonesia dipaksa untuk tidak memiliki rasa bangga terhadap Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Apalagi jika dilihat para generasi muda di Indonesia, saya yang juga bagian dari generasi muda di Indonesia merasa miris melihat keadaan Indonesia saat ini. Di mana mereka lebih menghargai bangsa lain ketimbang bangsanya sendiri dan tidak ingin masalah negara ataupun kehidupan dikaitkan dengan agama, apalagi dikaitkan dengan agama Islam. Padahal banyak sekali dari mereka yang jika ditanya beragama apa akan menjawab beragama Islam, dan mengakuinya sebagai bangsa Indonesia namun perilakunya tidak sama sekali menunjukkan keislaman dan keindonesiaannya.

Banyak juga yang memisahkan antara nasionalisme atau keindonesiaan dengan Islam, padahal hal tersebut adalah satu kesatuan yang bila dipisahkan akan menjadi hal yang fatal. Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia pun dianggap sebagai dinding pemisah antara Indonesia dan Islam. Banyak kaum muslim yang dipaksa untuk tidak merasakan Pancasila sebagai dasar negara dan memilih untuk memusuhi Pancasila

karena dianggap bertentangan dengan Islam. Padahal sangat jelas yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa adalah Allah SWT. yang benar-benar Esa, namun dikaburkan makna dan nama-Nya menjadi Tuhan dari agama manapun. Padahal Allah SWT adalah Tuhan kaum Muslim.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk tetap menjaga rasa keindonesiaan ini? Karena kita tahu, di zaman modern ini sekuat apapun kita mencegah masuknya budaya asing, pasti ada saja celah masuk yang bisa dilalui. Yang pasti, setiap individu harus melakukan upaya untuk bisa menghidupkan lagi nilai-nilai keindonesiaan dengan cara mengembalikan semuanya ke agama, kembalikan semuanya ke Islam. Dengan benar-benar memegang teguh dan memahami apa itu Pancasila. Kemudian, masyarakat muslim harus sungguh-sungguh memahami agamanya, sehingga agama bisa menjadi pedoman, pandangan, dan dasar dari setiap langkah yang diambil yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya.

Semoga ke depannya rasa keindonesiaan ini semakin bangkit dan agama Islam benar-benar menjadi acuan dari setiap langkah yang akan diambil oleh Indonesia. Dengan sama-sama memperbaiki diri masing-masing, mengingatkan sesama muslim, mengambil manfaat dari budaya-budaya asing yang masuk dan menjadikannya inspirasi dan motivasi untuk menjadi negara yang lebih maju.

Menjadi pemacu semangat Indonesia untuk lebih bersemangat memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada bangsa asing bahwa kebudayaan Indonesia pun tidak kalah dan lebih beragam apabila ingin dibandingkan. Insyallah kedepannya Indonesia dengan Islam bisa menjadi kesatuan yang sempurna dan Indonesia bisa memimpin peradaban dunia.

Gelombang Ketiga Membangun Peradaban Indonesia

Arif Suhendar



Perspektif sejarah memandang masalah jauh lebih komprehensif daripada perspektif hukum dan politik ataupun ekonomi. Dengan perspektif sejarah, jauh lebih mudah untuk merekonstruksi masalah yang kira hadapi secara keseluruhan dan menghadirkan solusi-solusi yang kira perlukan.

Negara ini sangat besar, juga sangat majemuk dengan segala permasalahan sosial yang sangat variatif. Berdasarkan hal itu maka untuk memahami kondisi Indonesia haruslah menggunakan pendekatan holistik dibanding pendekatan diagnotif yang lebih efektif kalau masalahnya satu. *One single program, one single solution.*

Biasanya, karena pendekatan diagnotif yang dilakukan kebanyakan orang akhirnya Indonesia dilukiskan dengan sangat sederhana dan menulis Indonesia dengan visi yang adjektif. "Indonesia hebat, Indonesia tangguh, Indonesia bisa."

Hal ini tentunya mereduksi kebesaran Indonesia menjadi terlalu sederhana. Padahal Indonesia negara besar. Ada tiga gelombang yang sudah kita lalui, negara Indonesia mengalami *sifting of history*, peralihan gelombang sejarah. Seperti layaknya sebuah film, kelahiran negara yang bernama Indonesia mengalami berbagai segmentasi gelombang.

Gelombang pertama adalah gelombang mencari Indonesia, di mana kita mencari jati diri dan identitas sebagai bangsa. gelombang ini ditandai dengan munculnya gagasan dan kesepakatan bersama untuk menghapuskan penjajahan dan mendirikan sebuah negara bangsa tersendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam peristiwa ini ditandai dengan adanya tokoh-tokoh bangsa pertama, seperti HOS Cokroaminoto, H. Agus Salim, II. Samanhudi, dan lainnya.

Gelombang kedua adalah menjadi Indonesia, gelombang yang dimulai sejak menjelang kemerdekaan sampai saat ini. Tanda yang bisa dilihat adalah adanya perbedaan ideologi dan pertentangan ideologi antar etnis atau kelompok masyarakat, suku bahkan agama. Di periode ini, Pancasila dan UUD sebagai dasar negara banyak dipertanyakan. Sejarah mencatat bagaimana pertentangan generasi tua dan muda, pertentangan antara Komunis, Islamis, dan Nasionalis. Semua terpecah, bahkan sektor agama sekalipun tidak luput dari hal ini. Adanya Muhammadiyah dan NU, juga organisasi-organisasi keislaman lainnya sempat menimbulkan friksi dan perpecahan di awal kehadirannya. Tokoh-tokoh yang muncul pada periode ini adalah, Soekarno, Moh Hatta, Sutan Syahrir, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asyari.

Gelombang ketiga, adalah gelombang kebersamaan. Gelombang ini muncul karena kesadaran bersama, bahwa Indonesia harus maju untuk memperbaiki peradaban yang porak poranda. Di periode ini ada tiga syarat untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik, yaitu profesionalitas, persatuan, dan spiritual.

Pertama, profesionalitas. Ibarat istana yang megah, Indonesia adalah sebuah atap yang kokoh, lantainya sangat rapi dan berjajar indah yang kita sebut sebagai dasar negara. Namun hari ini, istana itu rubuh tak berbentuk remuk redam karena tiang-tiangnya keropos. Tiang adalah kualitas dan keahlian yang dimiliki setiap individu bangsa. Kementerian, atau kabinet kerja hari ini menjadi contoh yang jelas. “*Jika kepemimpinan diletakkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*” Begitu sabda Rasulullah.

Jika salah satu pilar ini lemah, maka istana Indonesia ini tak akan pernah berdiri tegak. Profesional yang ahli di bidang teknologi, bidang militer, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang-bidang lainnya dipegang oleh orang-orang yang benar-benar paham dan menguasai bidangnya, seperti halnya yang direpresentasikan Turki hari ini. Semua bidang dipimpin oleh orang-orang yang ahli. Ketua guru nasional, ketua pergerakan sosial, menteri ekonomi, menteri kesehatan, dan posisi yang lainnya. Ini tentunya menjadi ‘PR’ bagi pemuda-pemuda hari ini.

Kedua, persatuan. Sumpah pemuda menjadi *historical for unity*. Isi dari sumpah pemuda menunjukkan sebuah simbol bagaimana persatuan dilakukan. Sekilas tak ada masalah dengan tiga butir sumpah pemuda. Menjunjung tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Poin kedua, Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Masalah muncul di poin ketiga, bahasa yang satu bahasa Indonesia.

Sejarah mengatakan bahwa sumpah pemuda dihadiri dari berbagai kalangan, *Jong Java*, *Jong Celebes*, *Jong Sumatra*, dan kelompok pemuda yang lain. Para pemuda membawa bahasa masing-masing sebelum disepakati bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Kemudian, yang menarik adalah, forum sumpah pemuda menghasilkan keputusan bahwa bahasa yang diambil adalah bahasa Indonesia yang notabene adalah bahasa melayu yang menjadi minoritas dalam pertemuan itu.

Ketika sebuah visi sudah sama, cita-cita sudah sama, maka permasalahan-permasalahan tentang perpecahan menjadi hal yang kecil. Persatuan menjadi kekuatan paling besar yang menjadi latar belakang berdirinya Bangsa Indonesia. Ke depan, Indonesia butuh akselerasi dan kolaborasi dalam bidang keilmuan, gagasan, keahlian, dan segala bentuk faktor berdirinya sebuah bangsa pemimpin peradaban.

Ketiga, spiritual. "Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan itu." Begitulah sabda Rasulullah yang di kemudian hari muncul Sultan Muhammad Al Fatih sebagai penakluk konstantinopel. Menjadi sebaik-baik pemimpin untuk penaklukan kota yang pertahanannya tak dapat ditembus sebelumnya selama lebih dari 700 tahun.

Hal yang menarik dari penaklukan ini adalah persiapan dan strategi yang dibuat oleh Al Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Setelah diangkat menjadi sultan, Al Fatih menyusun tim penasihat yang paham dengan agama, lalu kemudian membentuk pasukan dan setiap pasukan harus ada mentor atau guru spiritual yang mengajarkan Islam. Sehingga ibadah dan pemahaman pasukan terjaga. Sultan sendiri pun memiliki mentor, yaitu Ustadz Syamsudin yang kemudian memberikan inspirasi kepada Al Fatih untuk menjalankan kapal

ke atas gunung. Sesuatu yang mustahil dan tak terpikirkan orang lain, menggerakkan pasukan untuk membawa kapal besar ke atas gunung. Pasukan itu taat dan tak ada yang lari ke belakang. Spiritualitas yang kuat mampu menggerakkan mereka untuk berjuang selama 53 hari sambil menahan cuaca panas dan dingin yang ekstrim pada saat itu.

Sejarah mencatat spiritualitas selalu menjadi faktor utama kemenangan pertempuran-pertempuran besar. Perang Uhud, perang Khondaq, perang Badar, perang Salib yang dipimpin Sholahudin Al Ayyubi, perang Konstantinopel, Perang Padri, pertempuran Ambarawa, pertempuran oleh Jendral Sudirman, Pangeran Diponegoro dan lainnya menjadi bukti akan hal tersebut.

Sejarah Indonesia pun tak lepas dari peran para ulama, yang menjadi motor penggerak kemerdekaan. Seperti HOS. Cokroaminoto, H. Agus Salim, KH. Samanhudi, serta jauh sebelum itu juga kerajaan-kerajaan Islam dengan semangat memerdekakan diri dari penjajahan sangat gigih menghalau penjajah yang datang.

Spiritualitas yang kuat yang dimiliki generasi muda dan generasi-generasi penggerak perubahan akan sangat menentukan kekuatan kebangkitan bangsa Indonesia ke depannya. Strategi Al Fatih untuk memberikan mentor kepada pasukanya bisa diadopsi siapapun yang nanti menjadi pemimpin di negeri ini. Memberikan mentor kepada pegawai negeri sampai tingkatan paling bawah, terutama pendidik agar mendidik tidak sekedar pendidik, tapi mendidik untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin peradaban yang bermoral dan memiliki karakter yang kuat.

Membangun Identitas Keindonesiaan Melalui TV

Billy Abu Ja'far



Hasil riset Nielsen tentang pengukuran pemirsa televisi (tv) tahun 2012, menunjukkan bahwa sampai saat ini, konsumsi media televisi masih memimpin total konsumsi media, yaitu sebesar 94 persen dari total populasi media konvensional di Tanah Air. Dalam sehari, pemirsa bisa menghabiskan sekitar 4,5 jam duduk di depan tv dan 24 persen dari total waktu tonton mereka dihabiskan untuk menonton sinetron. Jika benar data di atas maka Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat genting.

Tingkat konsumsi tv di Indonesia memang jadi sasaran empuk bagi pengusaha media. Dari hasil survei di atas dapat diartikan bahwa program tv memiliki pengaruh luar biasa terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia. Mulai dari tingkatan umur terendah hingga paling tua memiliki dampak masing-masing.

Sadar atau tidak, penjajahan terselubung telah berjalan di era pertelevisian. Hak mendapatkan tontonan yang berbobot mulai terpinggirkan oleh kepentingan profit. Program yang benar-benar memiliki jiwa keindonesiaan bisa dihitung dengan jari.

Zaman globalisasi yang terus bergerak membuat negara yang tak siap seperti Indonesia akan menjadi permainan negara adidaya. Konsumsi konten kebudayaan barat begitu deras mengguyur masyarakat, terlebih lagi begitu rapuhnya nasionalisme masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi yang tepat untuk tetap menjaga nilai keindonesiaan.

Upin & Ipin adalah serial kartun yang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai usia tua pun akan tahu tentang serial kartun asal negeri jiran, Malaysia ini. Tokoh kartun tersebut menjadi bahan lawakan dengan mengambil gaya bicara dan kepolosannya. Kita simak lebih dalam tentang serial kartun ini apakah ada hal yang salah?

Sekilas terasa tidak ada, karena tontonan itu cocok dengan anak-anak. Tetapi, sesungguhnya ada penyebaran budaya Malaysia yang sangat kental di sana. Mulai dari tradisi atau kebiasaan masyarakat yang di kemas *apik* dalam cerita yang menghibur tanpa meninggalkan dunia permainan anak-anak. Sejarah Malaysia pun diceritakan sehingga anak Indonesia lebih dekat dengan budaya Malaysia. Belum cukup di situ, pengaruh luar biasa dari serial kartun adalah penggunaan bahasa Melayu yang sangat kental. Mungkin anak Indonesia akan lebih fasih

berbahasa Malaysia yang benar daripada berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah belum tersadar juga dengan dampak jangka panjang? Mari kita ambil contoh lain.

Serial kartun lain yang sukses di Indonesia adalah *Bobo Boy* dan juga *Pada Zaman Dahulu* yang disiarkan di stasiun televisi yang sama dengan *Upin Ipin*. Budaya Malaysia pun begitu kental terlihat di kedua serial ini, yaitu bahasa kebangsaan mereka. Naasnya, anak-anak Indonesia suka menonton serta mengikuti gaya tokoh-tokoh tersebut.

Keadaan ini kian hari akan semakin buruk jika tv tetap menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Pemilahan konten yang ditayangkan akan menjadi prioritas utama untuk menaggulangi segala dampak yang telah terjadi. Penyortiran program televisi berdasarkan segmentasi penonton. Persentase program keindonesiaan harus melebihi 50% karena penonton televisi nasional rata-rata kalangan menengah ke bawah. Contoh program yang bisa diangkat antara lain cerita rakyat, adat istiadat daerah, pariwisata, serta penggunaan dialek bahasa daerah dan lain-lainnya.

Konten anak-anak menjadi tombak dalam melestarikan keindonesiaan karena anak-anak merupakan sasaran yang strategis untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Program anak-anak haruslah produk Indonesia dan juga memberikan efek edukasi seputar Indonesia tetapi di bungkus dengan animasi yang mudah dicerna oleh anak-anak. Ingat, industri kreatif Indonesia sangat luar biasa. Mereka memiliki kualitas yang setara dengan negara maju.

Peran pemerintah menjadi sentral karena mempunyai *power* sebagai pembuat kebijakan. Ketegasan pemerintah sangat dituntut dalam pembuatan regulasi dan pengawasan dalam pelaksanaan. Sanksi tegas juga harus dijalankan tanpa pandang bulu menghadapi pelaku usaha yang nakal.

Pembangunan keindonesiaan di dunia pertelevisian Indonesia menjadi tanggung jawab bagi segenap pelaku pertelevisian dan pemegang kebijakan. Segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut tak bisa semudah apa yang dibayangkan karena perubahan harus bertahap. Pemimpin negeri ini telah mendengungkan revolusi mental yang menjadi jargon utama ketika kampanye, sejalan dengan pembangunan keindonesiaan di dunia pertelevisian.

Revolusi mental yang dimaksud adalah revolusi mental konsumtif terhadap produk luar dan mengubah menjadi mental produksi. Bayangkan saja jika setiap daerah di Indonesia diangkat kebudayaannya maka industri pertelevisian kita akan sangat variatif. Nantinya Indonesia tak lagi menjadi pengimpor tetapi pengekspor konten film yang produktif.

Menjadi warga negara yang baik adalah yang mengerti tentang sejarah negara dan bangsanya. Bung Karno pernah berkata JAS MERAH jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jika pembangunan keindonesiaan melalui televisi terlaksana maka negar Indonesia akan dicintai rakyatnya.

Pemimpin yang sadar akan keindonesiaan itu penting, insan pertelevisian yang paham menyampaikan keindonesiaan adalah sebuah kombinasi yang sangat sempurna didukung dengan regulasi yang mengatur jalannya industri pertelevisian. Semua akan menghasilkan sebuah bibit nasionalisme tumbuh subur di segenap hati dan jiwa rakyat Indonesia.

Negara Indonesia akan menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola pertelevisian dalam menyebarkan kecintaan pada negaranya. Indonesia akan membuktikan diri sebagai negara kaya akan budaya dan bahasa yang tak habis walau ditambang terus menerus. Negara ini akan berdikari melalui keindonesiaan yaitu empat pilar kebangsaan.

Membangun Satu Kekuatan

Dede El Triana



"Islam adalah kekuatan. Jiwa-jiwa muslim adalah jiwa-jiwa yang kuat, jiwa merdeka, jiwa-jiwa pembebas" (Jazir, ASP)

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Ya, siapapun tahu itu. Dari kecil kita diberitahu dengan penuh kebanggaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010, total penduduk Indonesia mencapai 238 juta jiwa dengan jumlah penganut agama Islam mencapai 87% atau sekitar 207 juta jiwa.

Dua ratus tujuh juta jiwa bukan angka yang kecil. Sayangnya, banyak umat Islam yang tidak menyadari apa makna dari 207 juta jiwa. Islam adalah kekuatan. Jika 207 juta umat Islam bersatu, maka akan menjadi satu kekuatan besar yang ditakuti. Mengutip

buku *Ketika Cinta Bertasbih*, 207 juta jiwa diibaratkan sebagai 207 juta singa, penguasa belantara dunia! Sayangnya masih banyak dari 207 singa itu yang justru bermental kambing dan berperilaku layaknya kambing.

Peradaban kita adalah peradaban besar. Kita adalah Majapahit yang perkasa, menguasai Nusantara, kita adalah Sriwijaya, Malaka, Samudera Pasai yang digdaya dan adikuasa. Kita pemilik Diponegoro, Soetomo, Natsir, Hatta, Soekarno, Hoegeng, Habibi. Kita adalah negeri dengan tanah subur yang mungkin dengan kesuburannya, mampu menghidupi orang-orang di dalamnya dengan makmur. Kita adalah jiwa-jiwa dengan banyak keragaman, namun bisa disatukan di bawah satu bendera. Adakah negara lain yang bisa menandinginya?

Kita adalah jiwa-jiwa dengan kelapangan hati seluas lautan di wilayah kita. Kita adalah jiwa-jiwa dengan semangat persaudaraan dan persatuan sekokoh gunung yang menancap di tubuh negeri ini.

Tahukah siapa yang paling intens memberi bantuan dan dukungan kepada rakyat Palestina yang tertindas di negerinya? Indonesia. Sampai mereka mengenang dan begitu bangga dengan persaudaraan yang kita beri. Tahukah siapa yang menerima ribuan manusia perahu pengungsi dari Vietnam empat dekade silam yang mencari suaka karena negaranya tengah bergejolak? Tahu siapa yang menerimanya? Di saat negara-negara ASEAN justru mengusir mereka?

Surat dari Nguyen Van Dinh salah seorang dari manusia perahu itu yang kini bermukim di Amerika Serikat, mengisahkan kenangannya:

"Saya bersama keluarga dan kebanyakan teman saya berutang kepada orang Indonesia banyak sekali. Setelah berhari-hari

di Malaysia mereka dipukuli, dirampok, diperkosa, dan dibunuh, mereka sampai di pulau terpencil di Indonesia yang penduduknya sangat miskin, tetapi sangat dermawan. Orang Indonesia datang dengan gelas berisi teh panas, mangkok nasi. Hanya hal ini yang dapat memberikan gambaran semua. Kemanusiaan bukan teori, tetapi tindakan. Orang Indonesia telah melakukannya kepada pengungsi Vietnam.”

Empat puluh tahun kemudian, apa yang dilakukan oleh penduduk di Riau Kepulauan di tahun 1970-an itu dilakukan oleh penduduk Aceh kepada muslim Rohingya yang tertindas dan terjajah di negerinya. Mei 2015, mereka dengan jalur laut mencari suka. Rasakanlah bagaimana salah seorang “manusia perahu” dari Rohingya ini mengisahkan:

“Ketika berada di laut, kami tiga kali ditembaki lalu diusir. Hingga saat kali ketiga ditembaki pada siang hari, lalu ada 6 bot/perahu nelayan yang datang membantu dan membawa kami ke daratan. Kami sendiri tidak tahu di mana daerah itu. Lalu orang-orang berdatangan melihat kami. Mereka menyebutkan kita adalah Muslim, kita saudara seiman dan mereka memeluk kami sambil menangis dan kami pun ikut menangis bersama mereka. Kami diberi makan dan mereka mencari salah seorang dari kami yang bisa berbahasa Melayu dan itu adalah saya. Dari situ kami tahu bahwa kami berada di Aceh, Indonesia. Terima kasih Aceh”

Empat puluh tahun kemudian. Bukan waktu yang pendek, namun nurani dan naluri persaudaraan itu masih tertancap kokoh di penduduk negeri ini. Sejarah mengajarkan, kita lemah ketika kondisi kita terpecah. Kita lemah ketika kita masih menganut paham primordialisme secara sempit, tapi kita kuat ketika kita

1 Isye Ismayawat, Manusia Perahu Tragedi Kemanusiaan di Pulau Galang, Jakarta: KOMPAS, 2013.

menamakan diri kita sebagai Putera-Puteri Indonesia dan bersatu untuk memperjuangkan negeri ini.

Mengetahui kebesaran sejarah negeri ini, menyadari bahwa bangsa kita sebenarnya adalah bangsa yang kuat dan berupaya membangun kembali kejayaan itu adalah faktor penting. Bangsa-bangsa lain yang menyadari potensi emas negeri kita tak ingin kita bangkit dan apakah lantas kita justru mengaminkan keinginan mereka dengan sikap kita yang rendah diri, dan justru mengedepankan kepentingan pribadi?

Sekalipun, jika berpecah belah, tak akan pernah kita menjadi satu kekuatan besar. Kita hanya menjadi sebuah lidi yang begitu mudah dipatahkan, kita hanya akan menjadi lilin yang begitu mudah untuk mati nyalanya dengan satu tiupan saja. Kita memang tak bisa menutup mata bahwa saat ini negeri kita sedang sakit. Kita memang tak bisa menyangkal atas bobroknya setiap sendi kehidupan di negeri ini. Politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan yang carut-marut. Sungguh, kita sudah terlalu sering mengeluhkan akan hal itu tanpa tahu apa yang harus kita lakukan.

Tulisan ini bukan untuk menghibur diri. Hanya ingin menyadarkan dan membuka mata tentang sejarah negeri ini yang begitu besar, bukan untuk larut dan berbangga-bangga terhadap masa lalu, tetapi untuk bangkit kembali mencapai kejayaan yang penuh rahmat. Karena untuk mencapai yang kita tuju, mengenal jati diri kita menjadi awal perjalanan yang harus direnungkan untuk melangkah selanjutnya.

Mengembalikan Kembali Akar Perjuangan

Jaya Sukmana



Hari ini kita dilahirkan sebagai orang Islam dan orang Indonesia. Tapi sejak kecil kita tidak pernah diajarkan untuk bangga sebagai seorang muslim yang hidup di Indonesia. Betapa tidak, dalam buku-buku sejarah pun kita lebih mengenal RA. Kartini sebagai tokoh perempuan pembaru daripada Cut Nyak Dien. Kita lebih mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan daripada KH. Ahmad Dahlan, dan kita lebih mengenal Taman Siswa sebagai pelopor pendidikan modern daripada Jam'iat Khoir. Kenyataan sejarah yang sudah banyak mengalami distorsi ini harus kita urai satu per satu, agar kita tahu ke depannya apa yang harus kita perjuangkan.

Dalam salah satu sejarah kontemporer, kita mengenal adanya Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan modern di Indonesia. Padahal jauh sebelum Taman Siswa berdiri, telah lahir sebuah organisasi yang bernama Jami'at Khoir pada tahun 1901 di Jakarta. Visi utama Jami'at Khoir saat itu adalah untuk memberikan pendidikan Islam modern karena menyadari dikotomi yang terjadi antara pendidikan modern dan pendidikan agama pada waktu itu. Sistem madrasah lama hanya menghasilkan lulusan-lulusan ulama yang tidak ada pengetahuannya tentang ilmu-ilmu modern dan sistem pendidikan formal hanya akan menghasilkan ahli-ahli yang sedikit pengetahuannya tentang ilmu agama.

Menghadapi kenyataan demikian, orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia waktu itu terdorong dan tergerak nalarnya untuk mendirikan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Tujuannya untuk mengintegrasikan pendidikan modern dan pendidikan Islam agar bisa dihasilkan *polymath*. Ulama-ulama yang fasih dalam bidang agama tapi juga ahli dalam ilmu pengetahuan modern.

Tujuan awal berdirinya Jami'at Khoir ini adalah untuk mendirikan sekolah Islam dan pengiriman pelajar ke Turki. Karena memang mempunyai jaringan dan kedekatan dengan kekhilafahan Islam di Istanbul. Pada tahun 1903, cendekiawan Muslim yang berkumpul dalam wadah Jami'at Khoir ini kemudian mengadakan seminar dengan mengundang Ahmed Amir Bey sebagai utusan dari Khilafah Utsmani di Istanbul. Hasil dari seminar ini menyatakan bahwa haram bagi ummat Islam tunduk pada penguasa kafir. Inilah yang menjadi percikan kemerdekaan pertama, yaitu hembusan semangat untuk membebaskan diri dari penjajah kafir dan menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya.

Aktivitas Jami'at Khoir itu kemudian tercium oleh Belanda dan dianggap mengancam eksistensinya. Setelah itu pemerintah

kolonial Belanda mengeluarkan peraturan. *Pertama*, orang asing terutama orang-orang Arab dilarang melakukan kunjungan ke Indonesia. *Kedua*, sultan, penguasa, dan abdi dalem dilarang pergi haji, dikhawatirkan akan terpengaruh *pan-islamisme* di Timur Tengah. *Ketiga*, mengharuskan orang yang sudah berangkat haji untuk mencantumkan gelar hajinya.

Peraturan itu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk menjaga agar kaum pribumi tidak terpengaruh oleh provokasi dunia luar sehingga eksistensi mereka di bumi Nusantara tetap terjaga. Belanda ingin agar pengaruh *pan-islamisme* tidak masuk dan menyebar di Nusantara karena akan menyebabkan pergolakan hebat dalam menentang pemerintah kolonial.

Pembatasan oleh Belanda itu kemudian dirasakan oleh aktivis Jami'at Khoir, akhirnya aktivis-aktivis Jami'at Khoir yang mayoritasnya adalah santri dan intelektual Muslim banyak yang membentuk organisasi baru. Sebut saja Haji Samanhudi yang kemudian membentuk Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905. KH. Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, Syeh Ahmad Syurkati yang kemudian mendirikan Al Islam wal Irsyad pada tahun 1914 dan KH. Ahmad Halim yang mendirikan Perikatan Oemat Islam (POI) pada tahun 1917.

Sebagian besar organisasi ini didirikan untuk menyebarkan dakwah Islam dan menangkal kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris yang masuk ke Indonesia. Organisasi ini pula lah yang di kemudian hari menjadi cikal bakal dalam menghembuskan semangat jihad untuk mengusir pemerintah kolonial dari bumi Nusantara.

Pada tanggal 17-24 Juni 1916 diadakanlah *National Indesche Congress* (NTICO) pertama di Surabaya yang dimotori oleh Syarikat Islam (SI) yang dihadiri oleh 80 lokal SI yang mewakili 360.000 anggota. Tema besar pembahasan kongres pertama ini adalah sosialisme dan demokrasi dalam pandangan Islam.

Pada kongres ini, karena melihat posisi Belanda yang masih sangat kuat sehingga diperlukan faham baru untuk menyatukan seluruh masyarakat dalam mengusir Belanda. Kemudian lahirlah semangat kemerdekaan dan rasa kebangsaan yang pada akhirnya faham ini akan menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme. Perlu dipahami bersama bahwasanya nasionalisme ini lahir sebagai strategi untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan lokal agar mau bergerak tanpa sekat dan bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan.

NTICO kedua kemudian dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20-27 Oktober 1917. Tema pembahasannya pada waktu itu adalah tentang pembelaan (advokasi) rakyat terhadap tanah, *raad* agama, persewaan tanah, industri gula, pengadilan, perumahan, dan nasionalisme.

Setelah itu dilaksanakan kembali NTICO ketiga pada tanggal 29 September-6 Oktober 1918 yang diikuti oleh 87 lokal mewakili 450.000 anggota. Tema pembahasan NTICO kali ini adalah penghapusan kerja rodi, turunkan pajak, perluas pengajaran rakyat, dan tanah untuk rakyat miskin.

Setelah sukses dengan manuver-manuver gerakannya, Syarikat Islam mengadakan kembali NTICO keempat di Surabaya pada tanggal 26 Oktober-2 November 1919. Kali ini Syarikat Islam berhasil memperluas keanggotaannya hingga berjumlah 2,25 juta orang. Tema pembahasan kali ini adalah "kapitalisme berdosa dan bersatulah kaum melarat." Terakhir, NTICO kelima dilaksanakan di Yogyakarta. Tapi karena pada periode ini Syarikat Islam sudah mulai tersusupi komunis, jadi tema pembahasannya adalah "Pendisiplinan Organisasi." Setelah NTICO kelima ini Syarikat Islam terbelah menjadi dua bagian, SI Putih yang tetap berasaskan Islam dan SI merah yang akan menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam perkembangannya, gerakan-gerakan Islam inilah yang nyatanya menjadi pelopor kemerdekaan. Barisan-barisan jihadis yang mempunyai semangat tinggi dengan jargon '*hidup mulia atau mati dengan syahid*' menjadikan mereka pasukan yang tangguh dan tak gentar menghadapi musuh meskipun dalam cerita-cerita klasik senjata yang digunakan hanya bambu runcing.

Semangat inilah yang seharusnya kita teladani bersama, menjadikan Islam bukan hanya sebagai dorongan beribadah, tapi sebagai naluriyah dalam bermasyarakat. Menjadikan Islam sebagai gerakan terpadu yang tersusun rapi dan mengakomodir kehadirannya dalam *spirit* bernegara. Apalagi ketika kita menyadari dalam era keterbukaan Indonesia hari ini, menyebabkan Indonesia dalam pertarungan terbuka antar ideologi dan menempatkan Islam sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaannya kembali yang hakiki.

Penguatan Wilayah Terdepan Indonesia

Muhammad Risal



Pemerataan pembangunan di Indonesia masih menjadi problematika dan polemik dan berkepanjangan. Sejarah bangsa kita telah mencatat betapa upaya-upaya telah dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan di setiap wilayah Nusantara ini sebagai wujud prinsip perikemanusiaan, perikeadilan, dan peripersatuan.

Sumber daya alam yang melimpah di negara kita diharapkan mampu menjadi salah satu modal besar dalam mewujudkan cita-cita yang hingga kini belum kita raih. Sekitar 70 tahun pasca kemerdekaan, Indonesia masih belum mampu menyejahterahkan rakyat yang hidup tersebar di sepanjang wilayah nusantara.

Apabila kita mengikuti etape perjalanan bangsa, tentunya kita ingat ketika peralihan kepemimpinan dari masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno digantikan oleh Soeharto. Pada saat itu, Soeharto berdalih bahwa yang diperlukan Indonesia pada masa itu adalah kesejahteraan, sementara kesejahteraan rakyat hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan yang terencana. Maka kabinet pembangunan yang menandai kekuasaan presiden Soeharto pun menjadi atribut dari pemerintahan Orde Baru. Pembangunan lima tahun (pelita) menjadi program untuk mengevaluasi dan memproyeksi kemajuan yang dicita-citakan. Sistem pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan yang sentralistik pada masa itu berlangsung selama 32 tahun lamanya.

Pembangunan yang direncanakan ini akhirnya tidak mampu menjawab keinginan pemerintah sendiri, ketimpangan dan interval yang jauh antara pusat dan daerah menjadi masalah besar. Kesenjangan kesejahteraan antara rakyat dan pejabat negara mewarnai kehidupan berbangsa. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin memonopoli keadaan.

Bahkan di akhir pemerintahan Orde Baru, yang pada saat itu kursi presiden diambil alih oleh BJ. Habibie, Timor Timur akhirnya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi di era pemerintahan reformasi yang hanya berlangsung singkat itu diprediksi akan menjadi jembatan pengantar perubahan metode dalam menjawab tantangan pembangunan yang dicita-citakan sebelumnya.

Era peralihan yang singkat ini dianggap sebagai pemerintahan paling produktif, karena menghasilkan berbagai undang-undang untuk mengubah tatanan yang ada sebelumnya dan telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar di dunia. Sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik akhirnya didesentralisasikan.

Selama sekitar 15 tahun demokrasi pasca reformasi, pembangunan sepertinya belum merata di semua wilayah. Kita tidak akan pernah heran jika kita temui perbedaan yang jauh antara pulau Jawa dan pulau Nusa Tenggara, Papua, dan berbagai kawasan di Indonesia bagian Timur. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya tidak dapat dirasakan oleh sanak saudara kita yang tinggal di wilayah ini. Akhirnya sebagian mereka hidup dengan keterbelakangan ekonomi, kesehatan, dan yang paling parah adalah keterbelakangan ilmu pengetahuan sebagai bekal mereka dalam membangun peradaban bangsa kita.

Mereka tumbuh dengan cita-cita dan pengharapan yang sangat besar. Menjadi orang yang besar agar dapat membesarkan Indonesia. Akan tetapi hati yang besar itu pula tidak ditopang dengan langkah yang besar untuk mewujudkannya. Olehnya itu, sudah seharusnya seluruh elemen bangsa sebagai satu kesatuan memperhatikan dan menitikberatkan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut.

Bangsa kita tentu tidak mengharapkan adanya gejala yang berujung pada lepasnya sejumlah wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya kita banyak belajar dari referensi Islam dalam membangun dan menguatkan sebuah negara. Tentu kita akan teringat bagaimana Sultan Mehmed Al-Fatih dalam menguatkan wilayah terdepan dari negaranya sebagai benteng untuk bertahan dan menyerang ketika ingin membebaskan Konstantinopel. Beliau sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya bahkan di daerah paling jauh dari pusat pemerintahan, dan paling dekat dengan wilayah musuh. Dengan strategi tersebut dia dapat melindungi dan menguatkan negara.

Selain itu, salah satu contoh negara yang ditaklukkan Islam dikarenakan kelemahan wilayah terdepan negaranya adalah pada

saat Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Di mana wilayah sekutu dari Raja Roderick, Lucian tidak lagi mempercayai sang raja yang akhirnya membuka jalan sebagai pintu terdepan kerajaan sehingga memudahkan pasukan Islam dalam perjalanannya menghancurkan pusat pemerintahan Raja Roderick.

Role model di atas menggambarkan betapa daerah terdepan atau terluar dari sebuah negara menjadi kawasan kunci dan sebagai teras negara. Pembangunan harus dilaksanakan secara cepat dan massif di wilayah-wilayah terdepan kita. Pemerataan infrastruktur pendidikan tentunya akan meratakan kualitas pendidikan pula, pemerataan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur penunjang perekonomian untuk kesejahteraan rakyat.

Begitu banyak anak-anak usia produktif yang tidak bisa menggap pendidikan yang layak di wilayah terdepan kita. Pendidikan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati mereka yang punya uang. Seluruh anak bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke harus mendapatkan pendidikan dengan kadar yang sama jika kita ingin Indonesia menjadi pusat peradaban dunia sebagaimana yang kita cita-citakan bersama.

Karena kita sadar, bahwa pendidikan yang merata akan membawa pemerataan dalam berbagai aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menjadi pemegang tanggung jawab, sedikit banyaknya perlu melihat bagaimana seorang pemimpin Islam yakni Umar bin Abdul Azis dalam memimpin rakyatnya. Di mana dia harus berada pada kondisi ekonomi yang setara dengan orang termiskin di negaranya dan akan murka apabila perbendaharaan negara menumpuk kekayaan sedangkan ada sebagian kecil rakyatnya yang masih dalam kondisi kekurangan.

Sehingga pemerataan kesejahteraan negaranya hanya dapat diwujudkan dalam jangka waktu dua tahun lamanya.

Pemimpin seperti inilah yang diidam-idamkan di negara Islam terbesar di dunia ini. Di negara yang saat ini pejabat negara sibuk dengan urusan korupsi pejabat negara lainnya, sibuk dengan percaturan politik yang meletakkan demokrasi sebagai prosedur dan menghilangkan esensi demokrasi itu sendiri sebagai sebuah substansi. Sementara rakyatnya sibuk memimpikan dan mengaharapkan keajaiban akan merubah kondisinya.

Rakyat di wilayah tertinggal dan terdepan negara kita punya mimpi besar tentang sebuah negara yang besar, saat ini tinggal menunggu langkah besar yang diambil oleh pemerintah. Semoga dengan kesadaran pemimpin-pemimpin kita, seluruh pihak terkait, dan para pemuda bangsa terhadap urgensi penguatan negara kita melalui wilayah tertinggal dan terdepan negara dapat mengantarkan Indonesia emas dalam beberapa tahun ke depan.

Kenapa Harus Indonesia?

Norma Ayu Setyabudi



Berbicara Indonesia salah satunya berbicara tentang angkatan muda dan mahasiswa. Para intelektual dan politisi yang punya hati nurani, para ulama *zu'ama* dan rohaniawan, dan para bhayangkara yang senantiasa memegang sumpah Tri Brata, para penegak hukum dan keadilan, tokoh tiga pilar bangsa: buruh, tani, dan nelayan, para pengasuh media, pegiat LSM yang berjuang demi bangsa, segenap pendidik yang sedang mengukir generasi muda, dan para anak bangsa yang masih peduli dengan harga diri negara.

Berbicara Indonesia, masih ingat dalam ingatan saya rentang pemilu presiden tahun 2014 kemarin. Semua orang beradu pendapat tak mau kalah dan memegang prinsip "*aku paling bener dewe*". Saling adu domba, saling menjatuhkan untuk bisa menaiki

tangga. Prinsip APBD atau biasa dipanjangkan “*aku paling bener dewe*” seakan menjadi prinsip dalam pribadi kebanyakan orang kala itu.

Berbicara Indonesia seakan selalu dikonotasikan tidak bisa antri, tidak taat aturan, sering telat bahkan sampai-sampai *saking* jeleknya Indonesia bunga bangkai pun sampai tumbuh di Indonesia, begitulah kira-kira kata Erie Sudewo. Batik diakui tetangga, reog Ponorogo jadi tontonan warga Malaysia, wayang jadi oleh-oleh khas Malaysia, pasir pun diambil Singapura.

Masih berbicara tentang Indonesia. Papua, Aceh, Maluku, Riau, Sulawesi, Bali yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Tapi kita bisa apa?

Tapi, kenapa harus Indonesia??

Berbicara Indonesia berarti berbicara juga tentang segala potensi yang ada di dalamnya, yang sebenarnya bisa menjadi prasyarat negara maju. Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dianugrahi tanah yang subur, hutan yang lebat, air yang cukup, lautan yang luas, tambang yang menggunung, dan sumber daya alam yang berkualitas.

Orang bilang tanah kita tanah surga, orang Eropa sudah mengakui bahwa zamrud khatulistiwa adalah sebangkah tanah surga. Orang Arab pun sangat terkesima dengan keindahan zamrud khatulistiwa. Air terjun yang mengalir. Gunung yang menghijau. Sehingga mereka berkata : “*Jannah, Jannah, Jannah*”

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, sebangkah kayu kalau dilemparkan di zamrud khatulistiwa maka akan tumbuh dengan indah dan baik. Keberkahan ada di bumi Indonesia, tapi sekarang sudah jauh.

Berutang Janji

Bangsa ini merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ketika bangsa ini mengalami kesakitan, keterpurukan, dan kemunduran, sudah seharusnya kita semua ikut bertanggung jawab merawatnya. Tak dapat diselesaikan dengan hanya merutuk, tapi berkontribusi nyata dengan membuat perubahan, perubahan, dan perubahan. Presiden sering menyebutnya dengan kerja, kerja, dan kerja. Tak usah pula saling menunggu, menyalahkan, mengadu domba, menjatuhkan, sebab semua anak bangsa dapat berperan serta memainkan fungsi terbaiknya sebagai akselerator perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

Saya sepakat dengan pernyataan Anies Baswedan bahwa pembukaan UUD 1945 negara ini tak hanya sedang bercita-cita, namun sedang berjanji. Menurutnya, Republik ini dibangun dengan ikatan janji, janji kemerdekaan. Mulai dari janji perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan peran global pada setiap anak bangsa. Sayangnya masih banyak dari masyarakat yang belum mendapatkan pelunasan janji tersebut.

Dalam alinea kedua pembukaan undang-undang dasar kita dijelaskan, bahwasannya para pendiri bangsa baru sampai mengantarkan kita pada depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Apa yang dimaksud ke depan pintu gerbang? Karena memang kenyataannya sampai saat ini falsafah yang dirumuskan para pendiri bangsa belum terpenuhi—yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur—Berarti jelas tugas kita sebagai pemuda adalah membawa bangsa ini masuk ke dalam gerbang kemerdekaan dan membantu melunasi janji kemerdekaan tersebut.

Semakin tambah tahun, Indonesia masih saja mempunyai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pelunasan janji

kemerdekaan ini tidak hanya bisa diselesaikan satu atau dua orang pemimpin saja, tapi memerlukan kerja yang kolektif. Pemimpin yang bertekad melanjutkan amanah para pendiri bangsa. Pemimpin yang berkhidmat untuk kepentingan rakyat.

Satu Tujuan

Indonesia membutuhkan ratusan bahkan ribuan para negarawan yang siap berkontribusi untuk bangsa ini. Indonesia juga membutuhkan semangat para negarawannya, yang siap membela rakyat bukan golongannya. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, keberagaman dalam persatuan. Tidak boleh ada anak bangsa yang merasa superior dan inferior. Semua sama di atas pangkuan Bhineka Tunggal Ika. Bendera Merah Putih, berkibar di atas semua bendera partai, golongan, kelompok, dan semua komponen bangsa. Pancasila sebagai konsensus dan perjanjian adiluhung bangsa Indonesia. Sebagai semen perekat bangsa Indonesai dari Sabang sampai Merauke.

Dan pada akhirnya Indonesia pun bisa mencapai tujuannya—... *untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial...*—jika semua elemen dari bangsa Indonesia bisa saling rendah hati untuk menuju tujuan itu.

Belanda Kulit Hitam Vs Pribumi di Era Reformasi

Syakir Daulay



Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang sebelum mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad Nusantara ini dijajah oleh bangsa Belanda ditambah dengan 3,5 tahun di jajah oleh tentara Jepang. Sungguh waktu yang cukup lama. Perlawanan dari rakyat di Nusantara ini terus dilakukan tapi belum membuahkan hasil.

Semua strategi perang terbaik yang dimiliki bangsa ini telah diluncurkan namun juga belum membuahkan hasil. Yang jadi pertanyaannya adalah "Apa Sebenarnya kelemahan yang dimiliki rakyat Nusantara atau bangsa Indonesia pada saat itu sehingga kita tidak bisa bebas dari penjajahan Belanda? Apakah ada orang pribumi yang menjadi pengkhianat yang bertugas membocorkan

rahasia-rahasia kekuatan yang telah disusun para pejuang kita kepada pihak Belanda?

Pertanyaan di atas mengingatkan kita pada perjuangan bangsa Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar dan dilanjutkan sang Istri tercinta, seorang perempuan tangguh bernama Cut Nyak Dien. Mereka melawan tentara Belanda yang dipimpin oleh Van Heurz pada abad ke-19. Dalam perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda, Teuku Umar mengatur strategi perang yang cukup baik.

Para pejuang Aceh berani angkat senjata melawan tentara Belanda. Namun, di tengah tengah perjuangan melawan Belanda, pejuang Aceh Teuku Umar ditembak mati oleh Belanda atas pengkhianatan dari orang dalam yaitu seorang Ulu Balang bernama Teuku Leubeh. Teuku Leubeh ini membongkar semua gerak-gerik pejuang Aceh, termasuk Teuku Umar. Sehingga dengan mudahnya Belanda bisa menembak Teuku Umar.

Wafatnya sang suami tercinta tidak membuat seorang Cut Nyak Dien menyerah terhadap Belanda. Beliau langsung memimpin perang melawan penjajah sampai akhirnya beliau sakit-sakitan dan ditangkap karena pemberitahuan orang kepercayaan Cut Nyak Dien kepada Belanda.

Orang kepercayaannya ini memberitahukan keberadaan Cut Nyak Dien kepada Belanda karena merasa tidak tega atas kondisi kesehatan Cut Nyak Dien. Hingga akhirnya beliau melaporkan keberadaan Cut Nyak Dien dengan janji Cut Nyak Dien harus diobati dan dirawat dengan baik dan tidak boleh dibawa keluar dari wilayah Aceh. Namun, kesepakatan ini dikhianati oleh Belanda dan mengasingkan Cut Nyak Dien ke Sumedang, Jawa Barat.

Dari kisah perjuangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Belanda pada saat itu yang mayoritas berkulit putih

mengkhianati pribumi yang berkulit hitam atau sawo matang. Namun, pengkhianatan yang dilakukan oleh kulit putih ini dibantu oleh orang berkulit hitam yang berpihak pada Belanda. Mengapa rakyat Indonesia tidak bisa mengusir penjajah Belanda? Bukan karena mereka kuat, bukan karena kita lemah, tapi karena di dalam lingkaran para pejuang kita ada orang-orang yang mengkhianati perjuangan mereka.

Ada orang yang dianggap sebagai kawan perjuangan namun ternyata lawan yang sangat membahayakan. Masuk dalam lingkaran pejuang namun membongkar rahasia kekuatan. Itulah yang dimaksud dengan Belanda Kulit Hitam. Dia asli pribumi yang berkulit hitam namun berpihak pada penjajah Belanda yang berkulit putih. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah "Masih adakah orang Belanda berkulit hitam di era sekarang ini?"

Sejarah telah membuktikan bahwa di dalam sebuah tim yang sama-sama berjuang, kerap kali ditemukan adanya orang yang mengkhianati perjuangan tersebut. Maka pada era reformasi saat ini tentu saja kita harus waspada, banyak sekali kita mendengar di media sosial, media elektronik, maupun media cetak misalnya antara sesama penegak hukum saling bongkar rahasia, saling menjatuhkan, dan saling memfitnah.

Antara pejabat yang satu dengan yang lainnya saling menuduh, saling memfitnah. Antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya saling menjatuhkan. Yang perlu kita sadari bahwa hal seperti ini terjadi tidak tertutup kemungkinan karena ada orang-orang dalam yang bermain di belakang layar. Bisa jadi ada kepentingan pribadi atau golongannya jika antar lembaga saling bermusuhan, antar pejabat saling memfitnah, antar partai politik saling menjatuhkan.

Maka dari itu, saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia mulai dari Presiden Indonesia, para Menteri, Kepala

daerah, para pejabat daerah sampai kepada rakyat Indonesia untuk berhati-hati jika ada konflik antar lembaga, konflik antar pemerintah, atau konflik yang melibatkan banyak orang.

Karena bisa saja ada orang yang mengambil keuntungan dan mengadu domba agar konflik berkelanjutan. Karena orang yang bijak adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap pada hari ini dan berguna untuk membuat rencana di masa depan.

Kejadian di masa lalu ketika Nusantara ini dijajah bangsa Belanda harus kita jadikan sebagai pelajaran bahwa dalam perjuangan kita untuk membangun negeri ini tentu banyak tantangan yang harus kita hadapi dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita ada yang tidak menyukainya kemudian berkhianat pada kita.

Pengkhianatan bisa berupa fitnah oleh orang-orang di sekitar kita, bisa juga membongkar rahasia kekuatan kepada musuh yang tidak menyukai kita dan banyak cara yang dibuat oleh orang-orang pengkhianat agar kita jatuh. Dan harapan terakhir saya adalah mari kita bahu membahu, bersatu padu untuk membangun negeri ini. Mari kita tinggalkan mental pengkhianat dari negeri ini. Mari kita kembali kepada keturunan asli kita yaitu keturunan pribumi yang tentunya bekerja untuk kejayaan pribumi ini.

Membangun Visi Kemerdekaan

Zakiul Fahmi Jailani



"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

(Pembukaan UUD 1945)

Jika dilihat dengan seksama, maka kita akan mendapatkan satu hal yang mengejutkan dari kutipan kalimat di atas. Hal yang mengejutkan tersebut adalah bahwa bahkan sebelum nama Indonesia itu sendiri dikenal sebagai negara merdeka di mata dunia, Indonesia sudah berani bicara tentang kemerdekaan seluruh dunia.

Mungkin itulah yang disebut dengan visi. Terjajah selama 350 tahun, bangsa Indonesia sudah merasakan benar bagaimana

pahitnya hidup di bawah kaki penjajah. Lebih sakitnya lagi karena negeri tuan penjajah tidak lebih besar daripada pulau Jawa sekalipun. Rasanya seperti gajah yang dijewer oleh semut.

Namun, itu bukan hanya tentang perasaan agar bangsa lain di dunia tidak ikut serta merasakan penjajahan yang pahit. Melainkan ada sesuatu yang besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang pada saatnya akan berguna untuk dunia.

Visi ini sama juga dengan visi yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat ketika menghancurkan batu besar di satu titik jalur parit dalam persiapan perang Khandaq. Berada di tengah dua kekuatan adikuasa saat itu (Konstantinopel di Barat dan Persia di Timur), Rasulullah mengatakan bahwa kaum Muslimin akan menaklukkan dua penguasa dunia tersebut.

Padahal, di luar sana, sedang bergerak menuju mereka 10.000 gabungan pasukan Arab melawan 3.000 pasukan muslim. Visi ini jelas terlihat seperti mimpi di siang bolong. Namun, visi tersebut menjadi motivasi bagi siapa saja pemimpin muslim sepanjang masa hingga Persia benar-benar runtuh dan seorang pemuda berumur 21 tahun melumat Konstantinopel berabad-abad kemudian.

Next Station

"...Sebab, masa-masa kemenangan memang akan selalu dipergilirkan oleh Allah di antara umat manusia. Suatu saat kemenangan berada pada suatu kelompok, sementara di saat lain akan berada pada kelompok lain. Semua itu dilakukan agar menjadi cobaan bagi orang-orang Mukmin, di samping agar Allah memberikan kelebihan kepada orang yang tegar imannya..." (QS. Ali 'Imran : 140).

Sebagaimana roda berputar, maka yang dulunya berada di atas di kemudian waktu akan berada di bawah, begitu juga sebaliknya. Jika Kita melihat dari peta dunia, maka kita bisa menemukan sejarah kekuatan dunia yang sangat beragam dari berbagai belahan dunia. Timur Tengah pernah menjadi pusat dunia di masa dulu, sama halnya seperti dunia Barat yang diwakili oleh Eropa dan Amerika Serikat saat ini.

Namun, angin itu sekarang sedang berhembus ke dunia Timur, Asia. Nama-nama seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India akan menjadi kekuatan dunia baru. Indonesia juga tidak ketinggalan. Namun, sebagai calon kekuatan dunia baru, bagaimanakah Indonesia sebaiknya menempatkan diri di tengah-tengah komunitas internasional?

Sebagai penyandang gelar negara berpenduduk muslim terbesar di dunia saat ini hingga beberapa dekade mendatang, Indonesia adalah negara yang berada dalam dilema besar. *Pertama*, karena sejak Tragedi 11 September 2001 yang menewaskan 3000 orang dalam serangan dua pesawat penerbangan komersial ke gedung World Trade Center di New York, serta serangkaian peristiwa-peristiwa lain yang mengikutinya belasan tahun kemudian, telah menyulitkan bagi beberapa pihak untuk memilah antara Islam dan teror. Sehingga Islam telah menjadi salah satu prioritas tertinggi dalam agenda keamanan global. *Kedua*, Indonesia adalah satu-satunya negara berpenduduk mayoritas muslim yang menjalankan demokrasi secara bebas dan dipuji oleh negara-negara barat yang menjalankan demokrasi itu sendiri sekalipun.

Dua posisi ini dalam perang tak terlihat antara dua dunia sekilas seperti sebuah dilema. Di dunia barat Indonesia adalah negeri sarang teroris. Sementara di dunia Islam Timur Tengah, Indonesia adalah negara yang menganut ajaran barat. Namun,

posisi ini justru mengantarkan Kita kembali pada satu pertanyaan ulang: bukankah ini saatnya kita memerdekakan dunia dari segala permusuhan seperti yang diminta oleh para pendiri bangsa kita dulu? Indonesia bisa menjadi penengah, Indonesia bisa menjadi poros perdamaian, Indonesia bisa menjadi pusat peradaban dunia baru. Indonesia adalah stasiun pemberhentian selanjutnya di mana masyarakat dunia mencari solusi atas perseteruan sesama.

Pendidikan

Adalah pendidikan yang akan menjadi instrumen untuk membentuk Indonesia sebagai pusat kekuatan dunia selanjutnya yang mampu merangkul dunia seluruhnya. Karena wajah dan masa depan Indonesia dan Islam sangat tergantung pada menu pendidikan yang dihidangkan kepada generasi penerusnya. Tidak hanya mampu menyokong wajah Indonesia dalam pergaulan global, dampak jauh dari proses ini pun mampu memperbaiki wajah Islam yang digebuki oleh ekstrimisme di mata dunia

Indonesia memiliki lembaga pendidikan Islam terbanyak di dunia yang tersebar di seluruh penjuru dan pelosok nusantara mulai dari tingkat kelompok bermain, taman kanak-kanak, tingkat universitas. Penerapan kurikulum pendidikan Islam yang unik dan toleran di lembaga-lembaga tersebut kemudian memberi dampak bagi masyarakat Indonesia dalam bentuk *output* yang sama sekali berbeda dengan *output* lembaga pendidikan Islam lainnya di dunia yang sering ditunjuk sebagai dalang di belakang menjamurnya aksi ekstrimisme Islam di timur tengah. Oleh karena itu, sudah saatnya dunia khususnya pemerintah Indonesia mendukung kurikulum pendidikan Islam di Indonesia.

Namun kurikulum pendidikan Islam Indonesia tidak cukup hanya dengan mencegah radikalisasi ideologi Islam. Diperlukan sebuah pendekatan lain agar jebolan lembaga pendidikan

Islam Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Salah satu paradigma yang telah dikembangkan sejak tahun 2002 adalah melalui pendekatan yang disebut dengan paradigma integrasi interkoneksi.

Konsep integratif interkoneksi ini secara singkat adalah upaya mengawinkan materi kajian studi keislaman dengan kajian ilmu-ilmu umum dan teknologi. Tujuan akhir dari konsep ini adalah untuk menghilangkan sekat-sekat dikotomis ilmu agama dan ilmu umum.

Dengan liberalisasi pendidikan yang dilakukan di masa reformasi menjadikan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat dengan leluasa membuat setiap disiplin ilmu baik itu ilmu agama, ilmu alam, dan sosial dapat bertegur sapa kembali. Dampak besarnya adalah setelah itu, lebih banyak alumni-alumni perguruan tinggi Islam yang menjadi jurnalis, aktivis NGO, aktivis politik, pemimpin organisasi sosial agama, dan profesi-profesi lain yang selama ini hanya dilakoni oleh lulusan universitas umum.

Dengan kemampuan sumber daya manusia yang mampu menyeimbangkan antara teknologi dan agama, maka semoga visi para pendiri bangsa ini dapat terwujud sehingga Indonesia mampu menjembatani dunia Islam di Timur Tengah dengan dunia Barat yang sejak awal abad 21 telah terlibat perseteruan sengit hingga berakhir perang yang merugikan kemanusiaan.

Refleksi

Mengusir Kemiskinan
Intelektual

Menggali Cahaya Islam untuk Membangun Politik Berkeadaban & Berkeadilan

Oleh: Muhammad Jazir ASP

Pengantar

Mengawali tulisan ini, saya ingin mengutip surat Dahlan Ranuwiharto –mantan Ketua PBHMI- kepada Presiden RI Soekarno jelang perayaan Isra Mi'raj di Istana pada 13 April 1953.

Jakarta, 13 April 1953
Ke Hadapan Diri Pribadi
Bung Karno
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta

Bung Karno yang kami muliakan! Assalamu'alaikum wr.wb!

Berhubung dengan peringatan Isra' Mi'raj yang akan diadakan di Istana malam ini, di mana di dalam amanat Bung Karno nanti akan disinggung persoalan sekitar Negara Nasional dan Negara Islam, izinkanlah kiranya kamiturut mengemukakan pikiran kami mengenai soal ini.

Pada hemat kami di dalam persoalan ini tersangkut tiga buah probeleemstelling pokok, yang masing-masing menghendaki jawaban dari penjelasan.

Probeleemstelling yang pertama, ialah mengenai pengertian-pengertian Negara Nasional dan Negara Islam. Pada hemat kami, di dalam masyarakat kita masih terdapat kekacauan pengertian tentang kedua istilah ini seolah-olah yang satu adalah lawan dari lainnya. Di kalangan Islam ada beranggapan bahwa Negara Nasional adalah lawan dari ide Negara Islam yang mereka cita-citakan sehingga adanya Negara Nasional dianggapnya sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan cita-cita mereka itu.

Di kalangan bukan Islam ada yang beranggapan bahwa ide Negara Islam adalah bertentangan dengan adanya Negara Nasional, sehingga cita-cita menuju Negara Islam diartikan sebagai cita-cita hendak menghapuskan Negara Nasional yang telah berdiri.

Alangkah berfaedah sekali jika Bung Karno malam nanti memberi penjelasan secukupnya mengenai pengertian kedua istilah ini, meskipun dalam kunjungan Bung Karno ke Aceh baru-baru ini Bung Karno telah memberi penjelasan sekadarnya.

Probeleemstelling yang kedua, ialah mengenai hubungan antara: ideologi Pancasila dengan Ideologi Islam. Di samping adanya pendapat bahwa Pancasila dengan ideologi Islam. Di samping adanya pendapat bahwa Pancasila adalah tidak bertentangan dengan Islam, ada pula pendapat bahwa juga Islam tidak bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, ada pula pendapat, bahwa Islam dan Pancasila yang satu terhadap yang lain adalah bertentangan, dan yang dikehendaki ialah Pancasila atau Islam.

Bung Karno dalam pidato Isra' Mi'raj itu menjawab antara lain:

“Tepat dikatakan oleh Saudara Dahlan, bahwa memang banyak salah paham tentang pengertian Nasional, pihak nasionalis banyak salah paham tentang pengertian Islam. Maka oleh karena itulah, aku merasa berbahagia mendapat kesempatan untuk mengupas ala kadarnya soal-soal, beberapa soal yang mengenai Nasional dan Cita-cita Islam.

Apakah ada cita-cita Islam, Saudara-saudara? Dengan tegass jawabannya ialah: ya ada, Islam mempunyai cita-cita. Islam mempunyai macam-macam cita-cita. Cita-cita mengenai ketatanegaraan punya, cita-cita mengenai kehidupan rohani khususnya sudah barang tentu punya.”

“Saudara-saudara, maka dalam aku pada berkata, tiap-tiap orang warga negara Indonesia mempunyai hak sepenuhnya untuk mempropagandakan akan ideologinya, mengertilah hendaknya bahwa negara kita sekarang ini sebagai yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 disertai dengan Undang-Undang Dasarnya, diikuti kemudian oleh Undang-Undang Dasar Sementara RIS, diikuti kemudian oleh Undang-Undang dasar sementara Republik.”

“Saudara-saudara tahulah, Pancasila ini sudah satu kompromis yang laksana meminta kita punya darah dan air mata. Siapa yang membuka sejarah kita terutama sekali pada bulan Juli 1945, satu bulan sebelum proklamasi Indonesia berkumandang di angkasa. Siapa yang membuka riwayatnya kita punya musyawarat-musyawarat, kita punya perdebatan-perdebatan, kita punya pertikaian satu sama lain, bahkan kita punya pada waktu itu hampir menjadi kita punya kebencian satu sama lain, akan mengerti bahwa Pancasila sudah satu kompromis.

Pada waktu itu di dalam sidang badan yang dinamakan Dokuritsu Zunbi Cosakai. Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, pada waktu itu pemimpin-pemimpin Islam duduk dengan pemimpin-pemimpin Nasional dengan pemimpin-pemimpin Sosialis. Pada waktu itu mula-mula bicara tenang-tenang, pada waktu makin berkobar-kobar, pada waktu itu hampir-hampir pecah persatuan nasional kita. Pada waktu itu kalau pecah, tidak mungkin ada proklamasi 17 Agustus 1945. Pada waktu itu aku ada, Kyai Masykur ada, Ki Bagus Hadikusumo ada, Saudara Chairul Saleh ada, Muhammad Yamin ada, pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia berkumpul membicarakan akan dasar-dasar negara yang diproklamlirkan.

Alangkah berbahayanya situasinya pada waktu itu. Tetapi Allah SWT Saudara-saudara memberi ilham, memberi taufik hidayatakan persatuan kita. Memberi, menjelma satu dasar yang bisa disetujuinya, yaitu dasar Pancasila, yang sampai di dalam tiga Undang-Undang Dasar RI tidak akan pernah terangkat. Undang-Undang Dasar RI Yogyakarta, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara RI, sekarang ini, Pancasila tetap berpegang teguh, ialah oleh karena Pancasila sudah satu kompromis yang dapat mempersatukan golongan-golongan ini. Maka oleh karena itu, Saudara-saudara indaf dan sadarilah akan keadaan yang berbahaya di dalam bulan Juli 1945 itu. Jangan kita, Saudara-saudara mengalami keadaan yang demikian itu. Jangan pecah persatuan kita. Dan jikalau kukata "pecah persatuan kita," kalau aku berkata demikian, itu berarti pecah, gugur, meledak, musnah negara kita yang telah kita perjuangkan bersama ini dengan penderitaan, dengan segenap penderitaan dan segenap korbanan yang hebat-hebat. Kembalilah pada persatuan. Aku sama sekali —sebagai tali berulang-ulang kukatakan— tidak pernah melarang sesuatu orang mempropagandakan ideologinya. Tetapi ingat, persatuan mutlak, persatuan mutlak, persatuan mutlak, accepten leggen kepada persatuan."

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Fitur demografis ini mau tidak mau mengantarkan umat Islam di Indonesia, juga warga negara Indonesia yang lain, terus-menerus bergulat dengan pertanyaan mengenai peran Islam dalam negara dan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, pertanyaan ini dikubur dengan paksa melalui tindakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai 'asas tunggal.' Pembajakan Pancasila oleh rezim yang berkuasa juga digunakan untuk mengenyahkan semua kekuatan yang menjadi ancaman bagi stabilitas rezim, baik yang ada di sisi kiri ('ekstrim kiri') maupun mereka yang berada di sisi kanan ('ekstrim kanan') alias Islam Politik. Walaupun sikap ini sedikit berubah di akhir masa pemerintahan Orde Baru, pertanyaan ini masih belum muncul kembali kepermukaan.

Reformasi membuka sumbat yang tertutup. Berbagai gerakan Islam yang tadinya terlarang, di bawah tanah, atau berdiaspora ke luar negeri, muncul kembali. Kembalinya Islam di dalam politik dan visibilitasnya dalam masyarakat, dengan beragam partai dan organisasinya, membuat pertanyaan mengenai peran Islam dalam negara dan masyarakat kembali mengemuka. Secara sederhana, pertanyaan itu dapat dirangkam dalam pertanyaan berikut:

Seperti apakah hubungan negara dengan agama yang paling ideal? Bagaimanakah peran agama dalam kehidupan politik yang beradab?

Latah "Menghakimi Agama"

Hari ini, wacana intelektual yang dominan mengenai hal tersebut cenderung berat sebelah. Kebanyakan mengarah pada dekonstruksi pemahaman agama. Agama, dalam hal ini Islam, harus disesuaikan dengan doktrin sekuler yang memisahkan

agama dengan negara sama sekali. Jika pemahaman agama masih belum sesuai dengan doktrin tersebut, maka pemahaman agama tersebut harus ditafsir ulang supaya sesuai. Jika Cak Nur dahulu masih berpegang pada dalil untuk berjihad mengenai di mana peran agama dalam negara, kini sebagian orang yang mengklaim meneruskannya bahkan tiba pada titik mempertanyakan fundamen-fundamen teologis Islam. Tentu saja hal ini lebih memicu kontroversi daripada menemukan solusi.

Tidak hanya tidak kreatif, kecenderungan semacam ini tidak bermanfaat karena uda hal. Pertama, membongkar fundamen teologis suatu agama justru akan mempersulit dialog mengenai peran agama dalam negara dan masyarakat, karena yang terjadi adalah monolog untuk memaksa sekelompok umat beragama melepaskan apa yang mereka yakini. Jika mereka menolak menerima penafsiran baru yang sesuai dengan doktrin sekularisme, maka mereka 'dikeluarkan' dari hak-hak mereka sebagai warga negara. Meminjam istilah Jose Cassanova, orang-orang religius "dientahkan" dari politik. Karena sifatnya yang monolog (meskipun sering mengkampanyekan dialog antar-agama), kecenderungan semacam ini memancing reaksi yang seringkali berupa kekerasan.

Yang kedua, kecenderungan semacam ini menafikan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang tidak bisa terpisahkan dari Islam. Sejak zaman penjajahan, Islam menjadi kekuatan penggerak yang tidak bisa terpisahkan dari pergerakan kemerdekaan. Sebelum kesadaran nasional tumbuh, perlawanan terhadap kekuatan kolonial di Indonesia diilhami oleh kesadaran Perang Sabil melawan para penindas dari *Darul Harb* (Perang Aceh, 1873; Perang Jawa, 1825-1830). Pada masa pergerakan, Islam masih menjadi faktor signifikan yang menggerakkan perjuangan. George McTurnan Kahin (1952) bukan menyebut Sarekat Islam sebagai gerakan nasionalis yang dominan.

Hal ini berkebalikan dengan pengalaman Eropa dengan agama yang mengantarkannya pada sekularisme yang ditandai dengan dekonfesionalisasi dan privatisasi agama. Kekejaman gereja dan perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan yang brutal membuat masyarakat Eropa “trauma” dan emoh agama. Di negeri-negeri muslim ceritanya berbeda: agama adalah motivasi untuk gerakan kemerdekaan. Ia adalah pengobar bara pembebasan (dan sebaliknya, sekularisme malah identik dengan penjajahan).

Menjelajah Sisi Lain: Membongkar Mitos Sekularisme

Jawaban yang lebih menjanjikan mungkin berada di sisi lain dari pertanyaan tersebut. Jika selama ini kita hanya berkutat di sisi agama, selayaknyalah kita mulai merambah sisi lain: pemahaman kita tentang sekularisme. Sejak era kebangkitan agama (*la revanche des dieu*), para ilmuwan politik mulai merenungkan kembali doktrin yang lama dipegang mengenai demokrasi dan sekularisme. Beberapa intelektual yang menonjol antara lain Alfred Stepan, Jose Cassanova, dan Nader Hashemi. Ketiganya mempertanyakan asumsi dasar yang selama ini dianggap sah bahwa sekularisme adalah syarat mutlak bagi demokrasi dan kehidupan politik yang beradab.

Uniknya, saat mendekonstruksi agama menjadi *trend* dan diikuti secara latah, tidak banyak cendekiawan kita yang mengikuti para ilmuwan politik Barat tersebut untuk mulai mengkritik mitos-mitos sekularisme. Sekularisme harus ditempatkan juga sebagai doktrin dan dogma yang harus dikritik. Karena itu, izinkan saya secara sederhana untuk mendekonstruksi sekularisme yang sekarang ini malah sering dianggap lebih suci dari agama.

Mitos Pertama: Sekularisme (Pemisahan Agama-Negara) adalah Bentuk Ideal Tata Politik, Semua Negara Maju merupakan negara sekuler.

Sebagaimana dicatat oleh Nader Hashemi (2009), Stepan melakukan tes secara empiris mengenai sampai dimanakah sebenarnya pemisahan antara gereja dan negara di lima belas negara anggota Uni Eropa.

Apa yang ditemukan Stepan? Ia menemukan bahwa:

- Semua demokrasi Eropa yang sudah mapan dengan mayoritas Lutheran memiliki sebuah gereja resmi.
- Suksesi tahta Inggris terus melanjutkan tata cara agama yang kaku.
- Di Yunani, Konstitusinya menyatakan bahwa “agama utama di Yunani adalah Gereja Kristen Ortodoks Timur” dan “penghinaan terhadap agama Kristen” dapat menjadi alasan untuk penyitaan bahan-bahan yang diterbitkan.
- Di Belanda, Austria, dan Jerman ada dukungan negara yang sangat besar terhadap pendidikan agam swasta. Partai-partai Kristen Demokrat sering sekali memerintah di Jerman, Austria, Italia, Belgia, dan Belanda.

Pada akhirnya, Stepan berkesimpulan bahwa secara umum tidak ada satu pun Negara Demokrasi Eropa Barat sekarang memiliki pemisahan yang mutlak antara gereja dan negara. Pelajaran dari Eropa Barat, dengan demikian, terletak bukan pada pemisahan gereja-negara tetapi dalam konstruksi dan rekonstruksi politik terus menerus mengenai batas-batas peranan agama dalam negara dan peranan negara dalam agama. Konstruksi dan rekonstruksi ini berjalan sesuai dengan pengalaman historis masing-masing negara. Memaksakan satu versi jawaban rentang peran agama dalam negara dan masyarakat, dengan demikian, bukan hal yang masuk akal.

Mengenai hal lain, Cassanova berpandangan bahwa “jika di Barat saja tidak ada bentuk yang seragam, maka di luar Barat

bentuk-bentuk hubungan antaranegara dan agama yang paling tepat dapat sangat bervariasi.”

Mitos Kedua: Sekulerisme adalah wadah yang bisa menciptakan perdamaian untuk semua. Sebaliknya, keikutsertaan agama dalam politik akan memicu diskriminasi dan kekerasan.

Klaim bahwa sekularisme adalah wadah yang paling ideal untuk sistem politik yang beradab seringkali diawali dengan menunjuk bahaya ketika agama ikut serta di dalam politik. Tentu saja, seperti juga faham-faham dan aspirasi politik yang lain, agama dapat menjadi sumber kekerasan dan diskriminasi. Namun, saya berpendapat bahwa hal ini bukan hal yang mutlak. Faktor-faktor sosial lain seperti kesenjangan sosial dan distribusi kesejahteraan lebih menentukan.

Jadi, peran agama tidak otomatis menghasilkan kekerasan. Sebaliknya, pemisahan agama dari politik tidak selalu berujung pada situasi ideal yang diklaim.

Secara empiris, justru kekerasan terbesar dalam sejarah umat manusia seringkali dimotivasi oleh bentuk-bentuk sekularisme yang ekstrim. Karena itu, klaim bahwa sekularisme adalah wadah yang bisa menciptakan perdamaian untuk semua dan sebaliknya keikutsertaan agama dalam politik akan memicu diskriminasi dan kekerasan bukanlah hal yang selalu tepat. Di Perancis, diskriminasi terhadap orang-orang yang beragama sering diinstitutionalisasi oleh negara.

Mengusir Kemiskinan

Dari dekonstruksi dua mitos tersebut, kita setidaknya dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Jika di Barat saja tidak ada bentuk yang seragam, maka di luar Barat bentuk-bentuk hubungan antar negara dan

agama yang paling tepat dapat sangat bervariasi.

2. Kaitan antara peran agama dalam politik atau pemisahan agama dari politik dengan kekerasan bukanlah hal yang otomatis. Ada bentuk-bentuk dan peluang-peluang diskriminasi yang bisa lahir dari keduanya. Ikhtiar kita adalah meminimalisir hal tersebut dengan mencari nilai-nilai bersama.
3. Sistem politik yang stabil (dalam hal hubungan negara-agama) di suatu negara sangat ditentukan oleh faktor sejarahnya yang unik. Karena itu, memaksakan mengadopsi satu pola mentah-mentah tidak akan pernah berhasil.

Berangkat dari titik inilah kita seharusnya berangkat membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang khas Indonesia, tidak hanya menelan mentah-mentah doktrin politik lama mengenai hubungan sekularisme dan politik yang beradab. Alih-alih membebek saja dengan mengulang teori-teori usang, bukankah lebih baik kita menggali sendiri dari tradisi dan warisan budaya kita?

Madinah dan Kebangkitan Politik Islam

Masa lalu adalah modal penting bagi setiap gerakan politik. Saat renaissance terjadi di Eropa, mereka mengagung-agungkan Yunani dan Romawi. Ide demokrasi sendiri pun diambil dari khazanah yang sudah berabad-abad lampau itu. Namun, saat sebagian umat Muslim mencoba mencari inspirasi dari masa lalunya, sebagian orang mencibir: kuno, jumud, ketinggalan jaman.

Apakah demokrasi Athena ideal untuk kacamata saat renaissance itu digulirkan? Tidak, Penindasan adalah hal biasa

di sana. Yang punya hak adalah bangsawan dan orang kaya. Tapi gagasan ini menjadi inspirasi untuk membangun tata politik baru yang lebih sesuai dengan tantangan zaman.

Politik Islam, saya yakini, juga demikian. Saat Pan-Islamisme menggelorakan kebebasan kaum tertindas di Asia dan Afrika, ia adalah jelmaan dari semangat untuk memerdekakan diri dari kejajaman penjajah dari Barat. Maka ia menggali semangatnya dari apa yang mereka yakini dan banggakan: Islam.

Tentu, konteks sejarah dan sosial-politik gerakan-gerakan Islam ini pun berbeda-beda, sehingga melahirkan gagasan yang berbeda-beda pula. Meminjam kata Stepan, ia adalah proses konstruksi dan rekonstruksi yang terus menerus. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa:

1. Sistem politik yang stabil (dalam hal hubungan negara-agama) di suatu negara sangat ditentukan oleh faktor sejarahnya yang unik. Karena itu, memaksakan mengadopsi satu pola mentah-mentah tidak akan pernah berhasil. Apalagi di negara-negara Islam di mana sekularisme hadir bersamaan dengan penjajahan dan penindasan.
2. Karena itu, umat Islam di Indonesia dapat memulai eksperimennya dengan membebaskan diri dari wacana dominan soal pemisahan negara-agama yang sebenarnya dipenuhi oleh mitos.
3. Kita harus menggali dari khazanah kekayaan tradisi pemikiran kita sendiri, dengan tetap berpikir terbuka pada setiap ide yang datang dari luar. Kata Imam Ali: "Hikmah itu milik mukmin, maka ambillah di mana pun ia engkau temukan."
4. Maka, alih-alih berfokus pada upaya "menghakimi agama", para cendekiawan Islam sebaiknya memulai upaya kreatifnya dengan menggali inspirasi dari sistem politik yang dibangun

oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* di Madinah.

Gerakan radikalisasi sekularisme (yang mengusung penafsiran tunggal atas pancasila dengan membenci semua ekspresi politik yang berdasar agama) tidak produktif bagi kesehatan sistem politik kita. Pada masa lalu hal ini berujung pada otoritarianisme Demokrasi Terpimpin dan otoritarianisme Orde Baru.

Melampaui Perdebatan

Selagi proses pencarian hubungan Islam dengan negara selayaknya berkembang di masyarakat dengan sehat, akan lebih produktif apabila kita mampu melampaui perdebatan-perdebatan yang ada pada tataran konseptual itu. Politik, dalam bahasa yang sering digunakan oleh para aktivis Islam, adalah *siyasaḥ = ar ri'ayah syu'unil ummah*. Politik adalah soal bagaimana menata urusan ummat untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hal ini, hampir semua pengusung berbagai model konseptual peran Islam dalam politik sepakat bahwa konsep politik yang manapun seharusnya berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan.

Karena itu, saya meyakini bahwa langkah awal penting untuk dilakukan justru diawali dari bawah, dari akar rumput: tentang bagaimana umat Islam membangun institusi yang dapat menata sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan bersama, mulai dari lingkup yang terkecil (seperti kampung misalnya).

Inilah yang kami yakini di Masjid Jogokarian. Apapun afiliasi dan konsep politik yang Anda miliki, masjid siap melayani dan menjadi mitra bagi penciptaan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Jika negara kadang melupakan warganya karena kesibukan elitnya berpolitik, Masjid selayaknya menjadi institusi dalam masyarakat yang mampu memberikan jawaban: mulai dari, pelayanan kesehatan hingga pembangunan kewirausahaan.

Daftar Pustaka:

Ahmet Kuru, "Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles and State Policies toward Religion," *World Politics* 59 (Juli 2007), 586-594.

Alpfred Stepan, *Arguing Comparative Politics* (New York: Oxford University Press, 2001)

_____, "Religion, Democracy, and the 'Twin Tolerations,'" *Journal of Democracy* 11 (Oktober 2000), 27-57

Delian Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafitipers, 1987)

George Mc. Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1952).

Hasan Al Banna, *Risalah Pergerakan*, (Solo: Era Intermedia, 2001)

James P. Piscatori, *Islam in a world of nation-States*, (Cambridge: Cambridge University Press 1986).

Mohammad Natsir, *Kapita Selecta*, (Bulan Bintang, 1954)

Nader Hashemi, *Islam, Secularism and Liberal Democracy*, (Oxford University Press, 2009)

Ruth McVey, "Faith as the Outsider: Islam in Indonesian Politics," dalam James Piscatori (ed.), *Islam in the Political Process*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

Shofwan Al Banna Choiruzzad, "Gerakan Islam 3-0", makalah tidak diterbitkan

Podcast "In God We Trust: the Role of Religion in Politics" dengan Professor Jose Cassanova (Brown University Janus Forum); Download dari itunes.

Bung Karno, Islam, Pancasila, dan NKRI Produksi Komunitas
Nasionalis Religius Indonesia tahun 2006

Profil Penulis

Mukhamad Suzianto, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Wahid Hasyim (UNWAHIS) ini dilahirkan di sebuah daerah sebelah selatan Kabupaten Tegal tepatnya di Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Juli 1994.

Menghabiskan masa kecil di kampung halaman dengan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, khas masyarakat desa. Menamatkan Sekolah Dasar di SD N Cempaka 02, kemudian melanjutkan ke SMP N 2 Bumijawa dan pada tahun 2009 meneruskan ke SMK Arizqo Bumijawa mengambil program keahlian Administrasi Perkantoran.

Semasa SMK mahasiswa yang akrab dipanggil Zian ini merupakan aktivis Pramuka. Hingga tahun 2010 Zain bergabung dengan Dewan Kerja Ranting (DKR) 11.28.17 Bumijawa. Baginya Pramuka tidak hanya sebatas belajar berorganisasi, belajar bekerja dalam sebuah tim, tetapi disini pula kita bisa belajar lebih mengenal Indonesia.

.....

Abdullah Al-Hazmy, Lahir di Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis tanggal 9 September 1993. Menempuh pendidikan pertama kali di TK Permata Bunda. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 2 Mojoranu hingga menjadikannya sebagai lulusan terbaik. Tamat SD, ia melanjutkan pendidikan SMP sekaligus nyantri di Islamic Boarding School Ar-Rahmat Bojonegoro, dengan beberapa kali menyabet penghargaan dan juara di bidang fisika, serta tak

lupa menjadi 10 besar lulusan terbaik SMP tersebut. SMA Negeri 1 Bojonegoro menjadi tempatnya berlabuh di jenjang pendidikan menengah atas.

Telah menyelesaikan Sarjana Kedokteran di program studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan IPK 3,42 dan tepat waktu 3,5 tahun. Kini sedang menempuh tahap program profesi dokter sebagai Dokter Muda di Rumah Sakit Pendidikan yang bermitra dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS), RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan Rumah Sakit jejaring di Karesidenan Surakarta.

Selain sukses di bidang akademik, pernah juga mendapat amanah sebagai pengurus harian OSIS ketika SMP, kemudian di SMA pernah menjabat sebagai ketua Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan juga ketua Karya Ilmiah Remaja (KIR). Sempat menjadi anggota aktif SKI FK UNS sebagai salah satu staf Humas Jaringan, dan telah dipercaya memegang amanah sebagai Presiden BEM FK UNS selama 2 periode kabinet, Kabinet Harmonis tahun 2013 dan Kabinet Totalitas Muda tahun 2015, dan seabreg aktivitas lainnya.

Deris Yudistira, dilahirkan pada tanggal 7 Maret 1994 di Tasikmalaya. Memulai pendidikannya di SDN 04 Pagi Lebak Bulus Jakarta, sempat berpindah SD ke Sukabumi dan Tasikmalaya. Melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 4 Tasikmalaya, lalu menamatkan pendidikan atas di SMK Nuurul Bayan Kalapanunggal Sukabumi. Semenjak di sekolah termasuk siswa berprestasi secara akademis, ia tercatat selalu berada di peringkat dua besar semenjak SD sampai SMK.

Mahasiswa angkatan tahun 2013 ini sekarang lagi menempuh jenjang perkuliahan di Jurusan Manajemen Universitas Islam

Negeri Sunan Gunung Djati. Rangkaian kisah hidup saya jika direnungkan, itu tidak terlepas dari Skenario Allah S.w.t untuk menuntun saya menuju jalan terbaik. Jika suatu hari kita merasa kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah putus asa dan menyalahkan Sang Maha Kuasa, sesungguhnya yang Sang pencipta yang lebih tahu tentang jalan terbaik untuk kita yang diciptakanya.

.....

Hasanuddin Ismail merupakan buah cinta dari pasangan Drs. H. Ismail P. dan Nurhuda. Lahir di OngkoE, suatu Desa di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan, tepat pada hari Selasa, 21 April 1992. Diberi nama Hasanuddin dengan harapan agar dapat seperti Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu Pahlawan Nasional kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki sifat dan pribadi intelek, berjiwa besar dan ksatria. Anak pertama dari 6 bersaudara ini bercita-cita menjadi Legislator DPRD I, DPRD II & DPR RI.

Pendidikan menengah atas ditamatkan di MAN 2 Model Makasar pada tahun 2011. Sekarang sedang menempuh pendidikan Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UNHAS). Semenjak sekolah di MAN sampai di Perguruan Tinggi ia aktif dalam berorganisasi seperti OSIS, Pramuka, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Dewan Pertimbangan Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi FH-UNHAS 2014-2015, juga sebagai salah satu penggagas Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi UNHAS 2012, dan lain sebagainya. Ia juga sering mengikuti beragam lomba, dari mulai LKTI, debat, olimpiade sains, dan menjadi delegasi FH UNHAS pada Debat Hukum tingkat Nasional di Jakarta.

Muhammad Rizal, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Andalas. Lahir di Panyalaian, 11 Oktober 1993. Merupakan anak ke-8 dari delapan bersaudara. "Sibungsu" begitulah kakak-kakaknya memanggil. Ia merupakan salah seorang penerima manfaat Bea Studi Etos, yang menjadikan ia mahasiswa yang kesibukannya tidak hannya di kelas, tapi juga lewat aktifitas di luar kelas. Proses transisi dari masa sekolah di SMA ke dunia Perguruan Tinggi menjadi titik awal proses pendewasaan dirinya.

"Belajar memantaskan diri, sebuah pernyataan yang membangunkan hati. Ada sebangkah kekuatan yang allah titipkan lewat kata-kata ini untuk orang-orang yang memang memiliki panggilan jiwa. Mengisyaratkan sebuah pesan, bahwa keterbatasan itu pasti ada batasnya dan tentu ada cara untuk melampauinya. Maka belajar lah untuk merubahnya. Menjadi pribadi kuat yang tidak mudah dilenakan oleh keadaan. Membaur dengan keterbatasan namun tetap mampu membatasi diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat."

Randa Reynaldi, dilahirkan 21 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu 27 Nopember 1993. Jika dilihat dari silsilah keluarga, ia merupakan suku melayu Pontianak asli. Mengingat kakek dan neneknya adalah orang melayu dan sama-sama lahir di Pontianak. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Ia sangat mahir dalam bermain sepak bola, kemampuan yang diturunkan secara langsung dari Ayahnya sebagai pemain profesional Persipon (Persatuan Sepak Bola Pontianak).

Saat ini ia sedang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Universitas Tanjungpura, Jurusan Pendidikan Matematika. Di kehidupan kampus ini ia aktif dalam berbagai organisasi

kampus. Hal ini tidak sulit dijalani, mengingat sejak SMA ia sudah terbiasa berorganisasi. Aktif di Lembaga Dakwah Kampus (LDK), di Himpunan Mahasiswa, di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), hingga aktif di organisasi ekstra kampus (KAMMI). Di sana ia banyak menemukan hal-hal bermanfaat dan pengalaman-pengalaman baru yang tidak pernah ia temui di bangku kuliah.

Mahasiswa yang bercita-cita ingin menjadi Ketua PSSI ini selain melakukan aktifitas kuliah dan berorganisasi, ia juga belajar berwirausaha, dari jualan pulsa, membuka rental buku, jualan buku, hingga jualan baju bola. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk latihan kemandirian untuk membangun mental dan manajemen berwirausaha pada dirinya.

.....

Redza Dwi Putra, mahasiswa yang sekarang mengenyam pendidikan di Jurusan Biologi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berkeinginan untuk menjadi penulis yang produktif dan inspiratif. Pendidikan SMP dan SMA dihabiskan dihabiskan selama 6 tahun di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketika kuliah ia termasuk salah satu penerima manfaat beasiswa yang diberikan oleh Bank BRI. Diluar kegiatan akademis perkuliahan, ia mengisi kegiatannya dengan berbagai aktifitas, diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi 'Biosfer', Tapak Suci UNS, juga LPM Kentingan UNS.

Jika ditanya tentang hobi, banyak hal yang ia sukai, diantaranya: membaca, menulis, olahraga, dan main musik. Beberapa penghargaan di bidang ini pun pernah ia raih, ia menganggap beberapa penghargaan itu sebagai bagian dari proses belajar untuk menjadi lebih baik lagi.

Riky Taufik Afif, lahir dan besar di Kabupaten Ciamis pada 28 Desember 1991. Menempuh pendidikan jenjang Sekolah Dasar di SDN II Panawangan. Sejak kecil ia menyukai dunia seni khususnya seni gambar, mengikuti berbagai kompetisi gambar, lukis, dan kaligrafi sejak duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar.

Ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Husnul Khotimah, di Pesantren inilah ia mempelajari agama Islam secara mendalam.

Pendidikan SMA ia lanjutkan di SMAN 1 Kawali. Sekarang ia sedang menempuh pendidikan di Jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Semenjak SMA dia sudah bergelut dalam aktifitas organisasi seperti Remaja Masjid (RISMA) SMAN 1 Kawali, MPK SMAN 1 Kawali dan Teater SMAN 1 Kawali. Di Perguruan Tinggi ia aktif mengimplementasikan tiga macam orientasi mahasiswa yaitu, Study Oriented (Orientasi Belajar), Organisation Oriented (Orientasi Berorganisasi), Entrepreneur Oriented (Orientasi Berwirausaha). Prestasi pun banyak ia raih di berbagai bidang diantaranya meraih beasiswa dari Djarum Beasiswa Plus, Juara 1 Lomba Komik Fisika tingkat Jawa Barat pada 2012 dan 2013.

Siti Awaliyatul Fajriyah, wanita utama pembawa harapan. Wanita muda yang akrab disapa Awa ini lahir pada 11 Agustus 1994 di Kebumen, Jawa Tengah. Dibesarkan oleh keluarga hebat, yang menjadikan kekurangan sebagai penyulut semangat meraih kebaikan sejati. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di kawasan Depok.

Pepatah yang selalu ia ingat untuk berani menjadi pelopor dalam memperjuangkan kebaikan ialah "Lebih baik terasingkan daripada harus bersatu dengan kemunafikan." Ia pertama kali mendengar pepatah ini dari seniornya saat menjalani Latihan

Paskibra Kota Bandung. Hal ini pulalah yang ia maknai sebagai perubahan yang dimulai dari hal kecil oleh diri kita sendiri saat ini juga.

Ia berharap, ia dapat menjadi bagian dalam perubahan negeri ini mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pilihan yang ia ambil ialah menjadi Menteri Perancangan Wilayah pada tahun 2039. Dari ilmu arsitektur yang sedikit banyak telah ia peajari, tata ruang sebuah wilayah menentukan produktivitas kegiatan masyarakat di dalamnya. Ia ingin menjadikan ruang kegiatan manusia sebagai pendorong lahirnya karya-karya membanggakan dari tangan masyarakat Indonesia sendiri.

.....

Taufik Permana, lahir pada hari Jumat 9 Agustus 1996 di kota tahu Sumedang dari pasangan Ibu Cicih Sunarsih dan Bapak yaitu Mimin Ruminta. Taufik kecil lahir dan berkembang tepatnya di Dusun Cibiuk Rt. 02 Rw. 02 Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di tempat kelahirannya di Kecamatan Situraja dari mulai TK Sekarmanis, SDN Malaka, SMPN 1 Situraja, dan SMAN Situraja. Sekarang ia sedang menempuh pendidikan di STMIK Sumedang.

Sejak kelas 1 SD sampai kelas XII SMA dia selalu menjadi juara 1 di kelasnya. Ia termasuk siswa yang berprestasi, segudang prestasi telah diraihinya dari mulai TK sampai SMA, dari mulai prestasi akademik, ekstrakurikuler, dan olah raga. Ketika SD ia pernah meraih juara 1 Olimpiade se-Kecamatan, juara 3 Olimpiade Matematika se-Kabupaten Sumedang, Siswa Teladan 3 Kecamatan, juara 1 Turnamen Boal Voli se-Kecamatan sekaligus menjadi atlet Voli Kecamatan. Begitupun ketika SMP ia banyak sekali meraih prestasi, diantaranya Peserta Olimpiade Komputer, Peserta Lomba Cerdas Cermat Matematika, juara 1 Turnamen Bola Voli se-

Kabupaten sekaligus menjadi atlit bola voli Kabupaten Sumedang. Ketika SMA prestasi yang diraih tidak kalah banyaknya, Juara 2 Olimpiade Fisika Kabupaten Sumedang, Juara 1 Potensial LKBB Unjani se-Indonesia, dan masih banyak lainnya.

Pengagum Ir. Soekarno ini juga aktif di berbagai organisasi, mulai dari Ketua OSIS SMP dan SMA, Ketua IRM, Ketua KIR, Pengurus Paskibra, pengurus POST (OSIS Sumedang Tandang). Ia akan terus berjuang untuk membangun bangsa melalui Komunitasnya yaitu Rumah Impian Indonesia dan Karang Taruna.

Vemby, dilahirkan di Ambon pada hari Jum'at, tanggal 17 November 1995 di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Ia dibesarkan di kota Bukittinggi, lebih tepatnya di kabupaten Agam Sumatera Barat. Semenjak SD ia dimasukkan ke Madrasah Diniyah Awaliah untuk memperdalam ilmu agama. Ketika menjalani pendidikan dari SD sampai SMA ia sering mengikuti lomba-lomba tingkat sekolah hingga kabupaten. Beberapa lomba yang ia ikuti diantaranya lomba cerdas cermat, MTQ, hingga olimpiade kimia di masa SMA.

Membaca, menulis, dan travelling adalah aktivitas yang sering ia lakukan di waktu luang. Saat ini ia sedang menjalani pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau. Ia mengambil jurusan ini karena kecintaannya terhadap hal-hal baru, salah satunya menyukai belajar bahasa asing. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang diplomat, karena baginya diplomat adalah salah satu pahlawan bangsa yang memperjuangkan kepentingan negara di dunia internasional. Saat ini ia tengah fokus mempersiapkan untuk melanjutkan pendidikan S2 nya di Inggris.

Dicky Adra Pratama, lahir pada 18 November 1995 dan besar di Kota Pekanbaru, Riau. Ia adalah anak pertama atau yang dipertama-kan dari saudara kembarnya. Ia lahir di keluarga bersuku Minang, yang senantiasa memegang teguhnya nilai-nilainya, terlebih nilai moral dan agama. Ia tumbuh dan dibesarkan dengan Kesederhanaan membuatnya belajar untuk menjadi seseorang yang bijak dalam memaknai kehidupan.

Sekarang ia tinggal sementara di Yogyakarta, demi mengembangkan diri dengan ilmu, wawasan dan pengalaman di Universitas Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada. Kuliah di kampus nan nyaman dan besar tidak lantas membuatnya berbangga hati lalu mengingkari tanggung jawab nyata sebagai Mahasiswa. Bahwa Mahasiswa harus sedari awal sudah mempersiapkan dirinya. Ia pun begitu, berproses sembari berjuang bersama yang lainnya, berkontribusi lewat aksi nyata dan organisasi.

Di dunia kampus, sejak 2013, ia senantiasa merawat idealismenya dengan mengikuti organisasi. Intra maupun Ekstra kampus. BEM, UKM, dan Komunitas. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk aktif di beberapa organisasi saja; BEM, Mahasaksi, juga berkontribusi di Fakultas tanpa embel-embel lembaga. 3 Kabinet BEM ia lalui dengan banyak dinamika di dalamnya. Ia belajar untuk berkontribusi besar meski tanpa nama atau kekuasaan yang menyertainya. Selain di BEM KM UGM, sejak 2013 lalu, ia juga berjuang di komunitas Anti Korupsi Mahasaksi Indonesia yang sekarang menjadi FLAC Jogja setelah melalui penggabungan gerakan.

Alvian Novi Arvianto. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini merupakan Penerima Manfaat Beasiswa Aktivistis Nusantara Angkatan 4. Mahasiswa Berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta tahun 2014 ini aktif sebagai Kepala Divisi Humas dan jaringan Forum Cendekiawan Muslim UNS Surakarta, *Volunteer* di Solo Mengajar, dan salah satu pegiat di Komunitas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa UNS Surakarta. Sebelum beramanah di Forum Cendekiawan Muslim, ia pernah menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Surakarta, Studi Ilmiah Mahasiswa (SIM) UNS Surakarta, Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) UNS Surakarta, *English Student Association* (ESA) FKIP UNS Surakarta, Rumah Hebat Indonesia, dan anggota Badan Koordinasi Kesenian Tradisional (BKKT) UNS Surakarta.

Pada tahun 2014, ia terpilih sebagai salah satu mahasiswa yang berkesempatan mengikuti program *Best Student Exchange 2014* ke Thailand, Malaysia, dan Singapore. Mahasiswa kelahiran Wonogiri Jawa Tengah ini terpilih sebagai *Indonesia Minister of Environment* pada acara *G20 Youth Forum 2013* yang diselenggarakan di St. Petersburg, Russia dan Delegasi Indonesia dalam *Indonesia Malaysia Youth Forum 2013*. Ia juga pernah terpilih sebagai *Delegate of Belgium* dalam *President Model United Nation 2012*, Delegasi UNS dalam *Indonesia Youth Forum 2013*, *Indonesia Agent Summit 2013*, dan Konferensi Budaya Nasional 2012.

Mahasiswa yang bercita-cita sebagai seorang dosen ini aktif mengikuti kompetisi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Salah satu penghargaan yang diperolehnya yaitu *2nd winner of English Competition 2015* Universitas Negeri Medan. Alvian beberapa kali diberi kesempatan untuk menjadi pembicara dalam seminar atau diskusi dalam bidang kepemudaan, keorganisasian, kepenulisan, dan akademik. Mahasiswa yang menjadi salah satu

kontribur dalam buku “Menagih Janji Negarawan” ini masih aktif mengikuti Asistensi Agama Islam atau mentoring kepada mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

.....

Edi Saputro, lahir di Malang pada hari Sabtu menjelang subuh di bulan April. Kehidupan masa kecilnya mungkin tidak sebaik anak-anak yang lain. Ia mulai sering sakit-sakitan sejak usia sebulan. Ketika sakit ia tidak bisa lepas dari gendongan ibunya. Ia baru bisa tidur jika digendong oleh ibunya. Sakitnya mempunyai ritme unik, sakit tiga bulan rata-rata tiga kali dengan berobar ke dokter. Setiap sakit memerlukan waktu tiga sampai empat hari baru bisa sembuh. Tanda sembuhnya sederhana, muntah, jika sudah muntah berarti ia besok sembuh. Sakitnya berlangsung sampai ia kelas enam Madrasah (SD) tepatnya setelah khitan.

Serelah menamatkan pendidikan di sekolah dasar ia dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah berbasis pesantren. Di tempat inilah ia mulai menemukan banyak hal yang menggugah yang membuatnya lebih mampu berdamai dengan kehidupannya dan menerima segala apa yang terjadi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

.....

Ferry Wirawan, merupakan seorang Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera). Lahir dan besar di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Medan, Sumatera Utara. Pendidikan mulai dari SD hingga SMA (SDN No. 053997 Sei Siur, SMPN 1 Pangkalan Susu, SMAN 5 Binjai) ditempuh di kampung halamannya. Setamat SMA, ia pun memutuskan untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi pada tahun 2010, dan sempat membuatnya bingung ketika diterima di beberapa Universitas ternama di Indonesia seperti UI, UGM dan

UIN. Namun karena orangtuanya lebih mengharapkannya untuk memilih UIN Jakarta dan ia pun mengamininya.

Sejak kuliah di UIN Jakarta Jurusan Hubungan Internasional ia aktif dalam beberapa kegiatan, khususnya berkaitan dengan jurnalisme seperti menjadi Jurnalis di Buletin FISIPNEWS dan beberapa Portal Online berita. Di luar kampus ia ikut aktif di salah satu NGO yang bergerak dalam misi Sosial Kemanusiaan sebagai Relawan. Pengalaman ke luar negeri pun ia dapatkan, yakni ke Turki pada tahun 2011. Ia dan 39 mahasiswa lainnya berkesempatan untuk *Study Visit* ke beberapa kota di Turki selama 1 Bulan secara gratis yang diselenggarakan oleh salah satu institusi Turki di Indonesia. Tak hanya itu, tahun berikutnya ia juga memperoleh beasiswa *Turkish Summer School* dari Pemerintah Turki dan Institut Yunus Emre pada program Bahasa dan Budaya Turki di Trakya University, Edirne, selama periode bulan Juli-Agustus sehingga memungkinkannya dapat merasakan suasana Puasa serta Lebaran khas keluarga Turki.

Pada tahun 2014 ia dianugerahi penghargaan Student Achievement Award atau Penghargaan Mahasiswa Berprestasi oleh Rektor UIN Jakarta. Ia pun mendedikasikan penghargaan ini untuk ked a orangtuanya yang telah menjadi pembimbing utama dalam kehidupannya.

Nurul Suciana Adam, dilahirkan di Rappang 29 September 1993. Mahasiswi semester 6 di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar. Sekarang, aktif sebagai pekerja sosial di sebuah NGO yang bernama Aksi Indonesia Muda (AIM) yang berpusat di kota Makasar. Selain itu, kegiatan dan organisasi di kampus juga sangat mewarnai kehidupannya. Ambil

andil dalam kegiatan kepanitiaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (HMJ-PBI), Dewan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (DeMa FTK UIN Alauddin Makassar) dan sebentar lagi akan ikut serta dalam konferensi Alauddin Debat Association (AlDebA), Intellectual Camp III di Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa (LPPM) UIN Alauddin dan Makassar International Writers Festival (MIWF).

.....

Ryan Frizky, lahir di Bandung pada tanggal 10 Maret 1994. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Jurusan matematika. Mahasiswa yang bercita-cita menjadi Walikota Bandung ini selain berkuliah juga banyak aktif di dunia organisasi. Pada tingkat satu, ia terpilih menjadi Bendahara Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB. Ia juga aktif sebagai kordinator internal FL2MI wilayah Jabodetabek. Selain itu saat tingkat pertama, ia mendirikan sebuah *social edu movement* bernama “Mentor Adik SMA se-Indonesia”

Ia aktif mengikuti berbagai pelatihan, seperti Forum Indonesia Muda angkatan 16 dan terpilih sebagai ketua kelompok 12 dan Young and Locavore Youth Camp yang diadakan oleh Indonesia Berseru dan Aliansi Desa Sejahtera. Pasca FIM, ia ditarik menjadi desainer sebuah organisasi yang didirikan oleh salah satu anggota DPR yakni Aliansi Selamatkan Anak Indonesia (ASA Indonesia). Pada tahun yang sama ia diterima menjadi penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS).

Dengan bekal jejaring selama tingkat pertama dan kedua, ia membangun sebuah organisasi di tiga sektor strategis, yakni Kita Gerak, Desain Untuk Negeri, dan Inspiranessia yang semuanya mempunyai visi membangun negeri. Aktivitas utama Ryan adalah sebagai penulis di ryanfrizky.tumblr.com

Siti Nur Arifah, biasa dipanggil Ifa. Dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 29 September 1992 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Tahun 2010 ia lulus dari SMAN 3 Malang dan pada tahun yang sama pula ia lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan diterima di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian.

Sejak SMP saya aktif mengikuti berbagai organisasi, mulai dari organisasi kerohanian hingga organisasi pecinta alam. Selama di perkuliahan ia aktif di BEM Fakultas sampai BEM Universitas. Bendahara umum 2 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian (BEM Faperta IPB) (2011-2012), Ketua Departemen Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian (BEM Faperta IPB) (2012-2013), Sekretaris Kementerian Kebijakan Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB (BEM KM IPB) (2013-2014), dan tim Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa IPB (MWA UM IPB). Aktif pula di lembaga ekstra kampus KAMMI IPB sebagai anggota departemen kebijakan publik.

Organisasi mahasiswa tingkat nasional juga diikuti sebagai wadah mengembangkan jaringan dan penyerapan pemikiran dari berbagai golongan yaitu staf ahli presnas 4 dan Badan Pengawas Organisasi Ikatan BEM Pertanian Indonesia (IBEMPI), Forum Perempuan dan anggota koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI). Sejalan dengan hobi yaitu berbagi, berdiskusi, berorganisasi dan *travelling*, ia mengaktualisasikan dirinya menjadi trainer di lembaga training dan outbound ATOM Indonesia dan Cave Trainer Word Assembly Moslem Youth (WAMY).

Admi Lidya Sari, kelahiran Banjarmasin 6 Desember 1995, anak ketiga dari tiga bersaudara. Mahasiswi STIA Bina Banua Banjarmasin, Memiliki ketertarikan dalam bidang menulis. Gemar membaca dan memasak. Terpilih menjadi Galuh Banjar Kota Banjarmasin pada 2013 dan wakil IV galuh Kalimantan selatan

2014 dan secara resmi menjadi Duta Wisata Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan. Aktif di komunitas 1000 Guru Kalimantan Selatan, sahabat bekantan Indonesia, Pena *Blogger* Banua dan Alhamdulillah pada 2015 dipilih menjadi duta Bekantan Indonesia.

Memilih menjadi sahabat bekantan dan diberi tanggung jawab sebagai Duta Bekantan adalah salah satu cara dia untuk membantu melindungi dan melestarikan bekantan, bekantan adalah hewan endemis pulau Kalimantan yang juga menjadi maskot resmi dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini sudah berstatus langka dan menurut penelitian terakhir hanya tersisa sekitar 5 ribu ekor bekantan saat ini.

Aktif sebagai *blogger* sejak tahun 2008 menjadi salah satu cara dia untuk bisa berbagi informasi dan memberikan inspirasi untuk banyak orang. Dan saat ini bersama komunitas Pena *Blogger* Banua yang sudah berdiri sejak tahun 2012 sedang menjalankan situs proyek bernama badangsanak.com yang di dalamnya akan membahas mengenai Banjarmasin dan Kalimantan Selatan lebih detail dengan gaya anak muda.

.....

Ahmad Haris Hasanuddin Slamet, dilahirkan pada 4 Maret 1994 di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ia merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Saat ini ia tercatat sebagai mahasiswa semester 8 di Jurusan Teknik Pertanian, Universitas Jember. Dari ketiga saudaranya, saudara nomor 1 dan 3 adalah lulusan Universitas Jember sedangkan saudara yang nomor dua adalah lulusan Universitas Indonesia.

Ia menghabiskan sekolah dasar di SDN 2 Jubellor dan melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Sugio. Selanjutnya ia berpindah ke Kota Jember untuk bersekolah di sana dan diterima

di SMAN 4 Jember. Semasa SMA ia menjadi salah satu siswa berprestasi dalam mata pelajaran fisika. Ia dua kali mewakili SMAN 4 jember untuk mengikuti perlombaan OSN tingkat kabupaten.

Billy Abu Ja'far, dilahirkan pada tanggal 16 April 1994 di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Anak ketujuh dari delapan bersaudara ini diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Billy yang diambil dari nama salah satu tokoh *Power Rangers*, sedangkan Abu nama ayah bapaknya, serta Ja'far dari nama ayah ibunya.

Pendidikan dasar sampai menengah dia habiskan di tempat kelahirannya, di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Selanjutnya ia meneruskan pendidikannya di Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Semenjak SMA sudah aktif berorganisasi di Pramuka dan dan Majelis Perwakilan Kelas. Di perkuliahan dia aktif di Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya juga di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik.

Mahasiswa yang bercita-cita ingin menjadi anggota legislatif ini termasuk berprestasi, waktu SMA dia menjadi juara 1 lomba Bidik Kompas dalam kegiatan World Care Scouting League. Ketika mahasiswa penelitiannya lolos didanai dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2014 dalam kategori Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan DIKTI. Mengabdikan pada daerah asal adalah prioritas kehidupannya,

Dede El Triana, begitulah ia akrab dikenal. Tercatat sebagai mahasiswi di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktif dalam keanggotaan di Lembaga Dakwah Kampus (LDK) SyaHid. Motto hidupnya adalah Bukan seberapa lama kamu hidup, tapi seberapa bermanfaat dirimu bagi sekitarmu. Menulis merupakan aktivitasnya sejak SD. Saat ini novelnya yang telah terbit adalah *Math VS Sastra (DAR! MIZAN, 2011)*. Antologi Cerpen “*Bisik Rindu dari Masjid Sekolah*” (PustakaPuitika, 2014), dan antologi Cerpen dan Puisi Palestina “*Goresan Indah Pena Syahid Intifadhah*” (Raditeens Publisher, 2014).

.....

Jaya Sukmana, lahir di Sukabumi pada tanggal 04 September 1994. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Nyamplung, SMPN dan SMAN 1 Cibadak. Semua pendidikan formal dari SD hingga SMA dihabiskan di Sukabumi sebelum kemudian hijrah ke Jatinangor pada tahun 2011 karena diterima di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran (Unpad).

Semenjak SMA sudah aktif berorganisasi, tercatat beberapa organisasi pernah diikuti seperti OSIS SMAN 1 Cibadak, PMR Wira, DKM Ta’limul Muta’alim, hingga pernah menjabat sebagai sekretaris dalam Forum Komunikasi Pelajar Islam (FKPI) Kabupaten Sukabumi. Keaktifan saat SMA terbawa juga saat sedang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Tercatat beberapa organisasi pernah diikuti seperti Pharmacy Muslim Family (Pharma), BEM Kemafar Unpad, BEM Kema Unpad, Korps Protokoler Mahasiswa Farmasi, HPEQ Student, Mahasiswa Unpad Asal Sukabumi (MUSI), Majelis Tetap Kongres sebagai presidium 1 dan pernah menjabat Komisaris ISMAFARSI termuda saat masih tingkat 1.

Saat ini aktif sebagai Manager HRD Komunitas Swamedika

Nusantara, suatu gerakan sosial yang bergerak di sektor kesehatan dengan pelayan 7 profesi kesehatan (dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan psikolog) dengan tagline *Sehat dengan Sedekah*. Selain itu juga merupakan anggota Forum Negarawan Muda.

Muhammad Risal, lahir pada tanggal 10 Juli 1991 di Kabupaten Bulukumba, ujung selatan pulau Sulawesi. Pendidikan dasar dan menengah ia habiskan di tempat kelahirannya. Sekarang ia tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2010 di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar.

Selama menempuh pendidikan di jenjang sekolah, ia pernah merasakan menjadi peringkat pertama sekolah sebagai siswa berprestasi, juara olimpiade sains sampai ke tingkat Provinsi, siswa teladan di Sulawesi Selatan, pemenang lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh LIPI, dan beberapa prestasi akademik lainnya. Disamping itu, sejak duduk di sekolah dasar ia telah memulai lembaga kesiswaan di gerakan pramuka, PMR ketika SMP dan LKIR, Pramuka ambalan, Saka Bahari, Wira Kartika, Bhayangkara, serta OSIS ketika duduk di jenjang menengah atas (SMA).

Di dunia perkuliahan ia tetap aktif berorganisasi, sejak tahun 2011, tidak jarang ia menjadi ketua panitia pelaksana dalam berbagai kegiatan internal dan eksternal kampus, hingga pada awal tahun 2014 ia terpilih sebagai ketua dewan eksekutif (ketua umum) Mahasiswa Pencinta Lingkungan Hidup Selaras (SINTALARAS) Universitas Negeri Makassar. Sebuah organisasi paling dinamis dan seksi di Universitas Negeri Makassar.

Norma Ayu Setyabudi, anak kedua dari dua orang bersaudara Kecil dan tumbuh di Yogyakarta, kota yang masih kental dengan adat budayanya. Tetapi ummi dan bapak selalu memberikan pengetahuan tentang agama begitu ketatnya. Mengikuti TPA, menjadi aktivis remaja masjid di desa tempat tinggal dan menjadi pengurus karang taruna merupakan kegiatan yang saya ikuti. Sekarang ia tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Pendidikan Luar Biasa UNS. Sewaktu SD sampai SMA ia aktif di kegiatan seni tari dan puisi, yang sering mengantarkan dia menyabet beberapa gelar juara dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi.

Di perguruan tinggi dia aktif belajar dan berorganisasi di BEM, mentoring, gerakan sosial, dan kader dari KAMMI Shoyub UNS. Beberapa kali pernah berangkat menjadi delegasi UNS dalam acara Persatuan Mahasiswa Ortopedagogik Indonesia, Musyawarah Nasional Sosial Masyarakat BEM Se-Indonesia dan Musyawarah Nasional BEM Se-Indonesia.

.....

Syakir Daulay, tercatat sebagai mahasiswa di Program Studi Teknik Pertanian Universitas Syiah Kuala bidang minat Alat dan Mesin. Sekarang ini ia aktif di berbagai organisasi intra maupun ekstra kampus. Bakat berorganisasi ini memang sudah ia pupuk sejak masih duduk di bangku sekolah. Ia tercatat sebagai Ketua OSIS SMPN 5, Ketua OSIS SMAN 1, Ketua Departemen Syiar (Humas dan Media) Lembaga Dakwah Kampus Al Ihsan Fakultas Pertanian Unsyiah 2013-2014, Ketua Humas Beastudi Etos wilayah Aceh 2013-2014, Wakil Menteri Dalam Universitas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala tahun 2015, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muslim Pertanian Indonesia (IMMPERTI) wilayah Sumatera Bagian Utara 2014-2016.

Di tengah-tengah kesibukan sebagai akademisi dan organisatoris, ia juga sering menjadi delegasi kampus dan lembaga organisasi di berbagai forum dan pelatihan baik tingkat regional maupun tingkat nasional, seperti Presentasi Sekolah Desa Produktif Beastudi Etos Wilayah Aceh di Makassar pada tahun 2013, Kongres Negarawan Muda Indonesia di Bogor pada tahun 2013, Seminar Peran Politisi Muda di Aula FISIP UI Depok tahun 2013, Musyawarah Nasional dan Seminar Pertanian Indonesia di IPB tahun 2014, Seminar Peran Teknologi Pertanian Bagi Petani Kecil Indonesia bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2014 di Universitas Andalas Padang, Seminar Peran Mahasiswa Pertanian dalam Menghadapi MEA pada tahun 2014 di Universitas Sumatera Utara Medan, dan masih banyak lagi.

Zakiul Fahmi bin Jailani bin Hamzah, dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1992 di Aceh. Ia menghabiskan masa sekolah seluruhnya di Aceh. Dari mulai TK sampai SMA. Ia mulai memasuki dunia organisasi ketika bersekolah di MAN Model Banda Aceh. Di tahun pertama, ia langsung ditunjuk menjadi Ketua OSIM II, diikuti menjadi Ketua OSIM I di tahun selanjutnya. Ia juga menjadi wakil pemimpin redaksi majalah sekolah Gema Man Model (GMM) Banda Aceh merangkap sebagai desainer lay-out majalah tersebut dan terakhir menjadi sekretaris Remaja Dakwah. Di sini ia mendapat juara 1 speech english se-Kota Banda Aceh.

Selepas SMA, ia melanjutkan kuliah di STMIK AMIKOM Yogyakarta pada tahun 2010. Ia mulai mencoba memasuki dunia organisasi kampus dengan menjadi staff kementerian komunikasi dan informasi BEM Amikom di tahun pertama dan menjadi wakil menteri departemen sosial dan politik di tahun kedua. Ia juga bergabung dengan organisasi eksternal seperti Kesatuan Aksi

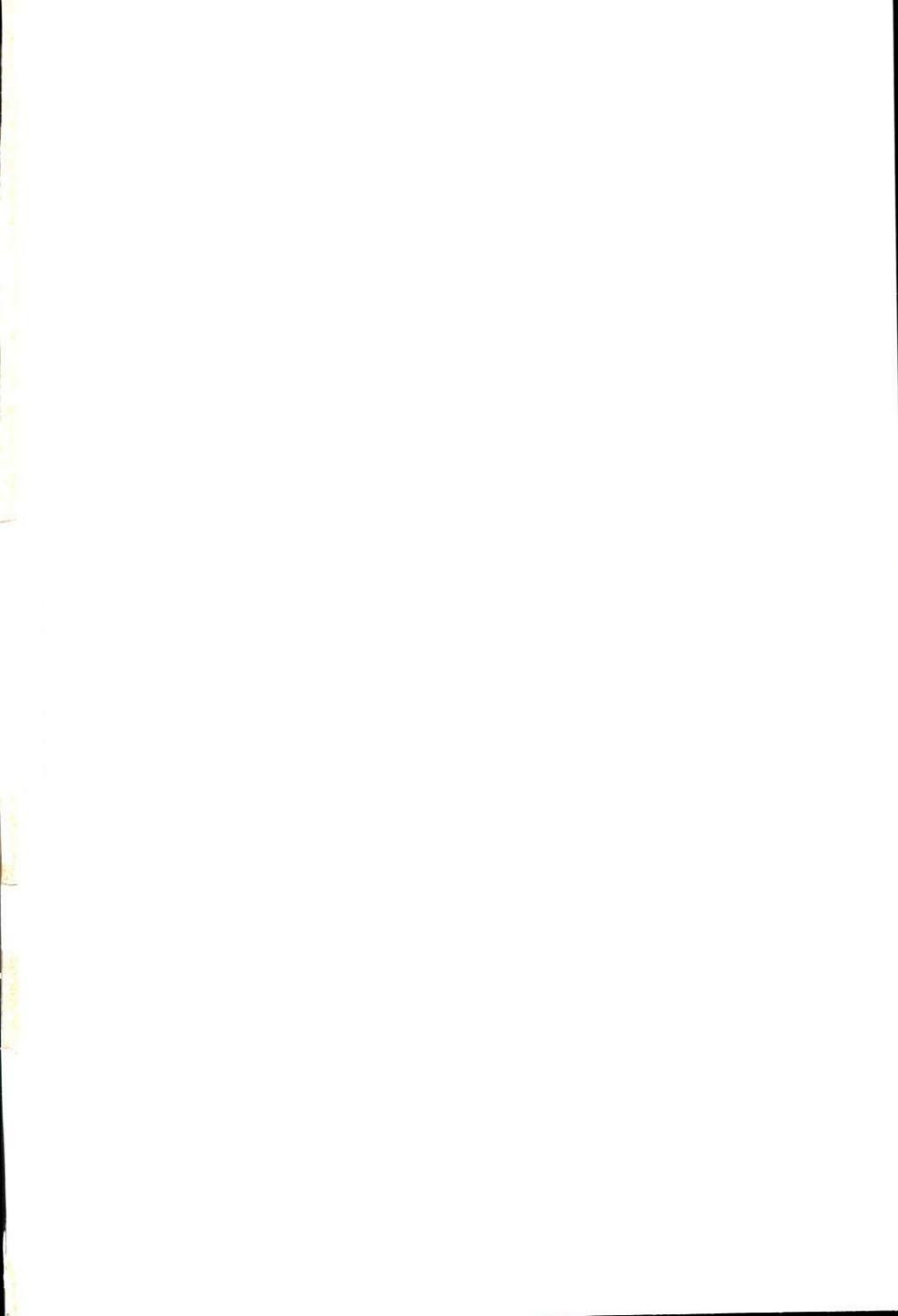
Mahasiswa Muslim Indonesia pada tahun 2011 dan berkontribusi di organisasi paguyuban mahasiswa Aceh di Yogyakarta.

Puas dengan dunia organisasi, ia pun mulai mengukir prestasi di bidang lain. Di tahun 2013 ia berhasil menjadi Finalis 50 besar Eagle Awards Documentary Competition. Setahun kemudian, ia berhasil menjadi Pemenang Favorit kategori blog dalam lomba karya jurnalistik dan blog Mahakarya Telkomsel Indonesia 2014. Kemudian, di tahun 2015, ia berhasil menjadi salah satu dari 40 Finalis Holland Writing Competition 2015.

Citation

Catatan :

Catatan :



"Saya kagum dengan Bung Hatta ketika ia membuat pledoi pembelaan yang berbunyi hanya ada satu tanah airku, dimana tanah air itu hanya tumbuh dengan tindakan nyata yang kita perbuat."

Eep Saefulloh Fatah

"Satu-satunya negara di dunia yang dalam konstitusinya memiliki misi cita-cita membebaskan penjajahan di atas dunia hanyalah Indonesia. Hal itu menggambarkan misi nubuwah kenabian, yaitu memerdekakan, dikarenakan penjajahan itu adalah bentuk perbudakan antar bangsa."

Muhammad Jazir ASP

"Jika kita melihat kembali bunyi Pembukaan UUD 1945 disana tercatat, mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Artinya para pendiri bangsa ini ingin mengatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai, perjuangan di alam kemerdekaan itu baru saja dimulai."

Yudi Latief, Ph.D

"Nilai dan praktek demokrasi sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi kita miskin negarawan sehingga demokrasi kehilangan wisdom dan esensinya. Yang menonjol adalah perebutan kekuasaan antar elite parpol sehingga agenda negara untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat secara merata masih jauh."

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

